Narasi Pembela HAM Berbasis Korban

BERJUANG DARI PINGGIRAN

Kata Pengantar

Reformasi 1998 adalah tonggak bersejarah untuk memancangkan kembali HAM di Indonesia, namun seberapa dekat kah kedua isu tersebut sehingga bisa berjalan beriringan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari? Pertanyaan itu bisa dijawab dengan menelusuri hal-hal yang saling bertautan satu sama lain sepanjang sebelas tahun terakhir ini, seperti keberlangsungan penegakan HAM yang tidak bisa dilepaskan dari proses panjang dalam melakukan reformasi institusional, yang didahului dengan didirikannya Komnas HAM sebagai institusi yang didesain untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan HAM di Indonesia. Institusi tersebut diharapkan bisa menjalankan prinsipnya sebagai lembaga yang mandiri dan independen, khususnya dalam menjalankan amanat reformasi untuk mengusut semua kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi sepanjang Orde Baru berkuasa. Namun dari sekian banyak upaya yang telah dilakukan oleh semua pihak untuk mendukung proses reformasi berbagai halangan dan rintangan masih terus datang silih berganti, misalnya seperti kasus-kasus kekerasan dan ancaman kekerasan yang dialami oleh para pegiat HAM dan kemanusiaan, kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, aksi premanisme yang dilakukan oleh kelompok sipil tertentu untuk merepresi kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah potret kekerasan kerumunan yang tidak saja dimonopoli oleh negara yang acap melakukan tindakan destruktif, namun kekerasan kerumunan itu menyebar –bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja-.

Akibat dari tindakan kerumunan itu melahirkan polarisasi yang menempatkan masyarakat dalam ruang-ruang sempit, sebagian bahkan terpinggirkan akibat sekat pembatas yang menghalanginya. Polarisasi membagi masyarakat dalam dua dimensi. Pertama, kelompok masyarakat yang berkeinginan kuat untuk merubah keadaan dengan mulai mempelajari dinamika dari konsep HAM dan demokrasi. Kedua, kelompok masyarakat yang belum bisa menerima gagasan universalisme yang terkandung dalam HAM. kelompok terakhir ini akan banyak memandang HAM sebagai sebuah konsep yang digadang-gadangkan oleh negara-negara maju, bersinggungan dengan budaya barat dan tentu saja bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia. Eksistensi dari bentuk ekstrem polarisasi tersebut tidak saja mengancam posisi korban pelanggaran HAM yang masih setia menunggu dipulihkannya hak-hak mereka oleh negara, namun juga hadir kelompok rentan lainnya (wanita, anak-anak, penyandang cacat, kelompok minoritas, orang asli, aliran kepercayaan, dll) yang berpotensi mengalami kekerasan serupa.

Reproduksi kekerasan yang diam-diam gemar dilakukan oleh bangsa kita

sendiri menjadi refleksi bahwa negara sebagai entitas sosial politik formal maupun gerakan masyarakat sipil belum mampu mensosialisasikan HAM sebagai standar nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Hal lainnya yang juga menciptakan ruang ke-salah-kaprah-an di tengah masyarakat adalah ketika konsep HAM dipercayai sebatas tumpukan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang harus segera dituntaskan, tentu saja kondisi tersebut tidak membuka kesempatan untuk melihat esensi dari konsep HAM itu sendiri. Hadirnya tren ini diikuti dengan setumpuk konsekuensi yang menyertainya harus dihadapi bersama-sama tidak saja oleh para aktivis pegiat HAM dan kemanusiaan, melainkan juga segenap komponen bangsa yang memiliki perhatian luas dalam isu penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia.

Untuk itu, Human Rights Support Facilities (HRSF) yang didukung oleh KontraS, LBH Jakarta, HRWG, Yayasan Pulih serta Yayasan TIFA memandang perlu segera dilakukan upaya perlindungan terhadap mereka yang banyak melakukan aktivitas dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui secara universal, atau biasa dikenal dengan nama pembela HAM. Upaya perlindungan tersebut tidak saja menjamin keamanan para pembela HAM dalam situasi darurat, maupun jaminan untuk mendapat akses perlindungan di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Selain itu HRSF juga mengemban misi untuk membangun jaringan solidaritas antar pembela HAM dengan ikut mengembangkan antar organisasi atau komunitas yang bisa mendukung upaya perlindungan tersebut.

Salahsatu aktivitas yang dilakukan oleh HRSF adalah melakukan penelitian pembela HAM berbasis korban. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam bentuk persoalan yang dihadapi oleh para pembela HAM yang meliputi Pertama, kontribusi yang selama ini dilakukan korban dalam melakukan penegakan HAM. Kedua, sistem perlindungan yang selama ini dilakukan oleh korban sendiri ataupun dukungan yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya. Ketiga, kebutuhan-kebutuhan untuk meningkatkan efektifitas advokasi kasus. Adalah Bedjo Untung (Tragedi 1965/1966), Wanma Yetty (Peristiwa Tanjung Priok, 1984), Azwar Kaili (Peristiwa Talangsari 1989), Ruyati Darwin (Tragedi Mei 1998), Sumarsih (Tragedi Semanggi 1998), Mugiyanto (Penculikan Aktivis Prodemokrasi 1997/1998), Zafrullah Pontoh (Kekerasan terhadap Jamaat Ahmadiyah), Kiswoyo (PT. Istana Magnoliatama), Muhammad Mizar Al Amir (Sengketa TPST Bojong) dan Suciwati (Kasus Pembunuhan Aktivis HAM Munir 2004) menjadi narasi personal yang coba dihadirkan dalam buku ini. Narasi inilah yang kelak diharapkan bisa digunakan untuk menandingi narasi-narasi mayor yang terlanjur baku dan beku di banyak benak masyarakat Indonesia. Kesepuluh responden tersebut adalah korban pelanggaran HAM berdimensi sipil – politik maupun ekonomi, sosial dan budaya yang telah lama menjadi dampingan KontraS, LBH Jakarta dan Yayasan Pulih. Mereka ini kemudian

bertransformasi menjadi pembela HAM di lingkungan mereka masing-masing dan memberi banyak inspirasi dalam gerakan advokasi HAM di Indonesia.

Cuplikan pengalaman kesepuluh pembela HAM tersebut diambil dari latar belakang peristiwa baik yang langsung maupun tidak langsung dialami oleh mereka. Dari cuplikan tersebut kita bisa mengidentifikasi ragam siasat yang mereka pilih untuk membawa ruang perlawanan ke tengah-tengah komunitas, menumbuhkan keintiman solidaritas di tengah ancaman kekerasan dan kerasnya realitas kehidupan yang selalu membayangi mereka. Kisah Bedjo Untung berjuang selama puluhan tahun untuk melawan stigma yang terlanjur melekat dalam dirinya, diri para korban dan keluarga korban Tragedi 1965/1966, Wanma Yetty hingga kini masih berjuang untuk meraih keadilan bagi keluarga korban Tanjung Priok 1984, Azwar Kaili yang terus memotivasi para korban Talangsari dengan caranya sendiri untuk bangkit dan membangun perlawanan terhadap kuasa yang lalim. Hal yang sama juuga dilakukan oleh Ruyati Darwin, Mugiyanto, Sumarsih, Suciwati, Zafrullah Pontoh, Kiswoyo, dan Mizar. Perjuangan mereka tidak saja bertujuan untuk memperoleh keadilan dan kebenaran personal namun juga menularkan spirit perjuangan itu kepada komunitas korban/keluarga korban lainnya agar keadilan bisa benar-benar ditegakkan.

Kami mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu keseluruhan proses Penelitian Pembela HAM Berbasis Korban. Ucapan itu terutama kami tujukan kepada para peneliti lapangan Wahyudi Akmaliyah Muhammad (KontraS), Febio Nesta – Muhammad Widodo (LBH Jakarta), Wakhit Hasyim (Yayasan Pulih). Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ali Nur Syahid, Indria Fernida, Papang Hidayat, Puri Kencana Putri dan Sri Suparyati yang mengawal proses penelitian dari awal hingga proses finalisasi penyuntingan naskah buku ini. Tak lupa ucapan terima kasih kami tujukan kepada Andi Achdian dan Hikmat Budiman yang telah meluangkan waktu untuk memberi masukan terhadap keseluruhan isi naskah.

Kami berharap dengan terbitnya buku ini maka kita bisa belajar banyak dari narasi perjuangan pembela HAM melalui pengalaman-pengalaman yang mereka tuturkan. Advokasi panjang tanpa lelah untuk saling menguatkan komunitas masing-masing melalui berbagai cara untuk mengekspresikan rasa keadilan dan kebenaran yang mereka damba-dambakan. Akhir kata selamat membaca dan berbagi pengalaman! Terima kasih.

Jakarta, 1 Desember 2009

Tim Penyunting HRSF

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Memperjuangkan Kebebasan Beragama	1
Ingatan yang Menjadi Peluru	13
Perjuangan yang Belum Selesai	39
Menagih Masa Lalu yang Dirampas	61
Meniti Jalan Tanpa Ujung	85
Berjuang dari Keterpurukan	99
Tulang Punggung Masa Depan itu Pergi untuk Selamanya	115
Dari Penjara ke Penjara	141
Sekilas Perjalanan Hidup Ustadz sang Pembela HAM	167
Menduduki Pabrik Sebagai Bukti Buruh Berdaulat	185
Profil	203

Memperjuangkan Kebebasan Beragama

Ahmad Zafrullah Pontoh

Komunitas Ahmadiyah

I. Menjadi Aktivis Jemaah Ahmadiyah Indonesia

Ahmad Zafrullah Pontoh, atau yang akrab disapa dengan nama belakangnya saja, Pontoh, dilahirkan di Bolang Itang Sulawesi Utara, pada tahun 1952. Pontoh adalah putera keenam dari sembilan bersaudara. Ayahnya bekerja di Koperasi Rakyat (KOPRA) dan ibunya lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Keluarga Pontoh memang memiliki latar belakang yang unik, khususnya terkait dengan keragaman budaya yang dimiliki oleh mereka. Pontoh sendiri mengakui bahwa dirinya merupakan peranakan campuran antara Filipina Selatan (Mindanao), Banten, Bugis dan Bolang Itang.

Pontoh besar di dalam keluarga yang berlatar belakang Islam Ahmadiyah, di mana nilai-nilai keagamaan mewarnai pendidikannya sehari-hari di rumah. Ayahnya memiliki karakter pendiam namun tegas. Meskipun nilai-nilai agama selalu diterapkan dalam pengajaran sehari-hari, akan tetapi penanaman nilai-nilai agama itu tidak dilakukan dengan cara-cara memaksan. Dengan kata lain pendidikan kegamaaan a la moderat yang selalu ditanamkan di dalam keluarga Pontoh. Sedangkan sang ibu, lebih banyak menanamkan nilai-nilai yang bisa dijalankan untuk menjaga amanat.

Secara struktur sosial, Pontoh berasal dari keluarga yang relatif berpendidikan. Ayahnya pernah mengenyam pendidikan di Hollandsch Inlandsche School (HIS: Sekolah rendah dengan bahasa pengantar Belanda); saudara-saudara sekandungnya juga bisa menikmati pendidikan minimal setingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLA); sementara beberapa saudaranya yang lain sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Kondisi ini tentu saja ditopang dengan kemampuan ekonomi keluarga Pontoh yang cukup memadai. Bahkan, ayahnya sering menampung orang-orang yang tidak mampu untuk tinggal di rumahnya, atau sekadar ikut menumpang tinggal.

Pontoh memperistri seorang perempuan yang berasal dari Qadian, India. Dari perkawinannya, ia dikarunia empat orang anak, di mana dua dari anaknya masih duduk di bangku kuliah dan dua lainnya masih bersekolah di sekolah menengah atas dan sekolah dasar. Sehari-hari, Pontoh berprofesi sebagai mubalig pada jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk wilayah DKI Jakarta. Penghasilannya pun ia peroleh dari pekerjaannya itu. Sebagai mubalig, Pontoh mendapatkan beberapa fasilitas yang bisa digunakan untuk menunjang mobilitasnya, seperti fasilitas rumah dan kendaraan dinas. Selain itu, Pontoh juga memiliki beberapa bidang tanah di Bolang Itang, yang berasal dari waris dan pemberian.

Sebelum menjalani profesinya sebagai mubalig Pontoh sempat berkuliah di

Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, akan tetapi perkuliahan itu tidak ia teruskan karena Pontoh lebih memilih dunia kerja sebagai pilihan hidupnya. Untuk menunjang profesinya, Pontoh akhirnya memilih untuk mengikuti pendidikan mubalig di Rabwah, Pakistan. Tentu saja, pertimbangan itu ia lakukan dengan masak-masak, apalagi jika kita mengenal karakter Pontoh lebih dalam, sebagai pribadi yang keras dan memiliki keteguhan hati.

Pilihan-pilihan yang ia ambil dalam hidup dilakukan dengan penuh konsekuensi. Kerasnya kemauan dan sikap yang tidak mudah berubah atas sesuatu yang ia anggap benar menjadi hal yang senantiasa ia lakukan dalam perbuatan sehari-hari. Pontoh pun tidak pernah takut dalam menjalani kehidupan maupun menghadapi orang-orang dan kelompok yang menentang/berseberangan dengan keyakinannya. Sikap inilah yang membedakan Pontoh dari kebanyakan orang, ketegasan yang ia miliki sedikit banyak ia dapatkan dari ajaran agama yang ikut membentuk karakter internal dirinya.

II. Pontoh dan Kehidupan Sehari-harinya

Paham Ahmadiyah tampaknya telah mendarahdaging dalam kehidupan Pontoh sejak kecil. Namun hadir fakta historis yang Pontoh tuturkan bisa dijadikan permulaan untuk melihat individu-individu yang menjalani keyakinan tersebut (baca: Ahmadiyah). Hidup dalam keluarga yang meyakini secara utuh paham Ahmadiyah, tidak serta merta membuat Pontoh langsung menjadi pengikut Ahmadiyah. Sejak kecil, Pontoh banyak dikenalkan dengan literatur yang membahas tuntas ajaran Ahmadiyah yang dibawa oleh ayahnya. Dari sana, perlahan-lahan Pontoh mulai menemukan adanya kebenaran dari ajaran Ahmadiyah. Hingga ia mengikuti proses baiat setelah ia menyelesaikan masa sekolahnya. Proses pem-baiat-an itu dilakukan di Mubagu, Sulawesi Utara.

Keinginan untuk menjadi mubalig mulanya adalah arahan yang dilakukan oleh ayahnya. Bahkan, jauh sebelum itu, Pontoh kecil telah didaftarkan sebagai anak wakaf, di mana kelak ketika ia menginjak usia dewasa, Pontoh dapat mengabdikan dirinya kepada Jemaat Ahmadiyah. Ayahnya pun tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan Pontoh agar segera mengabdikan dirinya kepada Jemaat Ahmadiyah, tentu saja sebagai mubalig. Setelah menyelesaikan masa SMA, sebuah surat yang ditulis oleh ayahnya, kembali mengingatkan Pontoh agar dirinya segera membuat pilihan hidup bagi masa depannya. Mulanya, Pontoh memilih untuk bekerja di bidang swasta. Pilihan itu ia lakukan karena mempertimbangkan bahwa orang-orang yang telah mewakafkan dirinya, haruslah orang yang tidak lagi mengejar harta kekayaan dan sudah memiliki cukup uang simpanan untuk membiayai diri sendiri.

Namun, akhirnya Pontoh memutuskan untuk tetap menjadi seorang mubalig.

Putusan itu juga diikuti dengan berbagai godaan yang timbul ketika ia mempersiapkan diri untuk melanjutkan sekolah ke Rabwah, Pakistan. Berbagai tawaran kerja hingga iming-iming untuk melanjutkan kuliah yang berasal dari sanak saudaranya, tidak membuat Pontoh gentar untuk merubah keputusannya, melanjutkan sekolah agama di Rabwah.

Setelah menyelesaikan sekolah agama di Rabwah, Pontoh ditugaskan ke berbagai daerah untuk melakukan pembinaan keagamaan kepada anggota Ahmadiyah dan masyarakat umum. Tugasnya selaku mubalig membuat ia dan keluarga selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Daerah-daerah yang pernah ia tinggali di antaranya; Parung Bogor, Medan, dan Petojo DKI Jakarta. Di setiap lingkungan di mana ia tinggal, Pontoh sering melakukan kegiatan berkeliling kampung untuk sekadar menyapa para tetangga dan bersilaturahmi. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan di manapun ia menetap. Kegiatan ini pula yang membuat orang-orang di sekitar lingkungan tinggalnya cukup mengenal baik Pontoh.

Lingkungan di Petojo Jakarta Pusat, misalnya, tergolong lingkungan yang relatif aman. Letaknya yang strategis di wilayah ibukota dan cukup dekat dengan Istana Presiden, membuat lingkungan ini memiliki sistem pengamanan yang baik. Pontoh mengilustrasikan lingkungan tempat tinggalnya sebagai sebuah wilayah yang dilengkapi dengan pagar pengaman dan petugas keamanan. Pagar kompleks perumahan akan ditutup setelah melewati pukul 21.00 WIB. Rata-rata warga yang menghuni wilayah tersebut merupakan masyarakat golongan menengah ke atas. Meski pun tetap ada kelompok masyarakat yang kurang mampu tinggal di sana. Umumnya, mereka berprofesi sebagai pegawai dan ada pula yang bekerja sebagai pengusaha.

Hampir di setiap lingkungan yang ia kunjungi dan ia tinggali, Pontoh selalu menyempatkan diri untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh warga setempat. Kegiatan itu bisa berupa kegiatan kerja bakti, pengobatan massal dan berbagai macam bentuk kegiatan sosial lainnya.

III. Kekerasan dan Ancaman kekerasan yang Dialami

III.1. Peristiwa Medan

Peristiwa kekerasan dan ancaman yang dialami secara langsung oleh Pontoh selama menjalani tugasnya sebagai mubalig berlangsung di beberapa daerah. Kekerasan pertama yang ia alami terjadi pada sekitar tahun 1996 dan atau 1997. Saat itu Pontoh ditugaskan untuk mengunjungi salah seorang anggota Jemaat Ahmadiyah yang baru saja dibaiat di kota Medan, Sumatera Utara. Untung saja rumah yang mereka kunjungi terbuat dari papan kayu tebal, sehingga bisa melindungi tubuh mereka. Pontoh dituntut bisa mengambil tindakan yang cepat,

apakah mau tetap bertahan dengan segala risiko yang harus dihadapi; atau pergi meninggalkan lokasi untuk meminimalisir risiko. Pilihan kedua pun diambil oleh mereka, dengan menggunakan mobil milik salahsatu jamaah, Pontoh dan para rombongan meninggalkan lokasi yang telah dikepung massa.

Masa yang mengepung rumah jamaah tersebut, telah bersiap dengan berbagai senjata seperti parang, pentungan dan sebagainya.Bahkan juga sebatang pohon sengaja ditumbangkan untuk menghalangi jalan Pak Pontoh dan rombongan. Namun akhirnya mereka bisa meloloskan diri dengan selamat. Pascaperistiwa itu, Pontoh mencoba untuk mengontak koneksi yang ia miliki di Pemda. Dari komunikasi yang ia bangun, langsung ditindaklanjuti dengan menghubungi pihak-pihak terkait yang bisa membantu proses pengamanan di lokasi kejadian. Komunikasi yang dibangun tersebut, diakui Pontoh memang sangat efektif untuk meredam gejolak penolakan kelompok masyarakat yang berseberangan dengan ajaran Ahmadiyah.

III.2. Peristiwa Parung

Peristiwa kekerasan lainnya yang terjadi adalah ketika JAI menyelenggarakan Jalsah Salanah di Parung Bogor, Juli 2005. Kegiatan yang seharusnya dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 8 hingga 10 Juli 2005 terpaksa harus dipercepat prosesnya, akibat adanya penyerbuan yang dilakukan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan kelompok-kelompok LPPI, FPI dan GUII. Kelompok itu dipimpin langsung oleh Abdul Haris Umarela yang menyebut dirinya sebagai Habib Abdurahman Assegaf bersama-sama Amin Djamaluddin.

Pada sehari sebelumnya, tepatnya tanggal 8 Juli 2005, dilakukan orasi singkat yang diikuti oleh sekitar 80 orang yang menuntut bertemu dengan pihak pimpinan Ahmadiyah. Pada kesempatan itu, Amin Djamaluddin dan Habib Abdurahman Assegaf, dihadapan aparat Kecamatan Kemang menyampaikan ancaman akan menghancurkan Ahmadiyah apabila dalam 7x24 jam JAI tidak membubarkan diri. Baru pada keesokan harinya, pada tanggal 9 Juli 2005, sekitar 100 orang berkumpul di depan gerbang Kampus Mubarak, tempat Jalsah Salanah diselenggarakan. Mereka melakukan tindak kekerasan yang disertai dengan aksi perusakan gapura acara Jalsah Salanah, melakukan pelemparan terhadap peserta Jalsah Salanah yang berada di dalam gerbang kampus, sehingga menyebabkan 16 orang luka-luka dan 8 unit kendaraan bermotor rusak. Pada saat penyerangan terjadi, Pontoh kebetulan tidak berada di lokasi. Ia mendapat tugas untuk menjemput Ibu Siti Musdah Mulia, yang sedianya akan memberikan sambutan pada acara Jalsah Salanah tersebut. Ketika sampai di Kampus Mubarak, Pontoh menggambarkan situasi mulai mencekam. Gerbang depan kampus ditutup dan dijaga ketat aparat, sehingga Pontoh terpaksa mengambil jalur memutar lewat pintu belakang kampus. Setelah kejadian itu, Pontoh sempat mendatangi pihak kelurahan dan kepolisian untuk menyam-

paikan agar polisi segera memberikan pengamanan terhadap acara Jalsah Salanah. Acara tersebut sejatinya telah mendapatkan izin dari Mabes Polri, sehingga sudah menjadi kewajiban kepolisian setempat untuk mengamankan acara tersebut.

Pontoh mengatakan, pengepungan terbesar terhadap Pusat kegiatan Ahmadiyah di Parung terjadi pada 15 Juli 2005. Sekitar 3000 orang berkumpul di depan Kampus Mubarak. Sebagian dari mereka bersenjatakan kayu dan bambu runcing menuntut pembubaran Ahmadiyah dan penutupan Kampus Mubarak. Akibatnya, dalam pengawalan polisi, sekitar 300 orang anggota Ahmadiyah yang berada di dalam kampus dievakuasi paksa untuk menghindari ancaman pembakaran kampus. Meskipun demikian, tetap saja, sebuah gedung Lajnah Imailah yang berjarak sekitar 300 meter di belakang kampus dirusak dan dijarah oleh para penyerang. Kediaman Pontoh di Parung pun yang sedianya akan ia tempati bersama keluarga sebagai rumah dinas tidak luput dari sasaran para penyerang. Para penyerang membongkar rumah Pontoh dari belakang dan merusak serta menjarah harta benda yang ada di dalamnya. Pontoh mengakui, sehari sebelum peristiwa pengepungan besar-besaran itu, ia sempat berada di Parung, akan tetapi karena ia harus berangkat ke Jakarta untuk mengisi pos yang kosong, Pontoh harus meninggalkan Parung.

III. Peristiwa Petojo

Ancaman kekerasan yang dilancarkan dari kelompok penentang Ahmadiyah juga masih dialami Pontoh ketika ia pindah ke wilayah Petojo, DKI Jakarta. Pasca penyerbuan Parung, kantor Pengurus Besar JAI yang awalnya berada di Parung, akhirnya dipindahkan ke Petojo. Rupanya informasi ini bocor ke habib Abdurrahman Assegaf. Beberapa kali Habib Abudrrahman Assegaf bersama anggotanya mendatangi masjid Petojo dan mengancam akan membakar masjid apabila plang mesjid yang identik dengan Jemaat Ahmadiyah tidak segera diturunkan. Dalam kedatangan selanjutnya, Assegaf bahkan meminta agar Ahmadiyah segera membubarkan diri.

Ancaman terhadap Pontoh dan JAI pada umumnya, juga datang dalam bentuk pesan singkat maupun surat tertulis. Bahkan di masjid terdekat dari kantor Pengurus Besar JAI, Masjid Al Makmur, dipasang spanduk bertuliskan "Kami mendukung pembubaran Ahmadiyah". Pontoh sempat menuturkan satu peristiwa penting yang terjadi ketika kelompok penentang Ahmadiyah melakukan konsolidasi untuk melakukan penekanan massif. Peristiwa itu bermula dari sebuah rancangan pertemuan yang rencananya akan menggunakan aula di salahsatu RW di wilayah Petojo. Sebelumnya, pertemuan itu telah diumumkan melalui radio, sms dan selebaran. Isi dari pengumuman itu mengatakan bahwa akan ada penutupan masjid Ahmadiyah yang harus disaksikan oleh seluruh umat Islam Indonesia. Namun, sebelum pertemuan itu berhasil dilakukan, pi-

hak Polda Metro Jaya membubarkan persiapan acara itu dengan melakukan pendekatan terhadap salahsatu ustadz masjid yang mengadakannya.

Pembubaran yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tidak membuat Habib Abdurrahman Assegaf gentar. Dalam beberapa kesempatan, Habib Abdurrahman Assegaf selalu mendatangi masjid JAI Petojo. Kedatangannya itu selalu ditanggapi dengan respon positif oleh Pontoh sebagai bentuk silaturahmi antar sesama umat muslim. Di sinilah Pontoh memandang tugas ke-mubalig-an yang diembannya harus bisa digunakan untuk meluruskan berbagai pemahaman yang keliru seputar Ahmadiyah itu sendiri. Hanya saja keinginannya untuk meluruskan pemahaman para penentang Ahmadiyah urung tersampaikan, karena kedatangan mereka ternyata hanya bertujuan untuk mencaci-maki, mengancam, melakukan tindakan anarkis; tanpa pernah mau melakukan komunikasi lebih lanjut.

Pontoh menganggap, berbagai peristiwa yang menimpa Jemaat Ahmadiya di Indonesia selalu membawa hikmah tersendiri. Ajaran Ahmadiyah yang senantiasa meletakkan nilai-nilai kebenaran sebagai basis ajaran senantiasa akan mendapat banyak ujian dan cobaan. Peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Ahmadiyah seharusnya tidak membuat anggota Ahmadiyah mundur, namun kondisi ini harus bisa menyatukan mereka dalam ikatan solidaritas yang kokoh. Pontoh mengakui, beberapa anggota Ahmadiyah yang dulunya menjauh, akibat peristiwa ini, kini kembali mendekat.

Seringnya peristiwa kekerasan yang menimpa kelompok Ahmadiyah, membuat jemaat-nya banyak mendapat kesempatan untuk tampil di muka publik untuk menyampaikan esensi utama dari ajaran Ahmadiyah. Padahal, sebelum adanya peristiwa itu, pekerjaan menyampaikan informasi seputar aktivitas Ahmadiyah bukanlah sebuah perkara gampang. Seringnya peristiwa kekerasan yang menimpa Ahmadiyah, membuat Pontoh dan keluarga seolah menjadi terbiasa dengan kondisi tersebut. Kondisi itu tidak serta merta mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi Pontoh. Hanya saja akibat yang bisa dirasakan secara langsung dari peristiwa itu adalah pekerjaan yang kian bertambah seiring waktu, tenaga dan pikiran yang harus disediakan Pontoh untuk mengadvokasi kasus Ahmadiyah.

Hal menarik yang muncul dari pengalaman Ahmadiyah adalah dukungan penuh yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Dukungan itu diberikan bukan berdasarkan kepada ajaran yang terkandung di dalam Ahmadiyah, namun lebih karena masyarakat sekitar tumbuh dan berkembang bersama dengan para pengikut Ahmadiyah. Persoalan keamanan kampung lebih banyak mendasari sikap mereka untuk memberi perlindungan kepada Pontoh dan Ahmadiyah. Masyarakat memandang bahwa Ahmadiyah merupakan bagian dari warga

kampung yang harus dibela. Selain dari itu, sesungguhnya tidak ada perbedaan mencolok yang bisa dirasakan antara orang-orang yang menjalankan paham Ahmadiyah dengan masyarakat kebanyakan.

IV. Survivalitas Pontoh dalam Mengadvokasi Ahmadiyah

Pascapenyerangan Parung, Pontoh dipercaya oleh Amir Nasional Indonesia sebagai wakil Amir untuk berbicara kepada publik. Hal ini membuat Pontoh banyak muncul di pertemuan-pertemuan publik seperti di baik di seminar, diskusi publik, maupun talkshow di banyak media elektronik. Hampir di berbagai kesempatan, Pontoh terlibat aktif mengikuti pertemuan-pertemuan untuk membicarakan isu-isu kebebasan beragama.

Persoalan ancaman dan kekerasan yang dialami oleh Ahmadiyah secara umum adalah persoalan yang terkait dengan hak ke-warga-negara-an yang sudah seharusnyanya dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, langkah hukum yang diambil oleh JAI sebagai langkah utama dalam melakukan advokasinya merupakan pilihan yang tepat. Langkah hukum itu juga diikuti dengan berbagai bentuk pendekatan nonformal yang dilakukan dengan melibatkan dukungan dari berbagai pihak.

Selain ditunjuk sebagai juru bicara (wakil Amir Nasional Indonesia), Pontoh tetap menjalankan amanatnya sehari-hari sebagai seorang mubalig untuk wilayah DKI Jakarta. Selain itu, Pontoh juga dipercaya untuk mengurus media center JAI. Tugas-tugas baru itu membuat pekerjaan Pontoh menjadi begitu padat. Kini, ia tengah berharap untuk lebih mampu mengatur jadwal dan SDM yang bisa digunakan untuk mengoptimalisasi aktivitasnya. Sayangnya, harapannya itu tidak didukung dengan SDM yang memadai, yang akhirnya membuat Pontoh merasa keteteran sendiri.

Dalam mengerjakan advokasinya, Pontoh selaku perwakilan JAI banyak mendapat bantuan dari organisasi pegiat HAM dan pendamping korban, seperti LBH Jakarta, ICRP, The Wahid Institute, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dan lain sebagainya. Dukungan personal lain yang diberikan dari pihak-pihak yang memiliki kepedulian datang dari tokoh nasional seperti Adnan Buyung Nasution, Dawam Rahardjo, Djohan Efendi, dan Musdah Mulia. Mereka merupakan pihak-pihak yang memainkan peran sentral dan sangat membantu dalam permasalahan yang menimpa Ahmadiyah. Bersama LBH dan organisasi pendukung lainnya, JAI melakukan gugatan ke PTUN Bandung, pengaduan ke KOMNAS HAM, pengaduan ke kepolisian, Wantimpres, Departemen Agama, berkoordinasi dengan LSM dan ormas keagamaan untuk membangun dukungan, serta roadshow dengan media massa cetak maupun elektronik.

Diakui oleh Pontoh, dirinya memang tidak banyak terlibat dalam advokasi kasus di bidang hukum, karena sudah ada orang-orang yang ditunjuk khusus untuk membidangi hal tersebut. Meskipun demikian, dalam setiap pertemuan koordinasi yang melibatkan LBH jakarta maupun dengan organisasi pendukung lainnya, Pontoh tetap datang menghadirinya sebagai wakil Amir Nasional Indonesia.

Ada perbedaan prinsipil dalam memandang kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh organisasi pendamping dengan JAI. Misalnya, penggunaan aksi demonstrasi sebagai salah satu pilihan advokasi. Secara kelembagaan, JAI memandang aksi demonstrasi bukanlah pilihan yang efektif dalam melakukan advokasi, karena tingkat kerawanannya terhadap aksi anarkis dan adanya kekhawatiran aksi tersebut bisa disusupi. Pilihan-pilihan langkah advokasi semacam itu tidak sejalan dengan sikap JAI yang lebih mengedepankan prinsip nir-kekerasan dan cinta kasih. Dan jika diperlukan, JAI akan lebih memilih prosedur-prosedur formal, seperti mekanisme hukum. Alasan inilah yang seringkali menyebabkan JAI tidak pernah terlibat secara kelembagaan dalam beberapa demonstrasi yang dilakukan oleh AKKBB. Namun demikian, JAI tidak pernah menghalangi bila para anggotanya sesuai dengan kapasitas personal, ikut serta dalam aksi demonstrasi tersebut. Pontoh hanya berharap para pendamping dapat memahami jalan pikiran dan sikap kelembagaan yang diambil JAI.

Sementara itu, dukungan terhadap perjuangan Pontoh dan JAI juga datang dari sanak keluarga yang tidak menganut paham Ahmadiyah. Pada umumnya, sanak keluarga Pontoh akan langsung menghubungi jika media massa memberitakan peristiwa kekerasan yang dialami JAI. Dan tidak sedikit dari mereka yang ikut memberikan semangat dan dukungan agar Pontoh tetap terus memperjuangkan apa yang telah diyakininya.

Keluarga Pontoh pada dasarnya tidak begitu khawatir atas peristiwa yang terjadi. Selain karena sang isteri berasal dari Qadian, di mana peristiwa-peristiwa kekerasan lebih sering terjadi di sana. Pontoh senantiasa mengajarkan agar keluarganya bisa mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi, dan memberi keyakinan bahwa cobaan akan selalu datang kepada ajaran yang benar.

Dukungan dari pemerintah dalam hal ini adalah dari pihak kepolisian bisa dikatakan cukup siginifikan, dalam berbagai ancaman penyerangan yang datang silih berganti, aparat selalu sigap berkoordinasi dan melakukan penjagaan. Aparat kepolisian bidang intelijen khususnya, adalah pihak yang paling sering berkoordinasi denga Pontoh. Bahkan sebagian besar informasi tentang rencana penyerangan atau tindakan lainnya yang akan dilakukan dari kelompok penentang, bisa ia peroleh dari intel kepolisian. Berdasarkan informasi itulah,

Pontoh bisa menggunakannya sebagai bagian dari koordinasi dengan aparat pemerintah; mulai dari tingkat RW hingga tingkat kecamatan.

V. Hubungannya dengan Korban Pelanggaran HAM Lain

Profesinya sebagai mubalig, memudahkan Pontoh untuk memanfaatkan forum-forum JAI seperti khotbah Jumat, pengajian, serta rapat-rapat pengurus untuk berkomunikasi dan membagi informasi aktual dengan para anggota. Di sana, Pontoh sering memberikan semangat, motivasi dan hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa yang menimpa mereka.

Tak jarang Pontoh melakukan kunjungan ke cabang-cabang JAI lainnya untuk memberikan penjelasan bagaimana langkah-langkah advokasi yang bisa dilakukan, sesuai pengalaman yang ia alami terkait kasus yang sedang mereka hadapi itu. Selain menggunakan forum-forum tatap muka, dalam menjalin komunikasi Pontoh juga sering menggunakan medium telepon, pesan singkat dan email.

Pontoh tidak saja aktif dalam pertemuan-pertemuan yang membahas kasus JAI. Dalam berbagai kesempatan, Pontoh pun sering menyempatkan dirinya untuk menghadiri pertemuan yang membahas kasus-kasus kebebasan beragama lainnya, seperti dalam kasus yang menimpa komunitas Eden, dan kasus penutupan gereja. Pontoh memandang bahwa setiap bentuk penganiayaan, penyiksaan, hingga penistaan sebuah keyakinan tidak semestinya diterima oleh siapa pun. Jika itu terjadi, maka tindakan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan, yang oleh siapa pun harus dibela. Pontoh begitu meyakini bahwa Islam telah mengajarkan nilai-nilai kedamaian, sehingga penting baginya untuk memperjuangkan hal itu bersama-sama dengan kelompok lain. Ia tidak dapat memahami, mengapa suatu perbedaan pikiran selalu direspon dengan penganiayaan fisik.

VI. Efektifitas Advokasi JAI

Dalam proses advokasi JAI, Pontoh berusaha realistis dengan semua capaian yang berhasil diraih. Baginya, keberhasilan advokasi adalah ketika media massa memuat berita sesuai dengan fakta yang terjadi dan tidak dipelintir sehingga dapat berakibat merugikan JAI. Di samping itu, respon aparat negara, khususnya kesigapan aparat keamanan dalam menangani setiap peristiwa yang terjadi, merupakan buah keberhasilan dari advokasi yang dilakukan.

Ancaman penyerangan, penutupan, pembubaran, atau pembakaran mesjid, bagi Pontoh sudah menjadi menjadi hak yang senantiasa harus dihada-

pi dengan kepala dingin. Ancaman yang datang baik langsung maupun tidak langsung, ia tanggapi dengan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan. Selain membangun komunikasi dengan pemerintahan daerah; mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan hingga Pemerintah Provinsi. Hal yang masih disayangkan oleh Pontoh adalah belum adanya mekanisme hukum yang bisa menjerat para pelaku yang masih melakukan kriminalisasi kepada mereka yang bergerak di bidang kemanusiaan.

Pontoh menyadari kemampuannya dalam bidang relasi masyarakat. aktivitas sehari-harinya yang banyak disibukkan dengan persoalan keagamaan, menuntut Pontoh untuk bisa memahami konsep keagamaan dengan lebih baik. Menurutnya, logika hukum dengan logika agama tidak jauh berbeda, bahkan sama saja. Kemampuan inilah yang membuatnya dipercaya mewakili Amir Nasional Indonesia dalam berbagai forum dan kesempatan. Dengan kemampuannya itu, Pontoh menjadi tandem yang cukup tangguh bagi pihak-pihak yang memiliki sudut pandang berbeda dengan JAI di dalam forum-forum diskusi dan talkshow.

Pontoh melihat penting dilakukan seminar-seminar atau pelatihan peningkatan kapasitas bagi para korban termasuk dirinya agar menunjang kerja-kerja advokasi. Meskipun JAI sendiri dalam beberapa kesempatan pernah melakukan pelatihan semacam itu, namun dirasa masih tetap perlu mengintensifkan pelatihan. Sejalan dengan hal ini, kiranya pelatihan yang membuka paradigma dan wawasan menjadi hal yang krusial dilakukan. Kebiasaan bekerja di dalam sistem, membuat Pak Pontoh dan korban-korban JAI lainnya tidak mampu mengembangkan metode advokasi yang dilakukan, meskipun kadang ide-ide yang positif muncul dari para korban sendiri.

Sedangkan secara ekonomi, sebagai bagian dari sistem JAI, belum dirasa perlu dilakukan. Oleh karena, iuran anggota yang selama ini dibayarkan cukup memadai untuk membiayai kerja-kerja advokasi yang dilakukan.

VII. Perlindungan terhadap Korban

Dalam berbagai peristiwa yang dialami, seperti telah disinggung sebelumnya, Pontoh selalu menggunakan prosedur yang ada untuk meminta perlindungan. Pada umumnya ia selalu melakukan koordinasi dengan aparat setempat, mulai dari RW sampai dengan kecamatan. Pihak KUA dan MUI kecamatan juga ia koordinasikan. Dan yang paling intens adalah pihak kepolisian mulai dari Polsek, Polres, sampai dengan Polda. Termasuk Satpol PP. Sehingga ketika tiba waktu dimana Assegaf dan kelompoknya mendatangi masjid Petojo, para aparat tadi sudah siap berjaga dan memberikan perlindungan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hanya saja tidak ada proses hukum ter-

hadap mereka yang datang, meskipun jelas mereka datang sembari melakukan ancaman-ancaman.

Sedangkan koordinasi dengan pihak jaringan, seperti AKKBB, LBH Jakarta, Komnas Jakarta, dan lain-lainnya, dilakukan oleh tim yang khusus untuk itu. Solidaritas yang dilakukan oleh jaringan dengan ikut mendampingi JAI dalam menghadapi kedatangan Assegaf dan kelompoknya, jelas sangat membantu Pak Pontoh dan JAI pada umumnya.

Bentuk perlindungan lain yang didapatkan berasal dari masyarakat sekitar. Dalam setiap kali ada informasi akan adanya penyerangan atau kedatangan kelompok penentang, masyarakat sekitar selalu sigap melakukan penjagaan, meskipun Pak Pontoh atau pihak JAI lainnya tidak secara khusus memintanya. Kepentingan untuk menjaga kampung dari kerusuhan mendasari sikap masyarakat demikian. Selain itu, hubungan baik dengan masyarakat yang senantiasa dijalin melalui berbagai interaksi formal dan non formal juga turut berkontribusi terhadap sikap masyarakat sekitar.

Ingatan Yang Menjadi Peluru

Sumarsih
(Keluarga Korban Peristiwa Semanggi I)

I. Doa-doa Yang Terkabulkan

Maria Katarina Sumarsih lahir pada 5 Mei 1952 di Salatiga, Jawa Tengah. Namun, tanggal lahir yang tertera di Kartu Penduduknya adalah 28 Desember 1950. Ini dilakukan untuk mensiasati agar ia bisa masuk sekolah rakyat untuk mengikuti kakak sepupunya. Kendati ia memalsukan tanggal kelahirannya, sebelum masuk Sekolah Rakyat itu ia sudah bisa membaca dan menulis. Karena itu ia langsung didaftarkan di kelas itu. Ia anak pertama dari enam bersaudara. Ia terlahir dari kultur budaya Jawa yang sangat kental di mana agama bukanlah menjadi faktor utama dalam mewarnai hidup seseorang. Orangtua Sumarsih menganut aliran kepercayaan Kejawen, meskipun secara formal bergama Islam[1]. Dalam kategori Cliffort Geert, orangtuanya Sumarsih termasuk ke dalam Islam Abangan. Yang terpenting dalam penganut kepercayaan ini adalah esensi prilaku dalam berbuat baik ketimbang ritual formal. Karena itu, orangtuanya selalu menasihati Sumarsih dan adik-adiknya bahwa yang terpenting dalam hidup sehari-hari harus ingat dan hormat pada yang memberi hidup dan kehidupan, harus selalu berbuat baik, menghormati setiap orang, jujur, dan waspada. Karena di dunia ada yang lebih berkuasa. Dalam menjalankan praktek ritual keagamaan pun mereka memberikan keleluasaan kepada anak-anaknya.

Pascaperistiwa 1965-1966 telah merubah struktur kekuasaan di Indonesia. Pada masa itu, orang yang tidak memeluk salah satu agama, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Budha, akan dicap komunis. Selain itu, mereka akan ditangkap dan dipenjarakan. Alasan penangkapan dan pemenjaraan tersebut adalah dengan dikeluarkannya UU/no 01/ PNPS tahun 1965 tentang pencegahan dan penodaan agama. Akibat Undang-Undang itu, bisa dipastikan, agama-agama lokal yang mengadopsi istilah agama "resmi" bisa terancam pasal didalamnya[2]. Sumarsih pun meminta kepada adik-adiknya untuk menentukan pilihan agama. Dari 6 bersaudara, 3 orang memilih Islam dan 2 orang, termasuk Sumarsih, memilih Katholik. Ia memilih Katholik berawal dari pertemuan dengan saudara sepupunya yang selalu menceritakan bagaimana tata kehidupan keluarga Katholik. Salah satu nilai dalam Katholik yang membuat ia terkesan adalah bahwa dalam kehidupan Katholik tidak boleh ada perceraian. Meskipun sederhana, tapi kata-kata itu mengandung makna terdalam untuk Sumarsih[3].

Setelah selesai dari Sekolah Rakyat, ia melanjutkan ke Sekolah Menengah Ekonomi Pertama yang kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Ekono-

1 Wawancara dengan Sumarsih, keluarga korban Semanggi I, 15 Desember 2008.
2 Lihat. Singgih Nugroho, Menyintas dan Menyebrang: Perpindahan Masa Keagamaan Pasca 1965 Di Pedesaan Jawa, Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2008, hal.135-185.
3 Wawancara dengan Sumarsih, Keluarga Korban Peristiwa Semanggi I, 15 Desember 2008.

mi Atas, di Salatiga, Jawa Tengah. Sejak kelas II SMEA pada tahun 1968 inilah ia mulai mengenal gereja Kristen lebih mendalam bersama teman-teman indekosnya. Yang dua orang di antaranya adalah siswi SPG Kristen. Di Gereja dekat tempat ia sekolah itu pula ia lebih menangkap pesan-pesan khotbah pendeta ketimbang ayat-ayat Kitab Suci yang dahulu semasa kecil ia dapatkan. Sebulan setelah lulus SMEA, pada 21 Januari 1970 ayahnya meninggal dunia. Tulang punggung pencari nafkah pun berpindah kepadanya. Ia harus membiayai pendidikan untuk 4 orang adiknya. Keinginan untuk melanjutkan belajar ke jenjang lebih tinggi ia benamkan. Ia kemudian bekerja di kantor Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ia ditempatkan di panitia Pemilihan Suara Pemilu 1971. Setelah pemilu usai, ia bekerja sebagai Petugas Lapangan Keluarga Berencana di bawah BKKBN wilayah Kabupaten Semarang. Pada masa itu pula ia bersama teman-teman seusianya mendirikan Sekolah Menengah Pertama sekaligus sebagai tenaga pengajar[4].

Pada hari Minggu, 5 Desember 1976, Sumarsih menerima Sakramen Pernikahan bersama Arief, lelaki yang ia kenal sejak tahun 1968 dari teman indekosnya yang kuliah di Universitas Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah. Mereka menerima sakramen pernikahan di Gereja Santo l'ara Martir Jepang, Salatiga. Sebelumnya, menjelang pernikahan, Sumarsih harus mengikuti pelajaran agama Katholik yang dibimbing Romo Ign. Wignyosumarto, MSC. Setelah dinyatakan lulus dan layak, ia dipermandikan pada 27 Oktober 1976. Sejak itu, setiap Minggu pagi ia pergi ke Gereja Salatiga dengan bersepeda motor milik inventaris BKKBN dengan jarak tempuh 25 Km. Sebelum pernikahan, ia juga diminta untuk mengikuti kursus perkawinan sebanyak 4 pertemuan[5]. Sedangkan Arief, sang suami, mengikuti kursus perkawinan di Jakarta.

Pada bulan April 1977, Sumarsih mengikuti suami pindah ke Jakarta. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jalan Hadiah, Jelambar yang berada di dekat St. Kristophorus. Dengan suasana lingkungan umat gereja inilah rasa kekatholikan di dalam dirinya semakin tumbuh, meskipun ia belum begitu fasih dalam mengucapkan doa Salam Maria. Setiap Minggu ia bersama suami

4 Wawancara dengan Sumarsih, Keluarga korban Peristiwa Semanggi I, 16 Desember 2008.

5 Sebuah nasihat perkawinan yang saat ini masih teringat Sumarsih adalah bahwa calon pasangan suami isteri sebaiknya bias menyatukan 2 keluarga yang berbeda, baik istiadat maupun latarbelakangnya. Sedangkan dalam materi kursus perkawinan, dalam kehidupan berumah tangga ada 4 kesatuan dasar yang harus dipersatukan, yaitu (1) Kesatuan iman dalam rumah tangga yang akan memupuk cinta kasih dalam keluarga, (2) Kesatuan pendidikan yang merupakan kesatuan perencanaan orangtua dalam membentuk kepribadian dan dalam memberikan bekal masa depan anak-anaknya, (3) Kesatuan ekonomi, yaitu bagaimana mengatur antara penghasilan dan pelbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, dan (4) Kesatuan sosial, yaitu sebagai manusia harus membina hubungan baik dalam kemasyarakatan.

selalu pergi berdoa ke Gereja St. Kristophorus. Sumarsih, dalam doanya, selalu meminta agar dikarunia seorang anak pertama laki-laki dan anak kedua seorang perempuan. Alasannya anak pertama laki-laki adalah karena ia lambang perlindungan. Namun, bukan berarti doa yang ia lantunkan itu bentuk pemaksaan, tapi satu keinginan lahiriah seorang ibu. Karena itu, ia dan suami telah menyiapkan sebuah nama dengan makna yang sama, yaitu Norma Irmawan untuk laki-laki dan Irma Normaningsih untuk perempuan. Nama itu mengandung harapan, kelak menjadi orang-orang yang mengetahui akan "norma" atau kaidah hukum yang berkeadilan, tanpa melupakan "irama" masyarakat yang penuh dinamika. Tambahan "wan" dan "sih" untuk membedakan laki-laki dan perempuan[6].

Doa Sumarsih dikabulkan. Pada hari Senin, 15 Mei 1978, jam 12.05, ia melahirkan seorang bayi laki-laki. Pada hari Rabu, 17 Mei, Romo J.G Beek SJ datang mengunjungi Sumarsih di rumah bersalin Sumber Waras, Jakarta Barat, dan memberikan berkat kepada anaknya. Atas permohonan Arief Priyadi, sang suami, Romo Beek memberikan nama permandian untuk anak mereka, yaitu Bernardinus Realino. Nama Bernadinus diambil dari seorang wali kota di benua Eropa yang sangat gigih memperjuangkan keadikan bagi rakyat tertindas, sedangkan Realino adalah nama asrama mahasiswa di Yogyakarta yang pernah didirikan oleh Romo Beek itu. Pada hari Minggu, 25 Juni 1978, si kecil Norma Irmawan dipermandikan di Gereja St. Kristophorus oleh Romo K.Bertens. 14 tahun, pada 23 April 1992, Norma Irmawan menerima sakramen penguatan di Gereja yang sama oleh Bapak Uskup Agung Jakarta Mgr. Loe Soekot SJ. Setelah mengkonsultasikan sendiri atas nama yang dipilih oleh Wawan, begitu Norma Irmawan biasa disapa, yaitu Yusuf, dalam surat Sakramen Penguatan namanya menjadi Bernardinus Yusuf Realino Norma Irmawan.

Sumarsih dan sang suami, setelah anak pertama lahir, pada akhir Desember 1978 pindah tempat tinggal. Mereka tinggal di sepetak tanah dengan bangunan rumah tua model Betawi Kedoya, Jakarta Barat. Rumah itu dibeli dari hasil jerih payah mereka selama bekerja di Jakarta. Setahun kemudian, ia melahirkan kembali seorang anak perempuan pada 14 Januari 1980. Arief lalu memberikan nama permandian kepada anak kedua yang sudah diberi nama Irma Normaningsih, yaitu Benedicta Rosalia. Lengkapnya menjadi Benedicta Rosalia Irma Normaningsih. Panggilan sehari-harinya adalah Irma. Selain mengajar di SMP Budi Murni, praktis kesibukan Sumarsih sejak tahun 1977-1982 adalah mengurus keluarga dan merawat anak-anaknya. Tak ayal, kehadiran Wawan dan Irma telah memberikan semangat dan harapan hidup keluarga Sumarsih. Kehidupan itu bertambah lengkap ketika ia mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil di Sekretariat Jenderal DPR-RI. Sedangkan Arief Priyadi bekerja

6 Wawancara dengan Arief Priyadi, Keluarga Korban Peristiwa Semanggi I, 16 Desember 2008.

sebagai peneliti di CSIS yang saat itu dianggap menjadi "Think-Thank"-nya Orde Baru[7].

Mereka lalu menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Katholik. Harapannya, selain bisa mendalami agama, Sumarsih juga bisa lebih banyak belajar dari kedua anaknya mengenai pendalaman Katholik Wawan dan Irma, sejak TK hingga SMP belajar di sekolah Bunda Hati Kudus, Jelambar Jakarta Barat. Setelah dianggap cukup dewasa untuk memilih, Sumarsih dan Arief memberikan kebebasan untuk anak-anaknya mengenai sekolah menengah atas yang diiinginkan. Wawan pun melanjutkan ke SMA Van Lith Pangudi Luhur di Muntilan, dan diikuti dengan kuliah di Universitas Atma Jaya Jakarta. Sedangkan Irma, selepas dari SMU Negeri 65 Jakarta Barat, melanjutkan kuliah jurusan ekonomi D3 di Universitas Indonesia.

Betapa senangnya Sumarsih ketika melihat anak-anaknya bertumbuh menjadi dewasa, terutama keduanya tumbuh menjadi remaja yang tidak bermasalah. Baginya inilah puncak kebahagian yang sudah diraih selama hidup berumahtangga. Terlebih lagi, ia bersama suami dan anak-anaknya, sejak tahun 1986 sudah menempati rumah dinas Sekretariat Jenderal DPR-RI. Dengan demikian, tidak ada "satu kekurangan apapun" sebagai sebuah keluarga. Hari-hari yang mereka lalui pun penuh suka dan duka yang merupakan bagian dinamika kehidupan bersama. Sebagai sebuah keluarga, Sumarsih dan Arief mencoba saling mengisi kekosongan di antara mereka dan anak-anaknya. Mereka saling berbagi tugas dalam pekerjaan rumah. Salah satu contoh, apabila tidak ada pembantu, Wawan sering mencuci perabotan rumah tangga, dan Irma menyapu halaman dan mengepel lantai rumah. Sedangkan Sumarsih biasanya memasak untuk makan siang dan malam selepas pulang dari kantor.

Satu kebiasaan yang dipegang dalam keluarga ini adalah makan malam bersama. Selain mengeratkan suasana keluarga, makan malam menjadi ruang berbagi pengalaman, pertukaran pemikiran, dan informasi di keluarga Sumarsih. Selain itu, pada momen makan bersama inilah mereka bisa saling bercerita mengenai aktivitas seharian yang mereka lalui. Makan malam pun menjadi agenda wajib yang harus mereka penuhi, sesibuk apapun aktivitas yang dimiliki. Kedekatan personal antara individu dengan yang lain pun menjadi sangat kental dalam keluarga itu. Memang, kedekatan Wawan dengan Sang Ayah, tidak sedekat dengan ibunya. Selain bisa memanjakan diri sebagai seorang anak, dengan Sang ibu, Wawan bisa menceritakan pelbagai hal yang mengganjal pikirannya. Karena itu, Sumarsih hampir tahu persis aktivitas kesibu-

7Wawancara dengan Arief Priyadi, Keluarga Korban Semanggi I, 18 Desember 2008.

kan yang dijalankan anaknya dan juga beban pikiran yang kerap melandanya. [8]

II. Jum'at Hitam

Pada hari Jumat, 13 November 1998, sekitar jam 16.00 Wawan menelepon ke rumah. Kebetulan yang berada di rumah saat itu hanyalah Arief, suami Sumarsih. *"Bapak kok sudah pulang?"* tanya Wawan dengan penuh penasaran. *"Iya, katanya ada himbauan dari Pangab Wiranto agar kantor-kantor segera memulangkan para karyawannya dan segera tutup"* ujar Arief. Dengan naluriah seorang ayah, Arief pun meminta kepada Wawan agar segera pulang saja ke rumah, *"ini berarti dalam keadaan gawat, kamu pulang saja"*. Namun, permintaan itu tidak dapat dipenuhi Wawan mengingat kondisi tidak memungkinkan dirinya untuk segera pulang, "pengennya sih pulang, tapi bagaimana mungkin? Suasananya seperti perang! Jangankan untuk pakai motor, jalan kaki saja susah!. Arief mengiyakan pemakluman yang dijelaskan oleh anaknya dengan tidak lupa sambil menasehatinya, *"Ya sudah, enggak pulang enggak apa-apa. Tapi hati-hati dan jaga diri baik-baik yah". "Ya, Pak. Saya enggak pernah keluar kampus kok. Sudah ya Pak, daaagh!"* jawab Wawan[9].

Sebelumnya, Wawan telah menelepon Ibunya mengenai kondisi yang terjadi di sekitar lokasi Universitas Atmajaya. Namun saat itu sang ibu sedang dalam perjalanan pulang dari kantor menuju rumah pada jam 14.30. Alasan Sumarsih untuk lekas pulang adalah karena suasana kantor sudah tidak tenang. Sebagian besar anggota DPR mengatakan bahwa ada himbauan dari Jenderal Wiranto agar kantor-kantor tutup jam 15.00 WIB. Jalan-jalan di luar gedung DPR/MPR pun diblokir. Sesampainya di rumah pada jam 16.30 WIB, ia menonton berita yang disiarkan oleh stasiun televisi Indosiar. Saat menonton itulah ia melihat bagaimana mahasiswa tiba-tiba tertembak saat melakukan demonstrasi di kawasan Semanggi. Melihat itu ia menjerit, "Aduh ada yang kena!". Pada jam 17.00 ia memindahkan channel televisi dari Indosiar menuju TPI.

Tiba-tiba telepon berdering. Ia mengangkat telepon itu. *"Tante saya Ivon temannya Wawan. Wawan ada di mana?"* tanya seorang perempuan dari gagang telepon itu. *"Wawan di kampus, ada yang kena ya?"* ujar Sumarsih penuh tanya. "*Tenang saja Tante, Ivon akan mencari Wawan. Nanti Ivon telepon lagi ya...!"*. Selang lima menit kemudian telepon kembali berdering. Sumarsih kembali mengang-

8 Sumarsih, "Perjuangan Menuntut Kebenaran dan Keadilan", dalam Melawan Pengingkaran, Jakarta: KontraS, 2006, hal. 69, Wawancara dengan Sumarsih, Keluarga Korban Peristiwa Semanggi I, 15 Desember 2008.

9 Sumarsih, "Perjuangan Menuntut Kebenaran dan Keadilan", hal. 75; Arief Priyadi, "Wawan, Tragedi Demi Tragedi", dalam Mardiya Chamim (ed), Saatnya Korban Berbicara: Menatap Derap Merajut Langkah, Jakarta: Jaringan Solidaritas Untuk Kemanusiaan, 2009, hal.71-73.

kat telepon itu. Dengan nada sedih suara telepon itu mengabarkan kepadanya, *"Ibu Sumarsih, Wawan tertembak"*, ujar Romo Sandiyawan Sumardi SJ. Belum selesai Romo Sandiyawan berbicara, Sumarsih berteriak histeris, *"ada apa Romo? Wawan kenapa"*. Saat itulah gagang telepon direbut Arief, sang suami, *"Ya Romo, ada apa? Saya bapaknya Wawan"*. *"Ada berita buruk Pak. Wawan kena tembak. Bapak saya mohon segera ke Rumah Sakit Jakarta"*. *"Dengan mobil atau sepeda motor saja Romo?"*. *"Rumah bapak di mana? Kami jemput saja"*. *"Tidak usah Romo saya angkat datang sendiri"* jawab Arief dengan wajah cemas. Sumarsih, dengan tergesa-gesa, langsung mencari kontak mobil, mengambil tas dan ganti baju sambil menangis membayangkan bagaimana nasib anak kesayangannya. Sumarsih dan Arief bergegas berangkat menuju Rumah Sakit Meruya Selatan. Mereka mampir sejenak di rumah adik iparnya yang tidak jauh dari rumah mereka. Dengan harapan, adik iparnya, yang merupakan anggota kepolisian, dapat diandalkan ketika nanti kondisi fisik Arief kelelahan. Sepanjang perjalanan, dengan mobil yang disetir oleh adik iparnya Arief, Sumarsih tidak putus-putusnya berdoa rosario, *"Tuhan Yesus, lindungilah Wawan, selamatkanlah anak saya, Bunda Maria tolonglah anak saya"*. Dengan perasaan yang hampir putus asa membayangkan kondisi anaknya, tiba-tiba ia berucap, *"Selamat jalan Wan"*. Ia tersentak dengan ucapannya sendiri. Ketika mulai sadar apa yang sedang diucapkan, ia berteriak, *"tidak, tidak!!!"*[10].

Setelah mobil keluar dari jalan tol, mereka pun menuju jalan S. Parman. Namun baru sampai lampu merah yang berada di Tomang Raya, kendaraan mereka dihentikan oleh aparat keamanan. Mereka meminta bantuan kepada aparat keamanan itu agar mengawalnya menuju Semanggi dan Slipi. Alih-alih dibantu, mereka malah dibentak dan diusir, "Segera tinggalkan tempat ini, nanti mengundang massa, silahkan ibu cari jalan lain saja. Ibu jangan memancing perhatian orang!!". Padahal, Sumarsih sudah menunjukkan KTP dan kartu pengenal pegawai DPR-RI. Sumarsih yang saat itu keluar mobil bernegosiasi dengan aparat keamanan pun kembali ke mobil sambil menangis meratapi nasib anaknya. Tidak putus-putusnya doa yang diucapkan agar anaknya tetap selamat hingga ia tidak sadar jalan apa saja yang sudah dilaluinya[11].

Ketika mobil sampai di ujung jalan masuk pintu Rumah Sakit yang berada di jalan Sudirman, ia mendengar suara adzan magrib dan suasana yang begitu kaotik. Kondisi itu membuat Sumarsih ingin turun dari kendaraan. Niat itu dicegah oleh adiknya. Ia, dalam kendaraan, melihat bagaimana kerumunan orang berlari sekencang-kenyangnya dengan wajah penuh rasa takut dan lalu-lalang kendaraan yang melawan arah. Di jalan raya depan kampus Atma Jaya terlihat sinar berwarna kemerah-merahan dengan kilat-kilat api yang meluncur di udara. Akibatnya, jalan aspal menjadi basah, meskipun saat itu tidak turun hu-

10 Sumarsih, "Perjuangan Menuntut Kebenaran dan Keadilan", hal.76.
11 *Ibid*

jan. Saat itulah sebenarnya, aparat keamanan sedang menyemprotkan gas air mata dan juga air kimia kepada para mahasiswa yang melakukan demonstrasi.

Sesampainya di Rumah Sakit Jakarta, Sumarsih dan Arief bergegas menuju pintu utama. Sementara adiknya mencari tempat parkir. Sumarsih, tanpa pikir panjang, bertanya kepada para mahasiswa yang sedang duduk di halaman, *"di mana Wawan, mahasiswa Atmajaya yang ditembak"*. Saat itu Sumarsih mengalami kecemasan yang luar biasa hingga ia tidak menghiraukan keberadaan suaminya sendiri. Setibanya di dalam rumah sakit, ia diinformasikan bahwa Wawan berada di basement. Sesaat mendengarkan kata basement, pikiran Sumarsih langsung terbayang pada kamar jenazah. Ia semakin tidak kuat membayangkan itu. Tidak terasa, air mata keluar lagi dari matanya. Ternyata, di basement sudah banyak orang berkerumun, terutama mahasiswa-mahasiswi. Ia lalu dipeluk oleh beberapa mahasiswa itu, dan memintanya agar tabah menghadapi. Ia malah teriak meronta, "di mana Wawan, di mana Wawan anak saya". Kamar pintu jenazah pun dibuka. Ia melihat Wawan berada di keranda terbuka. Tangannya dilipat. Dua jempol kaki kanan dan kiri diikat kain putih. Wawan bercelana pendek dengan mengenakan kaos putih. Sumarsih meraba seluruh badan anaknya. Ia memegang perut anaknya yang tipis, *"Wan, kamu lapar?....Oh, Wan, kamu ditembak"*. Dari kaosnya itu terlihat lubang yang disundutkan rokok yang disekelilingnya berwarna agak cokelat kemerahan. Seketika itu juga ia berdoa tanpa peduli apa yang keluar dari mulutnya[12].

Selepas berdoa, ia segera menuju bagian administrasi untuk membawa pulang Wawan. Di depan pintu jenazah ia bertemu dengan Romo Al. Andang. Ia mengeluh, *"Romo bagaimana sih cara berdoa yang benar? Semua doa saya dikabulkan. Tapi, untuk keselamatan Wawan mengapa Tuhan tidak mengabulkan. Tolong Mo, ajarin bagaimana berdoa yang benar"*. Ternyata, administrasi keuangan untuk penanganan jenazah Wawan sudah diurus oleh Ita F. Nadia, Senior TruK. Saat ingin kembali ke kamar jenazah ia mendapatkan informasi bahwa Wawan akan diotopsi. Awalnya ia menolak. Setelah dikonsultasikan dengan Romo Andang, ia membolehkan. Wawan pun dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan mengendarai mobil ambulan. Dalam mobil itu Arief, Sumarsih, Kustini adiknya, Ita F. Nadia, dan seseorang yang belum dikenalnya. Saat mobil ambulan melewati Universitas Atmajaya itu suasana masih mencekam. Tiba-tiba, suara tembakan mengenai badan mobil mereka. *"Tundukan kepala, tundukan kepala, mobil kita ditembaki" teriak Ita F. Nadia*[13].

Sesampainya di RSCM Romo Andang, Romo A. Susilo Wijoyo Pr, dan seorang dokter yang diutus oleh TruK bergantian menunggu otopsi Wawan. Ita F Nadia sibuk menelepon guna mempersiapkan segala keperluan Wawan. Saat itulah

12 Ibid
13 Ibid

Sumarsih memintanya agar Wawan dicarikan peti, baju, dan apa saja yang terkait dengan pemakaman yang paling bagus. Sebenarnya, ia ingin memgambil pakaian Wawan di rumah. Namun, atas saran suami terkait dengan situasi Jakarta yang masih mencekam, ia mengurungkan niatnya. Betapa kagetnya dr Budi Sampurno, dokter yang mengotopsi Wawan. Menurutnya, Wawan ditembak oleh peluru tajam, dan baru kali ini ia melihat jenis peluru semacam itu. Sumarsih pun langsung menanyakan perihal itu kepada dokter tersebut, "kalau begitu, peluru ini canggih yah dok". *"Masalah canggihnya saya kurang tahu. Tapi baru kali ini saya melihat jenis peluru ini*" ujar dokter itu keheranan. Arief sempat memegang dan mengamati peluru itu dengan seksama. Ia lalu memperlihatkan peluru itu kepada Sumarsih, tapi ditolaknya. Sumarsih dan Arif pun meminta kepada dr Budi Sampurno agar menyimpan peluru itu baik-baik sehingga tidak direkaya. Selain itu, mereka juga meminta agar dokter itu memberikan keterangan sama terkait dengan hasil otopsi yang dilakukan, jika satu saat dibutuhkan untuk bahan pengadilan[14].

Pada jam 24.30 jenazah Wawan telah diantarkan ke rumahnya. Di rumah itu telah banyak orang yang menunggu sejak sore. Alih-alih merasakan lelah, haus, dan lapar, pada malam terakhir bersama Wawan itu Sumarsih tetap setia menemani jenazah Wawan tanpa tidur sedikit pun. Malam itu, bersama Setya Rini, teman sekantornya, ia diminta untuk merenung dan mereflesikan diri sepanjang hidup yang pernah dilalui. *"Wawan adalah sekuntum bunga yang belum sempat mekar. Orang-orang seperti Wawan inilah yang selalu diincar untuk dihabisi. Mbak Marsih jangan marah kepada Tuhan dan jangan gila"* ujar Setya Rini meyakinkannya. Pada saat itu juga ia berdoa kepada Tuhan Yesus agar mau menerima persembahan Wawan semasa hidupnya dan juga untuk penembak anaknya agar ia bisa kembali menjadi manusia yang mengenal cinta kasih Tuhan[15].

Pada sekitar jam 06.00 wartawan RCTI datang untuk mewawancarai Sumarsih dan suaminya. Namun, hanya Arief saja yang mau menerima wawancara, sedangkan Sumarsih masih belum kuat untuk berbicara terkait dengan kepergian anaknya. Wartawan itu meminta tanggapan Arief mengenai ucapan Panglima ABRI Jenderal Wiranto yang mengatakan bahwa aparat bersenjata entah itu TNI dan Polri yang bertugas di sekitar Semanggi itu tidak dipersenjatai dengan peluru tajam. Ia sungguh kesal dengan pernyataan itu, "Lalu, peluru yang mengenai korban hingga tewas itu punya siapa? Pemulung? Ya, dia ingin menghindar, dia ingin cuci tangan, dia ingin lari dari tanggung jawab. Dia memang pintar bersilat lidah dan bersilat sikap. Dia selalu putar otak untuk mencari kambing hitam dan untuk membentengi diri". Setelah itu, kerabat yang

14 Ibid

15 Sumarsih, Kasih Ibu Dipenggal Peluru, Dokumentasi Pribadi, tidak terbitkan, tanpa tanggal dan tahun, hal. 6.

dikenal ataupun tidak datang silih berganti[16].

Namun, pada saat rombongan polisi datang Sumarsi menjadi naik pitam. Ia begitu marah melihat mereka. Seketika itu pula ia langsung mengusir mereka. Baginya korps polisi yang mengakibatkan anaknya meninggal. Sementara pada jam 10.00 pagi, saat Adi Sumarnoto, Seksi Liturgi Lingkungan, akan menyiapkan doa pemberangkatan Wawan ke gereja Maria Kusuma Karmel (MKK), tiba-tiba Romo Susilo Wijoyo datang dan berkenan memimpinnya. Betapa terkejutnya Sumarsih. Ia melihat hampir di sepanjang jalan, dari rumah menuju gereja, banyak iring-iringan manusia mengantarkan Wawan. Di dalam hingga di halaman gereja ribuan orang, baik Katholik maupun pemeluk agama yang lainnya, ribuan orang berkumpul mengantarkan kepergian Wawan. Dengan diiringi lagi Gugur Bunga, jenazah Wawan dibawa masuk ke dalam gereja dan diletakkan di depan altar. Paduan suara pun mengiringi Misa yang khidmat itu. Misa Requirem diantarkan oleh 11 pastor, dipimpin oleh Uskup Agung Jakarta Mgr. Julius Kardinal Daarmatmadja. Mereka mengenakan jubah berwarna merah sebagai lambang tanda kemenangan[17].

III. Mengumpulkan Derita Ingatan

Hidup ini seperti perahu yang berlayar di tengah samudera. Sejenak perahu yang saya tumpangi berlayar dengan tenang, kemudian tiba-tiba diguncang bajak laut yang ganas. Perahu itu karam dan kandas didasar laut yang curam. Saya menggelepar dari himpitan batu karang. Tak berdaya menahan jiwa yang terluka. Malapetaka itu mengingatkan nasehat kakek-nenek bahwa dalam hidup ada yang lebih berkuasa. Sang Hyang Widhi: Pencipta Langit dan Bumi, Yang Maha Segalanya; yang selalu melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan umat-Nya. Ketika lelah, DIA memberikan kekuatan. Ketika dihimpit derita, DIA memberi penghiburan. Ketika putus asa, DIA memberi pengharapan. [18]

Ada dua hal yang didapatkan jika menelisik ungkapan Sumarsih di atas. Satu sisi ungkapan itu menunjukkan satu kepasrahan Sumarsih atas apa yang menimpa keluarganya dengan kehilangan anaknya. Di sisi lain, hal itu merupakan satu harapan agar Tuhan memberikan keadilan untuk diri, keluarga, dan anaknya. Tarik-menarik kondisi inilah yang menyebabkan ia berdiri di antara dua kutub, antara ingin melupakan atas peristiwa yang menimpa anaknya, dan juga kerinduan keadilan yang diimpikannya. Akhirnya ia memilih cara

16 Arief Priyadi, "Wawan, Tragedi Demi Tragedi, hal.76-77.
17 Sumarsih, Kasih Ibu Dipenggal Peluru, Dokumentasi Pribadi, tidak terbitkan, tanpa tanggal dan tahun, hal.7; Sumarsih, "Perjuangan Menuntut Kebenaran dan Keadilan", hal. 82-83.
18 Wawancara dengan Sumarsih, Keluarga Korban Peristiwa Semanggi I, 17 Desember 2008.

untuk berdiri di tengah-tengah, yaitu menjauhkan diri dari komunitas dan ling kungan di mana ia bekerja dan bersosialisasi. Selain merasa telah gagal untuk membangun keluarga, ia, sebagai seorang ibu, merasa masa depannya suram dan menakutkan. Ia berencana untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Berita pengunduran dirinya menyebar di kantor. Atas saran beberapa mantan anggota DPR-RI dan juga teman-teman kantornya, ia pun urung mengundurkan diri. Ia mengambil cuti besar selama 3 bulan.

Sejak itu, hidup Sumarsih menjadi berubah. Berhari-hari ia tidak dapat me ninggalkan ruang tamu, tempat Wawan diistirahatkan sementara. Ia sering duduk di pojok selama berjam-jam di dekat jendela ruang tamu itu sambil mengikuti dan menunggu perkembangan terbaru berita penembakan anaknya dari Kompas. Ia selama berbulan-bulan sering tidur di lantai dan gudang. Ia selalu berdoa setiap hari dengan linangan air mata yang terus membasahi; setiap bangun pagi diawali dengan membaca kitab suci dan berdoa, sekitar jam 07.30 ia pergi berdoa ke makam Wawan, saat siang datang pada jam 12.00 tidak lupa ia berdoa Rosario, pada jam 17.00 berdoa dengan mendaraskan Litani Nama Yesus yang tersuci, Litani Hati Yesus yang Mahakudus, dan Litani Santa Perawan maria, menjelang tidur ia juga melanjutkan doa dan terkadang menyanyikan kidung ketuhanan hingga jam 24.00, setiap kali terbangun tiba-tiba ia berdoa apa saja sesuai dengan keinginannya. Doa-doa itu tidak pernah putus ia panjatkan sebagai bentuk pelepasan amarah mengenai kepergian dan rasa kehilangan anaknya mendalam.[19]

Selama berminggu-minggu pula ia tidak merasa lapar. Namun saat lapar itu datang, ia tetap tidak bisa menelan nasi yang dikunyahnya. Semakin kuat ia mengunyah nasi itu untuk ditelan oleh kerongkongannya semakin kuat pula lubang itu menolak butiran nasi untuk masuk. Ia merasa lehernya terasa diikat ketika akan memakan nasi. Sejak itu, bahkan kini, ia berhenti untuk makan nasi, dan menjadikan nasi sebagai pantangan. Ia juga kerap berpuasa setiap hari Kamis, hari Jumat yang merupakan hari penembakan Wawan, dan juga hari Sabtu yang merupakan hari penguburan Wawan. Memang cara berpuasa Sumarsih berbeda dengan puasa yang selama ini dipraktikan oleh umat Islam. Laku puasa yang dilakukan olehnya adalah sekedar menahan lapar sampai jam-jam tertentu. Misalkan puasa sampai jam 17.00 atau pun sampai 18.00. Jika mau, ia bisa puasa seharian penuh hingga keesokan harinya. Akibat kelabilan ini membuat ia kerap bertengkar dengan Arief, sang suami, terkait dengan sikapnya yang menutup diri kepada siapapun.

Praktis sejak saat itu kehidupan rumah tangga dipegang Arief dan Irma, adiknya Wawan. Di sini, Arief menjadi ayah sekaligus ibu untuk Irma dan juga

19 Wawancara dengan Sumarsih, 15 Desember 2008.

Sumarsih tentunya. Mulai dari menyapu, memasak, hingga mencukupi kebutuhan rumah tangga. Betapa tabahnya Arief. Ia begitu memahami perubahan drastis yang dialami isterinya. Melihat kondisi seperti itu, kepergian Wawan disikapi berbeda olehnya. Hal pertama yang dilakukan selepas Wawan dikuburkan adalah dengan mengirimkan surat-surat ucapan terima kasih kepada para aktivis yang selama ini memperjuangkan keadilan serta membantu kasus Wawan dan juga teman-teman sekampus dan seperjuangan dengan Wawan. Ia sadar bahwa satu saat akan berjuang dalam kesendirian. Teman kampus dan seperjuangan anaknya satu saat akan diwisuda, bekerja, dan membangun kehidupan sendiri sehingga kemungkinan besar mereka tidak ada waktu untuk menuntut keadilan. Sementara pegiat kemanusiaan akan disibukkan dengan kejahatan-kejahatan baru yang diciptakan elit politik dan sisa rejim Orde Baru untuk melupakan kejahatan masa lalu yang pernah dilakukannya. [20]

Beban hidup yang dialami oleh keluarga Sumarsih agak tertangguhkan. Selepas Wawan dikuburkan, banyak dari kawan-kawan TRuK di mana ia beraktivitas pada saat-saat tertentu mengadakan ibadat sabda dan refleksi di makam Wawan. Hal itu kemudian dilanjutkan dengan berkunjung ke rumah Sumarsih dengan suasana hangat. Sapaan para pastor, frater meneguhkan kembali iman Sumarsih dan menguatkan jiwanya untuk bangkit dari masalah yang menimpa. Selain itu, para mahasiswa dari pelbagai kampus di Jakarta, pegiat HAM KontraS selalu datang menemani Sumarsih, Irma, dan juga Arief hingga larut malam.

Dukungan juga datang dari keluarga terdekat Sumarsih. Ria, keponakan Wawan yang duduk di Tingkat Kanak-kanan (TK) St. Andreas selalu mencarikan buku Satu Perjamuan Satu Jemaat untuknya. Kustini, adik Sumarsih, selalu memberikan buku Saat Teduh. Adik sepupunya, Menuk, sering berjam-jam membacakan Kitab Suci melalui pesawat telepon. Ibu Titiek, seorang pendeta yang juga wartawan majalah D&R sering menelepon memberikan rangkaian kata-kata doa dan kutipan ayat-ayat Kitab Suci. Di antaranya adalah Surat Paulus kepada Jemaat di Filipi 4:13, yang berbunyi, “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”. Selain itu, wartawan dalam dan luar negeri banyak yang berkunjung ke rumah, salah satunya adalah wartawan Belanda. Menurut wartawan Belanda itu, tragedi 13 November 1998 adalah 10 kali lipat lebih besar bila dibandingkan dengan penembakkan mahasiswa Trisakti. Saat itu pihak aparat militer begitu kejam dan sangat brutal.

Satu persatu, dari pelbagai kunjungan sahabat, kerabat, dan juga yang memiliki simpati dengan penembakan Wawan ke rumah. Dari sinilah Sumarsih mulai dapat menghimpun cerita bagaimana sebenarnya peristiwa penembakkan Wawan dan pesan apa saja telah disampaikan Wawan sebelum ia meninggal.

20 Sumarsih, “Perjuangan Menuntut Kebenaran dan Keadilan”, hal.84.

Menurut Ita F Nadia, senior TRuK, saat memberikan kesaksian dalam 40 hari meninggalnya Wawan, sebelum ditembak, bersama dengan 6 orang kawannya mengangkat dan menyemprotkan air hidran di depan kampus Atmajaya untuk menetralisir gas air mata. Ketika itu, berondongan peluru aparat militer mengarah ke kampus Atmajaya. Akibatnya, banyak korban yang berjatuhan. Ada tiga orang yang melompat kemudian tertembak di kaki, yang membungkuk terkena pundaknya. Saat ditembak, Wawan sedang dalam posisi mengangkat korban yang terkena tembakan di dadanya, dan dilehernya masih menggantung tas berisi obat-obatan.[21]

Di akhir hidupnya, ia hanya mengatakan, "*haus, panas, haus.....*". Kesaksian itu kemudian dikuatkan oleh Dian, wartawan Radio pada 12 April 2000, "Ibu, saya baru siap menemui Ibu. Karena saya tahu Ibu sangat mencintai Wawan. Sebelum ditembak ia ada di samping saya. Pada saat itu militer masuk ke dalam kampus. Di halaman kampus ada korban yang jatuh. Wawan, melihat hal itu, lalu meminta ijin kepada salah seorang aparat militer, *"Pak, itu ada korban. Boleh ditolong atau tidak?". "Boleh, boleh.....Silahkan"* ujar militer itu. Wawan lalu melambaikan bendera putih sebagai tanda pihak netral yang akan menolong korban. Alih-alih diberikan ruang untuknya mengobati dan menolong orang yang tertembak itu, ia malah ditembak juga dengan peluru panas yang mengenai dadanya.

Namun, dukungan itu bukan berarti melunakkan hati Sumarsih untuk membiarkan yang lalu tetap berlalu. Ia tetap berusaha merelakan kepergian Wawan, tapi ia tidak merelakan bila pembunuh dari anaknya itu tidak diungkapkan. Ini tercermin dari sikapnya ketika pada hari Senin, 1 Desember 1998, 4 orang petugas Palang Merah Indonesia datang ke rumah mengantarkan santunan dari Negara berupa satu lembar cek senilai Rp.5.000.000,-, dengan lampiran surat ucapan belasungkawa dari Menteri Sosial, Yustika Baharsyah. Saat itu Sumarsih sedang sendirian di rumah, Arief berada di kantor, sedangkan Irma kuliah. Cek itu ia terima. Tapi, ia, secara lisan dan ditulis di bawah tanda terima itu, meminta bantuan kepada empat orang PMI untuk memberikan sumbangan itu kepada orang yang menembak anaknya. Jika penembak itu tidak ditemukan, cek itu bisa diberikan kepada aparat militer yang bertugas pada hari Jumat Sore, 13 November 1998. Bila sulit ditemukan lagi, agar itu diberikan kepada 163 prajurit yang dikenakan sanksi. [22]

Ia menangis sambil membenturkan kepala beberapa kali ke tembok setelah petugas PMI itu pergi. Ia merasa sudah hilang kepercayaannya kepada semua orang. Ia membatin bahwa tidak mungkin bantuan itu akan disampaikan sesuai dengan permintaannya. Hanya menggantungkan doa kepada-Nya yang

21 Wawancara dengan Sumarsih, 20 Desember 2008.
22 Wawancara dengan Sumarsih, 18 Desember 2008.

dapat membuat tenang dan mengerti apa kiranya yang harus dilakukan. Ia lalu menelepon berkali-kali ke Departemen Sosial untuk bisa berbicara dengan Ibu menteri, tapi tidak berhasil. Ia tidak putus asa. Ia menelepon dr. Ida Yusi Dahlan, Wakil Ketua Korbid Kesra Fraksi Golkar DPR-RI, pimpinan yang ia menjadi sekretarisnya di kantor. Ida Yusi Dahlan lalu membuatkan konsep surat untuk dikirim kepada Ibu Menteri Sosial. Namun, berhari-hari surat itu tidak mendapatkan respon. Atas saran Marlini, wartawan Femina, Sumarsih membuat surat terbuka pada rubrik surat pembaca di media massa. Ternyata cara itu dampaknya luar biasa. Setelah surat terbuka itu dimuat oleh beberapa media massa, beberapa minggu kemudian, teman Sumarsih sekantor memberitahukan bahwa keberanian mengembalikan santunan negara itu mendapatkan pujian beberapa anggota DPR-RI. Pengembalian santunan itu diangkat kembali dalam khotbah Romo Sandi dalam Misa di Jawa Timur.[23]

IV. Kasih Ibu Sepanjang Perlawanan

Di hadapan Tuhan saya bangga atas apa yang telah dikerjakan oleh anak saya. Tapi sebagai manusia saya tidak rela anak saya dibunuh. Dengan terbunuhnya anak saya itu terkait langsung dengan harga diri saya sebagai manusia. Hal itulah yang mendorong saya untuk tidak diam. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, saya diberikan kekuatan yang berlimpah dari-Nya. Sebab itu, saya kuat bertahan dalam melakukan tuntutan di dalam perjuangan, kuat dalam menghadapi masalah di dunia ini. Siapapun manusia itu tentu tidak akan tenang bila anaknya dibunuh. Jika saat ini banyak orang berkeinginan untuk melupakan masa lalu dan lebih baik menatap masa depan, tapi bagi saya masa lalu harus diselesaikan. Masa lalu adalah pijakan masa depan.[24]

Pada hari Senin, 12 Februari 1999 Sumarsih mulai masuk ke kantor. Ketika sampai kantor dan ingin menaiki gedung DPR di lantai 6 dengan menggunakan lift, badannya terasa goyah dan sempoyongan. Tidak terasa air mata mengalir dari matanya. Ia menyempatkan diri untuk bersandar tembok, istirahat sejenak sambil terus menangis. Ada teman kantor yang melihatnya. Ia lalu dipapah untuk menuju ruangan kerjanya. Alih-alih dapat bekerja dengan maksimal, di ruangan kerja itu pikirannya tetap kosong. Ia tidak dapat membaca surat-surat undangan anggota DPRI-RI. Semakin dicoba untuk membacanya, semakin dia tidak mampu menangkap pesan isi undangan itu. Perlu waktu berhari-hari ia harus menyesuaikan hidup tanpa Wawan anaknya dalam bekerja di kantor. Ia, terkadang, menyesali, mengapa begitu taat, patuh, dan loyal kepada penguasa Negara yang telah merenggut kebahagian hidup keluarganya.

Ia, saat kondisinya mulai agak stabil, pada hari Jumat pertama bulan Mei 1999

23 Wawancara dengan Sumarsih, 19 Desember 2008.
24 Wawancara dengan Sumarsih, 20 Desember 2008.

mengikuti misa perayaan Paskah karyawan-karyawati kawasan Slipi yang di pimpin oleh Romo Sandy di Gereja Salvator, Jakarta Barat. Selesai Misa, ia menemui Romo Sandy dan mengkonsultasikan keinginannnya untuk berdemonstrasi aksi damai di bundaran Hotel Indonesia. Informasi itu ia dapatkan dari berita harian Kompas. Romo Sandy menyetujuinya, *"Ya, nanti ikut Ibu Karlina saja"*. Atas sarannya juga, ia menghubungi Kalyana Mitra untuk ikut berdemonstrasi. Di lembaga inilah ia melihat orang pada lalu-lalang mempersiapkan peralatan untuk berdemonstrasi, salah satunya adalah sendok. Ia sangat heran, mengapa sendok dibutuhkan untuk itu. *"Ibu Ita, kita demonstrasi bawa sendok untuk apa?"*. *"Ibu Sumarsih, nanti kalau ingin menyebrang jalan, dan tidak dicarikan jalan oleh Polisi, kita tinggal membunyikan saja dua sendok ini, ting ting ting, agar diberikan jalan"*, jawab Ita F Nadia mencoba meyakinkannya.

Pada hari Jumat, Sumarsih pun datang ke bundaran Hotel Indonesia (HI). Di sekitar bundaran itu, polisi sudah berjaga-jaga dengan senjata, tameng, pentungan, panser, dan truk tronton. Ia lalu diperkenalkan dengan Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Lies Markus, dan para aktivis perempuan lainnya. Agendanya saat itu pembacaan pernyataan, berjalan mengelilingi bundaran HI dengan membawa spanduk dan poster sambil bernyanyi lagu Ibu Pertiwi dan lagu-lagu perjuangan. Dalam demonstrasi itu, ia mengenakan kerudung dan kaca mata hitam agar tidak diketahui orang. Ini karena, sebagai seorang ibu yang diberi tugas untuk mengantarkan anaknya selama hidupnya di dunia tiba-tiba ditembak. Ia merasa malu dan gagal sebagai seorang ibu. Pada hari Jumat berikutnya, ia ditugaskan membaca pernyataan untuk solidaritas masyarakat Timor-timur yang sedang berjuang untuk menyelamatkan nyawa dan kehormatannya akibat tindakan militer melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan.

Sayang, demonstrasi itu hanya diikuti dua kali. Pada Jumat berikutnya aktivitas itu sudah dilarang, karena dianggap sudah ditunggangi oleh Gerwani. Saat terakhir aksi demonstrasi itu, ia ditawarkan oleh aktivis TRuK bahwa ada pertemuan di kalangan korban Mei, kalau Sumarsih mau ikut sungguh diperkenankan sekali. Pertemuan itu bertempat di Wisma SJ (Serikat Jesuit). Sumarsih dan Arief pun akhirnya pergi ke sana. Sementara Irma akan menyusul selepas pulang dari Kampus UI yang letaknya tidak jauh dari lokasi pertemuan itu. Pertemuan korban itu dipandu oleh Ita F Nadia dan Tigor. Kalangan korban dan keluarga korban Mei tanpa membeda-bedakan status dan etnis mengkisahkan pengalaman pahit yang diderita. Hal yang membuat Sumarsih tertegun adalah ketika melihat orang etnis Tionghoa yang hanya berdiri di depan forum, memegang mikropon tanpa sepatah kata pun diucapkan, saking pahit dan traumanya pengalaman yang dialami. Setelah sharing pengalaman, dalam pertemuan itu disepakati untuk memperingati setahun peristiwa 13-14 Mei Berdarah 1998.

Pertemuan untuk melakukan konsolidasi internal dan juga penguatan solidaritas kalangan korban dan keluarga korban dalam mempersiapkan peringatan satu tahun peristiwa Mei sering diadakan di Kantor TRuK yang beralamat di jalan Arus Dalam, Jakarta Timur. Dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan unjuk rasa ke Istana menemui presiden B.J Habibie agar mempertanggungjawabkan peristiwa Mei 1998 dan peristiwa Semanggi 13 November 1998 serta melakukan tabur bunga di depan kampus Atmajaya. Sebelum peringatan itu dimulai, beberapa hari sebelumnya, Sumarsih dan Arief diminta TRuK untuk menemui korban dan keluarga korban Tionghoa di daerah Cengkareng. Dengan kehadiran mereka berdua, diharapkan dapat meringankan beban korban dan keluarga korban Tionghoa, bahkan kalau mungkin bisa ikut memperingati peristiwa Mei 1998. Saat itulah Sumarsih membatin, *"Saya ini pasien, kok malah menjadi dokter"*.

Dalam pertemuan itu Sumarsih mencoba membangkitkan kembali asa mereka yang putus dan membuka ruang untuk berbagi terhadap trauma yang menghinggapi, *"bapak-bapak, ibu-ibu lahir di Indonesia, mata pencahariannya di Indonesia. Bedanya dengan saya, bapak-ibu kulitnya putih sedangkan saya hitam. Bapak-ibu matanya sipit, saya enggak. Supaya ibu-bapak bisa sama seperti saya, kalau mau datang dalam peringatan 12 Mei, saya menyarankan bapak-ibu memakai baju warna biru, hitam, ataupun coklat. Agar bapak-ibu tidak kelihatan putih sekali. Tidak begitu kelihatan matanya sipit"*. Tidak disangka mereka datang dengan menggunakan beberapa angkutan Metromini.

Selain kalangan korban dan keluarga korban peristiwa Mei, dalam acara peringatan itu juga dihadiri dan didukung oleh pelbagai lapisan masyarakat. Penjagaan yang dibuat oleh TNI/Polri pun tidak kalah banyaknya. Sebagian besar kalangan korban dan keluarga korban membawa foto-foto keluarga yang meninggal sambil menangis. Hal itu tidak dilakukan oleh Sumarsih. Ia tidak tega memandang foto wajah anaknya. Sayang keluhan dan ratapan korban dan keluarga korban untuk memperingati peristiwa itu tidak didukung oleh aparat militer. Saat mereka ingin bergerak beberapa meter dari lapangan Monas menuju Istana Merdeka sudah dihadang brikade polisi berlapis-lapis dengan membawa tameng dan pentungan. Selain itu aparat keamanan langsung memasang tanda garis polisi agar mereka tidak mendekati Istana Merdeka itu. Setelah bernegosiasi dengan alot, mereka dapat melakukan long march ke Atmajaya untuk berdoa dan melakukan tabur bunga.

Dalam pertemuan evaluasi peringatan itu disimpulkan bahwa mereka memerlukan adanya pertemuan rutin untuk membangun semangat dan harapan hidup agar tidak lekas hilang. Untuk mewadahi itu dibentuklah Paguyuban Korban dan Keluarga korban Tragedi Mei 1998, Korban dan Keluarga Korban Berdarah 13 November yang diketuai oleh bapak Ali. Selain melakukan upaya

penuntutan keadilan, organisasi korban ini untuk memberdayakan dan menguatkan solidaritas sesama korban, yaitu dengan mendirikan koperasi, arisan, pengajian, dan aktivitas bermanfaat lainnya. Di sini, Sumarsih dan Arief mencari kalangan korban dan keluarga korban yang belum masuk dalam data TRuK. Namun, nama paguyuban korban itu berganti-ganti seiring dengan terjadinya kasus berdarah, yaitu peristiwa Semanggi II, dan tampuk kepemimpinan organisasi itu berpindah ke tangan Arief, mengingat Ali begitu sibuk dalam menghidup keluarganya.

Berawal dari sini, Sumarsih bersama paguyuban korban dengan didampingi Pegiat HAM Kontras dan TRuK melakukan upaya penuntutan dengan mendatangi kantor Pomdam Jaya untuk menemui Komandan Pomdam Jaya. Semula rombongan korban itu akan diterima olehnya, tapi ternyata justru diterima oleh Kabag Sidik, Kol.CPM.Ir. Wempy Happan. Mereka lalu meminta ijin untuk menunggu Komandan itu di aula, tapi tidak diperbolehkan. Mereka meminta ijin untuk menunggu dihalaman dan pinggiran gedung agar bisa berteduh tetap tidak boleh. Mereka malah diusir dan pintu pagar kantor itu digembok. Mereka lalu melakukan orasi di pinggir jalan dengan dijaga ketat oleh pihak kepolisian dengan disiapkan dua truk tronton. Ketegangan sempat terjadi ketika ada seorang provokator masuk dalam rombongan korban dan meminta kordinator aksi untuk membubarkan diri. Sekitar jam 17.15 beberapa perwakilan korban dan keluarga korban saja yang diterima untuk melakukan audiensi oleh Komandan Pomdam Jaya, Kolonel Mungkono. Komandan itu memberikan keterangan yang standar bahwa saksi kasus Semanggi sudah cukup dan Pomdam tetap akan melakukan penyidikan.

Setelah itu, rombongan korban dan keluarga korban menuju Dephankam Pangab untuk melakukan penuntutan kembali. Belum sampai ke lokasi yang dituju, mereka sudah dihadang brikade polisi dengan peralatan lengkap di depan Pasar Sarinah Jalan MH.Thamrin. Satu-persatu kalangan korban dan keluarga korban serta pegiat HAM melakukan orasi. Tiba-tiba terdengar bunyi tembakan beruntun. Brikade polisi yang merapat itu membubarkan diri. Sumarsih kaget melihat kondisi itu. Para polisi muda datang memukuli para aktivis TRuK yang mempertahankan kunci mobil komando yang akan direbut oleh aparat polisi. Di sebelah kanan mobil, ia menyelipkan telapak tangan dipinggang anak muda yang sedang pegang stir mobil, *"ini tangan Ibu, ini tangan Ibu"*. Tiba-tiba ia terlepas dari keroyokan polisi Sumarsih lalu pindah ke sebelah kiri mobil. Ia menarik telinga seorang polisi, *"hei, ini manusia, hei kita sama-sama manusia"*. Itu dilakukannya sambil menyelipkan tangan di tengah-tengah himpitan keroyokan polisi hingga menggapai dipinggangnya, *"ini tangan Ibu, ini tangan Ibu. Anak muda itu itu bisa terlepas dari keroyokan tersebut.*

Sementara bapak-bapak dan ibu-ibu korban yang lain dikejar-kejar, ditendang,

dan juga yang dipukuli. Sebagian besar dari mereka ada yang keseleo, patah tulang, dan babak belur di tubuhnya. Dari kejauhan ia melihat Tigor, kordinator lapangan aksi, dikeroyok dan dipukuli. Sumarsih secara refleks langsung merebutnya dari kerumunan itu. Entah kenapa, para polisi muda itu pergi begitu saja. Ia dan Titiek, sektretaris Romo Sandy memapah Tigor yang kemudian roboh di tengah jalan aspal yang panas. Ia rebah dipangkuan Sumarsih. Sumarsih pun meminta bantuan, *"tolong, tolong, taksi, taksi. Tigor bersuara lirih kepadanya, "Ibu, saya kena...."*. Awalnya ia tidak mengira bahwa Tigor terkena tembakan. John, salah seorang yang diselamatkannya mendapatkan taksi.

Mereka langsung membawa Tigor ke dalam taksi, meskipun saat itu polisi menghalang-halangi Sumarsih. *"Tangkap dia, amankan dia, bawa ke Polda"*, ujar polisi gemuk yang setengah tua itu. Sumarsih semakin marah. Sambil mengeluarkan KTP, ia berteriak, *"Saya jangan ditangkap sekarang. Kalau memang diperlukan saya akan datang ke Polda. Ini KTP saya"*. Ternyata kemudi mobil sudah dipegang seorang intel, sopir taksi telah dipaksa keluar. Sementara ia sudah kehabisan tenaga. Ia hanya bertahan dengan memegang dashboard. Tiba-tiba datang seorang wartawan duduk di sampingnya dengan kaki diangkat untuk menghalanginya. Ia berteriak, *"ini Ibu korban, kasihan jangan ditangkap, ini Ibu korban jangan ditangkap!"*. Sopir taksi kembali di samping Sumarsih, dan wartawan itu memberi aba-aba, *"ayo jalan cepat, kita dibuntuti polisi, ambil kanan, ambil kiir, lampu merah jalan terus"*. Akhirnya, mereka tiba di RS St. Carolus. Sumarsih menangis ketika melihat Tigor bersimbah darah. Ia baru tahu bahwa Tigor terkena tembakan. Wartawan itu kemudian memintanya untuk pergi entah kemana. Karena situasi dalam kondisi yang tidak aman. Sementara Tigor akan diurus oleh wartawan itu.

Dari rangkaian aktivitas itulah yang mulai merubah psikologis Sumarsih. Ia telah melakukan transformasi diri dari seorang Ibu rumah tangga, pegawai negeri sipil, tidak suka dengan pelbagai hal yang berbau demonstrasi, orang yang selalu meratapi kepergian anaknya, dan cenderung diam, kini menjadi orang yang berani berbicara di depan publik untuk menyuarakan keadilan atas apa yang dideritanya, dan juga melakukan advokasi bersama dengan korban dan keluarga korban peristiwa yang lainnya. Posisi narasumber keluarga untuk dijadikan wawancara media massa dan ataupun kepentingan publik mengenai perkembangan kasus Semanggi I yang awalnya dipegang Arief, kini berpindah kepada dirinya. Ia menjadi orang yang sangat lantang berbicara mengenai upaya penegakkan HAM. Padahal, di tengah kesibukannya mengikuti rangkaian advokasi dan perkembangan kasusnya dan juga kasus-kasus yang lain, ia harus menyelesaikan pelbagai pekerjaan yang menumpuk sebagai sekretaris di Fraksi Golkar DPR-RI.

Pada titik ini ia merasa menemukan pelbagai keajaiban dalam proses yang di-

jalani. Setiap ada aktivitas yang terkait dengan upaya advokasi kasusnya, sesering itu pula anggota DPR RI Golkar yang dilayaninya sedang melakukan kunjungan kerja keluar kantor ataupun kota. Kesempatan itu ia manfaatkan untuk melakukan aktivitas diluar dengan terlebih dahulu memilah dan memilih pekerjaan yang akan dan sedang diselesaikan olehnya sebagai sekretaris Golkar. Terlebih lagi, setelah pergantian periode, ada restrukturisasi kesekretaritan. Selain sudah lama bekerja dibagian sekretariat Golkar, ia memiliki kecakapan dalam bekerja yang sudah diakui ketekunan dan kedisipilinan serta kejujurannya. Sebab itu, ia diminta untuk membantu dibagian keuangan, meskipun tidak memiliki pengalaman dalam bidang itu. Masa itu, ketua Fraksi Golkar dipegang oleh Samsul Mua'rif, bendaharanya Nariah, adiknya Ginanjar Karta Sasmita. Dalam memegang bidang keuangan ia memiliki ruangan dan brankas tersendiri beserta kuncinya. Dengan demikian, ia bisa leluasa bekerja dan juga merencanakan sendiri hal-hal apa saja yang mesti diselesaikan sambil memperkirakan durasi waktu yang ia bisa selesaikan serta kemungkinan untuk membawanya ke rumah.[25]

Posisinya sebagai "orang dalam" di gedung DPR-RI ternyata membawa dampak positif bagi perjuangan paguyuban korban dan keluarga korban. Meskipun sebelumnya, perjuangan kalangan korban untuk menuntut keadilan selalu kandas. Misalnya, Puspom c.q Pomdam Jaya yang melakukan penyelidikan dan mengarahkan kasus TSS pada Peradilan Militer, sehingga memungkinkan para militer yang semestinya bertanggung jawab itu mendapakan impunitas dan hanya pelaku lapangannya saja yang disentuh, sedangkan pemegang komando dari organisasi gerakan itu tidak pernah. Begitu pula dengan Tim Penuntasan kasus Tragedi Trisakti Mei (TPK-12 Mei), yang sudah melakukan kerja sama dengan Mahkamah Militer, sekedar menetapkan kesalahan kepada individu pelaksana di lapangan. Di sini, penyidik, hakim, oditur, pelaku, maupun alat bukti telah dikuasai institusi militer. Sementara, Komnas HAM tidak bisa diharapkan oleh sebagian besar korban. Ini karena, berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 76 ayat (1), Komnas HAM hanya memiliki fungsi sebagai pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Ia tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki yang kemudian hasilnya dapat dijadikan rekomendasi untuk upaya pengadilan.[26]

Terbitnya UU No.26 Tahun 2000 memberikan harapan bagi korban dan keluarga korban. Ini karena undang-undang tersebut mengandung asas retroaktif, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 43 ayat 1. Selain itu, dengan adanya undang-undang tersebut, upaya penyelesaian kasus itu akan terhindar dari Peradilan Militer yang lebih berpihak kepada pelaku. Dengan demikian, melalui hal itu akan memungkinkan untuk mengadili para komandan ataupun

25 Wawancara dengan Sumarsih, 18 Desember 2008
26 Arief Pryadi, "Wawan, Dari Tragedi ke Tragedi, hal. 86

atasannya juga, selain pelaksana lapangan, sebagaimana diatur dalam pasal 42. Kalangan korban dan keluarga korban pun menghimpun kekuatan kembali. Dengan didampingi sejumlah pegiat kemanusiaan seperti KontraS, TRuK, PBHI, dan Elsam, mereka melakukan pendekatan dengan Komnas HAM, DPR, dan Kejaksaan Agung. Harapannya, terutama kepada DPR, agar kasus TSS tidak dipetieskan. Di sini, Sumarsih juga melakukan lobi internal kepada sejumlah anggota Fraksi DPR-RI, salah satunya adalah Agustin Teras Narang, S.H, anggota Fraksi PDI-Perjuangan agar mengangkat kasus TSS. Usulan itu diterima. Ia meminta kepada Sumarsih bahan dan data yang dimilikinya mengenai kasus itu agar diantarkan ke kantor DPP PDI Perjuangan untuk dijadikan bahan rapat DPP. [27]

Tidak berapa lama Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI di dalam rapat Bamus meminta agar peristiwa Semanggi I, II, dan Trisakti segera dituntaskan. Dengan negosiasi yang alot, DPR-RI membentuk Panitia Khusus tentang peristiwa-peristiwa itu. Sumarsih dan Arief dengan tekun mengikuti sidang-sidang pansus. Selesai rapat Pansus, bersama para mahasiswa yang tergabung dala AKKRA (Aliansi Keluarga Korban Kekerasan Negara), dan Arief berkumpul di ruangan kerja Sumarsih yang berada di Gedung Nusantara I lantai XII, ruang 1225. Mereka menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk dibagikan kepada para anggota pansus agar dikembangkan dalam rapat berikutnya. Dalam proses perjalanan rapat itu, Fraksi TNI dan Polri saling berdebatan dan lempar tanggung jawab. Dua fraksi itu juga sempat berani menantang untuk diklarifikasi di depan pansus, meski itu akhirnya tidak pernah terjadi. Dari pansus itu terungkap bahwa Polri tidak melakukan penyidikan dalam kasus Semanggi I, karena menganggap bahwa Pomdam Jaya telah melakukan penyidikan. Sedangkan Pomdam Jaya sendiri tidak pernah melakukan penyidikan itu. Untuk kasus Semanggi II, penyelidikan Polri menemukan penembak Yan Yun Hap, yaitu Prada Tuaputi dari kesatuan Kostrad.[28]

Setelah dalam pengambilan keputusan Pansus itu mengalami deadlock, lalu dilakukan voting kepada anggota Pansus yang berjumlah 50 orang. Namun dalam lembar presensi yang melakukan tanda tangan hanya 26, sementara secara fisik yang hadir hanya 19 orang. Dari jumlah orang yang hadir itu hanya 5 orang saja yang menyatakan bahwa kasus Trisakti, Semanggi I dan II telah terjadi pelanggaran HAM berat, sedangka 14 orang lainnya menyatakan tidak. Pada hari Senin 9 Juli 2001 inilah Ketua Pansus melaporkan pembahasan mengenai kasus-kasus itu dalam sidang Paripurna DPR-RI. Dalam pembahasan laporan itu dinyatakan bahwa 2 fraksi, PDI Perjuangan dan PDKB (Partai Demokrasi Kasih Bangsa) menyatakan bahwa tiga kasus itu termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Fraksi PKB memutuskan untuk diselesaikan dengan

27 Ibid

28 Sumarsih, "Perjuangan Menuntut Kebenaran dan Keadilan", hal. 102

jalan rekonsiliasi. Sementara tujuh fraksi lainnya, Golkar, TNI/Polri, PPP, Reformasi, Daulatul Ummah, Bulan Bintang, dan Kesatuan Kebangsaan Indonesia (KKI) menganggap bahwa tiga kasus itu bukanlah pelanggaran HAM berat. Mereka merekomendasikan agar itu diselesaikan melalui Pengadilan Militer yang sedang dan akan berjalan.[29]

Namun, hal itu diinterupsi oleh Firman Djaja Daeli dari fraksi PDI Perjuangan. Ia menyatakan bahwa voting dalam rapat Pansus tidak ada dalam aturan Tata Tertib Dewan. Ia mengusulkan agar voting dilakukan sidang Paripurna. Sayang, interupsi itu tidak digubris oleh Pimpinan Sidang, Soetardjo Soerjogoeritno. Ia langsung mengetok yang langsung diiringi oleh sorak sorai para anggota DPR-RI. Laporan itulah yang dikenal dengan, "Rekomendasi DPR-RI". Betapa marahnya Sumarsih menyaksikan keputusan itu. Ia langsung melemparkan 3 butir telor dari 7 telur yang dibawa, yang sudah disiapkan dari rumah dengan disembuyikan di balik kotak kue yang ditutup kue pisang dan unti, ke arah tempat duduk anggota fraksi TNI/Polri, Pimpinan Sidang, dan fraksi Golkar. Arief, sang suami, yang awalnya melarang isterinya untuk membawa telur, ia turut melempar satu telor untuk melampiaskan kekesalannya terhadap para anggota DPR-RI. Sejak itu, Sumarsih melakukan gerilya kecil-kecilan untuk melakukan kampanye, baik itu di kantor, kendaraan umum dan di mana pun ia berada agar pada tahun 2004 masyarakat tidak memilih partai yang anggotanya saat itu duduk di DPR-RI.[30]

Tapi, kalangan korban dan keluarga korban tidak menyerah. Dengan didampingi KontraS dan TRuK, pada Selasa, 4 September 2001, mereka melakukan audiensi ke Mahkamah Agung. Mereka diterima oleh Laica Marzuki, Hakim Agung, M. Taufik, Wakil Ketua Hakim Agung, Said Harahap anggota Pokja HAM, Abdurahman Saleh, Mugihardjo, Direktur Pidana, dan Girman Hudiarjo, Ketua Muda Urusan Lingkungan Pengadilan Militer. Dalam pertemuan itu dinyatakan oleh Mahkamah Agung bahwa Rekomendasi DPR-RI atas kasus Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II itu tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, pada Jumat, 13 Juli 2001, dengan didampingi AKKRA, FAM Atmajaya, FPPI, Posko Teknik UI, TRuK, KontraS, dan Institut Studi Arus Informasi, mereka datang ke gedung Komnas HAM. Mereka membawa setangkai bunga sepatu sebagai lambang cinta dan sebuah sepatu lars sebagai lambang kekerasan. Ini dilakukan untuk memberikan pilihan kepada Komnas HAM, apakah mau meneruskan kasus-kasus itu atau membiarkannya. Soegiri, salah satu anggota Komnas HAM, marah dengan tawaran itu. Sementara Mohammad Salim memilih bunga sepatu. [31]

29 Ibid
30 Ibid
31 Ibid

Beranjak dari sini, Komnas HAM membentuk KPP HAM Trisakti, Semanggi I, Semanggi II. Tapi, surat keputusan itu urung ditandangani oleh Ketua Komnas HAM. Sikap protes pun dilakukan oleh Karlina L. Supelli dengan pengajuan pengunduruan diri dari anggota KPP HAM itu, yang kemudian diikuti dengan pengunduran diri Hermawan Sulistyo. Dalam proses penyidikan ternyata KPP HAM itu tersebut tidak berhasil memanggil para jenderal yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Upaya hukum memanggil secara paksa pun tidak mendapatkan respon dari Mabes TNI/Polri. Saat itulah Sumarsih mendengarkan siaran radio Jakarta News FM bahwa KPP HAM didemonstrasi dan diminta dibubarkan. Ia langsung menelepon KontraS yang diterima oleh Haris Azhar. Dari perbincangan lewat pesawat telepon inilah kemudian diputuskan mengadakan konsolidasi dengan korban dan keluarga korban dan beberapa elemen mahasiswa. Beberapa alternatif dalam pertemuan itu pun diusulkan. Salah satunya adalah dengan mengunjungi rumah para jenderal yang dipangil KPP HAM tersebut.[32]

Pada Senin, 11 Maret 2002, keluarga korban bersama KontraS datang ke kantor Komnas HAM. Mereka diterima oleh Albert Hasibuan (Ketua KPP HAM TSS) dengan didampingi Usman Hamid sebagai sekretaris KPP HAM. Pada saat itulah mereka memohon ijin agar KPP HAM menunggu kehadiran Jenderal Wiranto. Ini karena, mereka akan menjemput Wiranto ke rumahnya, yang menurut jadwal, ia seharusnya pada jam 10.00 dipanggil KPP HAM. Untuk mengantisipasi jika tidak bertemu dengan Wiranto, Arief, sang suami, membuat surat yang berisi maksud dan tujuan kedatangan keluarga korban dan KontraS dengan menyiapkan bunga sebagai lambang bahwa mereka adalah orang baik-baik.

Sayang, setibanya di sana, Wiranto tidak mau menemui. Menurut Suharlan, ajudannya, ia pergi ke luar kota. Padahal, menurut informasi seorang wartawan, Wiranto pada siang nanti akan datang ke hotel Santika. Wartawan itulah yang ditugaskan untuk meliputnya. Melihat kondisi seperti itu, Ibu Maria, orang tua Tedy Mardani membacakan surat di depan rumah Wiranto di hadapan para wartawan maksud kedatangannya. Surat itu diserahkan oleh orangtua Sigit Prasetyo dengan setangkai bunga yang dibawa oleh Sumarsih. Tiba-tiba datang segerombolan polisi untuk menghadang. Sebelum kalangan korban ditanya, Sumarsih langsung memberitahukan, *"Pak, kami hanya menyampaikan surat dan sekarang sudah selesai. Kami akan segera pulang"*.

Memang, pemanggilan yang dilakukan KPP HAM terhadap 19 perwira tinggi TNI/Polri sebenarnya bermaksud untuk memeriksa bukan untuk menjatuhkan vonis. Namun, pemanggilan itu ternyata ditolak perwira tinggi itu. Alasannya, eksistensi KPP HAM mengenai kasus TSS itu dipertanyakan. Terlebih lagi

32 Ibid

DPR-RI sudah merekomendasikan bahwa kasus TSS bukan pelanggaran HAM berat. Persoalan itu makin meruncing ketika Kejaksaan Agung menolak hasil penyelidikan Komnas HAM oleh KPP HAM dengan beragam alasan. Salah satunya adalah keterangan dan penyidikan itu dilakukan tanpa melalui sumpah sebagaimana dirumuskan oleh KUH (Kitab Undang-Undang Hukum) Acara Pidana tentang penyelidikan. Sudah berkali-kali Komnas HAM menyerahkan berkas hasil penyidikan KPP HAM kepada Kejaksaan Agung, namun berkali-kali pula berkas itu dikembalikan ke Komnas HAM. Berkas itu menjadi bola panas yang terus dihindari oleh Kejaksaan Agung.

V. Melawan dan Tetap Melawan

Pergantian periode anggota DPR-RI dimanfaatkan oleh kalangan korban dan keluarga korban, pendamping KontraS dan juga masyarakat yang peduli HAM. Pada awal Januari 2005 mereka bertemu Komisi Hukum DPR-RI. Dalam pertemuan itu, anggota Komisi Hukum menyatakan bahwa seharusnya Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Ini karena, rekomendasi DPR tahun 2001 bukan merupakan produk hukum sehingga tidak mengikat. Pada 30 Juni 2005 seluruh fraksi di Komisi Hukum sepakat agar kasus TSS diungkapkan kembali. Hal ini secara tersirat didukung oleh Ketua Agung Laksono saat beraudiensi dengan korban dan keluarga korban pada 14 September 2005. Menurutnya, kesepakatan itu akan ditindaklanjuti melalui prosedur formal sesuai mekanisme yang berlaku dan akan dibahas dalam Rapat Bamus DPR-RI pada 22 September 2005. Yang terjadi, dalam Rapat Bamus itu, kasus TSS tidak masuk dalam agenda pembahasan.[33]

Perjuangan kalangan korban dan keluarga korban tidak berhenti. Pada 7 Desember 2005, mereka melakukan audiensi kembali dengan Komisi Hukum DPR-RI yang diterima oleh 9 fraksi, minus Partai Golkar. Komisi Hukum itu berjanji kembali untuk mendesakkan kasus itu melalui Sidang Paripurna DPR-RI. Benar saja, Nursjahbani Katjasungkana dari fraksi Kebangkitan Bangsa dan Al Muzzamil Yusuf, wakil Ketua Komisi Hukum mengajukan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR, 12 Januari 2006 kepada Pimpinan DPR agar segera memproses rekomendasi Komisi Hukum yang telah sepakat membuka kembali kasus TSS. Interupsi itu diterima dan ditampung oleh Agung Laksono. Ia merekomendasikan bahwa kasus itu akan dibahas di Rapat Bamus DPR.[34]

Pada 21 Februari 2008 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan menggugurkan kata "dugaan" pada Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU.26 Tahun 2000 karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pertimbangan itu disebutkan bahwa DPR dalam merekomendasikan pemben-

33 Arief Priyadi, "Wawan, Tragedi Demi Tragedi", hal. 91-94.
34 Ibid

tukan Pengadilan HAM Ad Hoc harus memperhatikan hasil penyelidikan dari Komnas Ham dan hasil penyidikan dari Kejaksaan Agung. Keputusan MK yang cukup berani ini memancing reaksi Menteri Pertahanan dan Kejaksaan Agung. Pada 17 Maret 2008, Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan, seusai melakukan pertemuan di Departemen Pertahanan dengan Wiranto, mantan Menhankam dan Henry Willem, Kabinkum Mabes TNI, mengajukan imbauan agar para purnawirawan TNI, khususnya mereka yang diduga terkait melakukan pelanggaran HAM berat, tidak perlu mengindahkan panggilan Komnas HAM. Menurutnya, kewenangan hukum Komnas HAM masih diragukan dan UUD 1945 menganut asas non-retroaktif.[35]

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berimbas pada sikap Jampidsus Kejaksaan Agung Kemas Yahya Rahman. Pada 13 Maret 2008, ia mengatakan bahwa berkas penyelidikan pro-yustisia Komnas HAM tentang kasus TSS dan kasus Penghilangan Orang Secara Paksa telah hilang. Meskipun pernyataan ini sempat dibantah oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung Bonaventura Daulat Nainggolan pada 27 Maret 2008. Ironisnya, pada 1 April 2008, Kejaksaan Agung malah mengembalikan empat berkas hasil penyelidikan itu kembali kepada Komnas HAM melalui kurir, yaitu (1) Kasus Wamena-Wasior untuk dilengkapi, (2) Kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, tidak akan dilanjutkan dengan alasan sudah diselesaikan lewat dengan Peradilan Militer, meskipun sebenarnya, penyelesaian kasus Semanggi I belum pernah dipersidangkan dalam Peradilan Militer, (3) Kasus Kerusuhan Mei 1998, dengan catatan menunggu terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc, dan (4) Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa, yang juga menunggu terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc.

Memang, upaya Sumarsih dan kalangan korban dan keluarga korban yang lain melakukan penuntutan pengungkapan kebenaran di meja hukum selalu mengalami kendala. Penegak hukum yang seharusnya berfungsi sebagai algojo keadilan malah berpihak kepada dan melindungi orang-orang yang diduga terkait dengan tindakan pelanggaran HAM berat. Di sini, kasus yang diperjuangkan Sumarsih dan juga kasus-kasus yang lain cenderung dijadikan komoditas politik oleh elit politik di Indonesia sebagai posisi tawar dan menaikkan pamor agar terlihat berpihak kepada mereka yang diambil haknya, terlebih saat karnaval politik pemilihan umum. Namun, hal itu tidak menggoyahkan dirinya untuk terus melawan pengingkaran negara. Ia masih melawan, meskipun dengan cara yang berbeda.

Satu bentuk perlawanan utama yang dilakukan Sumarsih adalah melawan pelupaan dengan mengingat-ingatnya dan membangun situs ingatan dengan beragam media. Di antaranya adalah; pertama, melakukan aksi kamisan (yang diadakan setiap Kamis sore dari jam 16.00-17.00) dengan berdiri diam di depan

35 Ibid

istana negara selama satu jam sejak 2007. Aksi ini terinspirasi oleh ibu-ibu Plaza De Mayo dalam menuntut pengungkapan kebenaran anak, saudara, dan ayah, dan sanak keluarganya yang hilang selama era Junta Militer Marcos. Selain meminta pertanggungjawaban negara atas kejahatan masa lalu, dalam setiap Aksi Kamisan ini peserta aksi, yang kebanyakan berasal dari kalangan korban, keluarga korban, pegiat HAM, dan juga elemen masyarakat yang peduli terhadap penuntasan kasus kejahatan masa lalu, selalu menyuarakan isu-isu dinamika politik kekinian terkait dengan persoalan HAM. Kedua, penggunaan pakaian hitam setiap melakukan aktivitas di luar rumah. Fungsi pakaian itu bagi Sumarsih bukanlah sekedar penutup badan, tapi hal itu sebagai bentuk perasaan duka, ketidakterimaan, dan juga bentuk perlawanan atas kejahatan hitam yang dilakukan oleh aparatus negara. Ketiga, melakukan Tirakat sejak Wawan tertembak. Tirakat adalah satu laku yang dilakukan oleh orang Jawa untuk melakukan usaha keras untuk mendapatkan dan mengharapkan sesuatu yang diinginkan. Nah, Tirakat ini biasanya dengan melakukan puasa, baik itu puasa menahan lapar dan minum, atapun puasa muteh, yang hanya memakan nasi putih tanpa lauk. Keempat, membangun ritus doa di makam Wawan. Bagi Sumarsih, kuburan Wawan itu bukanlah sekedar makam di mana orang terkasih itu meninggal. Tapi, itu menjadi makam keluarga yang juga bagian dari kehidupan Sumarsih, Arief Priyadi, dan Irma. Dalam makam inilah Sumarsih selalu berkunjung ke makam Wawan setiap pagi ketika ingin berangkat melakukan aktivitas sebagai aktivitis HAM. Dengan berdoa kepada Tuhan untuk Wawan dengan doa yang berulang dan serupa, yaitu agar pembunuh Wawan itu segera diungkapkan ke meja hijau.

Tidak dipungkiri, dari sejumlah konsistensi perjuangan sejak Wawan ini ia mendapatkan satu penghargaan atas buah yang ia lakukan selama ini. Tepatnya hari Rabu, 1 Desember 2004, ia ditemui oleh dua orang tamu dari Yayasan Yap Thiam Hien. Dua orang itu memberitahukan bahwa atas pertimbangan dewan juri, ia menerima penghormatan dan penghargaan Yam Thiam Hien Award atas konsistensi memperjuangan HAM khususnya mengenai kasus yang menimpa anaknya. Uang penghargaan yang ia terima itulah yang digunakan untuk melakukan pemberdayaan dan mendukung aktivitas korban dan keluarga korban dalam menghangatkan ingatan mereka melawan lupa dengan beragam media dan cara.

VI. Perihal Mendesak

Bagi Sumarsih, hal utama yang dibutuhkan untuk melakukan re-organisasi dan menguatkan kembali semangat korban adalah dengan memberikan semacam pelatihan pendidikan politik dan hukum. Dengan adanya pelatihan itulah korban dan keluarga korban akan bisa mengerti kasus yang sedang diperjuang-

kannya. Selain itu, korban juga bisa membantu korban-korban yang lain untuk mengadvokasi dirinya. Jika korban sudah memiliki kesadaran atas hukum, niscaya ia tidak akan mudah terperdaya iming-iming yang diberikan oleh pelaku.

Alasan yang dikemukakan oleh Sumarsih ini menjadi satu hal yang wajar. Ini karena, ia bersandarkan pada dirinya, di mana secara intelektual dan pendidikan memang lebih mapan dibandingkan dengan korban dan keluarga korban yang lainnya. Sementara, secara finansial Sumarsih tidak memiliki kekurangan sebagaimana dialami oleh korban dan keluarga korban kebanyakan. Bahkan, karena Arief Priyadi bekerja di CSIS yang memungkinkan untuk mengakses dengan mudah berita-berita yang dihasilkan dari dokumentasi, keluarga Sumarsih dapat dengan mudah isu-isu apa saja yang sedang berkembang terkait dengan kasus yang sedang diperjuangan ataupun kasus-kasus yang terkait dengannya. Karena itu faktor ekonomi bagi Sumarsih bukan menjadi kendala ekonomi. Menurutnya, pelatihan untuk memberdayakan korban dan keluarga korban ini bisa dilakukan secara berkala. Selain dapat mengetahui isu terbaru mengenai kasus yang sedang diperjuangkan, mereka juga mengerti apa itu sebenarnya HAM dan bagaimana harus memperjuangkannya

Satu modal sosial yang dimiliki olehnya dan juga bisa menjadi pendorong bagi kalangan korban yang lain adalah adanya "dendam yang mendalam" atas kehilangan anaknya. Dampak yang dihasilkan dari kehilangan anaknya ini bisa lebih besar ekspresinya bila dibandingkan dengan kasus kejahatan masa lalu di Indonesia, meskipun kasus itu sebenarnya secara korban dan juga stigma yang direproduksi bisa lebih berbahaya dan memiliki kelekangan jangka panjang, bila dibandingkan dengan kasus Semanggi I. Karena itu, dendam inilah yang kemudian menjadi energi positif dirinya untuk terus memperjuangkan kasusnya dan juga kasus-kasus yang lain akibat represi militer Orde Baru dan yang diwariskan olehnya. Dendam itulah yang membuat Sumarsih berani berbicara di depan publik, menulis perihal yang menimpa anaknya, mengorganisir korban yang lain untuk menuntut haknya, serta memberdayakan diri untuk terus belajar terkait dengan isu-isu HAM dan pelanggaran yang diakibatkan oleh aparatus negara di Indonesia.

Perjuangan Yang Belum Selesai

Suciwati
Istri Aktivis HAM Munir

I. Kematian Munir

Terbunuhnya Munir merupakan kehilangan bagi bangsa Indonesia atas putra terbaiknya dalam memperjuangkan nasib masyarakat kecil yang dilanggar hak mereka secara sewenang-wenang oleh para penguasa. Bagi Suciwati, istri almarhum Munir, kematian Munir tidak hanya sebagai kehilangan, namun juga pukulan yang sangat keras yang mempengaruhi kehidupan keluarganya. Paska kematian Munir, Suci berjuang untuk kehidupan dirinya dan dua anaknya. Ia juga berjuang untuk mengadvokasi kasus kematian suaminya dengan kerjasama dengan sahabat-sahabatnya dari lembaga swadaya masyarkat (LSM), melalui lembaga KASUM (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir) dan jaringan baik dalam maupun luar negeri. Perjuangan ini tidak saja untuk pemulihan dirinya sendiri dan keluarganya, namun lebih luas lagi untuk pemulihan masyarakat korban kesewenang-wenangan pihak yang berkuasa, perjuangan yang juga dilakukan Munir ketika masih hidup.

Munir, Suami Suciwati, meninggal pada hari Senin, tanggal 7 September 2004 di pesawat Garuda bernomor penerbangan GA-974 dalam perjalannya menuju negera Belanda untuk melanjutkan studi. Pada tanggal 6 September Munir berangkat menuju bandara Soekarno Hatta, Cengkareng dengan diantar oleh istrinya, Suciwati, dan beberapa rekannya dari Imparsial dan KontraS. Pesawat Garuda yang ditumpanginya berangkat pada pukul 21.55 WIB menuju Amsterdam yang dijadwalkan tiba di sana pada tanggal 7 September pukul 08.10 waktu setempat. Ketika boarding memasuki koridor pesawat Munir disambut oleh salah seorang crew Garuda yang tengan menjadi extra crew/aviation security bernama Polly Carpus Budihari Priyanto, mengajaknya berbincang dan menawarkannya untuk duduk di kursi 3 K kelas bisnis kendatipun tiket yang dibeli Munir adalah untuk kelas ekonomi.

Dalam perjalanan dari Jakarta hingga transit di bandara Changi, Singapura pada hari Selasa pukul 00.40 waktu setempat, Munir sempat menikmati hidangan dalam pesawat antara lain jus jeruk, mie dan irisan buah segar. Setelah transit selama satu jam sepuluh menit, pesawat melanjutkan perjalanan ke Amsterdam pada pukul 01.50 waktu setempat. Lebih kurang 40 menit setelah pesawat take off , Munir yang duduk di kursi 40 G kelas ekonomi terlihat menuju toilet. Selanjutnya Munir mendatangi pramugara Bondan Hernawa, menyampaikan bahwa dia sakit dan ingin bertemu dengan dokter Tarmizi, kenalan dalam perjalanan, yang duduk di kursi 1J. Munir menyampaikan pada dokter bahwa dia telah muntah sebanyak 6 kali, lalu Munir dipindah ke kursi nomor 4 kelas bisnis supaya dekat dengan tempat duduk dokter Tarmizi. Selama itu Munir mengalami muntah dan buang air besar berkali-kali walaupun sudah diberi obat diare, susu dan air garam. Selanjutnya dokter Tarmizi memberikan suntikan yang membuatnya kembali tenang. Namun dua jam sebelum mendapat di

bandara Schippol, Amsterdam; sekitar pukul 04.05 UTC (diperkirakan di atas Negara Rumania) atau pukul 08.00 waktu setempat, Munir diketahui telah meninggal dunia.

Berita kematian Munir disampaikan oleh pihak Garuda kepada kantor KontraS pada tanggal 7 September 2004 tersebut. Mouvty Maakarim, salah seorang aktivis KontraS, selanjutnya menyampaikan berita duka tersebut kepada Usman Hamid, Koordinator Umum KontraS, yang saat itu sedang menjadi salah satu pembicara dalam seminar mengenai RUU TNI. Usman kemudian menyampaikan berita ini kepada Suciwati, istri almarhum Munir. [1]

I.1. Munir: Korban Pelanggaran HAM

Kematian Munir bukan diakibatkan oleh pembunuhan biasa, tidak seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang pertama terhadap terdakwa Pollycarpus Budihari Priyono pada tanggal 9 Agustus 2005, satu setahun setelah Munir dibunuh di atas pesawat Garuda dalam perjalannya dari Changi Singapura menuju Schippol Belanda pada 7 September 2004. Kematian Munir merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh orang-orang yang terganggu dengan perjuangannya. Tindakan pembunuhan ini melibatkan lembaga dan fasilitas negara. Ini terungkap dalam temuan Tim Pencari Fakta (TPF) terbunuhnya Munir yang, sekalipun belum dibuka untuk umum sampai penelitian ini dibuat, telah memberikan rekomendasi kepada tim penyidik kasus Munir untuk memeriksa pihak-pihak dari pejabat PT Garuda dan BIN (Badan Inteljen Negara). Temuan TPF tersebut dibahas dalam eksaminasi publik atas pengadilan kasus Munir pada tahun 2007. Eksaminasi publik tersebut membahas perihal pengabaian dalam proses peradilan kasus Munir terhadap beberapa fakta yakni mengenai hubungan Pollycarpus dengan Muchdi Purwopranjono, seorang pejabat BIN. Hubungan tersebut ditemukan dari bukti kontak melalui telepon genggam milik Pollycarpus ke kantor BIN atau ke nomor selular Muchdi Pr. Dan fakta adanya hubungan para pihak dalam BIN dan PT. Garuda, meskipun fakta-fakta tersebut muncul di persidangan.

Kelemahan penyidikan dengan mengabaikan fakta-fakta hubungan para pihak baik dari BIN maupun PT Garuda mengarahkan penyelesaian kasus pembunuhan Munir sebagai kriminal biasa (personal crime), bukan pembunuhan secara sistematis dan terencana (konspirasi).

Pada tingkat pembuktian di pengadilan juga terdapat pengabaian atas fakta-fakta yang penting. Meskipun putusan pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi membuktikan bahwa Pollyycarpus bersalah

1 Tim KontraS, Bunuh Munir, Sebuah Buku Putih, pen. Kontras, cet.I, Jakarta, 2006, hal.21-33.

atas perannya dalam pembunuhan berencana terhadap Munir, namun putusan ini dibangun atas fakta yang kurang tergali. Menurut hasil eksaminasi publik tersebut, 'unsur terencana' dalam pembuktian itu dibangun di atas asumsi bahwa rencana pembunuhan itu dirancang di atas pesawat Garuda dari Jakarta menuju Singapura. Sehingga pihak yang terlibat dalam perencanaan hanya sebatas pada orang-orang yang ada dalam pesawat Garuda dari Jakarta menuju Singapura tersebut. Pengadilan negeri tidak menggali dengan sungguh-sungguh terhadap serangkaian fakta mengenai adanya komunikasi antara terdakwa Pollycarpus dengan personel BIN, keberadaan terdakwa di Singapura yang relatif singkat dan tanpa tujuan yang jelas, serta motivasi terdakwa menggunakan surat palsu ke Singapura.

Pengadilan tingkat kasasi di MA yang membebaskan tuntutan atas terdakwa Pollycarpus pada 3 Oktober 2006, 2 tahun setelah terbunuhnya Munir, menurut hasil eksaminasi publik atas persidangan kasus Munir juga memiliki kelemahan dan turut andil dalam mengaburkan fakta pembunuhan berencana atas Munir. Dalam amar putusan mengenai pembebasan Pollycarpus dari tuntutan pengadilan sebelumnya, MA hanya menggali kebenaran formil dan tidak memperhatikan pada kebenaran materiil dari substansi persidangan. MA dalam hanya memerankan diri sebagai judex juris yang mestinya dapat memerankan diri sebagai judex factie. Putusan MA hanya memutuskan Polly bersalah dalam pembuatan surat palsu, namun MA tidak menggali siapa yang membuat surat palsu tersebut. Putusan salah atas penggunaan surat palsu juga diputuskan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan pembunuhan Munir melalui racun arsenik yang dalam putusan pengadilan pertama disebutkan, ditaburkan ke mie goreng yang disantap oleh Munir sehingga masuk ke perut dan mengakibatkan kematiannya. Siapa yang membuat surat palsu, untuk apa pilot senior Garuda membawa surat palsu ke Singapura dengan tujuan yang kurang jelas tersebut, tidak kunjung digali. Putusan hukum MA ini menjadi ketidakpastian hukum dalam kasus Munir.

I.2. PK atas Putusan Bebas terhadap Pollycarpus

Putusan bebas mendapatkan respon dari berbagai pihak baik nasional maupun internasional yang menyatakan kekecewaan mereka. Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan dan beberapa anggota parlemen lainnya menyatakan akan mempertimbangkan pembentukan lagi panitia kerja kasus Munir dengan kewenangan yang lebih kuat dari tim sebelumnya untuk pemantauan kasus Munir. Ketua Komisi Yudisial mempertanyakan keputusan MA yang dinilai janggal. Dubes AS untuk Indonesia, B. Lynn Pascoe juga turut menyayangkan penanganan kasus Munir oleh pihak berwenang Indonesia.

Terlepas dari respon sosial dan politik yang ada, pihak kepolisian dan kejaksaan

masih memiliki keyakinan bahwa Pollycarpus terlibat dalam pembunuhan Munir. Oleh karena itu mereka berencana mengumpulkan bukti baru untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK).[2] Salah satu bukti tersebut didapat dari penyidikan di AS, melalui kerjasama dengan FBI berupa hasil rekaman telepon Pollycarpus dan Muchdi Pr.

Sidang pertama PK kasus Munir dilakukan pada 16 Agustus 2007, satu tahun setelah vonis bebas terhadap terdakwa Pollycarpus, sampai dengan sidang ke 15 terakhir pada tanggal 25 Januari 2008 menghasilkan putusan vonis terbukti bersalah terlibat dalam pembunuhan berencana bagi Pollycarpus dengan hukuman 20 tahun penjara.

Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan menyeret beberapa nama saksi yang akhirnya menjadi terdakwa dalam pengadilan antara lain Indra Setiawan (Direktur Utama PT. Garuda saat itu), Rohainil Aini, Ramelgia Anwar (Vice President untuk keamanan PT Garuda) dan Muchdi Purwopranjono (mantan Deputi V BIN). Selain mereka masih banyak saksi yang dipanggil baik dari pihak Garuda maupun BIN yang intinya adalah menguatkan bahwa Munir merupakan korban pembunuhan berencana.

II. Perjuangan untuk Memenangkan Nilai-Nilai HAM

Suciwati memperjuangkan penuntasan kasus Munir, tidak saja untuk pemulihan diri dan keluarganya, namun juga untuk memenangkan para korban dari kesewenang-wenangan pihak yang berkuasa secara sosial, politik, ekonomi dan keamanan dalam kehidupan masyararakat berbangsa dan bernegara. Aktivitasnya diperkuat dan didukung oleh Komite Aksi untuk Solidaritas Munir (KASUM). Bersama KASUM, ia terus mengawal perjuangan menuntut penuntasan kasus Munir. Hal itu dapat dilihat dari perjuangannya sejak pencarian kepastian informasi mengenai meninggalnya Munir, almarhum suaminya, hingga mengawal advokasi untuk menuntut keadilan dalam seluruh tingkat peradilan.

Suciwati juga melakukan banyak hal lain seperti lobi, audiensi maupun menggalang dukungan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Aktivitasnya dalam advokasi tidak sekedar untuk pembelaan kasus Munir, namun sekaligus untuk mempromosikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan membuktikan dirinya sebagai pembela HAM (*human rights defenders*).

2 Dalam Kronik Munir, berita ini disebutkan pada tanggal 26 Desember 2006, 3 bulan setelah putusan bebas Pollycarpus pada tanggal 3 Oktober 2006.

Tuntutan kepada Para Penguasa[3]

Suciwati adalah seorang pejuang yang sangat berani. Demi untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menuntut keadilan atas kematian Munir, suaminya, ia melakukan kunjungan, lobi sampai dengan menuntut para penguasa supaya serius dalam menangani kasus Munir. Hal tersebut dilakukan tanpa henti dan tanpa lelah sejak tahun kematian Munir 2004 hingga saat laporan ini ditulis, Mei 2009.

Pada tahun 2004, setelah lama menunggu kepastian penyebab kematian suaminya, ia mendapat informasi dari media Belanda bahwa hasil otopsi Munir oleh Institut Forensik Belanda (NFI membuktikan bahwa Munir meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal. Sehari setelah kabar diterima, 12 November 2004, ia pun mendatangi Mabes Polri untuk meminta hasil otopsi walaupun hasilnya gagal. Sejumlah LSM saat itu menggelar siaran pers bersama di kantor KontraS mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi, menyerahkan hasil otopsi kepada keluarga, dan membentuk tim penyelidikan independen yang melibatkan kalangan masyarakat sipil. Saat itu Presiden SBY berjanji akan menindaklanjuti kasus pembunuhan Munir. Pada tanggal 24 November selanjutnya Suciwati bersama beberapa aktivis LSM bertemu dengan Presiden SBY di Istana Negara dengan hasil Presiden berjanji akan membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus Munir.

Beberapa kronik tuntutan Suciwati terhadap para penguasa yang terpapar ini hanyalah sebagian saja apa yang telah dilakukannya yang sempat terdokumentasi. Apa yang telah dilakukan Suciwati sebagian memberikan hasil positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap penuntasan kasus Munir. Pada tahun kedua kematian Munir, tepatnya pada tanggal 18 Juli 2005, Suciwati menyatakan kekecewaannya terhadap Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jendral Polisi Sutanto. Hal ini disampaikan untuk mendorong penuntasan kasus Munir paska bekerjanya Tim Pencari Fakta (TPF) bentukan Presiden yang telah memberikan rekomendasi penyidikan kepada polisi terhadap pihak-pihak terkait, namun tidak dijalankan.

Pada tahun 2006 tidak kurang dari 4 kali Suciwati bertemu dengan para pejabat. Ia bersama dengan Usman Hamid pada bulan Januari bertemu dengan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh untuk meminta supaya rekaman percakapan Muchdi-Pollycarpus dibuka oleh perusahaan telekomunikasi. Hal ini dilakukan setelah ditemukannya bukti baru oleh polisi diantaranya adalah, adanya kontak nomor telepon genggam Pollycarpus dan Muchdi PR. Rekaman ini

3 Kronik Kasus Munir, data base advokasi Munir Komite Solidaritas untuk Advokasi Munir (KASUM) per Mei 2009.

sangat penting untuk menggali keterlibatan berbagai pihak dalam konspirasi pembunuhan Munir. Bulan Februari Suciwati dan sejumlah aktivis LSM bertemu dengan DPR, dan meminta DPR untuk menggunakan hak interpelasinya berkait guna lebih menekan pemerintah untuk menuntaskan kasus Munir. Sampai saat itu, dua tahun setelah kematian Munir, baru ada dua orang tersangka yang dijerat hukum yakni Pollycarpus dan Ramelgia Anwar.

Pada bulan Mei di tahun yang sama Suciwati bertemu dengan Wakapolri, Komjen Pol Adang Darajatun di Mabes Polri. Ia mengatakan bahwa Polri telah memeriksa sejumlah saksi baru paska disebutkannya beberapa pihak dalam putusan pertama untuk terdakwa Pollycarpus. Kemudian bulan Juni berikutnya Suciwati bertemu dengan Ketua MA, Bagir Manan untuk meminta MA melengkapi pemeriksaan saksi atau barang bukti yang tidak dilengkapi di dua tingkat pengadilan sebelumnya.Pada Juni tahun 2008, Suciwati menelpon Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri, dan mendapat kabar dari pihak Mabes Polri mengenai rencana penangkapan Muchdi PR. Suciwati bersama kabareskrim berencana mengadakan pertemuan setelah itu.

II.1. Menggalang Dukungan Regional[4]

Suciwati tidak hanya membuktikan diri sebagai seorang pejuang HAM di dalam negeri, namun juga aktif memberikan dukungan bagi keadilan dan promosi hak asasi manusia di tingkat regional Asia. Pada bulan Maret 2006, Suciwati bersama dengan beberapa perwakilan LSM seperti KontraS, IKOHI, Imparsial, dan satu aktivis HAM Thailand mendatangi Kedutaan Besar Thailand. Tujuan kedatangan ini adalah untuk menyampaikan rasa solidaritas dan meminta pemerintah Thailand untuk mengungkap kematian atau penghilangan Somchai Neelaphaijit. Somchai adalah aktivis HAM muslim terkenal di Thailand yang hilang sekitar dua tahun yang lalu. Sampai saat itu pengadilan sudah digelar untuk beberapa pelaku, namun masih ada pelaku lain yang belum diusut.

Pada tanggal 20 Juli 2006 Suciwati bersama Angkhana Neelaphichit, istri Somchai Neelaphaichit memulai rangkaian kampanye perlindungan para pejuang HAM dengan mengambil tema Borderless Struggle di tingkatan region Asia Tenggara. Rangkaian kampanye ini terdiri atas berbagai kegiatan, mulai pertemuan solidaritas antar korban pelanggaran HAM, audiensi dengan institusi negara, dan mengeluarkan pernyataan politik bersama.

4 Data base kasus Munir KASUM, 2009

II.2. Menggalang Dukungan Internasional

Kasus Munir adalah salah satu kasus yang mendapatkan perhatian sangat besar dari komunitas internasional. Kasus Munir dianggap sebagai ukuran dari keseriusan pemerintah Indonesia dalam menuntaskan masalah pelanggaran HAM di Indonesia. Hal ini tidak saja karena Munir adalah figur aktivis pejuang HAM yang dikenal luas secara internasional, namun juga karena dukungan kampanye dan penggalangan dukungan internasional yang dilakukan Suciwati bersama jaringan LSM.

Pada bulan April 2005, Suciwati menyatakan dalam siaran pers bahwa kasus Munir telah mendapat dukungan dari komunitas internasional, termasuk Ketua Komisi HAM PBB. Hal ini merupakan hasil kunjungan kampanyenya di Eropa yang didukung oleh Makarim Wibisono, pelobi internasional dari Indonesia untuk masalah pelanggaran HAM. Hal ini dilakukan bertepatan dengan sulitnya TPF dalam menyidik pihak pejabat BIN sehingga dibuat kesepakatan adanya tim khusus TPF dan BIN. Pada bulan November di tahun yang sama terdapat enam puluh delapan orang (68) anggota Konggres Amerika Serikat mengirimkan surat kepada Presiden SBY agar segera mempublikasikan laporan TPF. Para anggota Konggres AS tersebut mempertanyakan keseriusan pemerintah RI dalam menuntaskan kasus Munir.

Pada tahun 2006, Suciwati kembali melakukan serangkaian kampanye penggalangan dukungan internasional. Pada bulan Juli bersama Usman Hamid, ia melaporkan hasil kampanye kasus Munir di Eropa kepada publik melalui siaran pers. Hasilnya, Parlemen Uni Eropa berjanji memonitoring kasus Munir dan menyatakan kecewa atas kinerja pemerintah RI. Pada bulan Oktober di tahun yang sama, Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, B. Lynn Pascoe menyayangkan penanganan kasus Munir oleh pihak berwenang Indonesia. Hal ini merupakan respon atas putusan bebas terhadap terdakwa Pollycarpus di tingkat kasasi MA, di yang sama.

Pada bulan Oktober tersebut Suciwati terbang ke Amerika Serikat untuk menerima penghargaan Human Rights Award oleh Human Rights First di New York. Selama di Amerika Serikat, ia juga bertemu dengan beberapa anggota Kongres, Senator, pejabat Pemerintah AS, dan Philip Alston, UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, yang menyatakan kesediaannya untuk ikut membantu Pemerintah RI dalam kasus Munir. Kunjungan itu disambut oleh media setempat, yaitu The New York Times yang mengulas kasus Munir dalam editorialnya dengan tajuk Poisened Justice.

Pada tahun 2007, terdapat beberapa acara internasional yang memberikan respon terhadap kasus Munir. Bulan Maret pada tahun itu Philip Alston, Pel-

apor Khusus untuk isu Eksekusi di Luar Proses Hukum dan Semena-mena, menyampaikan keprihatinannya atas penanganan Pemerintah RI atas kasus Munir dalam Sidang ke 4 Dewan HAM PBB. Kasus Munir menjadi salah satu fokus utama kerjanya. Hal ini juga dilakukan oleh Pelapor Khusus lainnya yang menyampaikan keprihatinan yang sama di muka Dewan HAM PBB yaitu oleh Hina Jilani (pelapor utama *Human Rights Defender*) dan Leandro Despouy (pelapor utama Kemandirian Hakim dan Pengacara).

Pada bulan Juni tahun yang sama terdapat kunjungan kerja (*country visit*) dari *Special Representative of the Secretary General* untuk isu *Human Rights Defender,* Hina Jilani ke Indonesia. Hina Jilani mendatangi kantor KontraS/KASUM bertemu dengan Suciwati dan aktivis KASUM untuk membicarakan soal perkembangan kasus Munir. Dalam pertemuan tertutup itu Hina Jilani menyatakan bahwa ia mengetahui betul perkembangan kasus Munir dan merasa aneh mengapa Pemerintah RI tidak juga bisa menuntaskannya selama hampir 3 tahun.

Pada bulan berikutnya, Komisioner Tinggi HAM PBB, Louis Arbour juga melakukan kunjungan ke Indonesia. Arbour mempertanyakan penanganan kasus Munir karena kasus ini menjadi simbol bagaimana negara menghadapi kasus-kasus serius. Menurutnya kasus Munir sudah menjadi sorotan komunitas internasional. Louis Arbour juga sudah mempertanyakan langsung kasus Munir kepada Presiden SBY, Polri, dan Departemen Luar Negeri RI. Bulan September 2007, sejumlah anggota Parlemen Uni Eropa menyatakan tekad mereka untuk mengangkat kasus pembunuhan Munir dalam persidangan mereka. Bahkan, mereka juga berencana membentuk tim khusus untuk memonitor pengungkapan kasus tersebut.

Pada tahun 2008 dan 2009 dukungan internasional tidak surut setelah proses penanganan hukum atas kematian Munir mengalami penigkatan sekalipun sangat terlambat. Hal ini ditandai dengan putusan PK atas Pollycarpus yang menjatuhkan putusan penjara 20 tahun, lebih tinggi dari putusan tingkat pertama dan banding. Prestasi kedua adalah diseretnya beberapa pihak dan pejabat BIN dalam persidangan Muchdi Pr. Penghujung tahun 2008, Muchdi Pr divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sangat mengecewakan semua pihak. Namun upaya lebih lanjut masih terus dijalankan sampai sekarang. Hal ini karena majelis hakim lebih memperhatikan pada keterangan terdakwa daripada keterangan para saksi. Sampai laporan ini ditulis, proses hukum selanjutnya terhadap Muchdi PR masih berjalan.

Dalam konteks ini, pada bulan Juni 2008 Suciwati dan Usman Hamid menemui anggota Parlemen Inggris untuk mencari dukungan penyelesaian kasus kematian Munir. Pada awal tahun 2009, PBB menyatakan tetap memantau kasus Munir. Pelapor khusus PBB, Margaret Sekaggya juga menyampaikan rasa

prihatinnya atas vonis bebas terhadap Muchdi PR

III. Penghargaan sebagai Pejuang HAM

Perjuangan Suciwati pada akhirnya didengarkan oleh masyarakat. Beberapa pihak baik nasional maupun intenasional memberikan penghargaan atas upayanya yang gigih dalam memperjuangkan kasus Munir. Berikut ini adalah beberapa penghargaan yang sempat didokumentasikan oleh KASUM. Pada tanggal 5 Okt 2005. Suciwati mendapat penghargaan dari Time Asia Magazine sebagai salah satu Asia's Heroes tahun ini. Tahun berikutnya pada tanggal 15 oktober 2006.[5] Suciwati menerima penghargaan Human Rights Award oleh Human Rights First di New York. Penghargaan itu juga disampaikan sekaligus kepada Munir, almarhum suami Suciwati. [6]

III.1. Jajak Masa Lalu Suciwati

Suciwati telah membuktikan dirinya sebagai pejuang kemanusiaan dan telah mendapatkan penghargaan internasional atas pekerjaannya setelah kematian Munir, suaminya. Suciwati menjadi pejuang HAM bukan berasal dari ruang kosong, namun jejak masa lalu Suciwati turut memberikan dukungan terhadap aktivitasnya. Bagaimana sosok Suciwati di masa sebelum dikenal menjadi pejuang HAM, di bawah ini akan mengulas mengenai latar belakang Suciwati menjadi aktivis dan pejuang HAM.

Suciwati lahir di kota Batu Malang pada tanggal 28 Maret 1968. Suci, nama panggilan Suwicati, merupakan anak ke empat dari lima bersaudara. Dari lima saudara ini empat orang di antaranya adalah perempuan dan satu orang laki-laki. Dia dibesarkan dalam keluarga pedagang, di kampung Mergosono tidak jauh dari Kota Malang Jawa Timur. Ayahnya adalah seorang pedagang yang berpendirian keras dan berdisiplin tinggi dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang sangat menyayangi dan melindungi anak-anaknya.

Ayah dan ibunya tidak pernah mengenyam pendidikan formal, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan baca tulis, sekalipun sang ayah bisa membaca. Meskipun demikian mereka sangat cakap dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Sang ayah akan memastikan anak-anak perempuan pulang sebelum malam tiba. Dia akan mengunci pintu jika waktu sudah menunjukkan pukul sembilan malam, dan siap menanyakan alasan jika anaknya terlambat

5 Dari data base KASUM, Kronik Munir 2004-2009, Mei 2009. Berita ini juga dapat dilihat pada http://www.mail-archive.com/proletar@yahoogroups.com/msg12075.html, diunduh pada Kamis, 4 Desember 2008, pukul 13.35

6 http://www.rakyatmerdeka.co.id/?pilih=lihat_edisi_website&id=121

pulang atau menyiramkan air ke tubuh mereka sebagai hukuman. Sang ayah mengajari anak-anaknya berdisiplin dan tanggungjawab. Tidak ada pembedaan tugas untuk anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Mereka harus mencuci piring sendiri setelah makan, mereka harus menyapu lantai, membersihkan rumah dan pekerjaan rumah lainnya. Sang ayah sendiri memberi contoh langsung mengenai pekerjaan-pekerjaan ini. Sang ayah juga terbiasa masak sendiri tanpa harus menunggu ibu memasak jika sedang menginginkannya.

Dengan pendidikan keluarga ini, Suciwati dan saudara-saudaranya belajar bebas dan mandiri. Ayahnya akan menghargai pilihan anaknya setelah mereka bertanggungjawab atas tugas-tugas mereka. Ayahnya juga tidak membatasi anak-anaknya untuk beraktivitas di luar, yang penting pada waktunya pulang harus sudah ada di rumah. Anak-anak juga bebas memilih mainan mereka. Empat saudara perempuan ini tak pelak hampir berkarakter kelelakian alias *tomboy*. Mereka memilih mainan apa saja, bahkan mereka lebih suka mainan anak-anak laki-laki daripada anak perempuan, misalnya *umbul* (kartu berukuran kecil bergambar tokoh-tokoh dongeng anak-anak yang biasa untuk bermain semacam undian di antara anak-anak). ”Kami memiliki masa kecil yang bahagia” kata Suciwati.

Meskipun demikian, Suciwati kecil sering mengeluh dengan sikap kolot ayahnya terhadap teman-temannya lain jenis. Ayahnya akan melarangnya jika ingin belajar bersama dengan mereka. ”Kalau ingin belajar, belajar saja sendiri di rumah!” katanya. Hal yang sangat merepotkan Suci adalah ketika ada teman laki-laki berkunjung ke rumah. Ayahnya akan bersikap curiga dan siap mengajukan pertanyaan kritis ”Siapa kamu? Mau apa main ke rumah?” Suci sering mengeluh ”Kapan ya, punya bapak yang baik hati?” ungkapnya.

Untungnya sang ibu dapat mengimbangi sikap keras sang ayah. Ibu akan selalu melindungi anak-anaknya jika sang ayah marah kepada mereka. Jika kemarahan ayah tidak terlalu beralasan, ibu yang akan menahan ayah untuk marah. Biasanya sang ayah akan diam menghadapi kritik ibu jika memang merasa bersalah. ”Ibuku sangat baik hati,” tambah Suciwati.

Suatu saat bisnis sang ayah mengalami kebangkrutan karena tertipu oleh rekanan bisnis. Oleh karena itu tidak semua saudara Suciwati dapat melanjutkan sekolah. Setelah menyelesaikan bangku sekolah SMA, mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi kecuali Suciwati seorang. Anak-anak di sekitar tempat tinggal Suciwati juga mayoritas tidak meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Suciwati melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi karena memiliki prestasi di atas rata-rata saudaranya.

III.2. Pribadi Keras yang Berprestasi

Sejak kecil Suciwati sudah memiliki prestasi bagus dalam pendidikan. Suci merupakan satu dari dua orang di kampungnya yang dapat lolos masuk di sekolah negeri, yang lainnya di sekolah swasta. Sekolah negeri pada era tahun 80an, merupakan simbol kemajuan pendidikan di Indonesia secara umum, juga di kota Malang tempat tinggal Suciwati. (referensi tambahan). Dia selalu belajar di sekolah terfavorit baik di sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama. Nilainya selalu bagus, dan dia selalu mendapatkan rangking antara 1-5. Oleh karena itu, sebetulnya dia memiliki kesempatan untuk meneruskan di sekolah terfavorit di kotanya, SMA II Malang. Namun karena suatu alasan dia memilih bersekolah di Sekolah Pendidikan Guru (SPG), sebelum akhirnya melanjutkan ke jurusan Sastra dan Bahasa Indonesia, di IKIP Malang.

Suciwati selalu menonjol tidak saja pada prestasi belajar, namun juga pada pergaulan dengan teman-teman sekolahnya. Dia hampir selalu diminta untuk menjadi ketua kelas atau setidak-tidaknya pengurus kelas. Hal ini dialami sejak di bangku Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Ketika duduk di bangku SMP, Suciwati mulai sadar bahwa menjadi ketua kelas hakikatnya adalah suruhan guru atau teman-teman lainnya, namun dia sadar juga bahwa posisi itu sebenarnya bermanfaat. Maka sejak itu dia selalu menolak untuk menjabat sebagai ketua kelas, paling tinggi dia mau menjadi wakil ketua kelas. Dia juga aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler pramuka ketika duduk dibangku SPG. Prestasinya dalam pramuka mengantarnya untuk menjadi salah satu dari tiga orang pertama yang diangkat sebagai Pandega (pembina) di Malang dan juga menduduki jabatan Sekretaris Saka Bahari Detasemen Angkatan Laut Malang, yang karenanya sering menjadi perwakilan untuk pertemuan tingkat wilayah provinsi Jawa Timur. Karena pengalaman itu, dia pernah ditawari masuk sebagai staf Komando Angkatan Laut (Kowal), oleh komandan yang dikenalnya saat aktif di pramuka, walaupun dia tidak menerimanya.

Selain berprestasi dalam belajar dan bergaul, Suciwati juga kritis terhadap berbagai hal yang mengganggunya. Hal ini ditunjukkan sejak mula dia belajar di Sekolah Dasar. Ada seorang siswa laki-laki yang dikenal sebagai anak badung di kelasnya. Anak itu kerap merepotkan sehingga tidak disukai oleh seorang guru. Ketika anak itu dipindahkan tempat duduknya sebangku dengan Suci, kedua anak ini mulai bersahabat meskipun sering berantem. Sebetulnya anak itu tidak bodoh, sehingga ketika anak itu mendapatkan nilai buruk dia bingung. Maka dia ingin mengecek apakah pekerjaannya ada yang salah. Teman-teman lain menolaknya ketika ingin mencocokkan jawaban di lembar ujiannya, maka Suci menunjukkan lembar pekerjaannya. Dari situ dia tahu bahwa dia telah mendapatkan nilai yang salah dan tidak sesuai dengan hasil yang sesungguhnya. Namun dia tidak bisa berbuat apa, sampai Suciwati memintanya

untuk melapor ke guru yang bersangkutan.

Mereka datang berdua ke ruang guru. Tujuan mereka adalah untuk bertemu dengan Kepala Sekolah. Anak-anak sekelas rupanya juga mengikuti mereka. Namun rupanya mereka tidak diterima di ruang guru karena ruang tersebut buru-buru ditutup. Anak-anak itu dengan spontan meneriakkan *yel-yel*, mengungkapkan kecurangan guru tersebut sambil memukul apa saja yang ada di tangan mereka. Sampai akhirnya Kepala Sekolah keluar ruangan dan meminta mereka masuk kelas lagi. Nilai teman sebangku Suci akhirnya berhasil dikoreksi dan diperbaiki sesuai dengan hasil ujiannya. Suciwati yang masih anak kecil itu telah memimpin suatu protes dan berakhir dengan demonstrasi menuntut perbaikan nilai seorang teman sekelas mereka. Ketika Munir, mendengar cerita ini dia hanya berseru gemas merasakan kenekatan anak-anak yang dipimpin istrinya itu. ”Dasar!” ungkapnya sambil tersenyum, ingat Suci.

Suciwati juga pernah protes kepada gurunya saat mendapatkan nilai 7 untuk pelajaran bahasa Inggris di ujian akhir SMP. Dia merasa nilai itu salah, karena sepanjang riwayat ujian sekolah dia tidak pernah mendapatkan nilai dibawah angka 8 untuk pelajaran bahasa Inggris, bahkan kadang ia bisa memperoleh nilai 10. Maka dia kecewa, marah dan protes meskipun tanpa hasil dan malah dimarahi oleh sang guru.

III.3. Kegelisahan Keyakinan

Suci kecil adalah anak yang rajin beribadah. Dilahirkan dari keluarga Kristen yang taat, setiap minggu bersama keluarga mereka pergi ke Gereja Kristen Baptis, tidak jauh dari gedung Sekolah Dasar tempat Suci belajar. Kadang-kadang kalau mereka bosan, mereka pergi ke Gereja Isa Al-Masih yang juga tidak jauh jaraknya. “Aku kadang digendong sama kakakku, kadang berjalan kaki.” kenang Suci.

Selain ke gereja, Suciwati juga suka mengikuti pelajaran agama. Banyak pertanyaan yang mengganggunya berkait dengan keyakinan mengenai ketuhanan. ”Kenapa aku memiliki tiga Tuhan, kenapa Tuhan diwujudkan dalam diri seorang Yesus, apa perbedaan beliau dengan manusia lain?’ Suci kecil mencari jawaban dari pertanyaan yang tidak mudah ini. Karena di kelasnya hanya ada pelajaran agama Islam, maka ketika mata pelajaran agama Islam dia dibebaskan untuk tidak mengikuti sesi kelas. Namun Suci kecil tidak mau keluar kelas, dia ingin mendengarkan pelajaran agama dari Ibu Mudjayanah, guru agama Islam di kelasnya. Dia semakin tertarik dengan pelajaran agama Islam ketika ibu guru menceritakan tentang kisah nabi-nabi dalam Islam. Informasi-informasi dalam agama Islam itu diolahnya dengan caranya sendiri di dalam hatinya, dan pada akhirnya dia merasa mendapatkan jawaban-jawaban apa yang dia

gelisahkan dalam keyakinan agamanya. Secara mengejutkan Suci kecil, yang saat itu masih berada di bangku SD kelas 4, menyatakan ingin masuk Islam, dan meminta gurunya untuk mengislamkannya.

Ayahnya menentang keras keputusan Suci kecil, marah-marah dan *uring-uringan.* Dalam keadaan seperti ini ibu yang menetralkannya. Suci tetap dimengerti, dilindungi, dan didukung. "Ini adalah keyakinan, soal panggilan hati", tegas Suci saat itu. Keluarga pun akhirnya bisa menerima keyakinan barunya itu. Akhirnya Suci memperdalam pengetahuan agamanya ke rumah Ibu Mudjayanah yang tinggal sedesa dengannya. Dia belajar mengaji, menghapalkan doa-doa dan dzikir, sehingga membuat banyak temannya merasa malu karena kendatipun sudah memeluk Islam sejak lahir tapi tidak sebaik Suci yang mualaf (orang yang baru masuk Islam) dalam menghapalkan doa.

III.4. Membenci Kekerasan

Di saat kecil Suci hidup dan bergaul dengan para sahabat di kampung Mergosono. Kampung ini pada tahun 1980-an menjadi semakin ramai, karena dibangunnya jalan baru yang membelah desa ini menjadi dua. Jalan ini yang menghubungkan kota Malang dan Surabaya. Perubahan ini dibarengi dengan pemekaran wilayah desa menjadi dua di kanan dan kiri jalan, di kampung tempat tinggal Suci tetap bernama Mergosono dan kampung sebelahnya diberi nama baru, desa Ciptomulyo. Pada tahun-tahun tersebut terjadi perpindahan penduduk suku Madura dari Kalimantan karena konflik etnis.[7] Mereka banyak menduduki tanah-tanah di dua desa tersebut, sehingga tanah-tanah yang tadinya lapang mulai sesak dengan penduduk.

Desa Mergosono tempat Suci tinggal juga sangat terkenal karena anak-anak mudanya yang berandalan. Mereka sering berantem satu sama lain, terutama ketika ada keramaian perayaan atau konser musik. Suciwati sangat senang dengan konser musik, terutama jika dibawakan lagu-lagu tokoh idolanya saat itu, Iwan Fals. Namun dia juga membenci keramaian, karena hampir selalu

7 Konflik antara suku Madura dan Dayak di Kalimantan memiliki sejarah panjang. Kerusuhan berbasis etnis ini sudah terjadi sejak tahun 30-an sejak yang berskala kecil hingga yang melibatkan kerusuhan massa keduanya. Konflik meningkat setelah adanya arus pendatang cukup besar dari Madura sejak tahun 50-an. Tidak kurang dari 10 kerusuhan besar yang melibatkan massa yang saling berperang sejak tahun 1950-an hingga tahun 2001. pada tahun 1950 terjadi sekali, tahun 60-70- terjadi 2 kali, tahun 70-80 terjadi 3 kali, tahun 80-90 terjadi sekali, tahun 90-2000 terjadi tiga kali dan tahun 2001 terjadi sekali (lihat http://mobile.liputan6.com/?c_id=8&id=9009). Dalam kerusuhan Sampit pada tahun 2001 tidak kurang dari 125.969 jiwa atau 31.398 kepala keluarga (KK) menjadi korban yang mengungsi di sekitar daerah Tapal Kuda Jawa Timur, termasuk Malang (lihat http://kabarmadura.blogspot.com/2007/06/mencermati-kondisi-sosial-budaya.html,).

ada tawuran jika ada keramaian. Hal yang paling dia benci adalah tindakan pelecehan terhadap perempuan yang tidak bisa dilepaskan dari kondisi keramaian. Sejak itu Suci belajar mulai tidak suka dengan keramaian karena adanya kekerasan yang pelecehan yang hampir selalu terjadi di tempat seperti itu.

III.5. Bila Pekerjaan Datang

Riwayat pekerjaan. Pada saat menjelang lulus SPG, dia telah ditawari untuk bekerja menjadi guru bersama tiga teman lainnya di sebuah sekolah favorit yaitu di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang yang menjadi sekolah percontohan nasional, bahkan dibuat sebagai bahan studi banding sekolah di Australia. Beberapa guru memintanya untuk mengajar, dan jika dia mau saat itu lulusan SPG langsung diangkat menjadi PNS. Tapi karena dia ikut UMPTN dan diterima di IKIP jurusan Sastra dan bahasa Indonesia, dia keluar karena merasa tidak pas. Setelah lulus kuliah tahun 1990, dia sempat bekerja sebagai guru SMP dan tidak lama setelah itu mengajar di sekolah SMA Cokro, SMA swasta dengan anak-anak yang nakal namun akrab dengannya karena mereka memanggilnya 'Mbak', bukan 'Bu'. Akhir tahun 1990 keluar dari profesi guru untuk menekuni isu buruh pabrik. Dia penasaran dengan masalah-masalah penindasan dan pelecehan karena banyak ngobrol dengan teman-teman sekampungnya. Dia pernah diminta Munir, pengurus LBH Malang, untuk terlibat dalam penelitian sebagai tenaga lapangan, mengenai peran masyarakat dalam pemogokan buruh di Sidobangun yang diadvokasi olehnya karena PHK pada tahun 1992. Periode Januari-Mei 1992, Suci sempat membantu LBH Malang dalam penelitian dan pengorganisasian. Bulan Juni di tahun yang sama, Suci mulai bekerja di sebuah perusahaan keuangan.

III.6. Memperhatikan Nasib Buruh

Pekerjaan-pekerjaan di atas tidak ditekuni dalam waktu yang lama. Pada tahun 1990 itu juga dia tertarik untuk menggeluti isu buruh yang mulai mengganggu pikirannya. Bermula dari obrolan dengan para sahabat di kampungnya, Suciwati sering main ke beberapa kantong buruh dan mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi oleh buruh. Pada sebuah acara diskusi tentang buruh sekitar bulan Mei tahun 1991, dia bertemu dengan seorang yang kelak akan mempengaruhi seluruh hidupnya, yaitu Munir, pekerja pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Malang. Dari perkenalan itu Suciwati sering terlibat satu tim dalam kegiatan untuk mengadvokasi buruh bersama Munir.
Keakraban ini membuat hubungan kerja yang baik antar mereka. Munir mempercayai Suci sebagai orang yang bisa bekerja dan dipercaya. Ketika ada kevakuman posisi sekretaris di LBH Malang, Munir meminta Suciwati untuk mengisi posisi tersebut pada periode Januari-Juni 1992. Munir memintanya ti-

dak sekedar untuk kegiatan adminstratif kesekretariatan, namun lebih dari itu karena pengalaman Suci di lapangan bergaul dan mengorganisir buruh.

III.7. Perkawinannya dengan Munir[8]

"Bertemu dengan Munir bagiku adalah sebuah keajaiban", kata Suci. Seorang aktivis yang berparas ganteng dan cerdas seperti Munir banyak sekali ditaksir oleh gadis-gadis. Munir adalah pujaan banyak perempuan. Namun demikian mereka bertemu sebagai seorang teman. Antar satu dengan yang lain belum tumbuh rasa cinta sampai mereka bekerjasama cukup lama dan memiliki hubungan intensif dalam pekerjaan mengorganisir Buruh di Malang. Namun pada akhirnya Munir memilih Suci, dan pilihan itu tidaklah salah. Pekerjaan mereka di masyarakat untuk advokasi membutuhkan kawan diskusi yang sepadan, dan mereka berdua hampir selalu mendiskusikan berbagai hal bersama seperti layaknya sahabat. Mereka bisa berdiskusi sambil memasak bersama, atau sambil bersih-bersih rumah di hari libur, mengomentari suatu berita, merespon kejadian pelanggaran HAM yang disiarkan di media massa. Mereka sering memiliki pandangan yang sama sebelum mereka ungkapkan bersama. Jika ada suatu berita pelanggaran HAM, acap kali mereka memiliki satu pandangan, dimana Munir sudah menyiapkan agenda untuk merespon ketika Suciwati mengusulkan hal serupa. Mereka merasa satu pikiran, satu hati dalam banyak hal.

Dalam hal pekerjaan menegakkan HAM yang penuh risiko ini, mereka berdua juga sudah membicarakan secara serius. Ini adalah pilihan, dan jika terjadi apa-apa mereka berdua telah siap, bahkan untuk anak mereka kelak. Mereka secara berkelakar bahkan telah memikirkan kalau saja risiko yang dihadapinya adalah terenggut nyawa, Munir tak ingin Suci mengalami hal-hal buruk setelah itu, termasuk diantaranya adalah menjual idealisme untuk hidup. Mereka acapkali mendiskusikan hal substansial itu, karena ada banyak aktivis yang pada akhirnya menjual idealismenya untuk kehidupan mereka ketika kesempatan ada untuk itu.

Di saat-saat senggang, mereka sering mendiskusikan apa yang telah mereka perbuat bersama. Kadang-kadang mereka menertawakan diri sendiri, merefleksikan pengalaman dan membangun perencanaan baru bersama. Namun hubungan tidak selalu mulus. Kehidupan berumah tangga banyak persoalan yang harus dihadapi bersama. Munir merasa irama Suciwati begitu cepat dan kadang-kadang dia terlalu lambat untuk mengejarnya. "Sabar dulu dong!" ungkap Munir yang sering dikenang Suci. Suciwati juga agak tidak suka dengan kecenderungan Munir yang semakin lama semakin sibuk, membuka diri 24 jam terhadap siapapun yang mengontaknya. "Dia jadi terlihat terlalu sibuk, bahkan

8 Wawancara dengan Suciwati pada 29 Januari 2009.

di rumah sering menerima telepon pekerjaan, bahkan di hari libur". Namun semua bisa diatasi mereka. Suciwati memikirkan supaya Munir mendapatkan ruang privasi dan keluarganya ini melalui sekolah di luar negeri.

Meskipun Munir agak berat menerima hal itu, namun dia menyetujui usul istrinya yang memang penting sampai ketika Munir diterima untuk sekolah di negeri Belanda. Rencananya pada 6 September 2004 Munir berangkat, dan keluarga akan menyusul bulan Desember berikutnya. Munir masih mengusahakan ada donator yang mau mendanai keluarganya menyusul ke sana, jika tidak, maka mungkin keluarga akan menyusul bulan Juni tahun berikutnya saat Munir akan diwisuda.

Munir begitu merasa berat untuk meninggalkan keluarga. Sebelum berangkat ke bandara, Munir mengajak Suci dan kedua anaknya ke sudut kamar, memeluk mereka dengan erat, membisikkan kata-kata yang akan terkenang abadi "Aku sudah menemukan surgaku". Munir merasa bahwa kehidupan keluarganya lah surga itu, sehingga begitu berat dia mau meninggalkan mereka. Saat pelepasan di bandara Munir menangis memeluk Suci lagi. Seingat Suci, dalam hidup perkawinannya, Munir menangis hanya dua kali, termasuk pada saat berpamitan dengan Suciwati di ruang tunggu Bandara Soekarno Hatta tanggal 6 September 2004 malam itu. Di ruang tunggu malam itu adalah malam terakhir Suciwati melihat dan memeluk suaminya sebelum meninggal sehari setelahnya.

IV. Panggilan Untuk Pekerjaan yang Belum Usai

Peristiwa meninggalnya suami tercinta terasa sangat mengagetkan, sangat memukul. Pada tanggal 7 September 2004 itu sejarah kelam menorehkan tinta hitamnya dalam kehidupan Suciwati. Munir dikabarkan meninggal dalam pesawat karena terkena racun arsenik. Suciwati mengungkapkan perasaannya secara tertulis dalam facebook-nya setelah mendengarkan kabar kematian suaminya dari telepon Usman Hamid, sahabat almarhum di KontraS sebagai berikut:

"Tertegun aku mendengarnya. Seolah aku berada di awang-awang dan kemudian langsung dibanting ke tanah dengan keras. Kehidupan seolah berhenti. Seseorang yang menjadi bagian jiwaku, nyawaku, telah tiada..Kegelapan itu mencengkeram dan menghujamku dalam duka yang tak terperi".

Dan ketika anaknya yang masih kecil menanyakan kabar kematian abahnya, dia tak bisa menjawabnya. "Maafkan anakku, aku tak bisa menjawab pertanyaanmu", tangisnya dalam hati.

Setelah kesadarannya bangkit, Suciwati segera mencari kabar lebih jelas mengenai berita kematian suaminya. Sebagian dari dirinya ingin percaya bahwa berita itu bohong, maka segera dia menghubungi kantor Garuda di Jakarta dan Bandara Schippol Belanda, juga kepada teman-teman Munir di Belanda. Tidak ada jawaban yang memuaskan. Dicobanya lagi menghubungi kantor Garuda di Jakarta, mereka menyatakan tidak tahu menahu soal kematian Munir, hal yang menambahkan kesedihan dan sakit hati Suci. Kemudian setelah menelpon lagi kantor Garuda di Belanda dengan marah, seorang staf bernama Yan menjawab sambil meminta untuk tidak dipublikasi namanya, menjawab benar bahwa Munir, suaminya meninggal di pesawat GA-974. Peristiwa aneh ini semakin membuatnya bertanya-tanya.

Pada tanggal 8 September 2004 itu Suci memutuskan untuk menjemput jenazah suaminya ditemani beberapa sahabat. Sampai di sana semua orang berduka, menangis bahkan histeris. Suasana agak membaik setelah dilantunkan do'a-do'a oleh Usman Hamid. Dia melihat jenazah suaminya di ruang Mortuarium Schippol, terbujur kaku.

> *"Sejenak aku ingin hanya berdua dengan suami tercintaku. Aku meminta teman-teman keluar dari ruangan. Aku pandangi Munir dalam derai air mata. Tak tahu lagi apa yang kurasakan saat itu. Sedih, hampa, kosong.*
>
> *Lalu, kupegang tangannya. Kupandangi dia. Teringat saat-saat indah ketika kami bersama. Tiba-tiba ada rasa lain yang membuat aku menerima kenyataan ini. Aku harus merelakan kepergiannya. Doa-doa kupanjatkan. Ya Allah, berilah suamiku tempat terhomat disisi-Mu. Amin."*[9]

Kembali ke Indonesia, para sahabat, handai taulan, kawan jaringan dan masyarakat banyak yang telah menunggu dan ber-ta'ziah mengungkapkan duka cita. Setelah jenazah Munir dikebumikan pada tanggal 12 September 2004, Suci berpikir keras dalam ketakberdayaannya itu untuk keluar dari situasi buruk yang ia hadapi. Dia tidak tahu mengapa perasaan perjuangan itu begitu membetot semangatnya. Baginya hidup adalah bergerak, tidak boleh terus berkubang dalam perkabungan. Dia akan merasa bermakna jika melaksanakan sesuatu, sesuatu untuk diselesaikan. Di saat para sahabat masih menangisi almarhum, Suciwati justru telah memulai sikap untuk bergerak. Hal ini membuat para sahabatnya menganggap bahwa dia sangat kuat hati. Tak pelak almarhum sendiri ketika masih hidup menilainya sebagai orang yang begitu rasional. Namun sesungguhnya tidak, Suciwati juga merasakan kesedihan tak terperi. Setelah penguburan jenazah suaminya, dia merasa tidak sendiri karena banyak sahabat yang mengelilinginya. Namun setelah para sahabat pulang ke rumah masing-masing, tiba-tiba rasa sepi seperti mengepung, menusuk dan

9 Suciwati, Ibid

menyayat. Meskipun keluarga dan kerabat menemaninya, namun kekosongan itu tidak bisa hilang, bahkan semakin *menggigit*.

IV.1. Memulihkan Diri dengan Bangkit Bergerak

Kondisi di atas tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Dia berpikir dia harus bergerak, harus melakukan sesuatu untuk keluar dari situasi ini. Maka dua hari setelah itu dia memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan lamanya di Bekasi. Namun saat dia melakukan persiapan untuk pergi, tiba-tiba dia merasa tanpa daya, dia tidak punya tenaga bahkan untuk bergerak. Otaknya terus memerintah menyiapkan berbagai hal untuk disiapkan, namun tubuhnya tidak mau merespon. Dia bingung dan mengaduh, "Allahu akbar, inikah yang disebut kesedihan itu Tuhan?". Baru kali itu dia mengerti bagaimana rasanya makna kehilangan yang sesungguhnya.

Dia memang pernah merasa kehilangan saat ibunya meninggal dunia pada tahun tahun 2003, namun kehilangan suami tercinta merupakan kesedihan yang terasa sempurna. Dia terus berpikir untuk keluar dari situasi ini. Saat cukup kuat untuk berdiri, dia memaksakan diri untuk keluar rumah mencari sesuatu untuk berpegang. Dia masih sadar dengan hobinya jajan, maka ia memutuskan untuk naik becak mencari sesuatu untuk dimakan. Dia berhenti di sebuah ujung jalan dan memutuskan untuk berjalan kaki. Dia tidak menyadari ternyata dia menangis sepanjang jalan itu, dia bertanya-tanya akan berapa lama perasaan seperti ini menyelimutinya. Beginikah rasanya kesedihan itu, pertanyaan itu diulangnya kembali. Namun dia tidak bisa terus menerus terlarut di dalam suasana ini. Sekembalinya ke Jakarta lebih kurang tanggal 15-16 September 2004, seminggu setelahnya Diva Suuky, anaknya yang baru 2 tahun saat itu, sakit dan harus masuk rumah sakit. Sekalipun berat, namun kesibukan mengurus anak juga dapat memecah rasa kesedihan karena meninggalnya suaminya. Tidak lama setelah itu Suciwati memutuskan untuk menerima tawaran bekerja di Yayasan Tifa yang telah ditawarkan padanya beberapa saat setelah kematian Munir.

IV.2. Meneruskan Pekerjaan yang Belum Selesai

Sebetulnya Suci cukup kecewa terhadap otoritas resmi negara, mengapa kabar kematian suaminya tidak datang dari Departemen Luar Negeri (Deplu). Dia juga cukup kecewa bahwa kawan-kawan LSM tidak lekas menindaklanjuti pencarian informasi begitu kabar kematian Munir. Suci berharap besar pada mereka karena percaya pada Munir yang sejauh ini selalu berjuang bersama mereka. Ternyata tidak begitu, sehingga Suci mencari kabar sendiri sampai mendapat jawaban dari Deplu. Mungkin karena para sahabat masih berduka.

Justru Suci yang melakukan semua, mencari informasi. Suci merasa, ini adalah semacam insting yang membimbing, dan ini semua berasal dari-Nya, respon dari Tuhan untuk memberikan semacam sikap mempercayakan.

Maka peristiwa terbunuhnya Munir bagi Suciwati dimaknai sebagai pekerjaan yang harus dilakukan, yang diberikan Tuhan, karena Dia percaya padanya. Ini bukan pelimpahan dari Munir, tapi sebentuk kepercayaan dari Tuhan kepadanya untuk dapat melakukan pekerjaan ini. Maka dia merasa seperti menandatangani kontrak dengan Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan ini, perjuangan menuntut keadilan bagi kasus Munir, juga bagi para korban pelanggaran HAM yang lainnya.

Salah satu upaya untuk menguak kebenaran mengenai kematian sang suami adalah dengan aktif dalam jaringan KASUM (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir). KASUM berdiri bermula dari beberapa orang dan beberapa lembaga melakukan diskusi. Sampai suatu ketika ada beda pendapat antara kawan-kawan yang menggagas KASUM perihal pendekatan penanganan penuntasan advokasi kasus Munir. Ada di antara sebagian kawan yang ingin lebih tajam dan keras, dan ada yang ingin lebih taktis. Oleh karena itu dibutuhkan seorang sebagai penengah, dan dipilihlah Asmara Nababan. Hasil diskusi itu adalah didirikannya KASUM, tepatnya tanggal 4 Desember 2004. KASUM dibentuk pada di Jakarta oleh sejumlah elemen NGO dan aktivis HAM, antara lain: Kontras, Imparsial, Demos, VHR, PBHI, HRWG, YLBHI, Todung Mulya Lubis, Ade Rostina Suyanto, Dadang Trisasongko, Smita Notosusanto dan Binny Buchory.[10]

Suciwati bukan pemilik KASUM, tapi dia bagian darinya, bahkan mungkin nyawanya. Suci merasa hidup di dalam dan menghidupi KASUM. Suci tersemangati oleh KASUM, namun juga pernah kecewa. Untuk orang seistimewa Munir respon para sahabatnya masih dirasakan kurang. Untuk Munir yang kepeduliannya terhadap kawan sangat tinggi, teman-temannya tidak melakukan hal itu padanya. Dia sempat menyatakan kekecewaan ini kepada sahabatnya, Usman Hamid, "Kalau Munir ada kawan yang meninggal, dia tidak diminta sudah berdiri di paling depan. Apa yang kalian lakukan?" ternyata Usman menjawab, "Aku siap Mbak!" Jawaban yang membuat Suci juga merasa kaget, sebab bukan itu yang dia minta, karena Usman juga masih harus mengurus KontraS. Suciwati tidak mau Usman meninggalkan Kontras yang adalah roh-nya Munir juga. Usman, salah satu orang yang terlahir dari dorongan Munir.
Menuntaskan masalah pembunuhan Munir bukan hal sederhana. Pihak yang dihadapi adalah pihak-pihak yang berkuasa, pihak yang sangat berbepenga-

10 http://www.munir.or.id/?dir=pages&hal=aboutus&pgs=2#top

ruh dan disegani serta ditakuti yang terkait dengan lembaga TNI-Kopassus dan BIN. Tak pelak, para saksi pun banyak yang mencabut kesaksiannya di pengadilan, padahal dalam BAP sudah dituliskan, dan sebagian mereka mengungkapkan kekhawatiran yang berhubungan dengan keamanan diri mereka: "saya masih punya anak istri pak!", adalah salah satu ungkapan verbalnya. Hal ini terutama juga harus dihadapi oleh Suciwati dan LSM pendamping dalam menangani kasus Munir tanpa dukungan sistem keamanan yang berarti.

Menagih Masa Lalu Yang Dirampas

Wanma Yetty
Keluarga Korban Peristiwa Priok 1984

I. Belajar Dari Ayah: Ketegasan dan Kemandirian

Wanma Yetty lahir di Padang pada 1 Mei 1965. Ia anak pertama dari lima bersaudara. Ia tumbuh dan berkembang di Medan. Sejak adiknya yang ketiga lahir, Ayahnya, Bachtiar Johan, pergi mencari kakaknya dan melihat kemungkinan situasi di Jakarta untuk meluaskan usaha dan jaringannya dalam berdagang pakaian. Usaha yang dilakukan Bachtiar Johan adalah mengambil konveksi pakaian dari Jakarta lalu menjual dan mendistribusikannya ke beberapa daerah. Sementara, Nurcahyati, sang isteri, tetap berdagang aksesoris dan pernik-pernik yang terkait dengan dunia perempuan, mulai dari pita, bandu, pin, karet gelang, cincin, dan pengikat rambut. Ternyata situasi di Jakarta lebih memungkinkan untuk memperluas jaringan dan mendapatkan keuntungan lebih besar dalam berjualan pakaian ketika didistribusikan keluar daerah, Bachtiar mulai menetap dan bekerja di Jakarta. Terlebih lagi, yang menjadi agen konveksi pakaian itu adalah saudara-saudaranya sendiri, yang menetap di Tanah Abang. Pada tahun 1971, Nurcahyati bersama Wanma Yetty dan kedua adiknya berhijrah ke Jakarta. Mereka tinggal di dekat bandara Halim Perdana Kusuma. Pada tahun itu, Yetty masih kelas 6 Sekolah Dasar. Sejak saat itulah Yetty dan sekeluarga tinggal bersama di dekat Bandara Halim Perdana Kusuma selama dua tahun.[1]

Yetty dan adik-adiknya, oleh kedua orangtua, dididik dengan pola yang keras dan disiplin, meskipun mereka memiliki kecenderungan gaya mengasuh yang berbeda. Sang ayah, Bachtiar Johan, selalu mengarahkan anak-anaknya belajar segiat dan sepintar mungkin agar meraih hasil maksimal, serta mengajarkan kemandirian. Ia, dengan melihat kecenderungan bakat, selalu mengarahkan anak-anaknya agar mendapatkan hasil maksimal setiap prestasi yang mereka lakukan. Misalnya, Nurhayati, adik ketiga, diarahkan untuk menjadi pemain bulu tangkis, Elly, adik keempat, karena memiliki karakter yang tomboy dan berani dengan laki-laki, dimasukkan ke latihan bela diri Taekwondo. Sementara Yetty lebih diarahkan sesuai dengan kemauan ayahnya. Satu bentuk upaya mengajarkan ketegasan sikap dan juga kekuatan mental kepada anak-anaknya inilah ia memasukkan anak-anaknya ke sekolah swasta. Alasannya, di sekolah itu kebanyakan dari guru-gurunya berasal dari etnis Batak. Orang-orang Batak biasanya memiliki watak yang keras dengan suara bahasa yang lantang ketika ingin menyampaikan sesuatu. Sebab itu, mereka cenderung dianggap sebagai orang yang kasar dan galak.[2]

Satu waktu, Yetty pernah dipaksa oleh bapak Purba, guru olah raga, dalam ujian praktik berenang. Namun, ia tidak mau menurutinya. Karena, salah satu kakinya sedang sakit akibat terkena air panas, dan baru beberapa hari diopera-

1 Wawancara dengan Yetty, Keluarga Korban Peristiwa Priok, 20 Januari 2009
2 Ibid

si. Ia pun dijatuhi hukuman dengan nilai 5 oleh gurunya. Namun, ia tidak terima. Ia menawar agar dapat diberikan nilai 6. Sebelumnya dia memang sudah bisa berenang dan mendapatkan poin yang bagus, baru kali itu saja tidak bisa berenang, itu pun karena ada alasan yang mendesak. Alih-alih mendapatkan nilai yang diinginkan, kakinya malah dipukul dengan menggunakan penggaris besar berukuran ukuran panjang oleh guru tersebut. Sesampainya di rumah, ia ceritakan persoalan itu kepada sang ayah, dan meminta kepadanya untuk tidak mau mengikuti ujian olah raga dalam praktik renang. Bukan menuruti keinginan anaknya, Bachtiar malah menuntut anaknya untuk menghadapi semua itu, jika anaknya itu merasa dalam posisi yang benar, *"Enggak usah takut, jika kamu merasa benar, kalau kamu nanti akan dipukul dengan penggaris besar yang panjang itu. Kalau tersenggol sedikit saja kakimu hingga kamu menangis. Kamu harus melawannya. Jika sampai dia menamparmu itu sudah pelanggaran berat. Dia memang punya hak menyuruh kamu berenang, tapi kamu juga punya hak untuk menuntut atas dirimu, karena kamu telah membayarnya. Jangan mau dibodohi dan ditindas. Itu harus kamu ingat. Tapi jika kamu berada dalam posisi yang salah, bapak angkat tangan".*

Sementara satu bentuk kemandirian yang diajarkan itu, salah satu contohnya adalah saat Yetty meminta sang ayah untuk mengijinkan mengikuti bimbingan belajar yang diikuti oleh hampir seluruh teman kelasnya. Selain itu, ia merasa kesusahan mempelajari ilmu fisika dan matematika. Alih-alih diijinkan, Bachtiar Johan malah pergi ke toko Gunung Agung yang berada di Kwitang. Ia membelikannya buku saku yang bertuliskan Belajar Tanpa Guru. Buku saku itu menjelaskan kiat-kiat bagaimana mendalami ilmu fisika dan matematika. Tetap saja, jika tidak ada yang membimbing dalam menjelaskan, Yetty tidak akan mengerti. Alasan sang ayah mengapa ia tidak mengijinkan untuk mengikuti bimbingan belajar adalah karena guru itu manusia. Begitu pula dengan Yetty. Perbedaannya terletak pada pengalaman saja di mana Guru Pembimbing les itu lebih mengetahui, sedangkan Yetty belum. Selain itu, ia kurang belajar secara serius. Apalagi, sang ayah juga bisa berposisi sebagai seorang guru untuknya.[3]

Menurut Yetty, mengapa ayahnya mendidiknya dengan pola seperti itu, dengan memberikan kesempatan belajar yang telah disediakan, adalah agar anak-anaknya menjadi orang yang sukses. Tidak seperti dirinya yang hanya men-yelesaikan pendidikan Sekolah Dasar. Ayahnya, meskipun saat itu adalah anak yang cerdas, tidak diperbolehkan oleh Ibu tirinya untuk melanjutkan sekolah. Saking takut dengan ibu tirinya, dengan rasa keinginan belajar begitu tinggi, ia sering belajar di bawah kolong meja ketika kecil. Obsesi dan sikap kekecewaan untuk tidak mau mengulangi hal yang serupa dan meneruskan cita-cita yang terhempas inilah yang diwariskan anak-anaknya. Sebab itu, sang ayah akan memberikan apapun selama itu masih berhubungan mengenai pen-

3 Wawancara dengan Yetty, keluarga korban peristiwa Priok, 22 Januari 2009.

didikan anak-anaknya

Sebagai anak pertama, Yetty selalu ditekankan sang ayah untuk menjadi contoh bagi adik-adiknya. Dalam beberapa hal, ia kerap harus bersaing dengan adiknya yang ketiga, Nurhayati dalam berprestasi. Kalau tidak bisa menyamai dan mengungguli adiknya, ia akan dipukul dengan penggaris panjang berukuran besar oleh ayahnya. Sementara, dalam segi tanggung jawab sebagai anak tertua tidak pernah terkurangi. Selain harus mengasuh adiknya yang paling kecil, Yetty juga harus membantu sang Ibu untuk mencuci piring ataupun membantunya berjualan pernak-pernik yang terkait dengan perempuan di pasar. Dari segi kecerdasan pun, diakui Yetty, adiknya memiliki kelebihan ketimbang dirinya. Hal itu ditunjang dengan banyaknya waktu luang yang dimiliki Nurhayati untuk membaca buku. Sebab itu, Yetty, dengan sekuat tenaga selalu kerja keras untuk belajar, meskipun harus "diganggu" dengan kehadiran adiknya terakhir. Ini karena, sang ayah tidak mau menerima alasan apa pun. Bagi sang Ayah, ia bisa melakukannya selagi ia memiliki kemauan dan usaha. [4]

Sedangkan Nurcahyati, sang ibu, dalam pola mendidik juga cenderung keras. Namun makna keras di sini lebih mengarahkan pada kekolotan dan kecuekan kepada anak-anaknya. Ia kurang begitu memperhatikan sejauh mana prestasi pendidikan anak-anaknya. Ia lebih menyerahkan pengasuhan anak-anak kepada pembantu, dari mulai membangunkan tidur, memandikan, merapikan tempat tidur, dan mengganti pakaian ketika ingin sekolah. Tugasnya hanya mengecek kepada pembantunya, apakah anak-anaknya sudah melakukan aktivitas rutin harian itu. Ia disibukkan dengan usahanya, berangkat ke kios pagi hari, dan pulang di sore hari. Kendati demikian, ia tidak membolehkan anak-anaknya untuk mengikuti aktivitas yang sekiranya tidak berguna, seperti tidak membolehkan anak-anaknya untuk belajar berenang, karena tidak ada manfaatnya.

Kembali ke figur sang ayah. Bachtiar Johan paling suka dengan dunia politik. Saking sukanya, ia tidak pernah jauh dari harian Kompas. Dari media inilah ia sering mengikuti politik internasional dan juga gencatan senjata yang sedang berlangsung, misalnya mengenai Negara Amerika, ketegangan antara Irak-Iran, dan bagaimana peristiwa yang terjadi di Bosnia. Ia tidak membolehkan anak-anaknya untuk membaca korban Poskota. Selain secara intelektual kurang mendidik, menurutnya, koran itu juga banyak berisi unsur pornografinya. Dengan usia yang belum terlalu dewasa, mau tidak mau, Yetty dan adik-adiknya membaca koran yang dibaca oleh sang ayah.

Di Jakarta, keluarganya Yetty hanya bertahan dua tahun di daerah Halim Perdana Kusuma. Mereka lalu pindah ke daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ala-

4 Wawancara dengan Yetty, keluarga korban peristiwa Priok, 23 Januari 2009

sannya, karena di sana tidak ada sanak famili, sehingga sang ibu, Nurcahyati merasa kesepian yang kemudian membuatnya sakit. Selain memiliki saudara, di Tanjung Priok inilah banyak orang-orang yang berasal dari daerahnya dan juga teman sekampung sang suami yang berasal dari Minangkabau. Setidaknya, kehadiran mereka (baca: tetangga, *ed*), bisa mengobati kerinduan Nurcahyati dan Nurhayati atas kampung halaman di Padang. Terlebih lagi, sejak pindah dari Medan ke Jakarta, ia tidak melakukan pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sebagaimana yang pernah ia lakukan di Medan. Baginya Jakarta terlalu asing, dan bukan bagian dari identitas kehidupan yang membentuknya.

Di Tanjung Priok inilah Yetty dan adik-adiknya mengalami bagaimana keras dan rawannya hidup di Tanjung Priok yang notabene dihuni oleh masyarakat urban kelas bawah. Semasa itu, sebagian besar masyarakat itu buruh pelabuhan dan juga pabrik. Ada sebagian pula dari mereka yang hidup dengan berdagang. Di sana pulalah pengangguran banyak terjadi dengan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Sebab itu, dalam kondisi yang demikian, tingkat kejahatan, pemakaian narkoba, dan juga pencurian kerap terjadi. Yetty, hampir setiap hari, melihat orang meninggal di depan rumahya akibat overdosis penggunaan narkoba. Ketika melihat mayat di daerah Tanjung Priok, baginya pun menjadi suatu hal yang biasa. Meskipun keadaan di wilayah Tanjung Priok demikian, hal itu tidak menyurutkan ayahnya untuk menjalin interaksi dengan para tetangga. Bahkan dari mereka yang datang ke rumah keluarga Yetty untuk bersenda gurau bersama sang ayah. Bachtiar Johan memang keras terhadap anak-anaknya, namun ia bisa bersikap humoris dengan para tetangga. Saking akrab dengan mereka, setiap kali pembagian rapot, teman-teman seusia dan sekelas dengan Yetty meminta bapaknya untuk mengambilkan rapot. Begitu dekatnya sang ayah dengan para tetangga sehingga setiap kali ia ada di rumah, mereka sering datang untuk mengobrol.[5]

Sejak di Tanjung Priok inilah Bachtiar mulai mengikuti pengajian-pengajian yang berada di mesjid dan musholla. Setiap pengajian yang diikuti, sebagian besar materi ceramah biasanya berkisar tentang maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, penolakan terhadap program Keluarga Berencana (KB), penolakan terhadap larangan penggunaan jilbab bagi siswi SLTA, hingga kritik keras terhadap rencana pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi ormas dan orsospol. Di samping dalam bentuk ceramah, kritik terhadap kebijakan dan perilaku rezim Orde Baru juga dilakukan melalui media cetak, seperti pamflet yang tidak hanya ditempel di tempat-tempat umum, melainkan juga di masjid dan musholla. Terlebih lagi, ketika terjadi peristiwa penangkapan empat warga Koja yang ditangkap oleh aparat keamanan dan isu Sertu Hermanu yang masuk ke Musholla As-Sa'adah

5 Wawancara dengan Yetty, Keluarga Korban Peristiwa Priok, 23 Januari 2009

tanpa melepas alas kaki dan juga menyirami tembok tempat ibadah itu dengan air comberan membuat sebagian besar masyarakat muslim Priok semakin panas dan emosi. Rumor itulah yang kemudian menggerakkan masyarakat muslim Tanjung Priok, termasuk Bachtiar Johan mengikuti pengajian akbar yang dikordinir oleh Amir Biki sebagai bentuk seruan dan protes keras kepada aparat keamanan atas peristiwa penangkapan dan pelecehan tempat ibadah itu.[6]

II. Peristiwa 12 September 1984

Pada malam itu, tepatnya 12 September 1984, Bachtiar Johan pergi keluar rumah. Tidak berapa lama, ia kembali dan mandi, lalu shalat Isya. Ia berganti pakaian. Ia paling suka mengenakan batik. Malam itu ia mengenakan baju batik berwarna cokelat bercampur merah bata dengan celana warna cokelat. Ia menggunakan selop kulit bertali dan memakai kopiah. Ia terlihat begitu rapi dan bersih. Ia tampak gagah dan berani. Dengan berpakaian itu, ia mau menghadiri pengajian akbar. Sebelum pergi, ia mencium Yetty dan ibu yang sedang berbaring sakit dengan penuh rasa sayang. Ia berpesan kepada Yetty, "Besok kamu pasti sembuh, dan doakan Ayah semoga selamat ya!".[7]

Pada pukul 20.00 WIB ia melangkahkan kakinya keluar rumah sambil memandang ke arah isterinya dan Yetty. Meskipun dalam kondisi sakit, Yetty, yang saat itu berumur 19 tahun dan masih duduk di bangku SMA kelas 3, dapat mendengarkan atas apa yang sedang dibicarakan dalam pengajian akbar itu. Ini karena, selain letak rumahnya tidak terlalu jauh dari lokasi di mana pengajian akbar itu diadakan, yaitu sekitar 50 meter, ada sekitar 40 speaker yang disebar di sekitar lokasi tempat pengajian itu berlangsung. Saat itulah ia mendengarkan bagaimana ceramah Amir Biki dengan lantang, "Ini pertama kalinya saya naik podium dan kemungkinan ini adalah yang terakhir kali. Dan di depan itu moncong-moncong senjata sudah siap menghadapi nyawa saya. Umur saya sudah diujung". Yetty lalu membayangkan omongan Amir Biki dan menyimpulkan, "Kalau begitu, berarti semua tentara sudah menghadang dia". Tiba-tiba Yetty teringat sang Ayah, dan mengkhawatirkannya. Perasaan khawatir mengenai ayahnya ia bunuh secepatnya saat membayangkan keteguhan, prinsip, dan keberanian yang dimiliki. Bagi Yetty, Ayah pasti bisa selamatkan diri atas apa yang menimpa dirinya nanti. [8]

Selain itu, ia mendengarkan bagaimana Amir Biki berbicara mengenai pena-

6 Wawancara dengan Yetty, Keluarga Korban Peristiwa Priok, 24 Januari 2009.
7 Wanma Yetty, "Kehilangan Ayah, Kehilangan Masa Depan", dalam Subhan SD, FX Rudi Gunawan (ed), Mereka Bilang Di Sini Tidak Ada Tuhan, Suara Korban Tragedi Priok, Jakarta: Kontras dan Gagas Media, 2004, hal. 66.
8 Ibid

hanan terhadap empat orang warga Tanjung Priok. Amir Biki mengatakan bahwa dirinya telah datang ke Kodim untuk meminta pembebasan empat orang warga yang ditahan, namun tidak berhasil. Amir Biki mengancam, bahwa jika sampai pukul 23.00 keempat warga yang ditahan belum dilepaskan maka akan terjadi banjir darah di Tanjung Priok. Karena itu, Amir Biki mengajak untuk beramai-ramai mendatangi Kodim 0502 Jakarta Utara guna meminta pembebasan keempat orang tersebut. Amir Biki langsung membagi massa ke dalam dua kelompok: satu kelompok di bawah pimpinan Amir Biki dengan tujuan mendatangi Markas Kodim 0502 Jakarta Utara, dan kelompok kedua adalah massa dengan tujuan pertokoan Cina di daerah Koja. Suara-suara memekikkan *Allahu Akbar* terus bergemuruh sepanjang aksi itu hingga akhirnya senyap dari pendengaran Yetty.[9]

Pada hari ketiga paska peristiwa itu, Yetty, dengan kondisi badan yang sudah pulih, mulai berani keluar rumah. Ia mendengar informasi dari para tetangganya bahwa ada salah dari mereka yang bernama Eddy, pedagang baju, ditembak kakinya. Ini terjadi, selepas Eddy pulang dari berdagang pada jam 24.00 malam. Ia berencana ingin mengisi perutnya di warung makan (warteg). Saat di jalan menuju warung makan ia dengan iseng mengatakan, "*Allahu Akbar, Allahu Akbar!*". Tiba-tiba, salah seorang polisi yang melihatnya langsung melepas timah panas mengenai kakinya. Ia sempat ditolong oleh salah seorang warga kampung itu yang melihatnya. Namun, ketika disembunyikan selama tiga hari itu ternyata luka salah satu kakinya akibat tembakan menjadi membiru dan mulai membusuk.

Ia dibawa ke Rumah Sakit yang berada di Koja. Sesampainya di sana, karena melihat ada orang yang tertembak berasal dari wilayah Tanjung Priok, petugas rumah sakit itu memindahkannya ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Ia dipindahkan kembali ke rumah sakit RSPAD. Setibanya di sana, sebelah kakinya langsung diamputasi. Sementara kakaknya yang mengantarkan malah ditahan. Sang paman, melihat keponakannya tidak kembali, bersama adik isterinya yang laki-laki mencoba mencarinya di RSPAD. Lagi-lagi mereka juga ditangkap, dan kemudian disiksa di penjara. Bertolak dari peristiwa itu, hampir seluruh anggota masyarakat yang berada di Tanjung Priok tidak ada yang berani berbicara mengenai peristiwa itu. Sedikit saja mereka berbicara peristiwa itu, meskipun sekedar komunikasi personal antara tetangga sendiri, maka akan berujung pada penangkapan. Pembicaraan mengenai peristiwa itu biasanya dilakukan dengan bisik-bisik ataupun di kamar mereka masing-masing.[10]

9 Wawancara dengan Yetty, Keluarga Korban Peristiwa Priok, 23 Januari 2009 .

10 Pascaperistiwa itu, tidak ada satu pun media massa yang berani memberitakan

Satu bulan paska peristiwa, pengawasan aparatus pemerintah melalui petugas intelnya tidak begitu ketat. Yetty bertemu dengan beberapa orang Madura yang sedang mendorong becak dengan barang dagangannya di pasar. Menurut informasi orang-orang itu, banyak sekali sandal-sandal dan bahkan ratusan sandal yang tertinggal paska peristiwa itu. Sewaktu kejadian hampir semua lampu di sekitar rumah (di)mati(kan). Hanya lampu jalan yang remang-remang saja yang menyala. Salah seorang Madura itu melihat banyak orang yang rebah di jalan. Ia tidak tahu, apakah mereka yang rebah itu sedang tidur atau sudah menjadi mayat. Pada bulan yang sama, Yetty sekeluarga kedatangan seorang tamu. Ia adalah ibu dari Yusron, kelas 2 SMA, yang hilang ketika peristiwa itu berlangsung. Mereka memang tidak saling kenal. Namun, mereka memiliki kesamaan nasib, yaitu sama-sama kehilangan orang yang dicintainya. Ibunya Yusron mengajak Yetty dan ibunya (Nurcahyati) untuk pergi ke kantor Polisi Militer yang berada di Guntur untuk sama-sama mencari anggota keluarganya.[11]

Sesampainya sana, mereka tidak menemukan anggota keluarga yang dicari. Menurut sipir penjara, orang-orang yang mereka cari itu tidak ada namanya dalam daftar presensi. Atas saran salah seorang anggota militer yang melihat mereka, akhirnya menyarankan agar mereka diminta untuk kembali esok hari sambil membawa rantang dengan lauk-pauk kesukaan anggota keluarga yang dicari. Selain untuk mengakali sipir penjara, hal itu digunakan untuk mengetes apakah memang ada anggota keluarganya berada di penjara tersebut. Ternyata cara itu tetap tidak berhasil. Rantang yang berisi lauk pauk itu tetap utuh ketika mereka memasukan keesokan harinya.

Pelbagai usaha dilakukan Yetty untuk menemukan sang ayah. Mulai dari menanyakan kepada saudara-saudaranya yang bekerja di kepolisian Surabaya, Bandung, Semarang hingga menggunakan hal-hal yang gaib, yaitu pergi ke dukun dan paranormal, atau yang biasa disebut dengan orang pintar. Dari pencarian itu sudah banyak uang yang ia habiskan. Bahkan, ia sering memin-

mengenai peristiwa Tanjung Priok sesungguhnya. Tempo adalah salah satu contohnya. Dalam mendeskripsikan pemberitaan mengenai peristiwa Tanjung Priok, Tempo hanya menginformasikan berita dari satu sisi saja, yaitu perspektif militer: L.B Moerdani dan Try Sutrisno. Meski diakui ada sisi lain yang coba dimunculkannya, yaitu pemberitaan mengenai asal muasal munculnya huru-hara yang dilakukan oleh sekelompok muslim Tanjung Priok. Sedikitnya pemberitaan yang ditampilkan mengenai cikal bakal meletusnya peristiwa Priok membuat berita yang dimunculkan Tempo lebih cenderung menguatkan argumentasi massa jamaah tabligh akbar sebagai dalang di balik peristiwa itu. Lihat. Tempo, 22 September 1984.

11 Wawancara dengan Yetty, Keluarga Korban Peristiwa Priok, 23 Januari 2009. Penjara Polisi Militer Guntur yang terletak di Jl. Guntur, Jakarta Selatanadalah penjara yang digunakan untuk menahan orang-orang yang diduga terkait dengan peristiwa Tanjung Priok 1984.

jam dan meminta uang dari pamannya dengan alasan mengikuti ujian masuk kerja untuk mencari keberadaan sang ayah. Usaha pencarian ini tidak pernah ia beritahukan kepada sang ibu dan adik-adiknya. Satu waktu, ia pernah diberitahu oleh seorang paranormal atau orang pintar yang didatanginya bahwa ia tidak usah mencari ayahnya ke mana pun. Pencarian itu hanya berujung pada kesia-siaan saja. Ini karena sang ayah sudah pergi jauh sekali dan sangat susah untuk dijangkau. Namun, sang ayah selalu memikirkan dan berdoa untuk keselamatan isteri dan anak-anak. Lebih baik Yetty berdoa saja untuknya.[12]

Dalam mimpi, Yetty juga bertemu dengan sang ayah yang berdiri di depan pintu. Ia berpakaian persis seperti ketika ingin pamit menuju pengajian akbar itu. Ia hanya tersenyum dan melihat Yetty. Satu waktu dalam mimpinya pula, Yetty bertemu dengan Ayah yang mengenakan pakaian putih-putih se perti orang ingin berangkat haji. Sejak itulah Yetty sekeluarga tersadar bahwa ayah mereka "kembali untuk tidak kembali". Tulang punggung yang selama ini menjadi pundak dan penumpu harapan mereka kini telah pergi tanpa meninggalkan jejak dan kuburan yang ditinggalkan. Mereka sangat tergoncang, terutama sang ibu. Sejak proses pencarian ayah dihentikan, ibu selalu diam, tidak mau berbicara. Ia terlihat begitu kehilangan seorang suami yang selama hidup bersama mengarungi bahtera rumah tangga dalam suka dan duka. Alih-alih ingin menanyakan kondisi yang dialami oleh sang ibu, Yetty dan adik-adiknya lebih banyak bersikap diam melihat situasi itu. Yetty dan adik-adiknya menjadi bingung harus bersikap apa. Jika menanyakan keadaan ibunya agar tidak usah terlalu sedih dan hidup dalam kedukaan, khawatir ajakan itu malah mengingat-ingatkan kembali dengan suaminya. Saat itulah sang ibu sering ditemani oleh Nurhayati.

Untuk menghindari ingatan ibu mengenai ayah, Yetty kemudian berinisiatif pindah dari rumah kontrakan yang berada di Tanjung Priok menuju daerah Tebet, Jakarta Selatan. Mereka membeli rumah dari pamannya. Di sini, kepergian ayah mengubah hidup keluarganya. Cita-cita dan harapan di masa depan yang pernah diangankan dan adik-adik juga ikut sirna. Waktu itu ia akan memasuki Akademi Bahasa Asing, sedangkan adik nomor tiga telah mendapatkan Penelusuran Minat Bakat dan Kemampuan (PMDK) dari Universitas Indonesia, sehingga tidak perlu lagi untuk mengikuti ujian SIPENMARU. Tapi, cuma jadi harapan hampa. Ia tak pernah sampai menginjak ke perguruan tinggi. Ia dan adik-adik cuma sampai SMA[13].

Hari-hari sepeninggal ayah adalah hari-hari yang teramat panjang dan melelahkan. Yetty dan adik-adik menyadari bahwa mereka harus menghidupi diri sendiri. Ia melupakan cita-cita untuk sekolah tinggi, dan mereka harus berkutat

12 Wawancara dengan Yetty, Keluarga Korban Peristiwa Priok, 24 Januari 2009.
13 Wanma Yetty, "Kehilangan Ayah, Kehilangan Masa Depan", hal 67.

dengan realitas hidup yang pahit. Dengan berbekal ijazah SMU, ia kerapkali menyusuri jalanan dan mengetuk pintu dari kantor ke kantor instansi untuk melamar pekerjaan. Sesering ia melangkahkan kakinya untuk mendaftarkan diri melamar menjadi karyawan, sesering itu pula instansi menolaknya. "Di setiap instansi sepertinya terdapat nama-nama korban dan keluarga korban peristiwa Tanjung Priok, sehingga setiap mereka (instansi) mengetahui nama saya, seketika itu pula pintu pekerjaan tertutup untuk saya", ungkap Yetty. Isu yang muncul ketika itu, kalangan korban keluarga Tanjung Priok adalah juga anak eks PKI dan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), yang keduanya adalah "musuh" negara. Karena itu, banyak dari instansi yang tidak mau menerima dan berurusan dengan anak-anak atau keluarga korban yang tersangkut dengan peristiwa Tanjung Priok.[14]

Nasib mereka yang tak menentu membuat ibu mengambil putusan lain pada tahun 1985. Ia memboyong anak-anaknya untuk pulang kampung di Padang. Ia menjual rumah dan semua yang ada dari rumah hingga perabot-perabot yang mereka miliki tidak tersisa dengan harga sekitar 5 juta. Ia berharap bisa hidup bersama-sama kembali di kampung halaman, meskipun harus hidup dengan kesederhanaan. Ternyata, semua rencana untuk hidup damai di kampung halaman tidak seperti yang dibayangkan. Untuk memulai hidup baru itu bukanlah hal yang gampang. Yetty dan adik- adik dari kecil sudah terbiasa hidup di rantau yang banyak membuka wawasan. Sebab itu, kembali ke kampung bukan menyelesaikan persoalan, mereka malah hidup dalam keterasingan. Ini karena, Yetty dan adik-adik tidak dapat berbahasa Minang dengan lancar, bahkan terasa kaku ketika berkomunikasi dengan para tetangga. Perlu banyak waktu un-

14 Sebenarnya, tidak ada keterkaitan antara para korban dan keluarga korban Tanjung Priok dengan "Peristiwa 65" yang disejajarkan dengan "PKI". Selain mereka merupakan komunitas muslim yang berseberangan dengan Partai Komunis Indonesia, beberapa tokoh dari korban peristiwa itu merupakan penentang "keras" gerakan PKI. Terlebih lagi doktrin yang dibuat Orde Baru bahwa "PKI" itu adalah anti Tuhan, satu hal yang sangat bertentangan dengan ideologi masyarakat muslim Indonesia. Dengan demikian, penggunaan kata "PKI" di sini tidak lagi direproduksi untuk merujuk pada "Peristiwa 65", tetapi menjadi alat untuk menundukkan setiap gerakan atau tindakan yang dianggap berbau subversif oleh rezim Orde Baru. Karena itu, "PKI" yang selalu disandingkan dengan kata komunis atau komunisme, sebagaimana diungkapkan Ariel Heryanto, sudah menjadi 'tanda kosong yang mengapung' (a floating empty signifier), yang apa pun itu bisa dimasukkan dan dikategorikan sebagai bagian dari ancaman komunis. Dengan kata lain, kata 'komunis' atau 'komunisme' itu telah mengacu pada dirinya (a self-referential term). Dalam istilah Jean Baudrillard, kata itu lebih nyata dibandingkan dengan aslinya (hyperreality) atau sebuah simulacrum, fotokopi yang tidak ada aslinya. Lihat Ariel Heryanto, State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally belonging, London and New York: Routledge, 2006, hal. 142-145; Budiawan, "Komunis(me) Tidak Pernah Mati?", Bulletin Nadheer, Vol.04 No.4 April 2005, hal. 4.

tuk menyesuaikan dengan lingkungan yang sudah lama mereka tinggalkan.[15]

Akhirnya, Yetty memutuskan untuk kembali ke Jakarta mengikuti salah seorang sanak famili di daerah Cengkareng. Harapannya, ia bisa mencari dan mungkin bertemu kembali dengan sang ayah. Setelah itu, pada tahun 1987, satu persatu keluarganya berangkat ke Jakarta. Mereka kembali berkumpul dengan mengontrak rumah di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Mereka memulai lagi hidup dari nol. Uang hasil jual rumah dan segala isinya sudah habis, karena untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah adik-adik. Pada tahun 1990, ia mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan asing. Nurhayati juga bekerja satu kantor dengannya. Sedangkan ibu berjualan kue-kue basah. Semuanya dilakukan demi menyambung hidup. Setelah mendapatkan pengalaman, ia dan adik keluar dari perusahaan itu. Ia lalu melamar lagi di perusahaan elektronik milik Jepang dan diterima untuk bekerja. Ia mendapatkan pelatihan di Malaysia dan ditempatkan di negara itu pula selama 4 tahun. Karena kejujuran dan dedikasi yang dimilikinya, oleh perusahaan tersebut, ia ditugaskan untuk mengontrol barang yang siap dikirim ke luar negeri. Walaupun jauh dari keluarga, ia melakukan semua pekerjaan dengan senang hati demi memenuhi kehidupan ibu dan adik-adik serta mewujudkan membeli rumah, meskipun kecil, yang dahulu dijualnya.[16]

Pada tahun 1995 ia pulang kembali ke tanah air dan berkumpul lagi dengan keluarga. Namun niat untuk membahagiakan ibu belum terwujud juga. Impian untuk mempunyai rumah kembali belum tercapai. Ingin sekali rasanya membahagiakan ibu. Tapi kondisi itu sepertinya tidak memungkinkan di Jakarta, khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban kasus Tanjung Priok yang tidak pernah mendapatkan tempat. Ia dan adik-adik akhirnya menjalani hidup apa adanya. Yetty lalu mencoba melakukan peruntungan dengan membuka bisnis katering kepada orang-orang yang bekerja di perusahaan dan pabrik. Ia juga membuat kreditan barang-barang rumah tangga kepada masyarakat sekitar Tebet, mulai dari televisi, radio, dan lain sebagainya.

Setelah melakukan aktivitas yang mencukupi kebutuhan ekonomi mereka, Yetty mulai tersadar, untuk apa ia sebenarnya melakukan semua itu. Ia sadar bahwa harus melakukan sesuatu terhadap nasib yang menimpa diri dan keluarganya. Namun, ia, sebagai anak-anak korban peristiwa Priok, tidak bisa mengkhayal lebih tinggi dan muluk-muluk. Karena stigma pemerintah yang merembes kepada masyarakat dalam memandang mereka masih begitu kuat. Namun ia tidak putus asa dalam berharap. Ia masih punya harapan bahwa satu saat akan ada setitik cahaya, meski entah kapan datangnya, yang menerangi hari-hari gelapnya dan keluarga. Ia punya firasat, satu saat akan datang peme-

15 Wawancara dengan Yetty, Keluarga Korban Peristiwa Priok, 22 Januari 2009.
16 Wawancara dengan Yetty, Keluarga Korban Peristiwa Priok, 25 Januari 2009.

rintahan yang berpihak kepada korban dan keluarga korban.[17]

III. Harapan Reformasi

Rupanya firasat Yetty itu benar. Menjelang tahun 1998 pelbagai elemen masyarakat menuntut Presiden Soeharto mundur dari kekuasaan yang dipegangnya selama tiga puluh dua tahun. Puncaknya adalah pada tahun 1998, mahasiswa dengan didukung pelbagai elemen gerakan masyarakat melakukan aksi demonstrasi yang membuat Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. Betapa senangnya Yetty mendengar hal itu. Ia berpikir, inilah saatnya "cahaya itu datang" untuk mengungkapkan kebenaran atas masa lalu yang pernah dirampas dari keluarganya. Ia berharap "cahaya" itu bisa melacak hilangnya ayah di zaman kekuasaan Orde Baru. Seorang ayah yang telah lenyap ditelan rentetan peluru aparatus negara. Bagi Yetty, kepergian sang ayah bukan suatu musibah dari Tuhan, melainkan akibat kekejaman yang dibuat oleh pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Di sini harapan Yetty yang begitu tinggi hingga menjadi ingatan obsesif.[18]

Pada akhir Desember 1998, Yetty diberitahukan oleh seorang teman bahwa di daerah Permai, Tanjung Priok, Jakarta Utara ada spanduk yang berisi bahwa korban dan keluarga korban peristiwa Priok diharapkan untuk mendaftarkan diri ke rumah ibu Dewi Wardah. Namun, anjuran itu tidak digubrisnya. Ia menganggap bahwa itu rasanya tidak mungkin bila peristiwa Priok diangkat kembali. Namun anjuran itu menjadi kuat ketika ia membaca surat kabar nasional bahwa "Keluarga korban Tanjung Priok memberitahukan kepada siapapun yang menjadi korban pada 12 September 1984 diharapkan untuk datang ke rumah Ibu Dewi Wardah, di Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara". Setelah membaca informasi tersebut kemudian ia mencatat alamat yang tertera di surat kabar nasional itu. Impian yang dinanti-nantikan selama hampir 14 tahun diharapkan akan terwujud, yaitu kejelasan status ayahnya yang menghilang pada 12 September 1984.[19] Fragmen ingatan yang mengendap dalam goresan trauma atas kematian ayahnya pada peristiwa Priok terbuka kembali.

Akhirnya, Yetty menjadi anggota Yayasan 12 September 1984 tersebut. Dalam yayasan ini ia dan para korban yang lain menyiapkan strategi perjuangan untuk merebut ruang publik dan simpati masyarakat. Selain sebagai pengingat masa lalu, dipilihnya nama "Yayasan 12 September 84" tersebut juga bagian dari identifikasi diri mereka sebagai korban. Lewat nama ini, atas ingatan masa

17 Wawancara dengan Yetty, Keluarga Korban Peristiwa Priok, 22 Januari 2009.

18 Wanma Yetty, "Kehilangan Ayah, Kehilangan Masa Depan", hal.71.

19 Wawancara dengan Yetti, keluarga korban peristiwa Tanjung Priok, 8 November 2006.

lalu yang serupa rasa kedirian mereka dibentuk, digumpalkan, dan dimaknai. Tujuannya untuk menuntut pengungkapan kebenaran dan menagih keadilan kepada negara.[20] Perlu diakui, dalam upaya perjuangan menuntut keadilan ini Yetty tidak terlalu intensif. Ini karena, ia harus mengurusi usaha kateringnya bersama tetangganya. Usaha katering ini tidak dapat ditinggalkan begitu saja, meskipun ada orang yang memasak, tapi ia sendiri yang mengolah bahan makanan dan juga mengatur jadwal mengenai lauk pauk apa saja yang mesti dimasak dalam setiap harinya. Ia diwakilkan oleh John, adik nomor dua. Dari John dan juga informasi keluarga korban yang lain ini ia mendapatkan informasi terbaru mengenai kasusnya.

Setelah melakukan pelbagai usaha dan lobi dengan institusi terkait, mulai dari Fraksi Partai di DPR-RI, Komnas HAM, dan juga tokoh-tokoh politik reformasi yang berpengaruh, pada era kepresidenan BJ. Habibie ini perlahan-lahan desakan mengangkat kasus Tanjung Priok semakin menguat. Ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, bergulirnya gerakan reformasi yang tumbuh pada masa awal pemerintahannnya. Hal ini kemudian memungkinkan untuk menyelidiki pelanggaran kemanusiaan berat yang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya. Poin ini juga yang menjadi agenda utama dalam gerakan reformasi. Di satu sisi, naiknya BJ. Habibie menjadi presiden didukung oleh sejumlah cendikiawan muslim yang berasal dari ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan DDI (Dewan Dakwah Islam). Kedua, desakan internal kepada presiden BJ. Habibie untuk membebaskan para tahanan politik pada masa rezim Soeharto. Keadaan ini mendesaknya, sehingga ia memutuskan un-

20 Berhembusnya arus reformasi juga mendorong para korban Tanjung Priok yang lain membuat organisasi sejenis. Sontak (Solidaritas Nasional untuk Korban Priok) yang dipimpin Syarifin Maloko, dan Kompak (Komite Mahasiswa Pemuda Anti Kekerasan) yang dipimpin Yayan Hendrayana, misalnya, merupakan dua organisasi para korban Tanjung Priok yang melakukan penuntutan agar kasus itu dibuka kembali. Kendati munculnya beragam organisasi yang merepresentasikan diri bagian dari korban, mereka tetap berjalan seiring berjuang mengangkat kasus itu. Perjuangan untuk mendapatkan simpati publik itu, antara lain diwujudkan dalam bentuk diskusi, audiensi, tabligh akbar, hingga demonstrasi. Ide mendirikan beberapa organisasi korban tersebut berawal dari pengajian akbar yang diselenggarakan untuk memperingati peristiwa Tanjung Priok. Pengajian akbar yang bertema "Mimbar Kesaksian" ini dihadiri hampir 2000 umat Islam di Mesjid al-Husna, Tanjung Priok, pada 12 September 1998. Banyak tokoh yang hadir dalam memperingati tragedi Tanjung Priok tersebut, seperti Yuzril Ihza Mahendra (Partai Bulan Bintang), Sayid Aqil Sirad (Nahdatul Ulama), Jalalludin Rahmat (Cendekiawan Islam), dan Munir (KontraS), Amien Rais (Pimpinan Pusat Muhammadiyah). Dalam orasinya, Amien Rais menganjurkan kepada para korban agar menuntut kepada negara untuk memberikan kompensasi, rehabilitasi, dan reparasi atas kerugian yang mereka alami. Sejak itu, ide membentuk organisasi yang memperjuangkan hak-hak mereka pun muncul. Wawancara dengan Irta, korban peristiwa Tanjung Priok, 6 November 2006. Lihat "Amien Rais dan Yuzril Ihza Hadir pada Peringatan Tragedi Priok, Suara Merdeka, 13 September 1998.

tuk merehabilitasi dan membebaskan para tahanan politik tersebut. Tindakan ini, secara tidak langsung, membuka jalan munculnya koalisi antar para tahanan politik, para korban, dan keluarga korban. Kasus Tanjung Priok merupakan salah satu kasus yang coba diungkap kembali di antara kasus kejahatan masa lalu lainnya.[21]

Akhirnya, awal September 1998, DPR memutuskan untuk membentuk tim bersama pencari fakta yang terdiri dari wakil-wakil partai politik. Tim ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari pelbagai sumber mengenai pembantaian massal dalam kasus Tanjung Priok. Bulan September hingga November 1998, sambil menunggu kepastian keputusan penyelidikan, para korban, keluarga korban, dan pegiat kemanusiaan juga mengumpulkan informasi terkait dengan peristiwa tersebut. Selain mempertanyakan perihal kejelasan dan perkembangan kasus tersebut, mereka juga datang ke kantor Komnas HAM untuk menyerahkan hasil investigasi mereka.[22]

Akibat tekanan yang begitu kuat, Baharuddin Lopa, Ketua Koordinator tim yang menangani kasus Priok di Komnas HAM, akhirnya mengumumkan lewat press release, bahwa mereka telah hampir selesai mengumpulkan data dan informasi tentang kasus itu. Tim dari Komnas HAM ini juga akan mewawancarai lebih jauh perihal keterlibatan Benny Moerdani dan Try Soetrisno dalam kasus tersebut.[23] Pada Maret 1999, Komnas HAM pun merekomendasikan kepada pemerintah untuk (1) Segera menyelesaikan kasus Tanjung Priok di pengadilan, juga meminta kepada pemerintah agar memberitahukan kebenaran tentang pembantaian itu, dan (2) Mengungkapkan kepada keluarga para korban tempat-tempat penguburan para korban yang tewas; serta (3) Mereka yang bertanggung jawab diminta untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada masyarakat korban Tanjung Priok, dengan disertai rehabilitasi dan ganti rugi atau santunan kepada mereka.[24]

Sementara, hasil pemilihan umum pertama pasca-Soeharto pada tahun 1999 memperlihatkan bahwa partai-partai yang berbasis pendukung muslim masuk

21 Priyambudi Sulistiyanto "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dan Bahaya Impunitas", Jurnal Hak Asasi Manusia Dignitas, volume IV no. I tahun 2006, Jakarta: Elsam, 2006, hal. 34-35.

22 Korban Kasus Tanjung Priok Datangi Komnas HAM", Kompas, 1 Oktober 1998, "Selama 14 Tahun Mereka Merasa Diteror", Republika, 1 Oktober 1998.

23 "Pengungkapan Kasus Tanjung Priok Dilanjutkan", Kompas, 3 Desember 1998, "Komnas HAM akan konfirmasikan tragedi Priok pada L.B Moerdani dan Try Soetrisno", Republika, 3 Desember 1998.

24 Surat pengumuman ini ditandatangani Marzuki Darusman (ketua), Clementino dos Reis Amaral (Sekretaris Jenderal) dan Baharuddin Lopa (ketua Tim Tanjung Priok), "Pelaku Harus Diselesaikan Lewat Jalur Hukum", Kompas 10 Maret 1999.

ke dalam lima besar. Ini berakibat pada bergesernya peta politik yang sebelumnya didominasi Golkar dan fraksi militer kini bergeser ke partai-partai berbasis muslim, yakni PAN (Partai Amanat Nasional), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dan juga Poros Tengah (koalisi dari partai-partai kecil berbasis muslim) di DPR. Para mantan tahanan politik dari kelompok muslim yang dahulu aspirasi politiknya dikebiri pemerintah Orde Baru, kini naik ke permukaan mewakili suara-suara Islam lewat posisi anggota DPR yang diembannya. Mereka misalnya, A.M Fatwa dari PAN dan Abdul Qodir Djaelani dari PPP.[25]

Kedua kondisi ini cukup memperkuat artikulasi para korban dan keluarga korban untuk mengangkat kasus Tanjung Priok ke meja hijau. Kondisi ini makin diperkuat dengan naiknya Abdurahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden pada bulan Oktober 1999. Sebagaimana diketahui, Gus Dur merupakan salah seorang pegiat kemanusiaan yang gigih memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga kehadirannya cukup memberikan angin segar dalam meningkatkan harapan publik terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini makin meningkatkan semangat perjuangan dan harapan para korban, keluarga korban, dan pegiat HAM.[26]

Tanggal 1 Maret 2000, Komnas HAM membentuk KPP HAM Tanjung Priok, dipimpin Djoko Soegianto dibantu delapan orang anggota; Aisyah Amini, BN Marbun, Albert Hasibuan, Samsudin, Charles Himawan, Syafruddin Bahar, Mohammad Salim, dan satu nama lagi utusan dari luar Komnas HAM. Mereka memiliki waktu tiga bulan untuk mengumpulkan pelbagai informasi dan mengundang saksi-saksi dan pelaku. Hasilnya kelak diharapkan dapat dijadikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR untuk pertimbangan hukum

25 Korban Priok Siap Membawa Kasusnya Ke DPR yang Baru", Republika, 25 September 1999.

26 Pada titik ini perdebatan mengenai bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan kasus Tanjung Priok muncul dari korban, keluarga korban, pegiat kemanusiaan, akademisi, dan para politisi. Perdebatan itu berkisar pada apakah menuntaskan persoalan peristiwa Tanjung Priok lewat pengadilan Hak Asasi Manusia, atau melalui lembaga alternatif, yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Banyak di antara pelbagai institusi, seperti LBHI, KontraS, korban, keluarga korban, dan beberapa organisasi pegiat kemanusiaan lebih memilih cara yang pertama. Alasan utama mereka adalah adanya temuan-temuan awal hasil penyelidikan mereka, bahwa kejahatan yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984 bukanlah tindakan pidana biasa, namun kejahatan terhadap kemanusiaan yang memerlukan pengadilan hak asasi manusia. Gagasan ini mengacu pada UU Hak Asasi Manusia (no.39/1999) yang disahkan oleh DPR dan kemudian diikuti pengumuman peraturan pemerintah tentang pengadilan HAM (No.1/1999). Dengan demikian, penyelesaian peristiwa Priok lewat pengadilan HAM Ad Hoc sangat dimungkinkan (serupa dengan kasus Timor Timur) Priyambudi Sulistiyanto, Keadilan Transisional Di Indonesia Pasca-Soeharto: Kasus Pembantaian Tanjung Priok", hal. 34-35.

yang diperlukan. Tapi, komposisi keanggotaan yang hampir didominasi anggota Komnas HAM dengan kemampuan yang sangat diragukan para korban, keluarga korban, dan pegiat kemanusiaan, apakah mereka benar-benar memiliki keberanian untuk memanggil Benny Moerdani dan Try Sutrisno untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Terlebih lagi dengan adanya Djoko Soegianto yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa Priok. Jadi, tambah mereka, sikap kompromi dan tawar menawar antara KPP HAM dan pelaku sangat dimungkinkan terjadi.[27]

Pada 21 September 2000, KPP HAM memeriksa satu persatu saksi korban kasus Tanjung Priok. Sekitar 90 saksi memberikan testimoninya. KPP HAM, atas desakan para korban dan keluarga korban,[28] antara bulan April dan Mei 2000 memanggil sejumlah perwira tinggi militer yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut, untuk memberikan kesaksiannya.[29] KPP HAM juga menyelidiki tempat-tempat dikuburkannya para korban kasus Tanjung Priok. Sayang, mereka hanya melakukan peninjauan lokasi untuk memverifikasi keterangan para saksi kepada tim KP3T (Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tanjung Priok). Mereka enggan membongkar lokasi kuburan yang diduga sebagai tempat penguburan massal.[30] Kondisi ini membuat para korban, keluarga korban, dan pegiat kemanusiaan semakin menyangsikan keseriusan KPP HAM dalam mengusut kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok. Menurut mereka, KPP HAM sekedar formalitas untuk memenuhi permintaan publik. Ini terlihat dari kinerja KPP HAM selama ini. Puncak ketidakseriusan KPP HAM Tanjung Priok tampak pada laporan hasil temuan yang kemudian direkomendasikan kepada DPR dan pemerintah, yaitu berupa dokumen kontra-justisia yang tidak bisa ditindaklanjuti dalam proses pengadilan

27 "Djoko Soegianto Pimpin KPP HAM Tanjung Priok", Suara Pembaharuan, 8 Maret 2000, "KPP HAM Priok Didominasi Anggota Komnas HAM, Kompas, 8 Maret 2000.

28 "Djoko Soegianto Pimpin KPP HAM Tanjung Priok", Suara Pembaharuan, 8 Maret 2000, "KPP HAM Priok Didominasi Anggota Komnas HAM, Kompas, 8 Maret 2000. Sebagaimana diungkap oleh Abdul Qodir Djaelani, yang saat itu menjabat anggota Komisi I DPR RI, "Kalau para jenderal itu tidak mau dipanggil, biarkan rakyat yang akan memanggil. Nanti rakyat sendiri yang akan mengadili. Ini baru namanya pengadilan rakyat". Sedangkan para saksi, keluarga, dan korban Priok yang lain berencana mendirikan tenda keprihatinan di depan kantor Komnas HAM, sebagai bentuk keprihatinan dan protes kepada KPP HAM atau KP3T (Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM Tanjung Priok) agar bekerja secara serius dan tidak main-main. "Presiden Harus Berani Adili Kasus Priok", Republika, 24 April 2000.

29 Di antara perwira tinggi militer itu adalah Rudolf Butar Butar (Mantan Komandan Distrik Militer Jakarta Utara), Alif Pandoyo (Mantan Asisten Operasi Daerah Militer Jakarta), Try Soetrisno (Panglima Daerah Militer Jaya), dan Benny Moerdani (Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

30 "KPP HAM Priok Datangi Lokasi Makam", Kompas, 25 Mei 2000.

lebih lanjut.[31]

Rekomendasi ini sangat mengecewakan para korban dan pegiat hak asasi kemanusiaan. Selain tampak memihak pelaku, rekomendasi tersebut juga tidak bisa membuka jalan penyelesaian Tanjung Priok melalui langkah hukum. Para korban, keluarga korban, pegiat kemanusiaan, mahasiswa, dan elemen masyarakat yang peduli terhadap kasus ini pun mengekspresikan kekecewaan mereka dengan berdemonstrasi di depan kantor Komnas HAM mendesak agar Komnas HAM melakukan penyelidikan ulang. Mereka juga mendatangi Fraksi Bulan Bintang di gedung MPR agar turut mendesak Komnas HAM melakukan penyelidikan ulang terhadap kasus Priok.[32]

Saat membaca kekecewaan publik mengenai laporan KPP HAM tersebut, Presiden Abdurahman Wahid memerintahkan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan ulang terhadap kasus itu dengan memanfaatkan hasil laporan KPP HAM sebelumnya. Marzuki Darusman selaku Jaksa Agung kemudian mengembalikan laporan KPP HAM kepada Djoko Soegianto, ketua Komnas HAM sekaligus ketua KPP HAM. Alasannya, laporan tersebut tidak menying-

31 Di antara hasil analisis terhadap temuan yang diperoleh KP3T. Pertama, peristiwa Tanjung Priok terjadi karena sikap tanpa kompromi dari para pemrakasa pengerahan massa yang berhadapan dengan sikap kurang tanggap dan ketidaksiapan para petugas keamanan untuk merumuskan kebijakan serta mengambil langkah-langkah yang lebih arif, walaupun tanda-tanda akan terjadinya kekerasan massa sudah ada sejak empat bulan sebelumnya. Kedua, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh petugas keamanan tetapi juga oleh massa yang beringas. Ketiga, jenis pelanggaran HAM berat yang dilakukan petugas keamanan adalah (1) penghilangan nyawa di luar putusan pengadilan sebanyak 24 orang dan menyebabkan luka berat sebanyak 36 orang; (2) penyiksaan selama dalam pemeriksaan dan penahanan; (3) penimbulan rasa sakit; (4) penghilangan kebebasan beribadah salat Jum'at; (5) proses pemeriksaan tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP; dan penghilangan hak untuk memperoleh informasi. Keempat, jenis pelanggaran berat yang dilakukan oleh massa berupa: (1) penghilangan nyawa sembilan orang, yaitu keluarga Tan Kio Liem, termasuk seorang pembantunya, (2) pengeroyokan massa, (3) penimbulan rasa takut, (4) perusakan dan pembakaran hak milik atas rumah ibadah, rumah toko, apotek, kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua. Kelima, KP3T–meskipun tidak menggali kuburan–tidak menemukan bukti adanya pembantaian massal dengan sengaja atau terencana maupun adanya pemakaman massal. Penembakan yang terjadi oleh para petugas keamanan adalah dalam keadaan terdesak (force majeure) setelah adanya perlawanan massal terhadap ajakan damai dari pimpinan pasukan dan usaha perebutan senjata petugas oleh beberapa warga massa. Lihat, Ikrar Nusa Bakti, dkk, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru, Soeharto Di balik Peristiwa 27 Juli?, Bandung: Mizan, 2001, hal. 48-49.

32 Lihat. "Korban Tanjung Priok Tolak Hasil KPP HAM", Kompas, 21 Juni 2000. "HMI Minta Penyelidikan Priok Diulang", Republika, 24 Juni 2000. "HAMMAS Ancam Duduki Komnas HAM Jika Rekomendasi Tidak Dicabut", Republika 11 Juli 2000.

gung kemungkinan dilakukannya penggalian kuburan massal korban peristiwa Tanjung Priok.

Akhirnya, Komnas HAM membentuk tim KPP HAM yang baru untuk melakukan penyelidikan ulang kasus Priok. Dalam waktu dua bulan (Agustus-September 2000), Koesparmono Irsan, Ketua Komnas HAM, mantan perwira tinggi polisi, melalui bantuan tim pakar forensik Universitas Indonesia, Polri, RSCM, kalangan korban, pegiat kemanusiaan KontraS dan Elsam, mulai menggali tempat-tempat yang diduga sebagai kuburan massal korban peristiwa Tanjung Priok. Misalnya, Taman Pemakaman Umum (TPU) Mengkok Sukapura, Pondok Rangon, dan Condet.[33] Hasilnya, jumlah korban yang terbunuh pada 12 September 1984 lebih besar dari fakta yang disampaikan pihak militer selama ini. Selain terdapat bekas luka tembak dalam tempurung kepala salah satu korban, dari kuburan massal yang dibongkar itu juga terdapat jejak-jejak kekerasan pada tubuh korban yang lain.[34]

Pada 13 Oktober 2000, berdasarkan hasil temuan forensik dan pelbagai tambahan informasi, Djoko Soegianto, Ketua Komnas HAM, menyampaikan laporannya kepada Kejaksaan Agung dan merekomendasikan agar menyelidiki 23 orang yang diduga melakukan pelanggaran kemanusiaan di Tanjung Priok. Laporan ini cukup melegakan para korban, pegiat kemanusiaan dan pelbagai elemen masyarakat. Atas desakan mereka, Kejaksaan Agung membentuk tim penyelidik Ad hoc untuk menangani kasus tersebut pada awal tahun 2001. Salah satu tugas tim penyelidik Ad hoc adalah memanggil para korban dan pihak militer untuk memberikan kesaksian. Akhirnya, perjuangan mereka menuntut keadilan tidak sia-sia. Harapan mereka selama 16 tahun menemukan titik terang, terbukti dengan disahkannya Undang-Undang Pengadilan HAM (No.26/2000)[35] oleh DPR. Kondisi ini menambah keyakinan mereka atas masa depan penuntasan kasus tersebut, setidak-tidaknya untuk sementara.

---

33 Lihat. "Hari Ini, Komnas HAM Gali Makam Korban", Republika, 30 Agustus 2000; "Dua Makam Korban Tragedi Priok Digali", Bisnis Indonesia, 31 Agustus 2000; "Lima Kerangka Korban Tanjung Priok Ditemukan", Media Indonesia, 1 September 2000; "Tim Priok Angkat Tiga Kerangka dari Kramat Ganceng", Suara Pembaharuan, 13 September 2000.

34 Lihat. "Tulang Kepala Korban Hancur", Republika, 1 September 2000, "Mayat Korban Priok Ditemukan Lagi"Media Indonesia, 6 September 2000; "Mencari Jejak Korban Tanjung Priok", Media Indonesia, 12 September 2000; "Jumlah Korban Priok Lebih Banyak Dari yang Diakui" Kompas, 26 September 2000; "Penyebab Kematian Karena Senjata Api", Republika, 26 September 2000.

35 Dalam Undang-Undang HAM tersebut, bagian 43 pasal 1 menyatakan bahwa untuk menanggapi pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, pemerintah, dengan dukungan DPR, harus membentuk pengadilan hak asasi manusia ad hoc.

IV. KontraS, Pertemuan, dan Makna Sebuah Perjuangan

Sejak itulah aktivitis KontraS yang diwakili oleh Indria Fernida dan Vitor Da Costa sering menghubungi via telepon dan datang ke rumah kontrakan Yetty dengan meninggalkan kepadanya sebuah buku mengenai hukum. Awalnya Yetti kurang begitu menggubris mereka. Selain kedatangan mereka tidak terlalu meyakinkan sebagai aktivis yang akan memperjuangkan korban dan keluarga korban. Yetty masih percaya dengan organisasi korban yang dipimpin oleh Dewi Wardah sejak awal reformasi. Namun kepercayaannya menjadi sirna ketika ia berkunjung ke sekretariat organisasi korban di rumah Dewi Wardah. Sebagian besar korban dan keluarga korban sibuk membicarakan uang yang sudah diberikan oleh Try Soetrisno untuk urusan operasional mereka. Bertolak dari pembagian uang inilah kemudian Yayasan 12 September 1984 sebagai organisasi yang menaungi korban Priok terpecah. Kalangan korban yang merasa tidak mendapatkan pembagian yang adil atas uang yang diberikan oleh Try Soetrisno itu kemudian membuat kelompok sendiri. Mereka inilah yang kemudian mencoba merapat kepada Try Soetrisno dan membuat perwakilan korban dengan nama Tim Tujuh dengan organisasi korban yang bernama Yayasan Penerus Bangsa.[36]

Yetty merasakan ada yang tidak beres dalam dua organisasi itu. Ia lalu mencoba datang ke KontraS yang sebelumnya telah menawari untuk bergabung bersama-sama memperjuangkan kasus Tanjung Priok. Selain belajar mengenai hukum dan pasal-pasal yang terdapat di dalamnya dari membaca buku hasil pinjaman perpustakaan KontraS, selama di sanalah ia banyak mengikuti pertemuan-pertemuan guna membahas kasusnya dan juga kasus-kasus yang lain. Kesamaan visi dengan KontraS inilah yang membuatnya kemudian selalu mengikuti aktivitas yang terkait dengan upaya memperjuangkan kasus pelanggaran masa lalu, termasuk peristiwa Priok. [37]

Kecurigaan Yetty itu menjadi kenyataan. Pada 1 Maret 2001, sebagian besar kalangan korban dan keluarga korban dengan diwakili oleh Tim Tujuh telah melakukan perjanjian perdamaian lewat *islah* dengan pelaku di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Utara, 1 Maret 2001[38]. Pada saat itu, sebenarnya Kejaksaan

36 Wawancara dengan Yetty, Keluarga Korban Peristiwa Priok, 24 Januari 2009

37 Ibid

38 Kalangan Militer ini diwakili oleh Try Sutrisno, Sugeng Subroto, Pranowo, Soekarno, Rudolf A Butar-Butar, Sriyanto, dan H. Mattoani, BA sebagai pihak kedua, sedangkan pihak pertama yang diwakili oleh Tim Tujuh adalah Syarifuddin Rambe, Ahmad Sahi, Syafwan Sulaiman, Nasrun, HS, Asep Sapruddin, Sudarso, dan Siti Chotimah. Lihat. Booklet, Piagam Perdamaian Kasus Tragedi Tanjung Priok, Melangkah Menuju Islah, Jakarta 1 Maret 2001, hal 7. Islah sendiri adalah sebuah konsep penyelesaian secara damai dengan ajaran Islam. Dalam kasus Tanjung Priok, islah digunakan untuk demi persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus dalam rangka rekonsiliasi nasional, kedua

Agung siap membawa kasus Tanjung Priok ke pengadilan HAM ad hoc. Selain itu draft rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sedang dipersiapkan Departemen Kehakiman dan HAM. Karena itu, datangnya kesepakatan damai lewat *islah* sangat menguntungkan bagi mereka yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Ironisnya, sebulan setelah islah, pada bulan Maret 2001, Presiden Abdurahman Wahid mengumumkan Keppress No. 53/2001, tentang pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor-Timur dan Tanjung Priok.[39]

Akhirnya, kasus Priok memang dapat diangkat ke ruang publik yaitu dengan diselenggarakannya pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok. Tapi, akibat perdamaian lewat islah itu suara korban menjadi terbelah antara ingin menuntut peristiwa Priok dan melupakannya dengan jalan islah. Sebab itu, KontraS membuat sebuah pertemuan korban dan keluarga korban baik yang belum terangkul maupun sudah terangkul dalam islah di Wisma Hijau Cimanggis. Alasan KontraS merangkul korban yang sudah islah ini adalah karena mereka tidak tahu menahu secara jelas perjanjian dari islah itu. Tim Tujuh yang direpresentasikan oleh segilintir korban itulah yang memainkan mereka. Sedangkan tujuan pertemuan itu adalah untuk memberikan kepada mereka mengenai pelbagai persiapan menghadapi pengadilan yang akan segera diselenggarakan. Selama tiga hari, Yetty dan kalangan korban dan keluarga korban yang lain diberi pelbagai pengetahuan yang selama ini tidak pernah diketahui. Selain diberikan pengetahuan mengenai hukum dan pasal-pasalnya, mereka juga diinformasikan mengenai hak-haknya yang semestinya menjadi tanggung jawab negara, seperti kompensasi, rehabilitasi dan restitusi (KRR).[40]

Setelah beberapa hari dari pertemuan itu, KontraS juga mengadakan pertemuan kembali dengan korban dan keluarga korban di Utan Kayu. Mereka kembali diberikan pemahaman menyangkut kesiapan menghadapi pengadilan. Saat itu, KontraS mencoba mempersiapkan mental mereka agar tidak kaget, canggung dan merasa takut dalam menjalankan proses pengadilan ini. Ini karena, apa yang mereka tuntut itu adalah hak mereka dan juga proses pengadilan ini adalah jalan menuju pengungkapan kebenaran yang dahulu dibenamkan oleh rezim Orde Baru dengan mesin aparatusnya.

Tampaknya, pertemuan di Utan Kayu itu membuat pihak TNI berinisiatif lebih cepat. Mereka dengan mesin politiknya yang bernama Tim Tujuh menuju

belah pihak dengan penuh kesadaran, kebesaran jiwa dan ketulusan hati yang dilandasi ukhuwah Islamiah, wathoniah basyariah, saling memaafkan kejadian tersebut dengan segala akibatnya untuk selamanya.

39 Dalam proses selanjutnya keputusan itu diganti dengan Keppres No. 96/2001 seiring dengan naiknya Megawati menjadi presiden menggantikan Gus Dur.

40 Wanma Yetty, "Kehilangan Ayah, Kehilangan Masa Depan", hal. 73-74.

rumah-rumah korban dan keluarga korban. Mereka memanfaatkan kemiskinan dan kekurangan ekonomi yang dialami oleh korban dan keluarga korban dengan memberikan janji dan sejumlah kompensasi. Di sini, hasil kesepakatan antara para korban dan para pelaku adalah didirikannya sebuah lembaga yang bernama Yayasan Penerus Bangsa pada 1 Juni 2001. Yayasan ini dipimpin dan dikelola Ahmad Sahi, Syafwan bin Sulaeman, dan Asep Sapruddin. Tiga pelaku peristiwa Tanjung Priok, yakni Try Sutrisno, R.A. Butar Butar dan Sriyanto menjadi Dewan Pembina yayasan. Lembaga tersebut didirikan untuk mewadahi aspirasi yang kemungkinan belum tertampung dalam kesepakatan islah. Try Sutrisno dan kawan-kawan kemudian memberikan uang sejumlah 300 juta rupiah dan enam unit truk. Hal itu digunakan untuk biaya operasional yayasan tersebut.[41] Yayasan tersebut diharapkan mampu mengubah nasib korban dan keluarga korban.[42] Para korban atau ahli warisnya masing-masing menerima uang tali kasih sejumlah 2 juta rupiah dari Try Sutrisno.[43]

Sebetulnya, ia sudah merasakan strategi kotor akan langkah-langkah pihak militer itu. Ia mendapatkan kabar dari seorang pengurus korban Tanjung Priok (Tim Tujuh) bahwa sebelum pertemuan di Wisma Hijau Cimanggis dia pamit dahulu kepada Try Sutrisno dan Sriyanto. Maka ada korban yang sebelumnya bertekad bulat untuk melangkah ke pengadilan, jadi berbelok. Ia akui, uang memang bisa menjadi segalanya bagi korban dan keluarga korban yang hidup dalam kondisi ekonomi di bawah rata-rata. Upaya pembelokkan itu dilakukan oleh Tim Tujuh dengan gerakan pelbagai macam, dari mulai iming-ming materi hingga berupa ancaman dan teror, sehingga melemahkan korban dan keluarga korban yang ingin melakukan upaya penuntutan.[44]

Dalam konteks ini Yetty sadar bahwa ia tidak bisa menyalahkan kalangan korban dan keluarga korban yang melakukan islah, meskipun kesepakatan itu membuatnya dan teman-teman yang konsisten mendukung pengadilan HAM menjadi terpukul. Ia tidak gentar. Ia menghubungi teman-teman yang masih kuat dan mengerti atas hak-haknya. Yetty dan kalangan korban yang kontra islah kembali menghubungi KontraS dan bertemu dengan korban-korban yang masih konsisten. Saat itu hanya tinggal 14 orang yang berjalan bersama KontraS menuju pengadilan. Ia tetap bertekad meski cibiran datang tak henti-hentinya termasuk dari sejumlah korban sendiri yang dahulu sama-sama berjuang yang

41 Kesaksian Syarifuddin Rambe dalam sidang Mayor Jenderal (Purn.) Pranowo, tanggal 11 November 2003. Lihat. Rinto Tri Hasworo, Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penyelesaian Kasus Tanjung Priok Lewat Pengadilan HAM Ad Hoc, Skripsi Fakultas Hukum Indonesia, 2006, hal. 64 (tidak dipublikasikan).

42 "Mantan Petinggi TNI dan Korban Tanjung Priok Islah, Pak Try-Cak Nur Hadir, Dewi Wardah Menangis". Republika, 8 Maret 2001.

43 "Dewi Wardah Mengaku Terima Uang dari Try Sutrisno", Koran Tempo, 10 Juli 2001.

44 Wawancara dengan Yetty, Keluarga Korban Peristiwa Priok, 25 Januari 2009.

menyatakan bahwa pengadilan kasus Tanjung Priok itu hanya "*janji-janji buta*". Menurut mereka sangat tak mungkin pengadilan dapat menghukum pelaku. Kalaupun tetap tidak digelar, itu itu cuma ilusi, bukan bentuk kesungguhan pemerintah. Tapi ia tidak pesimis. Ia harus kuat. Ia tidak boleh berputus asa, walaupun kejenuhan dan kebosanan selalu menghantui. Menurutnya, inilah perjuangan yang semakin dekat, semakin berat.

Akhirnya, Tuhan mendengar dan mengabulkan semua doa dan jerih payah Yetty dan kalangan korban yang lain. Setelah mereka melakukan audiensi dengan Kejaksaan Agung bersama aktivis KontraS pada bulan Agustus 2003 untuk mempertanyakan kepastian pengadilan HAM, maka sebulan kemudian, 14 September 2003 Pengadilan HAM Ad Hoc itu digelar. Dalam pengadilan itu berisi pembacaan dakwaan terhadap Sutrisno Mascung CS, Komandan regu III dari Yon Arhanudse beserta 11 anak buahnya di Pengadilan HAM Jakarta Pusat. Mereka didakwa melakukan pelanggaram HAM berat meliputi pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan penganiayaan.[45]

Namun dalam proses perjalanan pengadilan HAM itu terdapat beragam hambatan dan persoalan yang justru itu didukung oleh kalangan korban dan keluarga korban yang pro islah. Di antaranya adalah pertama, teror yang dilakukan sebagian besar korban yang pro islah dan anggota TNI untuk melemahkan kesaksian mereka yang kontra islah. Ini terlihat selama proses persidangan pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok berlangsung. Tujuannya pertama, agar korban yang kontra islah mengurungkan niat mereka memberikan kesaksian. kedua, adanya pengingkaran kesaksian yang dilakukan oleh sebagian besar kalangan korban peristiwa Tanjung sebagai bentuk proteksi terhadap pelaku. Ketiga, lemahnya kinerja proses hukum Kejaksaan Agung dalam pelaksanaan persidangan turut menjadi faktor penentu penghambatan pada proses upaya pengungkapan kebenaran dalam pengadilan HAM tersebut. Akibatnya, sejak September 2004 hingga 28 Februari 2006, aparatus militer yang seharusnya menerima ganjaran atas tindakan pelanggaran yang dilakukannya di tingkat kasasi mereka semua telah dibebaskan. Pembebasan ini menjadi citra buruk untuk Kejaksaan agung dan juga institusi hukum di mata masyarakat Indonesia dan internasional.

Namun terbebasnya pelaku dan tidak tuntasnya persoalan kasus Tanjung Priok tidak meluruhkan mental dan sikap perjuangan Yetty. Ia masih terus berjuang dalam melakukan upaya penuntutan peristiwa Tanjung Priok dengan mencoba melihat beragam kemungkinan agar peristiwa Priok dapat diangkat kembali. Perjuangan itulah yang dimulai sejak ia bergabung dengan IKOHI pada bulan Maret 2002 sebagai salah seorang keluarga korban yang telah kehilangan ayahnya pada pemilihan Ketua IKOHI yang baru, Mugiyanto. Di sinilah in-

45 Lihat Monitoring Pengadilan untuk Kasus Tanjung Priok 1984, ELSAM 2004.

telektualitas, mental, dan juga daya advokasi Yetty mulai terbangun. Ia sudah mulai mengorganisir korban untuk melakukan upaya penuntutan kasus-kasus mereka, termasuk kasusnya sendiri.[46]

Berkat kegigihannya berjuang dalam mengorganisasi korban dan keluarga korban peristiwa kejahatan masa lalu yang lainnya, atas konsorsium lembaga dan komunitas yang bergerak di bidang HAM, termasuk KontraS, ia terpilih menjadi ketua IKOHI Jakarta. Selain rasa penuntutan keadilan yang terdalam atas hilangnya sang Ayah, keinginan Yetty untuk terjun dalam dunia aktivitas pembela HAM ini adalah panggilan hati melihat dukungan beragam elemen atas kasus Priok yang begitu besar pada tahun 2004. Jika KontraS mengawal seluruh kalangan korban dan keluarga korban pada tingkatan hukum upaya penuntutan kepada Negara, tugas Yetty di IKOHI adalah melakukan penguatan dan pemberdayaan korban dengan melakukan beragam pembelajaran mengenai hukum-hukum yang harus diketahui oleh mereka. Dengan demikian, adanya pengetahuan hukum dan juga hak yang semestinya dimiliki dan melekat dalam diri kalangan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, maka mereka tidak mudah untuk digoyahkan ataupun dirayu oleh para pelaku lewat "tangan-tangannya" yang itu seringkali berasal dari kalangan korban sendiri.[47]

Di sini, ia akan terus melakukan penuntutan dan memperjuangkan haknya yang pernah dirampas sebagai anak yang membutuhkan figur seorang ayah. Salah satu faktor mengapa ia begitu gigih untuk memperjuangkan kasusnya dan juga kasus-kasus sesama korban kejahatan rezim masa lalu yang lainnya adalah ungkapan sang ayah yang hingga kini masih terpatri, "*Enggak usah takut, jika kamu merasa benar, kamu harus tetap mempertahankannya*". Memang sang ayah begitu keras kepada Yetty dan adik-adiknya, namun sikap keras itu ternyata mendorong ia untuk tetap berjuang atas hak yang pernah dirampas, yaitu sang ayah yang terkasih.

V. Harapan-Harapan

Selain harus menghidupi ibunya, Yetty juga harus membayar kontrakan rumah setiap bulannya yang terbilang mahal. Sementara pekerjaan sebagai aktivis HAM tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua itu. Dalam konteks inilah terbersit keinginan olehnya untuk mengundurkan diri dari Ketua IKOHI Jakarta. Ia merasa sudah tidak bisa bersiasat lagi dalam menegosiasikan posisi dan kebutuhan hidup keluarga yang harus dijalani. Satu sisi Yetty ingin terus memperjuangkan peristiwa Priok yang telah merubah seluruh alur kehidupannya, namun pada sisi yang lain ia juga harus survival secara ekonomi

46 Wawancara dengan Yetty, Keluaga Korban Peristiwa Priok, 8 April 2009.
47 Ibid

Seluruh proses perjuangannya bersama KontraS dan aktivitas di IKOHI telah membentuknya menjadi anggota keluarga korban yang mengerti hukum. Sejumlah pelatihan, seminar, dan konferensi mengenai hukum dan HAM telah ia ikuti. Sebab itu, bagi Yetty, hal semacam itu memang dibutuhkan, tapi tidak terlalu mendesak. Yang dibutuhkan olehnya saat ini adalah kursus bahasa Inggris. Alasannya, ia seringkali berinteraksi dengan orang luar negeri baik itu untuk kebutuhan diwawancarai sebagai keluarga korban, sekedar datang ke IKOHI untuk bersosialisasi dan mengenal lebih dalam dari orang luar negeri itu, ataupun pertemuan korban internasional di beberapa negara terutama di Asia.

Setiap aktivitas pertemuan itu, ia selalu didampingi oleh seorang teman yang bisa menterjemahkankan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris dan sebaliknya. Namun, ia merasa tidak puas saja atas apa yang diterjemahkan itu. Ini karena, seringkali dalam proses menterjemahkan itu ada hal-hal yang terkurangi dengan tidak sengaja. Terlebih lagi, sebagai keluarga korban, dengan diterjemahkan semacam itu, ia tidak bisa mengungkapkan emosi terdalamnya dalam berbicara. Sungguh berbeda memang, berbicara atas nama sendiri dengan direpresentasikan oleh orang lain yang tidak mengalami langsung satu peristiwa kelam yang dialami. Dengan kelemahan kemampuan bahasa Inggris inilah ia kerap merasa rendah diri dengan teman-teman yang lain sebagai ketua IKOHI Jakarta. Terlebih lagi ketika diutus untuk melakukan pertemuan atau konsolidasi korban di Aceh dan beberapa daerah di mana ada orang luar negeri yang seringkali datang. Perasaan mindernya pun semakin muncul.

Yetty sangat mengerti dengan kondisi KontraS sebagai lembaga yang memperjuangkan HAM dengan menjunjung tinggi idealisme. KontraS bekerja bekerja dan mengabdikan diri kepada upaya penyelesaian seluruh pelanggaran HAM di Indonesia. Di sini, seluruh lapisan korban dirangkulnya, tanpa kecuali. Karena itu, sangat tidak etis untuk Yetty sebenarnya jika ingin meminjam uang untuk mencukupi modal cateringnya yang akan dijalankan nanti. Apalagi meminta uang kepada KontraS atas kebutuhan mendesak yang diinginkannya. Ia hanya berharap adanya pinjaman modal berupa uang kepada dirinya agar bisa mengembangkan usaha yang sudah dirintisnya sejak sepulang dari Malaysia. Setidaknya dengan peminjaman uang untuk modal ini ia dapat sedikit bernafas lega untuk mengembangkan usahanya dan juga melakukan upaya advokasi kasusnya dan membantu kasus-kasus pelanggaran HAM yang lain. Dukungan peminjaman modal usaha inilah yang sebenarnya sedang dan baru tahap pemikiran oleh lembaga reparasi yang baru dibentuk beberapa bulan itu

Meniti Jalan tanpa Ujung

Bedjo Untung

Korban Peristiwa 1965 – 1966

I. Dimulai dari Peristiwa Gerakan 30 September 1965

Gerakan 30 September 1965/1966 merupakan peristiwa luar biasa yang melahirkan tragedi kemanusiaan paling besar pada abad ke 20 setelah pembunuhan etnis Yahudi oleh rezim Hitler.[1] Tragedi ini menelan korban ratusan ribu orang, bahkan ada yang menyebutkan jutaan orang terbunuh dan atau hilang tanpa jejak. Para keluarga yang ditinggalkan tidak kalah menderita, mereka tersingkir dari kehidupan sosial, tidak bisa mengakses layanan publik layaknya warga negara yang memiliki hak warga, kesulitan mencari penghidupan ekonomi, dan kehilangan hak sipil dan politiknya.[2] Pemerintah menandai anak turun temurun dari orang-orang yang diidentifikasi sebagai anggota atau yang berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia dengan status ET (Eks Tapol, ditulis dalam Kartu Tanda Penduduk) setelah mereka dibebaskan penjara. Sebelumnya, mereka dikejar, diburu, ditangkap, dan dipenjarakan tanpa proses pengadilan, disiksa, dipaksa bekerja dan dinistakan. Gerakan pemerintah yang dipromosikan oleh Orde Baru itu mendapatkan dukungan dari banyak kelompok masyarakat yang turut menolak, menyingkirkan, bahkan ikut mengeksekusi anggota atau yang diduga anggota PKI. Hingga kini ketika konsep hak asasi manusia mulai dipromosikan dengan masif melalui media massa, kampanye publik dan berbagai cara pendekatan lainnya, rupanya masih banyak kelompok masyarakat yang tidak mau mengakui keberadaan para keluarga korban tragedi 1965/1966.

Beberapa orang yang memiliki akses dan kemampuan untuk melakukan advokasi telah mencoba mendukung keberadaan komunitas korban dan keluarga korban peristiwa 1965/1966. Salah satu organisasi yang sejak awal didirikannya berkomitmen untuk memperjuangkan kembalinya hak-hak korban, juga melakukan penelitian untuk meluruskan sejarah yang telah disalahtafsirkan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi pada September 1965, adalah Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP 1965/66). Kini YPKP dikepalai oleh Bedjo Untung, seorang aktivis yang pernah dipenjara selama 13 tahun tanpa

1Jumlah korban pembunuhan missal Yahudi (holocaust) selama 12 tahun antara tahun 1933-1945 lebih kurang 9-11 juta Jiwa. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Holocaust diakses pada 30 Januari 2009. Sementara dalam waktu 2 tahun dari tahun 1965-1966 di bawah pemerintahan Suharto korban PKI yang meninggal dan hilang kurang lebih 800 – 1juta jiwa, http://www.mail-archive.com/siarlist@minipostgresql.org/msg00875.html diakses pada 30 Januari 2009.

2 Peristiwa pembunuhan massal 1965-1966 adalah suatu tagedi kemanusiaan yang maha dahsyat di abad 20 sesudah perang Dunia II, dapat disejajarkan dengan facisme Hitler di Jerman, mengalahkan jumlah korban Perang Vietnam selama tiga tahun, padahal Indonesia hanya tempo 3 sampi 4 bulan korbannya mencapai 500.000-sampai 3.000.000 jiwa. Bukan itu saja korban masyarakat sipil tersebut bukan di masa perang tetapi masa damai. Tidak ada pengumuman peran. Ligat hasil wawancara dengan Pak Bejo Untung pada tanggal 1 Februari 2009

proses peradilan. Bedjo sempat dipindahkan dari satu penjara kepada penjara lainnya yaitu Penjara Salemba, Tanggerang dan Cipinang.[3]

I.1. Makna Peristiwa G 30 S Tahun 1965

1. Hanya Boleh Satu Pengertian tentang G30/S sebagai Gerakan Makar/Pemberontakan

Pada rezim Suharto, tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila. Untuk memperingatinya, anak-anak sekolah diwajibkan menonton film G/30S/PKI. Film ini berkisah mengenai Pemberontakan PKI menentang kedaulatan NKRI dan memvisualisasikan kebrutalan PKI dalam membunuh anggota Dewan Jendral, hingga akhirnya membuang mereka di sebuah sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sebelum jendral-jendral itu meninggal, mereka disiksa dengan cara menyayat kulit mereka memakai silet, menyulut mereka dengan rokok dan siksaan lainnya yang dilakukan oleh tentara Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Gerwani sendiri dalam film itu diidentikkan sebagai sayap perempuan dari organisasi PKI. Dalam suasana penuh siksaan itu, Gerwani diilustrasikan sebagai kerumunan perempuan yang tengah melakukan pesta seks (harum bunga) ketika para jenderal mengalami penyiksaan.

Orang-orang yang dibesarkan ketika Orde Baru berkuasa akan mengingat film itu, karena Orde Baru melalui stasiun televisi nasional (TVRI) akan menayangkan film *Pemberontakan G/30S/PKI* tepat pada malam 30 September. Tontonan film tersebut berusaha mengkonstruksikan pikiran masyarakat Indonesia untuk meyakini bahwa PKI sebagai organisasi massa dan salah satu partai terbesar di Indonesia memang ingin melakukan pemberontakan dengan cara-cara di luar nalar manusia. Orde Baru sebagai penguasa absolut kemudian melakukan propaganda atas sepak terjang PKI, dengan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi sesat yang tidak meyakini keberadaan Tuhan. Propaganda semakin digencarkan dengan membangun ilustrasi tentang kekejian PKI dan Gerwani yang melakukan pesta seks, ketika para jenderal mengalami penyiksaan.

Generasi muda diajak untuk memberi penilaian negatif terhadap mereka yang memiliki irisan dengan PKI. Namun sayangnya, para orang tua dan komunitas di tengah masyarakat tidak memiliki keberanian untuk memberikan pemahaman kepada para generasi muda tentang apa yang sesungguhnya terjadi, hal ini sangat mungkin berkaitan dengan kesimpangsiuran sejarah yang terjadi di balik peistiwa itu. Ambiguitas itu justru melahirkan dukungan penuh kepada pemerintah dengan mengamini keseluruhan isi film tersebut.Kondisi tersebut semakin memperkuat posisi pemerintah untuk tetap mereproduksi cerita keke-

3 Wawancara dengan Bedjo Untung, 25 Januari 2009.

jian PKI. Tidak hanya itu, kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto selama 32 tahun juga berhasil meluaskan diskriminasi terstruktur terhadap para korban dan keluarga korban peristiwa 1965/1966. Tidak ada seorang pun yang menentang tindakan diskriminatif itu. Apalagi PKI dicitrakan telah melecehkan simbol kesalehan ummat, sehingga rasanya setiap orang memiliki keabsahan untuk membenci mereka.

I.2. Keterkaitan Internasional

Apa yang terjadi seputar peristiwa 1965/1966 tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi di dunia internasional. Situasi Perang Dingin yang berlangsung antara tahun 1941 hingga 1947, menimbulkan ketegangan yang mewarnai Blok Barat yang dikomandoi oleh Amerika dan sekutunya versus Blok Timur yang dikomandoi oleh Uni Soviet dan sekutunya. Perang Dingin merupakan periode di mana terjadi konflik, ketegangan, dan kompetisi antar kedua belah pihak setelah berhentinya Perang Dunia II, hingga runtuhnya tembok pemisah antara Jerman Barat dan

Jerman Timur (1941-1947).[4]
Masing-masing negara pihak yang berseteru pada Perang Dingin, saling berlomba untuk menanamkan pengaruhnya di Indonesia dan negara-negara dunia ketiga yang ingin meraih kemerdekaan. Pengaruh Blok Barat yang tertanam pada golongan kanan yang menyetujui ide-ide liberalisme-kapitalisme, berhadapan dengan gagasan Blok Timur yang menyepakati ide sosialisme-kolektivisme, termasuk dalam hal ini adalah organisasi PKI yang memiliki hubungan baik dengan Partai Komunis China dan Partai Komunis Uni Sovyet.[5] Pertarungan kepentingan di Indonesia akhirnya dimenangkan oleh pihak yang pro Barat, dengan serta merta menihilkan posisi pendukung Blok Timur. Dari segi pengaruh Perang Dingin, Soeharto merupakan suksesor nasional yang ikut memenangkan pertarungan Blok Barat dan Blok Timur di Indonesia.

I.3. Komunis Sebagai Hantu

Tragedi 1965/1966 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang pernah terjadi sepanjang sejarah bangsa-bangsa di dunia. Peristiwa itu tidak saja menimbulkan rasa takut yang menggoncang akal sehat dan hati nurani seluruh masyarakat Indonesia kala itu, namun juga tragedi itu telah berhasil menimbulkan trauma kolektif berkepanjangan, di mana di dalamnya terkandung fakta-fakta kematian, penyiksaan, kekejian yang bertentangan dengan nilai-nilai

4 http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dingin.
5 DPP. LPR-KROB, DPP. LPKP 65 dan DPP. PAKORBA, Ringkasan Fakta Kebenaran Korban Tragedi 1965, pen. Forum kerjasama DPP. LPR-KROB, DPP. LPKP 65 dan DPP. PAKORBA, Jakarta, 2005, hal. 2

kemanusiaan yang tidak bisa dielakkan. Penandaan akan peristiwa kesadisan ini kemudian melekat pada frase "komunis". Frase itu menjadi momok, terlarang untuk dilafalkan apalagi untuk dipikirkan. Frase komunis dari waktu ke waktu sangat identik dengan peristiwa 1965/1966. Dalam hukum logika, setiap momok akan selalu membutuhkan penyebab, setiap kejahatan juga membutuhkan penjahat, dan setiap kesakitan membutuhkan penyakit. Frase komunis dipakai dari waktu ke waktu untuk menyangga apa yang telah terjadi peristiwa 1965/1966. Frase komunis digunakan untuk menandai para penjahat, diungkapkan untuk menghindari penyakit yang mengerikan: komunisme.

Layaknya penyakit yang gampang menular, nalar publik akan mudah melihatnya sebagai sesuatu yang harus dihindari dan dijauhkan dari ingatan kolektif. *Penyakit* ini diwacanakan dan diimajinasikan sebagai politik ingatan yang sangat menakutkan, bak hantu-hantu yang bergentayangan menghubungkan manusia dengan kematiannya. Cerita sukses Orde Baru memberangus ingatan pinggiran dari sebuah tragedi kemanusiaan, rupanya tidak serta merta meng hentikan wacana anti komunis untuk berkembang dari tahun ke tahun di tengah masyarakat. Kelompok-kelompok yang mendeklarasikan dirinya sebagai pembela Pancasila dan kedaulatan NKRI adalah cermin diri dari ketakutan jangka panjang sebuah komunitas bangsa yang tidak memiliki keberanian untuk menghadapi trauma dari peristiwa 1965. Trauma besar ini akan membutuhkan "yang lain" (liyan) untuk dijadikan kambing hitam, siapa lagi jika bukan PKI dengan segala label yang dicapkannya. Aku tidak boleh *ketularan* penyakit, "yang lain" tidak boleh bercampur dengan "aku" supaya aku selamat, karena "yang lain" itu memiliki kemungkinan untuk bercampur dengan "aku". Komunis sebagai "yang lain" sebetulnya mencerminkan gambaran mengenai ketakutan diri dari "aku" itu sendiri.[6]

I.4. Keluarga Korban Pasca-Tragedi 1965

Siapakah korban tragedi 1965/1966? Alasan patriotis dan moralis banyak dipakai sebagai dasar pengabsahan tindakan diskriminatif dan penyisihan kepada mereka yang terlibat dalam PKI rupanya berfungsi efektif. Kriminalisasi terhadap bekas anggota PKI, simpatisan dan keluarga mereka dilakukan sangat intensif dan sangat efektif untuk menggiring pemahaman publik atas PKI sebagai pihak yang ingin menghancurkan kesatuan republik Indonesia. Tindakan kriminalisasi terhadap eks tapol dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai bentuk pendekatan. Cerita mengenai pemberontakan PKI disebarluaskan melalui medium materi pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah. Materi itu dijadikan sebagai materi wajib ajar dalam pelajaran sejarah dan pendidikan moral di sekolah-sekolah. Bahan ajar itu diperkuat juga den-

6 Budiawan, Mematahkan Pewarisan Ingatan, Wacana Anti-Komunis danPolitik Rekonsiliasi Pasca-Suharto, pen. ELSAM, cet. Kedua, 2004, hal. 16

gan diputarnya film "Pemberontakan G/30S/PKI" secara periodik di TVRI yang saat itu masih menjadi media audio visual serta pemberitaan yang sangat dihandalkan.

Kesadaran yang timbul dari informasi tunggal tersebut tidak memungkinkan untuk menumbuhkan rasa empati terhadap korban dan keluarga korban tragedi 1965/1966. Tampaknya negara masih belum bisa memberikan ruang atas apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka impikan. Dalam situasi yang tidak mengenal informasi pembanding, apa yang dialami oleh eks tapol untuk mencari sumber keadilan dan kebenaran adalah sebuah kemustahilan.

II. Penjara tanpa Pengadilan

Apa yang dialami oleh Bedjo Untung tidak berbeda dengan yang dialami oleh banyak anggota keluarga PKI di seluruh Indonesia. Pihak yang terlibat dengan aktivitas PKI baik itu anggota aktif maupun simpatisan akan diburu, ditangkap, dibunuh dan dihilangkan pada tahun 1965-1966. Tidak hanya itu, keluarga mereka juga akan diperlakukan sama dan status yang sama sebagai penjahat yang perlu disingkirkan. Semua tindakan ini dilakukan tanpa melalui proses pengadilan dan prinsip kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*). Perampasan hak-hak sipil dan penghilangan orang secara paksa melalui operasi rahasia yang dilakukan di seluruh Indonesia, di mana tindakan tersebut dibenarkan sebagai legitimasi atas sebuah kondisi untuk menghadapi kelompok makar yang akan memberontak.

Banyak orang mulai mempertanyakan apakah PKI benar-benar melakukan pemberontakan tersebut? Apakah PKI ingin merebut kekuasaan dari presiden Sukarno yang mereka dukung secara penuh? Apakah mereka perlu melakukan kudeta untuk merebut kekuasaan dari tangan pemerintah yang sah di saat mereka secara politik memiliki dukungan dari masyarakat luas, dan hanya menunggu waktu yang tepat melalui proses prosedural pemilu untuk merengkuh kemenangan mutlak? Apakah mereka benar-benar siap dan memiliki senjata yang memadai untuk melakukan sebuah kudeta? Dari mana senjata itu mereka miliki, di mana senjata itu disimpan? Apakah ada laporan data yang meyakinkan tentang itu semua? Bagaimana peran partai-partai lain yang kalah dalam pemilu sebelumnya? Siapakah Dewan Jenderal tersebut? Apakah cukup masuk akal para pengikut Sukarno seperti Jendral M. Yani akan membunuh Sukarno bersama Jendral lainnya? Mengapa letkol Untung sebagai pasukan pengawal presiden Cakrabirawa saat akan bertindak menumpas Dewan Jendral dibantu oleh Suharto dengan mendatangkan dua batalyon siap tempur dari Jawa Tengah (Yon 454 Banteng Raider Diponegoro) dan Jawa Timur (Yon 530 Brawijaya)? Dan, apa hubungan Dewan Jenderal dengan PKI sebenarnya?

II.1. Mencabut Akar Rumput

Pada tahun 1966 dilakukan sidang MPRS untuk membubarkan PKI selamanya sebagai entitas partai politik di Indonesia melalui tap MPRS No. 25/1966. PKI sudah bubar dan tidak diakui sebagai satuan politik setahun setelah 1965. Setahun kemudian, setelah para tokoh utama ditangkap dan dipenjarakan, larangan dilanjutkan melalui tap MPRS No. 33/1967, berisi tentang aturan bersih diri, bersih lingkungan dari ajaran-ajaran dan keterkaitan dengan eks PKI.[7]

Dengan dua aturan ini ditambah aturan-aturan yang diskriminatif, PKI menjadi organisasi terlarang, paham *marxisme* sebagai ideologi PKI dilarang untuk dipelajari dan diajarkan, dan seluruh bekas anggota PKI beserta keluarganya dilarang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, kehilangan hak dan kebebasan sipil dan berbagai hak-hak dasar warga negara lainnya. PKI dan paham marxisme telah dicabut sampai ke tingkat akar rumput.

II.2. Dihabisinya Hak Asasi Manusia

Menempatkan konteks HAM untuk memahami tragedi 1965/1966 menjadi sesuatu yang membingungkan. Di masa itu tidak banyak orang mengenal apa itu hak asasi manusia. Mungkin hanya sedikit orang yang sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dan kebetulan mengambil pelajaran hukum dengan tema hak asasi manusia, sedikit banyak bisa memahaminya. Dengan pengertian sederhana dan sumir-nya pengertian atas terminologi HAM, maka publik tidak akan peka untuk menyangkutpautkan konteks PKI – tragedi 1965/1966 dengan perkembangan konsep HAM di dunia. Mereka adalah penjahat, dan penjahat perlu dipenjara. Dengan demikian, hakekatnya pemerintah telah mencerabut hak asasi dari masyarakat yang memilikinya. Pemerintah tidak saja merampas dan mencabut seluruh hak itu dari korban 1965/1966, yang notabene diidentikan dengan anggota PKI, simpatisan dan seluruh keluar ganya, namun juga dari seluruh masyarakat Indonesia; karena membatasi akses informasi, akses keadilan dan kebenaran untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam peristiwa tersebut.

Para korban yang menjadi *eks* tapol dan seluruh dan keluarga besar mereka juga mengalami trauma mendalam terhadap peristiwa yang menimpa diri mereka. Peristiwa itu tidak hanya mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang besar, namun juga peristiwa itu telah mengorbankan banyak kesempatan atas hidup yang lebih baik dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Para korban dan keluarga korban yang kini sudah berusia lanjut masih banyak memendam cerita yang belum berani mereka bagi. Cerita itu bersumber dari ingatan atas

7 DPP. LPR-KROB, DPP. LPKP 65 dan DPP. PAKORBA, ibid, hal. 36.

peristiwa yang langsung mereka alami, mereka rasakan, mereka lihat, dan mereka dengar. Hanya sebagian kecil saja korban dan keluarga korban yang telah diorganisir oleh YPKP, mulai berani untuk menyampaikan pendapatnya, membagikan pengalamannya kepada publik. Butuh pendekatan yang baik dan upaya pemulihan komprehensif, supaya mereka dapat mengekspresikan perasaan dan pendapat mereka secara aman dan mendapat jaminan perlindungan dari negara ketika mereka membagi sejarah oral dan ingatan kepada publik. Tuturan ingatan tersebut bisa dijadikan sebagai informasi pembanding terhadap sejarah PKI versi Orde Baru. Ingatan mereka menjadi sumber sejarah yang tersisa. Sayangnya, tidak jarang generasi muda dari keluarga besar mereka sudah tidak ingat kisah yang dialami oleh orang tua mereka. Upaya membongkar sejarah 1965/1966 menjadi proyek utama yang masih dikembangkan hingga kini. YPKP sebagai organisasi korban dan keluarga korban tragedi 1965/1966 sudah memulainya melalui penelitian sejarah dengan melibatkan para keluarga besar *eks* tapol PKI di seluruh Indonesia.

III. Memperjuangkan Martabat dan Hak Asasi Manusia

Martabat manusia melekat dengan hak asasi manusia dalam diri manusia itu sendiri. Dengan adanya hak asasi yang melekat tersebut maka manusia memperoleh martabatnya. Tercerabutnya hak asasi meletakkan manusia ke titik kehilangan martabat. Hal ini terjadi pada keluarga *eks* anggota PKI yang kehilangan segala-galanya dari hak-hak mereka untuk hidup, berkembang, menyampaikan pendapat, akses informasi, hak untuk berserikat, hak turut serta dalam pembangunan dan lain-lain. Keterbatasan akses atas kebenaran sejarah itu tidak saja dirasakan langsung oleh korban dan keluarga korban tragedi 1965/1966, namun juga kepada seluruh rakyat Indonesia.

Hingga kini masih banyak masyarakat belum bisa menerima PKI sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Masih banyak masyarakat yang menyatakan dirinya sebagai kelompok/komunitas anti-PKI. Sebagian dari mereka bahkan membentuk kelompok-kelompok anti PKI. Kondisi ini merupakan akibat dari pola pikir sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih menganggap PKI sebagai bahaya laten yang selalu mengancam dan menghantui kehidupan kita, oleh karena itu segenap hal yang berbau PKI, komunisme-sosialisme, ekstremis kiri harus selalu diwaspadai.

Praktik sosial dari stigmatisasi tersebut dipakai di mana-mana. Orde Baru dengan aparatusnya cenderung untuk melakukan pengawasan ketat (surveillance) terhadap segala aktivitas yang dilakukan di tengah masyarakat. Pengawasan itu akan banyak memantau aktivitas yang memiliki kecenderungan kritis untuk merubah konsep kemapanan terminologi nasionalisme, maka aktivitas itu akan dicap sebagai aktivitas terlarang (baca: aktivitas komunis). Para aktivis

mahasiswa, terutama yang bergabung dengan organisasi seperti SMID dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) menjelang berakhirnya pemerintahan Soeharto lebih sering dicap PKI atau komunis dan banyak mendapat pengawasan khusus dari aparatus intelijen negara.

Akibatnya, seseorang yang telah distigma sebagai PKI, terkebih dengan status *eks* tapol yang disandang dalam KTP mereka, akan kehilangan banyak akses sebagaimana praktik Orde Baru di bawa Soeharto yang menutup berbagai akses kehidupan ekonomi, sosial dan politik bagi para eks tapol. Dengan jatuhnya Rezim Soeharto, korban dan kelurga korban 1965/1966 banyak berharap praktik diskriminasi dan stigmatisasi akan segera berakhir, dengan keterbukaan arus informasi dan dijalankannya praktik demokrasi di tengah masyarakat. Namun kenyataannya, masyarakat luas masih belum menerima perubahan tersebut. Benak masyarakat masih dipenuhi produk kesadaran masa Orde Baru, dengan mengekpresikan frase 'PKI" sebagai biang keladi keonaran. Hal ini lah yang hingga kini masih sering dialami oleh Bedjo Untung, ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65/66 (YPKP) dalam aktivitas advokasinya untuk meluruskan sejarah mengenai PKI hingga sekarang.[8]

III.1. Ujian bagi Pekerja Kemanusiaan

Tidak banyak jumlahnya aktivis dan organisasi pendamping korban yang memiliki konsentrasi untuk mengadvokasi kasus tragedi 1965/1966 secara penuh. Di antara mereka adalah para aktivis dan organisasi pejuang HAM yang memiliki perhatian khusus untuk mempromosikan dan menegakkan nilai HAM, seperti KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan), HRWG (Human Rights Working Group), ELSAM (Lembaga Studi HAM), IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang) dan lain-lain. Amat sedikit lembaga yang menangani masalah khusus seperti tragedi 1965 yang berskala luas dan nasional dengan korban yang sangat banyak. YPKP merupakan, mungkin, satu-satunya lembaga yang secara terbuka menyatakan diri sebagai lembaga yang mengadvokasi kasus 1965/1966, dan penanganan ini ditekankan pada kegiatan peneli-

8 Dalam rapat terbatas para pengurus YPKP pada tanggal 25 Januari 2009 di secretariat YPKP di Tanggerang, Bedjo Untung mendapatkan intimidasi dari orang yang mengaku berasal dari Polsek setempat yang mengaku bekerjasama dengan masyarakat setempat. Bedjo Untung sudah tinggal pulahan tahun di sana dan memiliki hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat sekitar, namun demikian pihak aparat mengaku bekerjasama denngan masyarakat sekitar untuk mengawasi kegiatan YPKP. Kini Peristiwa ini telah ditangani oleh Kontras dengan memberikan surat protes ditujukan kepada Polri, ditembuskan kepada polsek setempat dan instansi lain yang terkait. Pemerintah juga telah merespon dengan penerbitan surat untuk mengawasi keamanan keluarga Bedjo Untung, dibuat oleh Depkuham, ditujukan kepada dinas hukum dan HAM setempat, ditembuskan kepada polsek setempat dan Konstras atas nama korban.

tian untuk meluruskan sejarah seputar tragedi 1965/1966.

Tidak mudah bagi para aktivis dan organisasi pembela HAM untuk dapat memperjuangkan hak-hak asasi yang berkaitan dengan peristiwa 1965. Peristiwa ini sarat dengan nilai-nilai penolakan dari berbagai isu terkait. PKI dituduh *ateis* dan menyebarkan *ateisme*, hal yang sangat dihindari oleh masyarakat Indonesia yang bersifat religius. Upaya untuk meyakinkan bahwa PKI tidak anti agama adalah satu soal yang tidak mudah. PKI juga dituduh makar dan melakukan kudeta. Kendatipun ganjaran atas predikat pemberontak ini telah dilakukan, yaitu dengan penyingkiran mereka dari status penduduk penuh menjadi status penduduk dengan hak-hak terbatas, namun tuduhan makar itu masih melekat kuat di hati masyarakat. Butuh banyak sekali riset, dokumentasi dan publikasi kasus-kasus seputar '65 untuk membangun sejarah kesatuan baru, sejarah yang tidak membedakan sesama warga Negara. Sejarah yang kita maksud adalah yang dibangun atas dasar rangkaian historis perjalan bangsa yang jujur, sehingga kesalahan masa lalu yang menyembunyikan fakta, yang pada gilirannya tidak membantu perkembangannya pertumbuhan identitas bangsa secara progresif.

Melakukan advokasi kasus 1965 sangat rentan terhadap risiko diperlakukan kembali seperti negara Orde Baru menggelandang para anggota PKI, simpatisan dan keluarga mereka. Tidak jarang aktivis YPKP diikuti oleh aparat intelijen. Keluarga mereka yang mengetahui hal ini juga merasa resah dan takut, seperti istri Bedjo Untung ketika melihat suaminya dicari oleh aparat intelijen seputar rapat pengurus YPKP tanggal 25 Januari 2009.[9] Ketika itu, peneliti hadir di rumah Bedjo Untung, dan menyaksikan ketakutan istrinya tersebut. Istrinya masih mengingat orang tua dan saudara mereka yang dulu keluar rumah dan tidak pernah kembali pada tahun 2006. Dia hanya tidak ingin suaminya mengalami hal serupa.

III.2. Berjuang untuk Memelihara Harapan dan Ingatan

Apakah hasil dari semua upaya selama ini akan membuahkan hasil yang memuaskan untuk korban dan keluarga korban tragedi 1965/1966, dengan dipulihkannya hak-hak dasar mereka oleh negara? Sekalipun telah banyak pihak menyuarakan supaya *eks* tapol dan seluruh keluarganya diakui kembali menjadi warga negara Indonesia dengan segenap hak-hak dasar kewargaan yang utuh dan melekat. Namun hingga kini belum ada pengakuan resmi

9 Pada tanggal 10 Februari 2009 Bedjo Untung merelease surat protes atas diawasinya dan dibubarkannya rapat pengurus YPKP pada tanggal 25 Januari 2009 melalui mailing list jaringannya dengan judul "Kronologi Pengawasan dan Intimidasi di Sekretariat YPKP 65". Protes ini mendapatkan tanggapan positif dari para aktifis HAM baik dari dalam maupun dari luar negeri.

dari pemerintah bahwa mereka telah dipulihkan hak sipil dan politiknya sebagaimana warga negara lainnya. Tidak hanya itu, pengusutan pelanggaran HAM yang terjadi seputar tahun 1965/1966 tidak pernah diusut tuntas, dan para pelakunya juga tidak diproses di pengadilan. Kondisi ini mengakibatkan praktik *impunitas* berkepanjangan terutama kepada mereka, pelaku pembunuhan 1965/1966.

Sementara itu perkembangan sosial politik secara umum telah berjalan secara dinamis, demokrasi semakin maju, dan transparansi semakin meningkat. Namun situasi positif ini tidak berbanding lurus dengan pengakuan terhadap para korban dan keluarga korban tragedi 1965/1966 yang mengalami kerugian materiil dan inmateriil.

Dalam konteks perjuangan untuk meraih kebenaran dan keadilan ini, Bedjo Untung bersama dengan YPKP berjuang tanpa lelah untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Perjuangan mereka hanya satu yakni berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari negara bahwa tragedi 1965/1966 merupakan pelanggaran HAM berat.

IV. Mengenal Bedjo Untung

Nama YPKP kini tidak bisa dilepaskan dari Bedjo Untung yang juga menjabat sebagai ketua. Bedjo Untung memiliki jaringan luas baik, dengan para komunitas keluarga korban tragedi 1965/1966 di seluruh Indonesia melalui YPKP, dengan organisasi korban pelanggaran HAM yang tergabung dalam IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang), JSKK (Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban), maupun dengan lembaga-lembaga LSM dan jaringan masyarakat sipil lainnya.

Hal di atas dikarenakan sikap aktif Bedjo Untung yang membuka diri untuk menyatukan tekad perjuangan advokasi menuntut negara agar memenuhi kewajiban mereka dalam memulihkan hak-hak warga Negara yang telah dihilangkan (dalam konteks ini adalah para korban dan keluarga korban tragedi 1965/1966). Bedjo Untung memposisikan diri sebagai bagian dari para korban lain yang menghadapi hal sama, yaitu pelanggaran HAM oleh Negara. Korban-korban lain itu misalnya keluarga korban peristiwa Tanjung Priok, keluarga korban peristiwa Talangsari lampung, keluarga korban kerusuhan Mei 1998, keluarga korban Semanggi I dan II, dan lain-lain. Bagi Bedjo Untung, perjuangan harus terus dilakukan sampai kapanpun. Bersama dengan aktifits JSKK yang lain, Bedjo Untung menggagas dan menjalankan aktivitas "Kamisan", yaitu aksi diam dengan seragam hitam di depan istana presiden yang diikuti para korban pelanggaran HAM dan orang-orang yang mendukung mereka. Mereka tidak pernah bosan, tetap bertahan setiap Kamis sore

dalam 1,5 tahun sampai sekarang. *"Kita selamanya nggak pernah pikirkan untuk berhenti. Kita terus. Kita semuanya sepakat. Sedikit atau banyak jalan terus. Pernah hujan tetap datang", ujarnya.*[10] *" Kita kan merasa bahwa kita tidak salah. Nah kalau kita merasa benar, tapi didzalimi, kan begitu. Kita ditahan, dipenjara tanpa diadili. Jadi itu sampai kapanpun".*[11]

Siapakah Bedjo Untung sehingga memiliki semangat luar biasa dalam berjuang yang penuh tantangan dan tanpa harapan yang jelas tersebut?

IV.1. Masa Remaja di Jalan dan Penjara

Bedjo Untung lahir tanggal 14 Maret 1948. Pada saat pecah tragedi 1965, dia berumur 17 tahun. Ketika dia ditangkap pada tahun 1970 umurnya mencapai 22 tahun.[12] Dia ditangkap pada tanggal 24 Oktober pukul 10.00 pagi di Jakarta, saat dia masih bekerja sebagai kasir di Sarinah Department Store. Kemudian dia ditahan dan dikirim ke penjara khusus Salemba, kemudian dipindahkan ke dalam kamp kerja paksa yang terletak di Tangerang. Semua proses penahanan dan pemenjaraan tersebut dijalaninya tanpa proses hukum.

Pada tahun 1965 ini Bedjo Untung adalah siswa kelas tiga SPG (Sekolah Pendidikan Guru). Mestinya sebentar lagi dia akan lulus. Namun tidak lama sebelum kelulusan tiba, tragedi 1965 pecah. Banyak keluarganya yang ditangkap aparat. Kawan-kawan sekolah Bejo Untung yang aktif di IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia)[13] banyak yang melaporkan diri kepada yang berwajib, namun mereka kemudian diinterogasi. Banya diantara mereka yang ditendang dan disiksa pada saat interogasi. Karena Bedjo Untung tidak merasa bersalah, lagipula melihat temanya mendapatkan perlakuan kekerasan dan siksaan, Bedjo memutuskan untuk tidak datang dan melarikan diri ke Jakarta. Alasan utamanya bukan karena dia anggota PKI namun karena menghindari tindakan kekerasan dan penyiksaan. Setelah melapor mereka ditangkap dan disiksa.[14]

---

10 Wawancara pada saat rapat evaluasi Kamisan, tanggal 23 Januari 2009, di kantor Kontras

11 Ibid

12 Wawancara dengan pak Bedjo oleh Feertje Liu melalui email terkirim tanggal 30 Januari 2009, dan hasil wawancara dikirimkan oleh Bedjo Untung kepada Wakhit, peneliti, melalui email pada tanggal 31 Januari 2009.

13 IPPI adalah organisasi pelajar independen, berdiri pada tahun 27 September 1945. IPPI mendukung dan melaksanakan ajaran Bung Karno. Lihat dalam "Mengenang IPPI, Korban Tragedi '65", ditulis oleh HD. Haryo Sasongko, mantan Ketua Umum IPPI di Jawa Tengah, Penulis buku "Catatan Harian Anak Bangsa Terpidana", http://www.forums.apakabar.ws/viewtopic.php?f=1&t=20267&start=0

14 Wawancara dengan pak Bedjo oleh Feertje Liu, ibid.

IV.2. Bertahan dalam Siksaan

Selama di penjara, Bedjo Untung mendapatkan perlakukan tidak manusiawi. Dia dipenjara tanpa proses pengadilan, seperti korban-korban lainnya. Penyiksaan saat interogasi tahun pertama penahanan sangat berat di hadapan operasi militer Angkatan Darat yang dikenal dengan Kamp Operasi Kalong. Sudah tak terhitung berapa kali, namun siksaan-siksaan diterimanya tanpa dapat melawan. Dia ditelanjangi, disiksa, diestrum, ditendang dan pukul.[15]

Ruang sempit berukuran 2x2 meter dihuni oleh 6 orang tanpa perlengkapan yang memadai. Di sana hanya ada 3buah sendok saat makan untuk nasi yang basi, tida ada obat dan dokter. Dia tidak bisa tidur karena kepalaran dan menderita kurang gizi. Dalam ruang tahanan itu para tahanan tidak boleh tak boleh ngobrol satu sama lain, suasanannya penuh teror.Setiap malam Bedjo selalu ada yang berteriak karena mendapt siksaan. Dalam ruang tahanan itu tidak ada aktifitas lain kecuali menunggu interogasi berikutnya. Tahanan harus bangun pada jam 5 pagi, kemudian harus berjalan memutar ruangan berukuran 40 m persegi. Kontak antar tahanan satu dengan yang lain dilarang lebih kurang 5 tahun sampai ada tekanan internasional[16]

Pada tahun berikutnya Bedjo dipindahkan ke penjara Salemba dan terakhir dipindah lagi ke penjara Tanggerang. Selama di sana dia dipaksa untuk ikut kerja paksa di sawah yang jarak tempuhnya mencapai 7 km tiap hari mulai jam 5 pagi hingga 6 sore dengan pengawasan yang ketat. Banyak teman-temannya sesama tahanan yang menderita kelaparan, banyak yang mati. Oleh karena itu mereka makan apa saja yang ada termasuk hewan-hewan seperti anjing, kucing, cicak dan sebagainya. [17]

Ayahnya juga mengalami nasib serupa. Ditahan di Nusa Kambangan dan dipindahkan ke Pulau Buru untuk masa penahanan 14 tahun. Hal serupa juga dialami oleh paman Bedjo yang dihilangkan hingga kini. Bedjo meyakini bahwa pamannya sudah mati dibunuh berikut juga dengan teman-teman, tetangga dan saudara yang ia kenal.

Dampak psikologis juga harus dirasakan oleh ibu dan kedua adiknya yang tidak pernah lepas dari rasa takut. Ibunya harus meninggalkan kedua adik Bedjo kepada sanak saudaranya karena takut mereka juga akan ditangkap dengan tuduhan yang sama.

---

15 Wawancara Floortje Liu, *ibid*.
16 Wawancara Floortje Liu, *ibid*.
17 Wawancara Floortje Liu, *ibid*.

Ibu dari Bedjo Untung juga harus bertahan hidup dengan berbagai cara, salah satunya adalah berjualan ikan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan berjalan kaki demi bertahan hidup. Ketika Bedjo dibebaskan dari tahanan, ia berhasil bertemu kembali dengan ibu dan adik-adiknya, yang ia temui dalam kondisi susah.

IV.3. Memelihara Harapan Menunggu Pembebasan

Selama masa penahanan, Bedjo Untung selalau berkeyakinan bahwa suatu saat ia dan para tahanan yang masih berada di dalam penjara akan dibebaskan. Keyakinan itu selalu ia pupuk dan ia percayai melebihi apapun yanng sempat ia miliki. Meski kondisi tahanan tidak memadai dari segi higienisitas, namun Bedjo Untung selalu menjaga kesehatannya dan mencoba tetap berpikir rasional dalam menanti masa pembebasan. Berbagai tekanan internasional dilancarkan untuk memberi peringatan kepada rezim Orde Baru terkait dengan masih dilakukannya penahanan sewenang-wenang kepada mereka para tahanan politik kasus 1965/1966.

Aktivitas Bedjo Untung di dalam organisasi YPKP, agenda pertemuan rutin lintas korban, pertemuan rutin dengan institusi negara dan serangkaian aktivitas yang bisa mendukung kerja advokasi kasus 1965/1966, juga didukung dengan gerakan kultural lintas korban yang dinamai dengan Aksi Diam Hitam Kamisan. Aksi yang sudah berlangsung selama 2 tahun tersebut, merupakan aksi rutin yang dilakukan tidak saja oleh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu untuk menuntut negara menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang selama ini masih belum mendapat kejelasan status hukumnya. Aksi Diam Hitam Kamisan tidak saja didukung oleh para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu, namun juga didukung oleh kelompok anak muda yang memiliki kepedulian sosial atas penderitaan dan kerugian lahir batin yang dialami oleh para eks tapol dan keluarga korban tragedi 1965/1966.

Pada masa itu, diakui oleh Bedjo, tidak ada pihak manapun yang akan memberikan dukungan maupun pertolongan terhadap orang-orang atau kelompok yang dituduh sebagai simpatisan PKI. Bagi siapapun yang memberikan bantuan secara terang maupun sembunyi-sembunyi akan ikut mengalami nasib serupa: ditahan, disiksa dan dijebloskan dalam rumah-rumah tahanan tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Selepas dari masa penahanan, Bedjo bekerja sebagai pekerja sosial di sebuah panti asuhan. Ia memberi pelajaran musik dan bahasa inggris untuk anak-anak di sana.

Berjuang dari Keterpurukan

Mugianto Sipin
Korban Penculikan Aktivis 1997/1998

I. Menjadi Orang Hilang

Akhir tahun 1997, para mahasiswa dan pemuda melakukan aksi-aksi kecil dan terserak baik di lingkungan kampus maupun instansi pemerintah. Jatuhnya nilai rupiah, semakin mendorong munculnya aksi-aksi. Pada Januari 1998, aksi-aksi dilakukan berbagai kelompok seperti mahasiswa baik kelompok Cipayung (HMI, PMII, GMNI dan GMKI) maupun *non* Cipayung seperti koalisi LSM, Ormas, Kelompok Pemuda dan buruh. Jumlah massa yang terlibat dalam aksi-aksi tersebut antara puluhan hingga ratusan orang. Isu-isu utama yang menonjol adalah isu ekonomi.Bulan-bulan berikutnya aksi-aksi semakin meningkat, dan memasuki penghujung bulan Maret 1998 mulai muncul tuntutan-tuntutan politik terutama tuntutan mundurnya Presiden Soeharto. Masyarakat mulai menunjukkan respon mendukung aksi-aksi mahasiswa. Pada bulan Mei 1998, aksi mahaiswa semakin meningkat terlebih setelah pemerintah menaikkan harga BBM dan terjadinya penembakkan di kampus Trisakti yang diikuti oleh kerusuhan di berbagai kota. Di Jakarta aksi mahasiswa terakumulasi pada gedung DPR/MPR yang mencapai puncak dengan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan.[1]

Situasi politik Indonesia tidak saja memanas karena aksi-aksi mahasiswa, namun jauh sebelum ini yakni sejak tahun 1995 situasi politik Indonesia memang bergejolak. Hal ini ditandai dengan berkembangnya opini pemerintahan Soeharto tidak lagi mampu menjaga keutuhan dan kekompakkan barisannya. Berita perpecahan elite politik, perpecahan kalangan petinggi militer ditambah dengan, berita-berita pelanggaran HAM di Aceh, Papua, dan Timtim, serta krisis ekonomi dunia yang juga berimbas ke Indonesia semakin menguatkan gejolak politik.[2]

I.1. Politik Penghilangan Paksa

Penghilangan orang secara paksa sering disebut sebagai ibu dari pelanggaran HAM. Di dalamnya terkandung banyak unsur pelanggaran HAM antara lain 1) Penghilangan hak kehidupan seseorang, 2) Perampasan kebebasan atau kemerdekaan fisik secara paksa, 3) Penyiksaan dan 4) Penganiayaan.[3]

Penghilangan paksa biasa dilakukan oleh rejim totaliter otoritarian misalnya terjadi di Jerman terhadap kaum Yahudi oleh rezim Hitler, di banyak negara Asia dan yang paling fenomental adalah di Amerika Latin, terutama di Argen-

1 Ester dkk., Kerusuhan Mei 1998: Fakta dan Peristiwa, hal. 57.
2 *Ibid*, hal 47
3 Lihat, Komnas HAM, Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi yang Berat, Peritiwa Penghilangan orang Secara Paksa Periode 1997-1998,dalam www.komnas.ham.org diakses pada 22 Juni 2009.

tina ketika dibawah kekuasaan junta militer pada tahun 1976-1983. Pimpinan Junta, Jenderal Videla pernah mengatakan *"Berapapun banyaknya orang harus mati, demi keamanan negeri ini"*. Maka korban banyak sekali diculik, dieksekusi, jasadnya dibuang dan dihilangkan, bahkan ada yang dibuang dari pesawat ke lautan luas dalam keadaan masih hidup.[4]

Di Indonesia penghilangan paksa dilakukan sejak lama. Salah satu yang monumental dilakukan oleh Rejim Suharto pada tahun 1997-1998. Penghilangan orang pada saat menjelang runtuhnya Suharto dilakukan dalam tiga tahap, yang pertama untuk merespon gerakan Mega-Bintang-Kerakyatan. Megawati sebagai Icon perlawanan terhadap Orde Baru bersatu dengan PPP untuk memikirkan suatu kemungkinan timbulnya kepemimpinan baru ke depan untuk menjadi alternatif dari Golkar yang selama ini menjadi mesin kekuasaan Orde Baru menjelang pemilu tahun 1997. Rezim yang berkuasa merasa terancam dengan gerakan ini sehingga para simpatisan dari PDI (Partai Demokrasi Indonesia) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) banyak yang menjadi korban penculikan. Diantara korban penculikan saat itu adalah Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Sonny dan Yani Afri adalah aktivis PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang menjadi korban penculikan di Jakarta ketika muncul fenomena koalisi akar rumput Mega-Bintang antara pendukung PPP dan PDI melawan Golkar pada saat kampanye pemilu 1997. Sampai kini kelima orang tersebut belum diketahui keberadaannya.Tujuan dari penculikan ini adalah untuk menghambat gerakan Mega-Bintang untuk mendapatkan suara lebih banyak dalam pemilu mendatang yang akan membahayakan posisi Golkar sebagai mesin politik Orde Baru.

Tahap kedua terjadi pada awal tahun 1998 untuk pengamanan agenda Sidang Umum MPR untuk memenangkan kembali Suharto sebagai presiden yang ke-7 kalinya. Tindakan yang dilakukan adalah penangkapan dan penculikan terhadap aktivis-aktivis pro demokrasi yang diduga akan mengganggu Sidang Umum MPR yang akan dilakukan pada bulan Maret 1998. Mereka yang menjadi korban pada penculikan ini antara lain adalah aktivis Aldera (Pius Lustrilanang) yang sebelumnya aktif di SIAGA (Solidaritas untuk Amin dan Mega), LBH Nusantara Bandung (Desmon Junaidi Mahesa), PDI Megawati (Haryanto Taslam, Sekjen DPD PDI DKI), Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID). Terdapat 14 korban yang diculik, 9 orang diantaranya telah dilepaskan, termasuk Mugiyanto, 1 orang ditemukan meninggal yaitu Gilang, dan 4 orang yang belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Mereka adalah Wiji Thukul, Petrus Bimo Anugerah, Suyat dan Herman Hendrawan.[5]

4 Mugiyanto, Mencontoh Argentina Menangani Masa Lalu, diposting pada 9 November 2007 dalam www.mugiyanto.blogspot.com diakses pada 22 Juni 2009.

5 Mugiyanto, 10 Tahun Reformasi, Mengenang Para Martir Perubahan, www.mugiyanto

Tabel
Korban Penghilangan Paksa yang Dikembalikan[6]

No	Nama Korban	Tanggal Hilang	Keterangan
1	Aan Rusdiyanto	13 Maret 1998	Diambil paka di rumah susun Klender Jakarta Timur
2	Andi Arief	28 Maret 1998	Diambil paksa di Lampung
3	Desmon J Mahesa	4 Februari 1998	Diambil paksa di Jakarta
4	Faisol Riza	12 Maret 1998	Dikejar dan ditangkap di RS Cipto Mangun Kusumo Jakarta Pusat
5	Haryanto Taslam	2 Maret 1998	Saat mengendarai mobil dikejar dan diambil paksa di depan pintu Taman Mini Indonesia Indah
6	Mugiyanto	13 Maret 1998	Diambil paksa dirumah susun Klender Jakarta Timur
7	Nezar Patria	13 Maret 1998	Diambil paksa dirumah susun Klender Jakarta Timur
8	Pius Lustrilanang	4 Februari 1998	Diambil paksa di Jakarta
9	Raharja Waluya Jati	12 Maret 1998	Dikejar dan ditangkap di RS Cipto Mangun Kusumo Jakarta

Tahap ketiga merupakan puncak penghilangan orang, dimana menjelang pengunduran diri Suharto sebagai presiden RI tanggal 21 Mei 1998 banyak sekali masyarakat menjadi korban dan tidak diketahui keberadaanya hingga sekarang. Dimulai tanggal 12 Mei 1998 ketika terjadi penembakan terhadap mahasiswa Trisaktif, kemudian disusul dengan kerusuhan di Jakarta pada tanggal 13, 14 dan 15 Mei 1998. Jakarta dan beberapa kota rusuh, banyak korban tak teridentifikasi dan banyak orang tidak diketahui lagi rimbanya.[7]

Dengan tidak menyertakan korban pada kerusuhan Mei 1998, korban penghilangan orang pada tahun 1998 secara keseluruhan terdapat 23 orang. 1 (satu) orang meninggal dunia, 9 orang dikembalikan (sebagaimana di atas) dan 13

.blogspot.com, Mei 2008. Tulisan ini diambil dari VHR Media, diposting oleh penulisnya di www.mugiyanto.blogspot.com diakses pada 22 Juni 2009

6 Lihat: www.mugiyanto.blogspot.com

7 Mugiyanto, 10 Tahun Reformasi, Mengenang Para Martir Perubahan, *Ibid*

orang masih hilang. Tiga belas orang tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Tabel
Korban Penghilangan Paksa yang Hingga Kini Belum Kembali[8]

No	Nama Korban	Tanggal Hilang	Keterangan
1	Dedy Hamdun	29 Mei 1998	Diambil paksa di Jakarta
2	Hermawan Hendrawan	12 Maret 1998	Diambil paksa di Jakarta
3	Hendra Hambali	14 Mei 1998	Diambil paksa di Jakarta
4	Ismail	29 Mei 1997	Diambil paksa di Jakarta
5	M Yusuf	7 Mei 1997	Diambil paksa di Jakarta
6	Noval Al Katiri	29 Mei 1997	Diambil paksa di Jakarta
7	Petrus Bima Anugrah	Minggu ke III bulan Maret 1998	Diambil paksa di Jakarta
8	Sony	26 April 1997	Diambil paksa di Jakarta
9	Suyat	Februari 1997	Diambil paksa di Jakarta
10	Ucok Munandar Siahaan	14 Mei 1998	Diambil paksa di Jakarta
11	Yadin Muhidin	14 Mei 1998	Diambil paksa di Jakarta
12	Yani Afri	26 April 1997	Diambil paksa di Jakarta
13	Wiji Tukul	Mei 1998	Diambil paksa di Jakarta

I.2. Politik Impunitas Bagi Pelanggar HAM

Mugiyanto berpendapat bahwa *impunitas* (membiarkan pelaku tetap bebas) secara umum memiliki tiga pola tindakan. *Pertama*, pelaku sama sekali tidak disentuh oleh proses hukum. Kasus tragedi kemanusiaan tahun 1965, yang meliputi peristiwa pembunuhan, penyiksaan, penghilangan orang, penahanan semena-mena, pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat sedikit yang ditangani melalui proses hukum. Para pelaku pelanggaran HAM menikmati impunitasnya karena tidak diperkarakan secara hukum.

Kedua, pelaku dibebaskan oleh hakim dalam proses pengadilan, baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi. Misalnya adalah pembebasan MA atas Mayor Jenderal (Purn) Pranowo terdakwa kasus pelanggaran berat HAM pada

8 Lihat: www.mugiyanto.blogspot.com diakses pada 22 Juni 2009.

peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 dengan alasan bahwa perkara Pranowo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkheid/NO*). Kasus serupa yang dibebaskan oleh MA lainnya menurut identifikasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras) setidaknya MA ada 18 kali membebaskan para pelanggar HAM, yang meliputi 16 kasus Timor Timur 1999 dan kasus Tanjung Priok 1984 (Siaran Pers Kontras 16 Januari 2006). Sebelumnya, pada tanggal 8 dan 9 September 2005 Pengadilan HAM di Makassar untuk kasus Abepura Berdarah tahun 2000 juga membebaskan 2 orang terdakwa yaitu Kombes Johny Wainal Usman dan AKBP Daud Sihombing.

Ketiga, kasus dipeti-eskan atau dibiarkan mengambang dengan alasan-alasan teknis yuridis-prosedural. Keberadaan undang-undang, seperti UU 39/1999 tentang HAM dan UU 26/2000 tentang Pangadilan HAM yang banyak kelemahan, serta belum adanya UU perlindungan Saksi dan Korban kerap dijadikan perlindungan bagi para pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan pelanggaran HAM seperti Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, terutama TNI yang sering menjadi pihak yang diduga terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut. Contoh nyata dari pola ini terjadi antara lain kasus Trisakti-Semanggi I dan II yang berhenti di Kejaksaan Agung, kasus Lampung 1989, Bulukumba, tragedi 1965 dan Manggarai di Komnas HAM, dan yang sangat menonjol akhir-akhir ini adalah kasus pembunuhan aktivis HAM Munir di Kepolisian.[9]

Cara mengulur waktu, menunggu situasi menguntungkan untuk pelanggar HAM supaya mendapat *impunitas* (bebas dari jeratan hukum) menjadi benang merah bagi seluruh pola di atas. Dan hal ini terjadi pada kasus penghilangan orang seperti di bawah ini.

II. Respon atas Penculikan 1997-1998

Setelah didesak oleh berbagai pihak baik dalam dan luar negeri, pada tanggal 3 Agustus 1998 Panglima ABRI Jendral TNI Wiranto membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Tim ini diketuai oleh Jenderal TNI Subagyo HS selaku KSAD, kemudian wakil ketua terdiri dari Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI) dan Letjen TNI Yusuf Kartanegara (Irjen Dephankam), dan beranggotakan Letjen TNI Soesilo Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI), Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhanas), Letjen TNI Djamiri Chaniago (Pangkostrad) dan Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Danjen Akabri).[10]

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) menghasilkan penyelidikan dan rekomen-

9 Mugiyanto, Impunitas dan Pengingkaran Keadilan, diunggah pada 27 Januari, 2006, www.mugiyanto.blogspot.com diakses pada22 Juni 2009.
10 Kronik Penghilangan Paksa, KontraS, *ibid*

dasi kepada pimpinan ABRI. Atas dasar rekomendasi ini Pangab ABRI Jendral Wiranto menjatuhkan hukuman terhadap mantan Danjen Kopassus dan mantan Panglima Komando Strategis (Pangkostrad) Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto berupa pengakhiran masa dinas TNI (Pensiun), Pejabat Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi PR dan Dan Group-4 Kolonel Inf. Chairawan berupa pembebasan tugas dari jabatannya karena ketidakmampuannya mengetahui segala kegiatan bawahannya.[11]

Pada bulan Februari 1999 juga dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Puspom ABRI terhadap tim bentukan Kopassus yang diketahui bernama Tim Mawar karena tanggungjawab mereka terlibat dalam penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 1998. Proses ini merupakan salah sastu tindak lanjut dari keputusan Menhankan/Panglima ABRI ABRI Jenderal TNI Wiranto. Hasilnya Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II Jakarta memberikan sanksi hukum terhadap 11 orang anggota tim mawar dengan nomor perkara PUT. 25 – 16 / K- AD / MMT – II/ IV/ 1999. Keputusan tersebut berisi:[12]

Tabel
Tim Mawar yang Diadili

No	Nama Terdakwa	Vonis / Hukuman
1	Mayor (Inf) Bambang Kristiono	22 bulan / dipecat
2	Kapten (Inf) F.S Multhazar	20 bulan / dipecat
3	Kapten (Inf) Nugroho Sulistyo	20 bulan / dipecat
4	Kapten (Inf) Yulius Stevanus	20 bulan / dipecat
5	Kapten (Inf) Untung Budi Harto	20 bulan / dipecat
6	Kapten (Inf) Dadang Hendra Yuda	16 bulan / dipecat
7	Kapten (Inf) Djaka Budi Utama	16 bulan / dipecat
8	Kapten (Inf) Fauka Noor Farid	16 bulan / dipecat
9	Sersan Kepala Sunaryo	12 bulan / dipecat
10	Sersan Kepala Sigit Sugianto	12 bulan / dipecat
11	Sersan Satu Sukadi	12 bulan / dipecat

Sampai pada tahun 2007, enam dari 11 prajurit yang dipecat tersebut mengajukan banding, sehingga sanksi pemecatan belum bisa dikenakan atas mereka.

11 Penculikan Aktivis 1997/1998, www.wikipedia.com

12 Kronik Penghilangan Paksa, Kontras, Ibid, juga lihat di Penculikan Aktitis 1997/1998, www.wikipedia.com diakses pada 22 Juni 2009.

Sementara itu mereka tetap meniti karir di TNI dan menduduki beberapa posisi penting.[13]

Terhadap penyelesaian kasus penculikan aktifis tahun 1997/1998 tersebut terdapat beberapa catatan yang diberikan oleh Ikatan Keluarga Orang HIlang (IKOHI) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam lembar Usulan untuk Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Tahun 1997/1998 yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum, di DPR RI sebagai berikut:

1. Pengadilan Militer hanya dilakukan untuk kasus penghilangan paksa yang menyangkut 9 orang saja, yang kesemuanya sudah dibebaskan. Pengadilan Militer telah gagal menjelaskan nasib korban yang lain, yang saat ini masih hilang, yang ketika itu disekap di tempat yang sama dengan beberapa dari korban yang telah dilepaskan.

2. Pengadilan Militer hanya mengadili pelaku lapangan (11 anggota Tim Mawar Kopassus) dan tidak menyentuh satu orang pun yang menjadi otak dan komandan.

3. Beberapa dari anggota Tim Mawar yang dipecat ternyata justru mendapatkan promosi dan menduduki jabatan penting (Chairawan, Kapten Jaka, Kapten Multazar dan lain-lain)

4. Para komandan, terutama Prabowo Subianto, Muchdi PR dan Chairawan hanya diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP), bukan sebuah putusan pengadilan. [14]

Oleh karena itu, kasus ini merupakan kasus yang belum selesai (*outstanding case*) dan masih bisa ditindaklanjuti. Usulan ini disampaikan untuk menanggapi proses hukum yang berhenti karena adanya tafsir hukum yang berbeda-beda antara pihak Komnas HAM, DPR, Kejaksaan dan Pengadilan. Komnas HAM telah melakukan serangkaian kajian (2003), penyelidikan (2005) dan penyelidikan pro justisia (2005) dengan hasil adanya dugaan pelanggaran HAM berat pada peristiwa penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997/1998. Untuk itu Komnas HAM meminta kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Pihak kejaksaan menolak dengan alasan harus ada

13 www.wikipedia.com diakses pada 22 Juni 2009. lihat juga Penculikan Aktivis 1997/1998, www.wikipedia.com diakses pada 22 Juni 2009

14 Usulan untuk Panitia Khusus (Pansus) DPR RI, Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Tahun 1997/1998, disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum, di DPR RI pada tanggal 3 Desember 2008, lihat. http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=807 diakses pada 22 Juni 2009.

rekomendasai DPR terhadap Presiden untuk adanya pengadilan HAM *ad-hoc* sebelum diadakan penyidikan. Namun DPR dan presiden telah sependapat dengan Komnas HAM bahwa kasus penghilangan orang secara paksa tersebut merupakan kategori kriminal yang berlanjut yang mekanisme penanganan hukumnya dapat melalui pengadilan reguler.

Selain respon atas penegakan hukum yang tidak menentu ini, usulan juga ditujukan untuk merespon pandangan Kejaksaan RI bahwa kasus penculikan tersebut tidak bisa diajukan kembali karena telah diselesaikan secara hukum karena adanya asas *ne bis in idem* dan *double jeopardy*. Asas ini tidak tepat diterapkan karena pada kenyataannya, kasus ini masih merupakan kasus yang belum selesai (*outstanding case*).[15]

III. Advokasi bagi Keluarga Orang Hilang

Menlu Hassan Wirajuda yang dalam pidato pembukaan Sidang Pertama Dewan HAM PBB tanggal 22 Juni 2006 yang menyatakan Indonesia "akan memprioritaskan perlindungan *non-derogable rights* (hak dasar yang tidak bisa ditunda pemenuhannya), dan membuang jauh-jauh praktik *extrajudicial killing* (pembunuhan di luar prosedur hukum) dan *enforced disappearances* (penghilangan paksa).[16]

Mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu kini mendirikan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi) sebagai wadah bagi keluarga dan mereka yang peduli untuk memperjuangkan kembalinya 13 aktivis yang masih belum kembali itu jika masih hidup. Apabila sudah meninggal keluarga bisa mengetahui di mana letak lokasi pusaranya.

"Saya merasa beruntung, beberapa teman belum ketahuan rimbanya. Korbanlah yang harus turut memperjuangkan nasibnya, tidak bisa menyerahkan kepada orang lain," Mugiyanto memaparkan alasan pendirian organisasi yang tidak punya cukup dana itu.

Dengan Ikohi, dia telah melakukan advokasi bagi korban maupun keluarga orang hilang di dalam dan di luar negeri untuk mengembalikan 13 rekannya tersebut. Ikohi tentu juga meminta pertanggungjawaban negara karena semua korban meyakini bahwa negara melalui tentara melakukan penculikan ini secara sistematis.

Keengganan Jaksa Agung melakukan penyidikan penghilangan paksa ini tidak membuat Ikohi putus asa. Pria kelahiran Jepara, 2 November 1973 itu yakin

15 Usulan untuk Pansus DPR, *Ibid*.

16 www.mugiyanto.blogspot.com, Januari 2007. Diakses pada 22 Juni 2009.

kunci penyelesaian masalah ini ada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. [17]

III.1. Mugiyanto, Penyintas yang Berjuang

Mugiyanto lahir dari keluarga tani di Jepara Jawa Tengah pada 2 November 1973 di Jepara. Pada tahun 1998 ketika terjadi peristiwa penculikan para aktivis penentang Orde Baru, Mugiyanto masih berstatus mahasiswa Fakultas Sastra Inggris Unversitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Sejak masuk kuliah di UGM pada tahun 1992 kesadaran politik Mugiyanto mulai terbangun seiring dengan kesempatan membaca yang melimpah. Lingkungan pendidikan di kampus dengan berbagai diskusi kritis mengenai isu sosial, ekonomi dan politik merupakan ladang yang subur bagi pengembangan wawasan kesadarannya. Dengan modal bacaan yang selalu diasah dalam aktifitas diskusi membangun pandangannya yang kritis saat melakukan eskposure ke dalam kehidupan nyata. Kepekaan sosial politiknya tumbuh semakin kuat ketika dia bergabung dengan SMID Yogyakarta, sebuah organisasi yang kritis terhadap kondisi sosial politik dengan pandangan yang cukup radikal yang berafiliasi dengan PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang juga dimusuhi oleh Orde Baru.[18]

Lingkungan lain yang turut mendukung tumbuhnya kesadaran dan kuatnya kepekaan terhadap masalah sosial adalah keluarganya sendiri. Kedua orang tuanya, Pak Sipin dan Bu Sipin, sangat mendukung apa yang telah diperjuangkan oleh anaknya. Walau tidak ada yang tamat sekolah dasar, keduanya menghargai dan bangga atas pilihan hidup Mugiyanto, putranya itu. Terhadap risiko ancaman pada masa Orde Baru, kedua orang tuanya berpesan: *"Hati-hati, karena yang kamu hadapi adalah negara. Mereka sangat kuat"*. Restu orang tua ini juga yang menjadi pendorongnya untuk tetap memperjuangkan idealisme walaupun harus berulang kali menghadapi ancaman dan berseberangan dengan kebijakan negara. [19]

Aktivitas politiknya dalam SMID yang kritis terhadap kebijakan Orde Baru mengantarkannya pada peristiwa yang tak pernah dia lupakan, yaitu penculikan terhadap para aktivis yang memperjuangkan perubahan, termasuk dirinya sendiri. Dia diculik oleh kelompok pria kekar pada tanggal 12 Maret di rumah susun Klender Jakarta Timur, tempat dia mengontrak bersama Aan Rus-

17 www.mugiyanto.blogspot.com, diposting oleh Mugiyanto pada 26 Mei 2008, diambil dari Media Indonesia Cetak Siang, xatria@mediaindonesia.co.id diakses pada 22 Juni 2009.

18 Mugiyanto, Sebuah Kesaksian, http://mugiyanto.blogspot.com/ Diposting pada 27 April 2009. Diakses pada 22 Juni 2009.

19 www.mugiyanto.blogspot.com, diposting oleh Mugiyanto pada 26 Mei 2008, diambil dari Media Indonesia Cetak Siang, ibid

dianto dan Nezar Patria yang juga diculik sesasat sebelumnya.[20]

Mugiyanto termasuk salah satu dari 9 orang korban penculikan yang dikembalikan oleh penculiknya. Dia menduga dirinya selamat dari pembunuhan karena ditangkap dan sempat menjadi rebutan beberapa pihak, seperti Kodim, Koramil, Babinsa, polisi, dan Tim Mawar Kopassus. Tiga hari setelah disekap sejak tanggal 13 Maret 1998, tepatnya pada tanggal 15 Maret 1998 dia dialihkan penahanannya ke rutan Polda Metro Jaya hingga 6 Juni 1998.

III.2. Apa yang Dia Alami dalam Peristiwa Penculikan?

Jumat, 13 Maret 1998, pukul 18.30 adalah hari naas bagi saya. Begitu masuk rumah kontrakan yang baru kami tempati selama seminggu, saya menemui beberapa kejanggalan. Nezar dan Aan harusnya ada dirumah itu, karena 20 menit sebelumnya saya meneleponnya untuk menunggu dan mereka mengatakan "ya". Tetapi mereka berdua tidak ada. Mereka hanya meninggalkan segelas air jeruk yang masih panas. Mereka pasti sedang keluar sebentar, pikir saya waktu itu.

Saya juga sempat mengirim pesan lewat pager yang dipegang Nezar. *"Nez, kamu di mana? Aku tunggu di rumah ya"*. Begitu bunyi pesan yang saya sampaikan lewat operator. Pesan itu saya sampaikan 2 kali, setelah yang pertama tidak mendapat respon. Sekitar 5 menit kemudian pikiran saya jadi macam-macam. Memikirkan berbagai kemungkinan buruk. Maklum, saat itu kami memang sedang dalam masa perburuan. Kami dituduh menjadi dalang kerusuhan 27 Juli 1996. Sebuah peristiwa penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro Jakarta oleh orang-orang berbadan kekar dan berambut cepak, yang menyebabkan ratusan orang meninggal danhilang.

Lalu ada 2 orang kawan yang menelepon ke rumah. Mereka berdua panik, salah satunya menangis sambil meninggalkan pesan, *"Kalian hati-hati, jangan ada yang tertangkap lagi"*. Bukannya membesarkan hati, pesan itu justru menguatkan bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang mengancam diri saya. Lalu saya membayangkan puluhan kawan-kawan PRD yang sedang dipenjara saat itu, Budiman Sudjatmiko, Dita Sari, Petrus Harianto dan lain-lain.

Ternyata benar. Saya mendekati jendela rumah kontrakan lantai 2 itu. Saya menyibakkan gorden untuk mengintip keluar. Badan saya lemas, dibawah sana sudah berjejer orang-orang berbadan tegap menatap saya. Dari jendela yang lain, saya melihat hal yang sama. Lalu saya berjingkat jalan ke dapur, memikirkan loncat ke bawah dan melarikan diri. Tetapi di bawah sana, ada berjajar puluhan orang yang lain. Rumah kontrakan saya sudah dikepung. Badan saya

20 Ibid

melemas. Saya sudah membayangkan kematian.

Lalu dengan tenaga tersisa, saya raih saklar untuk mematikan lampu. Persis pada saat itulah mereka menggedor rumah. "*Buka pintu! Buka pintu!"*. Kunci pintu kubuka, lalu sekitar 10 orang masuk. Satu dari mereka adalah orang tua berpeci seperti perangkat kelurahan. Ia Sangat sopan dan menenangkan, *"Mas, ikuti bapak-bapak ini saja ya"*. Dua orang berpakaian tentara dinas lapangan. Selebihnya berpakaian preman.

Setelah mengacak-acak rumah, 3 menit kemudian saya dibawa turun. Lalu dinaikkan kendaraan yang tengah menunggu untuk dibawa ke statu tempat yang ternyata adalah Koramil Duren Sawit Jakarta Timur. Setengah jam diinterogasi, lalu "kami" dibawa ke Kodim Jakarta Timur. "Kami" karena sejak dari Koramil itu, saya punya "teman" yang juga ditangkap, namanya "Jaka". Paling tidak begitulah ia memperkenalkan diri di hadapan saya dan interogator Koramil.[21]

Mugiyanto lalu mengisahkan penculikan dirinya, Jumat, 13 Maret 1998, pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan di Klender, Jakarta Timur. Dia sempat diinterogasi di Koramil Duren Sawit sebelum dibawa ke Kodim Jakarta Timur. Dengan mata tertutup dia kemudian dibawa ke sebuah tempat yang tidak diketahuinya.

"*Ketika turun dari kendaraan, saya langsung dihajar sampai jatuh dan berdarah-darah, ditelanjangi, disetrum dengan kedua tangan terikat di sebuah ruangan yang sangat dingin*," ujar ayah satu anak itu.

"Saya membayangkan hidup akan berakhir di sini. Selama dua hari dua malam bersama Nezar (Patria) dan Aan (Rusdianto), mata saya diikat. Kami dihajar dan disetrum. Teman-teman yang sudah lama di sana, siksaannya lebih parah lagi," tambah sarjana lulusan Fakultas Sastra Inggris UGM itu.

Dia menduga dirinya selamat dari pembunuhan karena ditangkap dan sempat menjadi rebutan beberapa pihak, seperti Kodim, Koramil, Babinsa, polisi, dan Tim Mawar Kopassus. Anak petani itu lantas ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sejak 15 Maret hingga 6 Juni 1998. Mugi mengaku tidak pernah merasakan kesedihan luar biasa kecuali saat ayah dan kakaknya menengok dia saat berada di tahanan polda. Suaranya pun tak terdengar, hanya terdengar isak tangis dan linangan air mata yang membasahi kedua pipinya. [22]

21 Mugiyanto, Thursday, Refleksi 10 Tahun Penculikan Mugiyanto; Kami Tidak Akan Pernah Lupa, diunduh dari www.mugiyanto.blogspot.com, diposting oleh Mugiyanto pada 13 Maret 2008, diambil dari terbitan VHR Media; http://www.vhrmedia.net/ diakses pada 22 Juni 2009.
22 Ibid, 26 Mei 2008

III.3. Dampak Traumatik Penculikan

Luka batin Mugiyanto hingga kini belum juga sembuh. Satu dasawarsa berlalu ternyata tak membuat dia lepas dari pengalaman traumatik itu. Terutama jika melihat tatapan mata Oetomo Rahardjo, ayahanda Petrus Bima Anugrah; ataupun Ibu Nung, ibunda Yadin Muhidin, yang masih berharap anak-anak mereka –dua di antara 13 korban penculikan– suatu hari akan pulang.

Menurut Mugiyanto, sebagai survivor (korban selamat) peristiwa penculikan, perasaan itu awalnya ini hanya soal personal. Dia merasa beruntung sehingga terdorong harus berjuang untuk teman-temannya. *"Tapi, kini (sudah berkembang) soal keadilan, kepastian, dan kehidupan. Orang yang diculik bukan hanya teman-temanku,"* kata Mugiyanto yang kini menjadi ketua IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) kepada Jawa Pos.

Mugi, sapaan akrabnya, lalu dikejar para penyekap dengan pertanyaan seperti siapa saja teman-temannya. Tak hanya interogasi, dia juga menjalani siksaan seperti disetrum dan dipukuli dalam keadaan tangan diborgol.

Pada 15 Maret 1998, dia, Nezar, dan Aan diserahkan ke Polda Metro Jaya oleh penculiknya. Di markas korps baju cokelat itu, Mugi cs diproses pidana. Dia dikenai pasal subversif. Tapi, pada 6 Juni 1998, dia dilepaskan dari tahanan setelah mendapat penangguhan penahanan buntut tumbangnya rezim Soeharto pada 21 Mei 1998.

"*Aku baru merasa jadi manusia setelah dibebaskan,*" imbuhnya. Darah aktivis Mugi tak pernah berhenti menggelegak hingga akhirnya menjadi ketua IKOHI, organisasi tempat mendiang Munir menjadi penasihatnya.[23]

III.4. Saat di Tahanan

Ditugaskan untuk memastikan bahwa saya tidak jatuh ke tangan kesatuan lain. Setelah mampir 3 menit di Kodim Jakarta Timur, saya dinaikkan kendaraan lagi. Kali ini dengan mata ditutup. Dan dari sinilah, prosesi interogasi dan penyiksaan khas serdadu didikan Amerika dimulai.

Dari tanggal 13 Maret malam hari sampai 15 Maret sore hari saya disekap, diinterogasi dan disiksa. Mata ditutup, dua tangan dan dua kaki diikat di tempat tidur velbed. Hanya memakai celana dalam. Di sana ada suara sirine yang meraung-raung, suhu ruangan yang sangat dingin, dan alat setrum listrik yang bunyinya seperti cambuk. Ada juga sarana siksa yang sangat mengerikan, para

23 Ibid, 26 Mei 2008

penculik sengaja memperdengarkan suara jeritan orang lain yang sedang disiksa. Sungguh biadab para penculik ini. Mereka memperdengarkan Nezar Patria dan Aan Rusdianto yang sedang mereka siksa di dekat saya. Dari situlah saya sadar bahwa sebelum saya ditangkap, Nezar dan Aan sudah duluan mereka culik. Pesan pager saya untuk Nezar diterima para penculik yang zalim itu.[24]

III.5. Makna Peristiwa Penculikan Bagi Mugi

Mugi memaknai peristiwa penculikan yang ia alami sebagai bentuk konsekuensi dari apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Apa yang telah dan tengah ia perjuangan saat itu memang bertentangan dengan niat dan keinginan pemerintah yang tidak menginginkan perubahan.

"*Ini menegaskan bahwa bukan berarti saya salah secara hukum dan moral, tetapi saya salah di depan penguasa yang zalim, dan saya benar didepan orang-orang yang ditindas secara ekonomi dan politik oleh pemerintah Orde Baru waktu itu*."

Penculikan yang dialami oleh Mugi dianggap sebagai konsekuensi oleh dirinya, namun demikian, kasus penculikan tidak bisa diabaikan oleh negara. bersandar pada norma hukum dan prinsip-prinsip HAM, di mana Indonesia juga telah menjadi negara anggota PBB yang telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional terkait dengan penegakan HAM, maka sudah seharusnya pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai perlindungan yang bisa dilakukan kepada tiap-tiap warganya.

"Harus ada pertanggungjawaban hukum atas apa yang telah terjadi pada diri saya dan teman2 saya, dan terhadap siapapun yang telah dilanggar hak-hak dasarnya olehnegara. Itulah kewajiban negara. Sementara kami, masyarakat dan terutama korban (istilah hukum, mengenai relasi antara pelaku dan korban) memiliki hak-hak yang juga diatur dalam norma hukum nasional dan internasional. hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan, kepuasan dan jaminan ketidakberulangan."

Sikap semacam ini, yang membedakan Mugiyanto dengan orang-orang yang bukan saja tidak menuntut pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan para pelaku pelanggaran HAM yang menimpa diri mereka, namun tidak disangka mereka (baca: korban penculikan) mengambil sikap untuk berkolaborasi dengan para pelaku pelanggaran HAM. mereka yang disebutkan oleh Mugiyanto seperti, Desmond J. Mahesa, Pius Lustrilanang, dan Haryanto Taslam yang kesemuanya ikut beraktivitas di Partai Gerindra saat ini.

24 Mugiyanto, Thursday, Refleksi 10 Tahun Penculikan Mugiyanto; Kami Tidak Akan Pernah Lupa, ibid.

IV. Sistem Dukungan Bagi Bagi HRD Kasus Penculikan

Dukungan moral dan psikologis tentu saja sangat diharapkan oleh Mugiyanto pascapembebasan dirinya. Ia merasa sangat beruntung mendapatkan dukungan yang begitu berlimpah, khususnya dari anggota keluarga, para aktivis prodemokrasi 1998, dan teman-teman dekatnya yang lain. Mereka semua mendukung Mugiyanto dan menyatakan bahwa sejak awal langkah yang dipilih Mugi dalam memperjuangkan kebebasan sipil dan politik di Indonesia bukanlah suatu kesalahan, dan langkah itu kini bisa dinikmati oleh orang banyak.

"Itulah memang yang ingin saya lakukan dalam hidup saya. Setelah menikah dan memiliki anak, saya juga mendapatkan dukungan yang sepenuhnya dari istri dan anak saya (*la vita es bella*!)Dari situ saya sadar dan senang bahwa saya survived! Tetapi survived saya tidak cukup, ternyata. Sehingga saya membutuhkan dukungan yang lain untuk kemudian bangkit, melanjutkan hidup dan bahkan melakukan usaha advokasi. "Dukungan demi dukungan dari keluarga korban dan organisasi-organisasi HAM yang lain, mendorong Mugi untuk membentuk IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia).

Mugiyanto sempat mengingat hal-hal yang terjadi pada dirinya pascapembebasan dari Polda Metro Jaya. Mugi mengakui bahwa dirinya mendapatkan surat perlindungan dari Puspom TNI yang ditandatangani oleh Mayjen Syam sul Djalal (Dan Puspom saat itu). Ia sempat menyimpan dokumen itu, yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika peristiwa penculikan menimpa dirinya. Mugi juga menyatakan bahwa surat itu berisi penjaminan terhadap Mugiyanto hingga waktu yang tidak ditentukan, namun kini surat itu hilang entah ke mana.

Mugi mengakui, ancaman kekerasan dan teror pembunuhan masih ia rasakan hingga tahun 2003. Mugi kemudian melaporkan pengalamannya kepada PBB. Hasil laporannya tersebut ditindaklanjuti dengan pemberitahuan khusus kepada Deplu RI untuk meminta Mabes Polri menindaklanjuti dengan memberi perlindungan kepada Mugiyanto. Namun, justru perlindungan itu ia dapatkan dari aktivitas Mugiyanto bersama dengan komunitas korban dan jaringan LSM.

Mugiyanto menyadari bahwa negara masih sulit memberikan mekanisme perlindungan, terutama apabila tindakan kriminalisasi pekerja dan pembela HAM masih dilakukan oleh negara itu sendiri. Mugiyanto bahkan berharap dengan adanya lembaga perlindungan saksi dan korban yang independen seperti LPSK bisa dijadikan sarana untuk mendorong negara untuk memajukan regulasi-regulasi khusus terkait dengan mekanisme perlindungan pembela HAM.

Dalam menjalankan aktivitasnya di Ikohi, Mugiyanto selalu bekerjasama de-

ngan LSM-LSM HAM seperti KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, ELSAM dan lain-lain. Sedangkan di tingkat regional, Ikohi menjalin kerjasama dengan AFAD dan PBB yang memiliki kelompok kerja khusus untuk menghilangan paksa (*UNWGEID*).

Advokasi ia tekankan bukan pada sebentuk keberhasilan yang bisa diraih dalam hitungan waktu atau diukur dengan angka-angka statistik, karena bergelut di dunia HAM selain mengedepankan rasionalitas dan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip HAM itu sendiri, pegiat HAM juga harus mengedepankan aspek pendidikan, pencerahan dan peningkatan pemahaman. Tidak lupa menanamkan nilai-nilai HAM dan demokrasi juga harus dilakukan sebagai corak dominan dalam advokasi penegakan HAM.

Keleluasaan yang bisa dinikmati dalam berbagai aktivitas, seperti kebebasan berekspresi, membangun organisasi HAM atau organisasi korban, membuat penerbitan, bisa bepergian ke mana saja dengan bebas, menjadi sesuatu yang sulit kita lakukan sampai 1998, sejak Orde Baru berdiri. Tentu saja, kita belum pernah menyaksikan kisah tentara dan polisi yang digiring ke muka pengadilan karena melakukan tindak kejahatan pidana yang mereka lakukan, meski pada akhirnya pengadilan menjatuhkan vonis tidak bersalah.

Keadilan sejati adalah keadilan yang melebihi semua prosedur rumit dan berbelit-belit yang harus dihadapi oleh korban dan keluarga korban itu sendiri. Sehingga, jika pengadilan masih belum bisa menyediakan keadilan dan kebenaran sebagaimana yang dicita-citakan oleh para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM sejak dulu, bukan berarti keadilan dan kebenaran tidak bisa dicapai dengan cara lain. Meraih keadilan dengan melibatkan harapan, dukungan, dan berbagai bentuk solidaritas yang tak henti-hentinya disalurkan demi perjuangan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM untuk menuntut keadilan dan kebenaran atas peristiwa di masa lalu, yang memisahkan mereka dengan orang-orang terkasih.

Tulang Punggung Masa Depan itu Pergi Untuk Selamanya

Ruyati Darwin

Korban Tragedi Mei 1998

I. Hari Terakhir

Tanggal 13 Mei adalah hari yang tak akan pernah dilupakan oleh Ruyati. Hari itu anak kesayangannya, Eten Karyana, menjadi salah satu korban kerusuhan Mei 98. Sejak hari itu hingga dua hari berikutnya, yakni tanggal 15 Mei 1998, yang adalah penanda puncak dari efek krisis ekonomi, anaknya tidak akan pernah kembali lagi. Sejak hari itu, ketika kekuatan rakyat mencurahkan kemarahan kepada penguasa, kerusuhan terjadi susul menyusul, merata di semua penjuru kota Jakarta, memakan korban siapa saja. Mulai hari itu Ruyati selalu bertanya, mengapa anaknya yang pagi-pagi sekali telah berangkat untuk mengajar tidak pernah pulang, namun terbakar di Yogya Plaza Klender Jakarta Timur. Ruyati berduka, dan kedukaan ini masih membekas dalam perjuangannya menuntut keadilan yang tak kunjung membuahkan hasil selama 10 tahun terakhir bersama para keluarga korban pelanggaran HAM lainnya.

Sehari sebelumnya, tepatnya tanggal 12 Mei 1998 Eten, yang pada saat itu masih berumur 36 tahun dan belum kawin, sempat berbincang dengan ibu yang disayanginya, Ruyati. *"Kasihan ya Ma, mahasiswa Trisakti yang kena tembak itu!"*. Eten bersimpati pada para mahasiswa yang menjadi martir yang tak sempat menyadari bahwa kematian mereka akan mendorong klimaks tercurahnya kekuatan rakyat (*people power*) bersama mahasiswa menuntut reformasi dan pergantian rejim penguasa. Eten juga tidak pernah tahu bahwa esok harinya dia akan menyusul mereka, dan juga tak pernah tahu bahwa mamanya akan meneruskan perjuangan para martir tersebut sampai 10 tahun terakhir ini.

I.2. Dompet Itu Masih Utuh dengan KTP di Dalamnya

Hari itu sore tanggal 13 Mei 1998 di Kampung Penggilingan Cawang Jakarta Timur. Cucu, anak bungsu Ruyati, menegor sang mama mengapa tidak mencari keberadaan kakak sulungnya, Eten. Ruyati agak heran mengapa anak bungsunya panik. Dia juga mendengar bahwa Yogya Plaza terbakar, namun dia pikir itu kebakaran biasa yang sering terjadi di Jakarta. Dia juga tidak paham mengapa para tetangga ribut dan berlarian. Ada yang membawa barang-barang, katanya dari Yogya Plaza yang dibakar. Ruyati merasa tidak tahu apa-apa, dia hanya di rumah seharian itu.

Namun karena situasi agak tegang, Ruyati kepikiran juga dengan anaknya yang juga belum pulang sampai malam hari. Suami juga sedang pergi. Malam itu Ruyati sendiri di rumah, merasa gelisah dan tidak bisa memejamkan mata. Oleh karena itu saat subuh pagi harinya, tanggal 14 Mei 1998, dia memutuskan untuk mencari anak dan suaminya. Yang dipikirkan pertama kali adalah Yogya Plaza, dari Kampung Penggilingan ke Klender harus naik sekali ang-

kutan umum Metromini. Begitu sampai jalan raya seseorang laki-laki berjaket menegurnya dan bertanya mau kemana. Ruyati menerangkan bahwa dia akan mencari anakya yang tidak pulang sejak kemarin. Orang tersebut malah menasehati supaya Ruyati pulang saja, karena tidak akan ada angkutan pada hari itu.

Namun tidak lama setelah itu ada Metromini melintas. Sampai di Yogya Plaza dia tak berani menatap, api masih terlihat, dan banyak sekali orang di sana. [1] Bagaimana nasib Eten, pikirnya. Dia sedih sekali, lalu dia berpikir akan menyusul suaminya ke Depok. Merasa sangat aneh dan khawatir, dia melanjutkan sampai daerah Jatinegara. Metromini dicegat orang-orang yang menjaga wilayah tersebut, sehingga memaksa Ruyati berjalan kaki menuju kampung Melayu, dan dilanjutkan lagi sampai stasiun Tebet. Sampai di sana dia naik kereta api yang berjalan perlahan-lahan dan sebentar-sebentar berhenti seakan sambil memberi kesempatan para penumpangnya melihat toko-toko yang terlihat terbakar di sepanjang jalan.

Sampai di Depok Ruyati baru tahu bahwa suaminya tidak bisa pulang cepat-cepat karena ada larangan bepergian pada tanggal 14 Mei tersebut. Sumber larangan tersebut tidak jelas dari mana asalnya, namun tiap orang seperti saling memberitahu bahwa hari itu jangan sampai keluar rumah karena kondisi keamanan sedang berbahaya. Ruyati meminta suaminya pulang bersamanya pagi itu. Semula suaminya menolak, namun akhirnya dia menyetujui Ruyati.

Mereka sampai di rumah lebih kurang pukul 10 pagi. Mereka bergegas mencari informasi keberadaan anaknya. Para tetangga menyarankan mereka ke rumah sakit, maka suami Ruyati berangkat diantarkan oleh salah seorang tetangga. Sampai di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo mereka terperangah dengan

1 Menurut pengakuan Ruyati, pagi ketika dia pergi ke Depok itu tanggal 14, dan pagi-pagi itu juga dia sudah menyaksikan bahwa Yogya Plaza sudah terbakar, asumsinya terbakar sejak kemarin sore. Hal ini berbeda dengan temuan TGPF yang menyatakan bahwa kerusuhan di Jl. Gusti Ngurah Rai Yogya Plaza Klender tersebut terjadi pada tanggal 14, jam 12.00, sebab paginya supermarket ini sempat buka sebentar walaupun kemudian ditutup kembali (Ester Indahyani Jusuf dkk., Kerusuhan Mei 1998, Fakta, Data dan Analisa; Mengungkap Kerusuhan mei 1998 Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, pen. Solidaritas Nusa Bangsa (NSB) dan Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI), Mei, 2007, hal. 144. Hal ini dikuatkan oleh buku karangan Ester Indhayani Jusuf dan Raimond R. SImanjorang, Raka Ulang Kerusuhan Mei 1998, pen. Solidaritas Nusa Bangsa, Kontras, APHI, IKOHI, FKKM '98 dan Tifa, hal. 110. Sementara peneliti tidak akan mengubah kesaksian korban, namun besar kemungkinan anak Ruyati meninggal pada tanggal 14 Mei 1998. Masalahnya, di manakah Eten Karyana pada antara tanggal 13 Mei ketika dia berangkat bekerja untuk mengajar sampai dengan tanggal 14 Mei siang ketika kerusuhan terjadi dan kemudian ditemukan jenazahnya pada tanggal 14 sore hari?---tanya ke bu Darwin.

banyaknya mayat, semuanya hangus terbakar. Mereka tidak menemukan mayat Eten, jadi mereka pulang.

Menunggu di rumah Ruyati bertanya-tanya mengapa juga belum ada kabar mengenai anaknya. Beberapa tetangga juga menemaninya di rumah. Mereka mulai khawatir Eten juga menjadi korban. Kabar itu datang sore harinya. Ruyati terus merasa tidak enak, sampai seorang tetangga menyampaikan berita mengerikan itu. Abu jenazah Eten ditemukan di RS Ciptomangunkusumo disatukan dengan dompet berisi KTP yang masih utuh atas namanya. Berita itu disaksikan dari acara Cakrawala di ANTV pukul 4 (empat) sore.

Salah satu menantu Ruyati diminta untuk mengambil abu jenazah Eten malam itu juga. Paginya, ketika abu jenazah itu dibuka, Ruyati tidak kuat menahan diri, menangis histeris dan jatuh pingsan.

I.3. Meninggal Karena Menolong Anak Kecil yang Terjebak dalam Api

Sejak ditemukannya dompet berisi KTP anaknya yang masih utuh di antara puing yang terbakar itu, Ruyati merasa tak mampu melihat barang-barang milik anaknya. Maka dikumpulkannya barang-barang itu, buku, baju dan barang lainnya dimasukkan ke dalam karung dan disimpan di tempat aman. Dompet yang masih utuh itu diberikan kepada salah satu sahabat almarhum.

Ruyati lebih sedih ketika mendengar cerita bagaimana anaknya sampai dapat meninggal di Yogya Plaza Klender beberapa tahun setelah kerusuhan itu berlalu. "*Anak ibu pulang mengajar bersama kawannya. Kawannya ini yang cerita kepada anak saya, sama saya tidak berani....*". Eten saat itu masuk ke gedung Yogya Plaza mal bersama temannya tersebut. Temannya lalu keluar lagi, namun Eten terpaku dengan seorang anak kecil berseragam SD. Dia ingin menyelamatkannya dari api. Mungkin dia ingat keponakannya yang sering diantarnya ke sekolah, dan pagi itu ketika kerusuhan akan terjadi dia tidak sempat mengantarnya karena harus berangkat kerja untuk mengajar. Setelah itu Eten tidak terlihat lagi untuk seterusnya.

Teman Eten yang masuk Yogya Plaza mal bersamanya ketika kejadian kebakaran tersebut tidak mau menemui keluarga Ruyati. Setelah kejadian itu dia pulang ke Jawa dan untuk beberapa tahun tidak kembali. Ketika kembali para tetangga sekeliling memintanya menceritakan kejadian tersebut. Para tetanggalah yang kemudian menyampaikan hal itu kepada keluarga Ruyati.

Perasaan penduduk hari-hari setelah kerusuhan itu sangat tidak menentu dan takut. Saat itu banyak tetangga yang saat kejadian masuk ke mal didatangi oleh pijak Kelurahan. Pihak Kelurahan, entah dikoordinir oleh siapa, meminta para

warga yang sempat mengambil barang supaya dikembalikan lagi ke kantor Kelurahan. Sebagian warga ada yang mengembalikan barang jarahan itu, sebagian lainnya ada yang menghindar dan pindah alamat. Perasaan penduduk tidak menentu, tidak ada aktivitas di kampung. Banyak yang pindah karena takut, terutama yang tinggal di sekitar mal. Mereka takut tidak sekedar soal perintah itu, tapi juga karena membayangkan suara letusan-letusan barang terbakar dari mal yang masih terngiang di telinga.

Kondisi tak menentu seperti ini berlangsung sampai berbulan-bulan. Baru ramai setahun lebih setelah gedung yang terbakar dibangun kembali dan digabung dengan Ramayana, dan diberi nama baru Citra Mal itu, satu tahun lebih setalah kebakaran itu.

"Saya sendiri cukup lama tidak mampu melihat gedung itu, perasaan rasanya mau menangis, dada berdetak kencang. Namun lama kelamaann saya berani. Pada tahun 2006 saya datang ke pengurus Citra Mal untuk minta ijin akan mengadakan kegiatan paguyuban di sana. Saat itu dada rasanya degdegan, seperti ada suara gemuruh. Tujuh tahun baru sekali itu masuk ke situ, pun yang pertama ditemani oleh anak TRK. Ada ibu lain dari keluarga korban walaupun sudah 10 tahun tetap tidak berani datang ke sana, kalau datang ke sana langsung stres. Kita tabur bunga setahun setelah kejadian, banyak yang pingsan. Ibu lemes, pusing, keluar air mata, bekas-bekas masih ada, gelap, jembatan masih ada, bareng-bareng tabur bunga, didampingi kanan kiri, ada abu, ada reruntuhan, mungkin keinjak mereka".

Pendamping rohani dalam hal ini mendampingi, ada ustadz, ada pemimpin Kristen, doa bersama. Yang mengundang adalah Romo Sandyawan dan TRK. Anak-anak TRK mengajari "Ibu harus bisa masuk", dan setalah itu akhirnya Ruyati bisa masuk. "Kita yang harus berjuang, tidak harus menunggu" tegas Ruyati. Do'a-do'a dari pendamping rohani sangat menguatkan pada saat itu. Ruyati merasa dapat merasakan terharu, merasa dapat berkomunikasi dengan anaknya yang telah meninggal, memberi kekuatan dan kesabaran. Saat itu pendamping rohani dari lima agama ada semua untuk mendampingi korban saat acara tabur bunga.

I.4. Tulang Punggung Masa Depan

Di mata Ruyati, Eten Karyana, anaknya yang menjadi korban kerusuhan Mei 1998 itu sangat baik. Dia membayar kuliah sendiri, mencari uang dengan membuka jasa membantu pembuatan skripsi dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Semua pekerjaan ini dikerjakan di rumah hingga sampai larut malam. Dia mengerjakan itu dengan memakai mesin ketik biasa dengan suara berisik. Kadang-kadang suara itu terdengar hingga pukul tiga dini hari. Bah-

kan Eten juga membantu adik-adiknya.[2]

Almarhum juga berjasa kepada pamannya, Budi, yang tinggal di Bandung. Berkat bantuan bimbingan bahasa Inggris dari Eten Karyana, Budi mampu lolos dalam pendaftaran sebagai guru agama. Eten juga yang membantu kakeknya untuk menyusun surat berbahasa Inggris untuk rekanan bisnis sang kakek di Bandung. Keluarga di Bandung merasa shock ketika melihat berita kematian Eten di televisi. Banyak di antara mereka yang pingsan.

Eten adalah seorang kutu buku. Kalau sedang bepergian ke Bandung dia selalu bawa buku, kadang dia membaca buku sampai ketiduran. Ayahnya sering melihatnya dalam mimpi. Eten kelihatan bersih dan tersenyum. Saat ia meninggal dia berumur 32 tahun, cukup tua untuk dapat menikah. Namun dia tidak ingin menikah dulu, sebab cita-citanya adalah membahagiakan mamanya lebih dulu. Maka Ruyati punya pengharapan besar padanya, apalagi setelah krisis ekonomi berdampak pada suaminya terkena PHK. Namun sebelum cita-cita itu berhasil, Eten telah pergi untuk selamanya. Itulah mengapa bagi Ruyati Eten adalah tulang punggung masa depan.[3]

Kerusuhan Mei 1998 tidak dapat dilepaskan dari konteks peristiwa sosial, ekonomi, politik yang terjadi sebelumnya sampai pada saat itu. Kerusuhan Mei merupakan klimaks dari efek krisis ekonomi terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda kawasan Asia. Krisis ini membawa efek domino penurunan nilai mata uang terjadi di Asia, mulai Bath - Tailand, Peso - Philipina lalu Rupiah, terhadap mata uang Dollar Amerika. Pemerintah tak bisa menstabilkan *kurs* devisa apalagi praktik KKN masih amat tinggi. Akibatnya, pemerintah tidak bisa mengelak untuk menandatangani *LoI* dengan IMF yang harus menandatangani pernyataan sebanyak 50 butir paket, di antaranya penutupan 16 bank bermasalah. Hal ini berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka terjadi penarikan uang (rush) yang luar biasa. Akibat lebih lanjut adalah banyak pabrik ditutup, PHK meningkat, angka pengangguran melonjak. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pulang ke kampung dihadang dengan kegagalan panen pada tahun 1997 karena fuso yang disebabkan oleh gelombang Elnino. Harga barang-barang naik di pasar, terutama sembilan bahan pokok (sembako). Kendatipun Badan Urusan Logistik (Bulog) mengadakan operasi pasar karena masyarakat panik jika sembako habis, namun aksi memborong tetap muncul. Krisis sudah merambah ke ekonomi secara luas.

Sampai pada tahun 1997 angka Rupiah menembus nilai Rp. 10.000,- per Dollar Amerika. Harga minyak dunia turun, menambah beban kesulitan dalam

2 Wawancara dengan Ruyati pada tanggal 20 Januari 2009
3 Wawancara dengan Ruyati pada tanggal 23 Januari 2009.

negeri. Krisis meluas ke segala arah, tidak saja moneter, namun ekonomi, birokrasi, format politik, kemasyarakatan dan lain-lain. Angka Rupiah *fluktuatif* namun pada awal 1998 menembus angka 13.000 walaupun pada Mei 98 turun menjadi 7.000. Masyarakat panik dan resah.

Situasi sosial politik di Indonesia menunjukkan gejala adanya pertama konflik *SARA* dengan melibatkan kelompok massa. Hal ini terlihat seperti adanya isu-isu ninja dan dukun santet yang merebak di Jatim pada tahun 1998. Kaum Nahdliyin (pengikut NU) banyak yang menjadi korban. Saat itu Gus Dur menyebut bahwa ada aparat terlibat dalam munculnya isu ini, akhirnya isu mereda. Namun isu ini ternyata muncul lagi pada tahun 1999 dan 2003.

Kedua, isu rasial anti Cina juga mewarnai suasana sosial politik pada tahun 1998. Isu ini sudah tergolong tua, karena gerakan anti Cina sudah ada sejak 1967 dan berlanjut hingga saat itu. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan rasialis dan adanya stereotip bahwa Cina eksklusif dan pelit. Pada tahun 1997 pecah kerusuhan anti Cina di Makassar. Hal ini terus berlanjut sampai kerusuhan 1998 di Jakarta. Akibatnya ketersediaan sembako di pasar terganggu karena karena etnis Tionghoa adalah pemegang jalur retail sembako. Kondisi ini semakin memicu konflik lebih besar dengan munculnya banyak kelompok anti Cina. Bahkan pada tahun 1998 tersebut beredar VCD pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa, seakan bersinergi dengan kampanye Aku Cinta Indonesia yang digaungkan oleh mbak Tutut sebagai upaya menahan larinya uang ke luar negeri. Kerusuhan berbasis SARA yang terjadi di Medan pada bulan Mei 1998 dan di Makassar pada bulan September memberikan indikasi pelaku sebagai berikut: 1) indikasi didalangi oleh kelompok muda, dikenal sebagai preman, terorganisir, 2) massa adalah pelajar dan remaja, 3) provokator berkaos warna sama dengan anak sekolah SMA, rambut cepak, badan kekar, terlatih, 4) ada indikasi keterlibatan aparat, di Medan ada kelompok diduga suruhan orang jakarta untuk menangkap OKB paska kerusuhan, 5) Angkatan Darat terlibat, 6) massa didatangkan dari daerah lain, 7) ada massa yang berperan provokator, diantaranya dari organisasi kepemudaan. Kerusuhan bukan hal alamiah, namun ada yang mengatur kejadiannya.

Situasi sosial politik menjelang 1998 di Indonesia menunjukkan beberapa indikasi keterlibatan penguasa dalam berbagai masalah kekerasan di masyarakat. Pada tahun 1995 timbul perbincangan di masyarakat mengenai ketidakkompakan kubu Suharto. Hal ini terlihat dari munculnya wacana mengenai kepemimpinan ke depan. Sikap elit politik mulai menunjukkan saling bersaing mendekati Suharto. Kosgoro justru mendekat ke Habibie.

Kabinet Pemerintahan saat itu merespon anti Cina dengan merangkul Islam. ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dibentuk, dan Bank Islam

didirikan (Bank Muamalat). Persaingan antar elit tidak sebatas pada saling mendekat kepada Suharto, namun juga terhadi perpecahan di tubuh militer. Isu yang beredar menyatakan bahwa telah terjadi dua kubu militer, kelompok ABRI Merah Putih (SBY, Agus W, Bimo Prakoso dll.) dan ABRI HIJAU (Hartono dan Prabowo). Isu ini menyebar melalui jaringan internet yang mulai berkembang saat itu. Pada Januari 1998 Soeharto mengajukan diri lagi sebagai presiden dalam sidang istimewa. Wakilnya adalah Habibie. Masyarakat merespon dengan kecewa dan terjadilah banyak demonstrasi saat itu. Dalam konteks perpecahan elit dan keinginan Soeharto terus berkuasa setelah sebelumnya menyatakan akan turun *keprabon* (turun tahta) dan akan *madeg pandito* (menjadi guru bangsa) ini kerusuhan Mei 1998 terjadi.

Situasi keamanan dan penanganannya secara militeristik juga perlu dilihat menjelang kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 1-11 Maret 1998 dilaksanakan Sidang Umum MPR dalam situasi ekonomi yang krisis dan dirasakan oleh semua elemen dalam semua sendiri kehidupan sosial politik. Dalam Sidang Umum ini Soeharto mengajukan diri menjadi presiden lagi setelah gagal memulihkan sistem ekonomi direspon negatif oleh masyarakat. Respon negatif ini terkait dengan berbagai krisis lain sejak krisis moneter 1997. Mahasiswa dan masyarakat semakin sering melakukan demonstrasi dengan mengangkat isu kesenjangan sosial, anti dwi fungsi ABRI, transparansi dan strategi pertahanan. Saat itu juga telah terjadi perbincangan kemungkinan pemimpin di masa depan. Kelompok-kelompok kritis baik dari kalangan mahasiswa maupun umum mulai aktif berkiprah mengorganisir diri misalnya kegiatan kelompok anti kemapanan (PIJAR, PRD, AJI. KNPD, ALDERA, SBSI, LSM) semakin kritis dengan pemerintah. Ada peluncuran buku mengenai penggantian presiden di YLBHI karangan Ryas Rasyid. Kelompok Megawati juga semakin aktif berdemonstrasi.

Aksi mahasiswa yang semakin lama semakin bertambah banyak. Akhir 1997 demo kelompok Cipayung mulai demo lagi, bergabung dengan *non* mahasiswa dan kalangan profesional. Januari 1998, demo merebak di setiap kota, sebagai respon atas: krisis ekonomi. Jumlah peserta ratusan, tempat di instansi pemerintah dan kampus. Februari demo semakin banyak dari semakin banyak kalangan, bentrokan mulai terjadi, dan isu masih soal krisis ekonomi. Maret semakin banyak, mahasiswa semakin banyak, aksi mencapai ribuan. Isu bergeser, dari ekonomi ke politik. Tuntutan Suharto mundur mulai ada, respon masyarakat mulai mendukung mahasiswa. April semakin banyak massa dan kampus. Demo mulai beraksi ke jalan. Bentrok dengan aparat mulai meningkat. Isu politik semakin santer. Tuntutan adalah reformasi, anti KKN, dan turunnya Soeharto. Dukungan masyarakat dan profesional semakin bertambah Mei, aksi mahasiswa semakin meningkat, apalagi ada kenaikan BBM. Peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti memicu terjadinya kerusuhan di berbagai kota. Aku-

mulasinya adalah aksi di gedung DPR/MPR. Soeharto menyatakan mundur. Tanggal 13-15 Mei adalah puncak, menjadi pemberitaan utama, adalah efek krisis ekonomi.

I.5. Situasi Menjelang Kerusuhan Mei 1998[4]

Perkembangan pemberitaan di media massa menjelang bulan Mei 1998 menunjukkan dinamika yang luar biasa, terutama dalam hal ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Hal ini cukup baru dalam konteks pemberitaan dalam situasi media yang serba dibatasi pada zaman Orde Baru. Demonstrasi mahasiswa semakin meluas merespon ekonomi dan reformasi. Wiranto, yang ketika itu adalah panglima TNI, mencoba menawarkan dialog namun ditolak. Perkembangan selanjutnya demonstrasi diwarnai bentrokan antara aparat dan mahasiswa.

Kondisi ekonomi juga memburuk. *Fluktuasi* nilai tukar mata uang masih terus berlangsung, harga-harga terus melambung terutama harga sembako. PHK semakin hari semakin banyak. Kondisi masyarakat sangat resah. Menurut temuan TGPF ada dua jenis peristiwa terkait dengan kerusuhan Mei 1998, yaitu pertama, faktor pemicu dan kedua, peristiwa pra-kondisi kerusuhan. Faktor pemicu kerusuhan meliputi kerusuhan di Jakarta antara lain:

1. Penculikan aktivis baik dalam isu Mega-Bintang maupun terkait hal lain
2. Penembakan mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998
3. Peristiwa pemakaman mahasiswa Trisakti yang tewas dalam penembakan
4. Isu-isu selebaran mengenai akan adanya kerusuhan di Jakarta

Peristiwa yang dikategorikan sebagai pra kondisi kerusuhan Mei 1998 antara lain adalah:

1. Tindakan provokasi ke arah aksi keprihatinan mahasiswa Trisakti, yaitu pada tanggal 13 Mei berupa teriakan, pembakaran mobil, pengrusakan pagar pembatas jalan dan rambu lalu lintas
2. Tindakan provokasi ke arah mahasiswa UI di Salemba pada tanggal 14 Mei 1998 dengan mengatakan "UI Pengecut" dan merusak rambu lalu lintas
3. Pada malam tanggal 13 Mei ada isu akan adanya para serangan dari perusuh luar daerah
4. Ada tindakan mengantarkan kelompok perusuh dengan memakai berbagai jenis kendaraan.

Provokasi tidak sebatas pada mahasiswa Trisakti dan UI, namun juga pada ma-

4 Lihat, Ester Indah Jusuf dkk., Kerusuhan Mei 1998; Fakta, Data dan Analisa, ibid. hal. 112-113.

hasiswa UPN (Universitas Pembangunan Nasional) di Pondok Labu Jakarta Selatan beberapa hari sebelumnya, dengan adanya massa yang mengajak mahasiswa ke luar kampus. Ketika mahasiswa menolak mereka memaki-maki mahasiswa tersebut.

Kondisi keamanan dan ketertiban juga berada dalam ancaman akan adanya kerusuhan di Jakarta. Hal ini ditegaskan beberapa kali oleh laporan ketua Badan Intellijen ABRI (BIA), Zacky Anwar Makarim dengan himbauan menghindari akan kejadian dimaksud. Namun justru apa yang disarankan adalah yang terjadi, yakni kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia.

II. Kerusuhan di Yogya Plaza, Klender Jakarta Timur[5]

Hari itu tanggal 14 Mei 1998, hari Eten Karyana meninggal di sana. Jam 09.00 pagi Yogya Plaza masih sempat buka, namun 2 jam berikutnya pihak manajemen mengumumkan Plaza tutup dan meminta para karyawan keluar dari gedung. Pada jam 12.00 siang terdapat perkelahian antar pelajar di sekitar itu. Terdapat 30 orang pelajar terlihat masuk permukiman Kampung Jati, namun ditolak oleh warga sehingga mereka lari ke arah stasiun Klender. Di persimpangan Yogya Plaza tidak jauh dari situ mereka dihadang oleh 20 orang massa yang berteriak dan menyerang mereka. Penyerang ini memiliki ciri-ciri tegap, atletis dan berambut cepak. Ada juga yang memberi kesaksian bahwa terdapat orang-orang berseragam pelajar, namun muka tua dengan ciri tegap dan rambut cepak meneriakkan untuk menyerang Yogya Plaza. Ada juga yang menyaksikan percekcokan pelajar mengundang orang datang dan membakar ban di depan Yogya Plaza mal.

Setengah jam berikutnya, antara 12.30-13.00, ada lebih kurang 50 orang melempari toko-toko, kerusuhan semakin besar. Pukul 14.00 mulai ada titik api dari lantai dua. Mobil patroli polisi yang datang saat itu langsung diserang oleh 20 orang yang siaga di situ dan tidak ikut menyerbu gedung. Pukul 15.00 ada truk warna merah berhenti di bawah jembatan layang tanpa mematikan mesin, di dalamnya ada dua orang berpakaian preman dengan kacamata hitam. Ketika ada seorang warga mencari anaknya di mal tersebut, dia malah disuruh oleh orang-orang tak dikenal untuk masuk ke dalam gedung dan menjarah isi gedung. Di antara orang yang membawa bensin sambil berteriak "Bakar! Bakar!"

Selang 15 menit berikutnya ada perkembangan menarik. Ada satu truk plat merah berwarna oranye membawa penumpang lebih kurang 50 orang, turun di kompleks mal dengan membawa *jirigen* berwarna putih, lalu mereka lari memasuki mal dan keluar dan naik truk lagi dengan tanpa membawa kembali

5 Lihat Ester Indayani dan Raymond R. Simanjorang, Reka Ulang Kersuhan mei 1998, ibid, hal 109-122.

jirigen tersebut. Mereka berbadan tegap, umur 20-30 tahun, berpakaian preman, ada yang memakai seragam SMA dan ada yang berambut cepak. Terlihat mereka saling mengenal satu dengan yang lain, dan beraktivitas dengan perintah supir dan orang yang ada di sebelah supir. Tak lama setelah itu terdengar letusan dari belakang mal, dan sopir bereaksi melambaikan tangan kepada orang-orang yang semula membawa jirigen warna putih. Lalu mereka kembali ke truk dan pergi. Ada juga yang menyaksikan di waktu yang sama ada orang-orang yang membakar barang-barang dengan bensin, dan mengunci pintu lantai 2, sehingga anak-anak tidak bisa turun dari sana. Ketika ada beberapa warga masuk mal ingin menyelamatkan orang, mereka bertemu dengan orang yang membawa handy talkie yang menyuruh mereka masuk dan mengatakan pada mereka di dalam banyak emas. Pukul 15.30 banyak orang terjebak di lantai dua yang mulai terbakar hebat dan tidak bisa keluar dari sana. Dari saat itu sampai pukul 17.00 semakin banyak orang panik dan turun dari lantai 4 dengan kain tambang, atau ada yang panik dan meloncat ke bawah sehingga terluka atau meninggal seketika. Pukul 17.00, semua pintu sudah dalam keadaan terkunci dengan gembok warna kuning. Warga yang ingin menyelamatkan korban yang sempat bisa melintas menyaksikan bahwa banyak orang terbakar dengan bau yang sangat tidak enak.

Kondisi keamanan tidak menentu. Ketika warga lapor ke Polsek Pulo Gadung dengan jarak 1 km dari arah itu, polisi meminta mereka pulang, dan mereka juga tidak melakukan apa-apa karena juga diserang oleh massa. Pukul 19.00 ada lebih kurang 20 tentara berjaga di sana. Malam itu mulai hujan, dan pada pukul 21.30 api sudah padam. Beberapa warga masuk gedung dan menemukan pintu rolling door dalam keadaan dirantai, padahal sebelumnya pintu itu selalu terbuka.

Pukul 01.00 dini hari, tanggal 15 Mei, banyak warga datang mencari keluarganya yang menjadi korban. Pukul 06.00 warga juga banyak yang mencari keluarganya yang tidak pulang. Pintu gembok warna kuning sudah dibuka. Di lantai dua banyak mayat anak-anak yang terjebak di tempat mainan. Lantai tiga sulit dimasuki karena masih panas.

Pukul 08.30 – 12.30 evakuasi dilakukan oleh PMI untuk mayat-mayat korban dan diangkut ke RSCM Jakarta. Tim keamanan tidak ada di sana. Pukul 10.00 tim evakuasi lain juga sudah ada, warga dilarang oleh tentara untuk ikut terlibat dalam evakuasi, tapi menyarankan mereka mencari keluarganya yang menjadi korban di RSCM. Baru sehari berikutnya tanggal 16 Mei aparat berjaga di sekitar Yogya Plaza mulai pukul 09.00 yang membuat warga kecewa

.

III. Anak Sang Ayah; Riwayat Aktivisme dan Keberanian Ruyati

Orang-orang memanggilnya Ibu Darwin, namun perempuan lembut berkacamata lebar itu memiliki nama asli Ruyati. Nama itu diberikan orang tuanya untuk mengenang "riwayat yang mengandung arti", kepanjangan dari nama tersebut, yaitu peristiwa dijatuhkannya bom Atom di kota Nagasaki dan Hiroshima menjelang berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Namun Ruyati juga diambil dari kata "yayat" yang berarti derajat, sebuah do'a supaya Ruyati akan menjadi orang yang bermartabat.[6] Ruyati yang lahir di Bandung pada tahun 1946 kini telah berumur 62 tahun dan memiliki 6 (enam) anak, 4 (empat) orang laki-laki yakni dan 2 (dua) orang lainnya perempuan. Mereka adalah 1) Almarhum Eten Karyana, 2) Tata Subrata, 3) Adi Aswadi, 4) Lilis Daruningsih, 5) Dian Mulyaningsih, 6) Cucu Ruyana Darwin.[7]

Ruyati mendapatkan pendidikan di Sekolah Rakyat, setingkat dengan Sekolah Dasar. Dia masih ingat ketika itu harus belajar membaca dan menulis dengan menggunakan asbak, semacam papan tulis kecil berwarna hitam, dan grip, semacam kapur tulis yang berasal dari batu.

Tidak lama setelah menikah, Ruyati pindah ke jakarta mengikuti suaminya. Mereka menumpang di rumah saudara tua suami di asrama Brimob, Pulogadung jakarta Timur. Tidak lama setelah itu mereka pindah ke daerah Jatinegara dan selanjutnya mereka tinggal di kampung Penggilingan, Cawang, Jakarta Timur. Mereka tinggal di Penggilingan sampai sekarang.

III.1. Riwayat Aktivisme Ruyati

Ruyati merupakan pribadi yang aktif di lingkungannya. Ketika masih muda, dia aktif di kelompok PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan menduduki jabatan sebagai sekretaris PKK di desanya. Selain itu Ruyati juga aktif di kepengurusan arisan se- RW- I di desa Penggilingan. Melalui PKK Ruyati terbiasa mengelola kegiatan misalnya mengkordinir anak remaja untuk kegiatan olah raga, kesenian, membuat kostum dari karton untuk persiapan perayaan hari besar nasional. Sering anak-anak di kampung itu memesan kostum yang terbuat dari kertas krep dan kertas manila berwarna-warni.

Kehidupan keluarga cukup harmonis ketika itu. Anak-anak mendukung kegiatan Ruyati, ibunya. Anak-anak sudah berlajar mandiri sejak dini, mengurus sendiri urusan mereka misalnya mencuci pakaian, membersihkan rumah dan lain-lain. Dukungan ini memungkinkan Ruyati bisa beraktivitas secara aktif di

6 Wawancara dengan Ruyati tanggal 23 Januari 2009

7 Wawancara dengan Ruyati tanggal 22 Januari 2009.

kelurahan bahkan di kecamatan. *"Saya baru menyadari sekarang, saya tidak capek. Itu mulai dari (mereka sekolah di) SMP dan SMA. Ibu sangat terbantu, termasuk memasak. Sekarang juga masih didukung anak-anak, mereka di kampung Jembatan Penggilingan".*[8]

Latar belakang aktivitasnya di masyarakat sangat berpengaruh terhadap kiprahnya dalam memperjuangkan hak-hak korban kerusuhan Mei 1998 di kemudian hari. Hal ini terlihat dengan keaktifan Ruyati dalam menekuni dunia gerakan pembelaan hak asasi manusia korban Mei 1998. Sejak mendapatkan undangan dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRK) pimpinan Romo Sandyawan, sejak itu pula Ruyati terus aktif mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan TRK. Bahkan ketika pendamping dari LSM semakin bertambah, Ruyati turut aktif dalam menyambut kegiatan-kegiatannya. Pada saat itu beberapa LSM turut mendampingi kelompok korban Mei 1998 misalnya dari Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Kalyanamitra, SIP (Suara Ibu Peduli), KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan lain-lain.[9]

Ruyati menyadari posisinya sebagai ibu rumah tangga dengan kemampuan terbatas. Namun bukan berarti dia merasa kecil hati. Melalui aktivitasnya dalam organisasi tersebut Ruyati menyimak, mendengarkan, mempelajari berbagai hal yang diajarkan oleh pendamping dari LSM, misalnya pemahaman atas konteks kejadian kerusuhan 1998, wawasan mengenai sosial politik negara, wawasan mengenai pembelaan terhadap masyarakat korban (advokasi), cara mengorganisir kelompok korban bahkan cara membuat proposal suatu kegiatan. Ruyati mulai mengerti mengapa dalam 30 tahun terakhir dia beraktivitas di tengah masyarakat merasa bodoh dan tidak tahu apa-apa adalah disebabkan karena politik otoritarian model Suharto. Ketekunan ini mengantarkan dia terpilih menjadi ketua Paguyuban Kelurga Korban Kerusuhan Mei 1998 sejak berdiri tahun 2006 hingga sekarang.[10]

III.2. Dari Memasak Hingga Berorasi di Tempat Umum

Pendampingan LSM membawanya pada aktivitas-aktivitas yang tidak selalu aman. Barisan ibu-ibu tidak jarang ditempatkan di garis depan untuk menghadapi para penjaga keamanan supaya mereka tidak terlalu bertindak keras. Pada banyak kesempatan strategi ini berhasil, karena sikap polisi akan lebih hormat kepada ibu-ibu yang maju di depan. Kadang secara sengaja Ruyati menekankan orasinya di depan aparat polisi dengan mengajak mereka berempati, merasakan apa yang mereka rasakan sebagai ibu yang kehilangan anaknya, yang

8 *Ibid*
9 Wawancara tanggal 22 Januari 2009.
10 Wawancara tanggal 20 Januari 2009.

menjadi korban kerusuhan Mei 1998.

Namun hal ini tidak selalu berhasil. Pada saat kelompok korban dari berbagai komunitas berkumpul dan menyuarakan protes kepada pemerintah supaya lebih mendengarkan suara korban, keadaan menjadi anarkis. Saat demonstrasi di kawasan Sarinah jalan Tamrin Jakarta, Ruyati pernah terjatuh di depan seorang penjaga polisi, dan ketika seorang teman berdiri ingin menolongnya tiba-tiba ada suara tembakan. Teman itu rubuh dan segera dilarikan ke rumah sakit. Ruyati tidak gentar dengan pengalaman keras ini, justru dia semakin *solider* kepada kawan-kawan seperjuangan, kawan-kawan yang mau membelanya bahkan sampai tertembak oleh aparat.

Melihat nasib Ruyati yang aktif di organisasi walaupun kondisi kehidupan keluarganya serba berkekurangan, saudara-saudaranya di Bandung sering mengharapnya untuk pulang kampung. Di Bandung, Ruyati memiliki rumah peninggalan orang tuanya. Namun Ruyati telah menikmati perjuangannya di Jakarta, Ruyati tidak bisa tinggal diam di Bandung sementara perjuangan bisa dilakukan untuk alamarhum Eten, anak tercintanya. Perjuangan ini harus dilanjutkan supaya nasib anaknya tidak akan terulang kepada anak-anak lainnya.

Saudara-saudaranya memahami sikap keras Ruyati ini. Mereka tidak heran, semangat inilah yang diturunkan ayah mereka di masa lalu. Bapaknya adalah seorang haji, dan berprofesi sebagai pengusaha keramik, kerajinan tangan, kayu berhias batik dan lain-lain yang cukup berhasil hingga dapat mengekspor produknya ke luar negeri. Untuk itu kadang bapaknya membutuhkan penerjemah, dan salah satu penerjemah dan pembuat surat perusahaan saat itu adalah Eten Karyana, sang cucu yang menjadi korban kerusuhan Mei 1998. Keaktifan bapaknya mengantarkan pada beberapa penghargaan dari pemerintah, sehingga suatu saat sang bapak pernah berfoto bersama dengan Soeharto. [11]

"Semangat harus! Kalau kita nggak semangat, ya udah hilang nanti. Salah satunya harus ada yang kuat. Emang kebanyakan ibu-ibu sih..ya segen lah..males lah! Lebih-lebih masih belum ada perubahan apa-apa. Itulah nanti yang membuat kasus ini lama-lama menghilang. Jadi ya udahlah, saya akan usaha untuk memberikan kepada ibu-ibu yang lainnya supaya tetap semangat. Walaupun nggak setiap ini, tapi selalu ada. Selalu perjuangan kita ada. Jangan sampai tidak ada perjuangan sama sekali. Karena itu perbuatan Negara yang membuat kita jadi begini. Membuat kita jadi kehilangan anak, bapak, istri, itu kan negara! Negara harus bertanggungjawab...."[12]

11Wawancara dengan Ruyati tanggal 23 Januari 2009.

12 Wawancara dengan Ruyati, Selasa 20 Januari 2009.

III.3. Trauma Itu Masih Tersisa

Kerusuhan Mei 1998 sudah berlalu sebelas tahun yang lalu. Namun tiap kali menjawab pertanyaan mengenai soal kematian anaknya, Eten Karyana, Ruyati selalu masih merasakan sedihnya. Kadang-kadang Ruyati masih bisa berbicara lancar mengenai bagaimana anaknya dulu tekun bekerja untuk membantu keluarganya. Namun jika cerita itu sampai pada detik dimana Eten Karyana meninggal di Yogya Plaza itu hatinya masih terasa ngilu. Rasa marah, kecewa dan sedih menjadi satu. Kadang-kadang air mata mengalir tanpa diminta. Sambil meminta maaf kepada peneliti, Ruyati kembali tersenyum melanjutkan ceritanya.

Malam itu tanggal 13 Mei 1998, Ruyati yang sendiri di rumah merasa gundah karena anaknya belum pulang sejak pagi. Semua perasaan itu mencapai puncaknya ketika Ruyati mendengar kepastian bahwa anaknya telah meninggal, ketika abu jenazahnya dengan identitas KTP dalam dompet yang masih utuh, di bawa ke rumah malam itu, dan ketika pagi berikutnya abu jenazah itu dibuka. Ruyati tidak kuat, menangis histeris, dan jatuh pingsan saat itu. Peristiwa ini merupakan hal traumatik yang pernah dia rasakan dalam hidupnya.

Hari-hari berganti dan Ruyati tidak tahan melihat barang-barang yang mengingatkan Ruyati pada almarhum anaknya. Maka barang-barang almarhum pun dikumpulkan dalam sebuah karung dan disimpan. Hanya sisa KTP Eten yang masih di bawa oleh Ruyati.

III.4. Terjebak dalam Pusaran Kekerasan dan Kemiskinan

Ruyati tidak sekedar mengalami penderitaan karena meninggalnya Eten Karyana yang sempat menjadi harapan gantungan hidup keluarga, namun dia juga mengalami masalah lain yang tidak kalah beratnya. Ruyati mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jika dalam berjuang bersama Paguyuban dia menuntut keadilan dalam ruang publik supaya pemerintah mengakui adanya pelanggaran HAM pada kasus kerusuhan Mei 1998 dan bertanggungjawab akan hal itu, maka di ranah domestik Ruyati juga tidak bebas dari situasi kekerasan.

Peristiwa itu terjadi pada tahun 1997, setahun menjelang kerusuhan Mei 98. Krisis moneter yang berujung pada krisis ekonomi tak bisa teratasi oleh pemerintah. Banyak perusahaan gulung tikar dan harus mem-PHK (Putus Hubungan Kerja) para buruh. Angka pengangguran melonjak, dan suami Ruyati adalah salah satu korbannya. Sejak itu pula, kondisi keluarga menjadi goncang. Setelah beberapa kali usaha dilakukan akhirnya tidak ada yang berjalan lancar. Mungkin karena depresi dan kehilangan rasa harga diri, sang suami menjadi

bertemperamen keras. Hubungan suami istri diwarnai dengan konflik. Ruyati yang cukup aktif melakukan aktivitas sosial tidak menyelesaikan masalah, justru membuat sang suami sering merasa cemburu yang memicu emosi. Hubungan yang dipenuhi dengan kekerasan akhirnya menjadi *mode* dari hubungan suami istri.

Ketika kerusuhan itu terjadi, dan Eten sang anak menjadi korban, maka apa yang dialami Ruyati bagaikan jatuh tertimpa tangga pula. Ruyati mengabaikan situasi domestiknya dan berkonsentrasi pada kegiatan memperjuangkan nasib keluarga korban Mei 1998. Namun tak pelak, jika kondisi Ruyati sangat lelah dan membutuhkan istirahat di rumah, harapan ini sering kandas dan kembali komunikasi dalam keluarga kembali memanas. Ruyati terjebak dalam pusaran kekerasan, namun dia tidak tinggal diam.

Situasi kekerasan yang dialami Ruyati berhubungan erat dengan kondisi ekonomi keluarga yang semakin lama semakin buruk sejak suaminya mendapatkan PHK. Latar belakang suami yang menjadi sekretaris pada sebuah kantor keuangan tidak memberinya keahlian memadai untuk membangun usaha bisnis di luar. Ketika suami mencoba bisnis dengan rekanan, kehidupan bisnis yang kejam tak dapat dikuasainya. Suaminya bangkrut karena ditipu oleh rekanan kerjanya.

Sejak itu suami tidak bisa bangkit kembali setelah mencoba dua kali usaha bisnis dan berakhir kegagalan. Sejak itu pula Ruyati mengambil tanggungjawab untuk melakukan apapun yang dapat mendukung supaya mereka dapat makan. Meskipun anak-anak sudah berkeluarga, dan mereka juga membantu Ruyati dan suaminya, namun kondisi kemiskinan yang melilit tak kunjung teratasi. Kini, Ruyati yang dulu pernah hidup bersama suami dan keluarga secara berkecukupan jatuh ke dalam kemiskinan. Kadang-kadang dia tak mampu membayar rumah petak kontrakannya tepat waktu. Bahkan kadang-kadang uang untuk makan di hari esok juga masih belum tentu tersedia. Namun, Ruyati tidak tinggal diam.[13]

III.5. Menggerakkan Diri, Mengobati Luka Batin

Situasi kekerasan baik di ranah domestik maupun ranah publik yang selalu mengancam tak membuat Ruyati gentar. Dia merasa harus tetap bergerak. Dia tidak bisa diam menghadapi masalah ini kalau tidak ingin menjadi gila. Maka dia putuskan untuk aktif mencari tahu masalah yang sedang menimpanya. Untuk merespon masalah keluarga dia berkonsultasi kepada Kalyanamitra, sebuah lembaga pendamping perempuan korban kekerasan di Jakarta. De-

13 Wawancara dengan Ruyati, 22 Januari 2009.

ngan proses yang berat namun berani, Ruyati belajar memahami relasi laki-laki dan perempuan yang diwarnai kekerasan. Dengan usahanya yang gigih, kini hubungan keluarga ini dapat bertahan, walaupun sekali waktu situasi tegang masih muncul. Itu hal biasa dalam kehidupan rumah tangga.

Ruyati juga memutuskan untuk aktif dan belajar sebanyak-banyaknya dari para pendamping korban kerusuhan Mei 1998. Ketulusan para pendamping, terutama di awal-awal proses setelah peristiwa kerusuhan, yakni dari TRK tidak sia-sia. Ruyati belajar menghadapi situasi sulit. Ruyati juga belajar berorganisasi, mengorganisir keluarga korban, bahkan kini Ruyati memegang jabatan sebagai ketua Paguyuban Keluarga Korban Mei 1998.

Aktivitas demi aktivitas tersebut dapat membuat Ruyati tidak saja terhibur, namun juga digunakan olehnya untuk memelihara harapan. Kadang-kadang jika Ruyati sedang melakukan orasi, ingatan akan segala kepahitan ini hadir. Maka dia kadang merasa marah sembari berorasi, merasa semua sesak di dada dia keluarkan. Kadang-kadang dia juga berlari dari rumah menghindari situasi kegerahan, sehingga kadang dia berangkat pagi sekali menuju kantor IKOHI, dan pulang ke rumah pada sore menjelang malam. Dengan demikian dia sudah melepaskan beban-beban batin itu. Kini dia lebih tenang dalam menghadapi masalah sempitnya hidup ini. Esok selalu ada harapan kehidupan yang lebih baik. Akan ada uluran tangan baginya untuk menyambung kehidupan, entah dari siapa. Esok juga korban Mei 1998 akan diakui sebagai korban, dan akan mendapatkan hak-haknya untuk dipulihkan, *entah* kapan.[14]

IV. Perjuangan adalah Memelihara Ingatan

Tujuan advokasi supaya pemerintah mengakui korban itu sebagai korban kadang-kadang jauh panggang dari api, sulit sekali ditargetkan kapan akan berhasil. Ruyati dan keluarga korban Mei menyadari hal itu. Meskipun sebagian anggota mulai bosan, namun Ruyati menyadari, harus ada di antara mereka yang berkorban. Ruyati memaknai dirinya sendiri berkorban untuk perjuangan ini. Baginya jika tidak diteruskan, harapan perjuangan ini akan semakin jauh lagi. Dalam situasi penegakan hukum untuk pelanggaran HAM yang masih belum kuat ini, dia sadar bahwa berhenti memperjuangkan hal ini sama dengan membiarkan kematian anaknya sia-sia, kematian para korban Mei 1998 tidak akan ada artinya. Dan kasus ini akan semakin disalahartikan untuk kemudian terlupakan.

Ruyati hanya berharap supaya pemerintah semakin cepat mengakui mereka sebagai korban. Negara yang membuat para korban kehilangan bapak, istri,

14 Wawancara dengan Ruyati tanggal 22 Januari 2009.

anak dan kerabat meninggal. Negara harus bertanggungjawab. Terhadap Pemilu 2009 yang akan segera dilaksanakan, Ruyati masih berharap para caleg yang terpilih adalah mereka yang peduli pada kasus pelanggaran HAM. Walaupun sampai sekarang belum ada satu caleg pun dalam kampanye mereka, terutama di media massa, yang peduli dan menyuarakan korban.[15]

IV.1. Kekuatan Sang Perempuan

Penderitaan demi penderitaan di atas terbukti tidak menyurutkan Ruyati dalam berjuang. Justru melalui perjuangan Ruyati menemukan dirinya semakin kuat, perjuangan adalah pemulihan diri untuk menjadi lebih kuat. Kekuatan ini digunakan menghidupi dan sekaligus dihidupi oleh aktivitas Paguyuban, dan sekarang juga IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang).

Ruyati memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa, termasuk dalam hal mengatasi situasi yang sangat drastis. Dulu Ruyati berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi. Ayahnya adalah seorang pengusaha berhasil di daerah asalnya, Bandung. Dia juga bersuami seorang laki-laki yang memiliki kedudukan dalam sebuah bank di Jakarta, sampai mendapatkan PHK tahun 2006. Bersama suami dan anak-anaknya Ruyati pernah mengenyam kehidupan yang mapan. Mereka memiliki perangkat komunikasi telepon selular ketika belum banyak tetangga memilikinya, mereka juga memiliki rumah yang mapan dan alat transportasi keluarga, mobil. Namun sejak kerusuhan Mei 1998 kondisi ini berangsur surut, dan mencapai titik nadir hingga sekarang, di mana mereka tinggal di rumah kotak terdiri dari dua ruang tamu sekaligus ruang keluarga, dan separuh di belakang dijadikan sebagai dapur dan kamar mandi. Antara dua ruang ini hanya disekat dengan kain.

Rumah dengan penerangan listrik 10 watt ini juga bukan rumah sendiri, melainkan rumah kontrakan. Mereka juga masih kerepotan untuk dapat membayar kontrakan tepat waktu. Namun Ruyati tidak pernah jatuh karena keadaan berubah seperti ini. Dia adalah seorang perempuan yang memiliki seperangkat kemampuan praktis untuk keluar dari masalah kesulitan hidup tanpa membuat masalah lebih besar, sekaligus berjuang demi kelompok korban lebih luas.

Kemampuan ini banyak dimiliki kaum perempuan. Hal ini terbukti bahwa dalam aktivitas paguyuban perempuan lebih aktif daripada laki-laki. Suami Ruyati semula juga aktif di paguyuban, namun lama kelamaan tinggal Ruyati yang bertahan, bahkan memimpin paguyuban. Banyak laki-laki yang tidak bisa bertahan seperti suaminya, sebagian karena depresi dengan lamanya perjuangan tanpa keberhasilan, namun sebagian lainnya memang sudah pasif sejak semula.

15 Wawancara dengan Ruyati pada tanggal 27 Januari 2009.

Ruyati masih mampu mengelola aktivitasnya di rumah dengan situasi yang sulit, juga di Paguyuban serta kini di IKOHI. Baginya hal ini adalah sebuah keniscayaan. Mungkin perempuan memang lebih kuat dari laki-laki.

"Kalau saya bertengkar dengan suami saya, saya malah lebih kuat. Pikiran dia macam-macam, saya malah beraktivitas, sejak pagi-pagi. Saya langsung berangkat, tidak sarapan. Berdoa malam hari dengan tasbih. Semoga saya mendapat peluang seperti mereka".[16]

Kadang-kadang untuk keluar dari situasi di rumah harus menghadapi hal yang sepele namun menjengkelkan, hal yang remeh bagi banyak orang namun begitu berat baginya karena harus mengeluarkan uang. Kadang-kadang dia harus berangkat walaupun hanya memegang uang 10.000 Rupiah. Rahasianya adalah naik kereta. Pada pagi buta dia sudah bangun, masih sempat menyiapkan kopi untuk suami, lalu berangkat dengan naik kereta ekonomi. Baginya yang sudah berumur 62 tahun hal ini bukan perkara mudah, namun Ruyati tetap semangat. Sebab dengan naik kereta api dia hanya mengeluarkan uang sebesar 1.000 Rupiah. Dari stasiun Klender dia akan berhenti di stasiun Cikini, atau kadang-kadang Stasiun Kramat. Dari sana tidak jarang dia berjalan kaki sampai ke kantor IKOHI yang jaraknya lumayan jauh. Kadang dia merasa iri kepada orang-orang yang bisa naik ojek dengan leluasa, atau naik angkutan umum lainnya. Dia merasa besyukur sekali ketika kadang-kadang ada rejeki cukup dia bisa naik metromini yang membuatnya bisa duduk tenang tidak bergelantungan seperti di kereta.[17]

IV.2. Harapan Masa Depan

Sebagai seorang ibu, keinginan Ruyati secara pribadi adalah dapat hidup mandiri. Dalam kesempitan hidup di masa tua ini, ketika anak-anaknya sudah mampu menghidupi keluarga mereka masing-masing, Ruyati masih memegang prinsip hidup mandiri. Dia ingin tidak merepotkan anak-anaknya. Dan dia ingin memiliki sebuah toko kecil supaya suaminya dapat beraktivitas, merebut makna hidup kembali sehingga bisa bersemangat dan dapat bekerjasama dengan dia untuk kehidupan selanjutnya.

"Keinginan ibu adalah bisa hidup mandiri, tidak mengandalkan pada anak, merasa malu, karena mereka juga memiliki banyak kebutuhan. Anak-anak sendiri mengerti, tapi kalau sedang ada kebutuhan mereka tidak bisa membantu".[18]

Kerusuhan Mei 1998 bukan merupakan kerusuhan murni oleh karena respon

16 Wawancara tanggal 23 Januari 2009.
17 Ibid
18 Ibid

kemarahan masyarakat atas kondisi sosial politik yang tidak dapat terkendali. Kerusuhan 1998 ada yang mendalangi. Hal ini terbukti dari tanda-tanda seperti adanya kelompok massa provokator antara lain ditunjukkan dengan badan kekar, atletis, rambut cepak, memakai seragam Sekolah Menengah Atas (SMA) namun bermuka tua. Mereka juga yang mengerahkan masa untuk membakar, mengordinir sebagian masa untuk menyiramkan bensin ke tempat target, melempar api, memerintahkan untuk menyerang kelompok pelajar, menyerang polisi. Ciri-ciri ini didapatkan di hampir semua titik kerusuhan terjadi, bahkan di kota lain selain Jakarta, dan dalam waktu yang hampir serentah di di berbagai lokasi. Penjarahan bahkan juga merupakan bagian dari hal yang direncanakan. Ketika masyarakat dalam keadaan hidup sulit dan gelisah, perintah menjarah yang dikondisikan secara massal akan membuat orang secara psikologis merasa tidak bersalah untuk bersama-sama melakukan aktivitas menyimpang dari kondisi normal, misalnya mengambil barang dari toko saat situasi kacau. *"Para penonton pembakaran ditepuk dari belakang supaya masuk ke gedung dan mengambil apa saja yang bisa diambil...."*, kata Ruyati menjelaskan kejadian di Yogya Plaza ketika Eten terenggut nyawanya.

IV.3. Negara Mengabaikan Perlindungan bagi Korban

Sistem keamanan ketika kerusuhan berlangsung juga tidak berjalan. Para warga yang mengadu ke kantor polisi resort Pulogadung yang jaraknya tidak seberapa jauh dari lokasi kerusuhan di Yogya Plaza Mal menolak untuk merespon mereka. Polisi enggan mengamankan suasana karena mereka mengaku terancam serangan massa juga. Polisi yang ada di tempat kerusuhan juga hanya memperhatikan dari atas jembatan layang. Patroli polisi yang mendatangi lokasi kerusuhan langsung berlari karena mendapat serangan dari kelompok massa provokator. Satuan tentara baru datang berjaga di sekitar Yogya Plaza pada hari ketiga kerusuhan, yakni tanggal 15 Mei 1998 ketika evakuasi para korban dilakukan oleh PMI dan tim lainnya.

Menjelang 40 hari dari kejadian kerusuhan, tim relawan dari jaringan TRK (Tim Relawan Kemanusiaan) pimpinan Romo Sanyawan mendatangi rumah para korban di sekitar Klender untuk mendukung para korban menghadapi masa sulit. Hal pertama yang dilakukan adalah mengundang para korban untuk berkumpul di sekretariat TRK, yaitu di Jalan Arus Cawang, memberikan para korban sedikit bantuan finansial untuk menyiapkan peringatan 40 hari kematian para korban. Hal berikutnya adalah mendampingi para korban dalam proses pemulihan, mengorganisir para korban untuk dapat beraktivitas normal kembali, memberi dana bagi mereka untuk usaha ekonomi dan mendorong mereka untuk membangun paguyuban yang akhirnya berdiri sebagai "Paguyuban Korban Mei 1998" (Paguyuban). Kegiatan kemanusiaan dari tim

TRK diperkuat dengan dampingan dari berbagai organisasi lain semisal Elsam, KontraS, Solidaritas Ibu Peduli dan lain-lain. Melalui pertemuan Paguyuban para keluarga korban Mei 1998 mendapatkan dukungan, dorongan supaya tetap kuat, mendapat penyadaran mengenai konteks mengapa kerusuhan terjadi, mengapa anak dan keluarga mereka menjadi korban. Dari aktivitas ini peguyuban melakukan advokasi kepada pemerintah supaya kasus kerusuhan Mei 1998 diakui sebagai praktik pelanggaran HAM karena negara membiarkan kerusuhan terjadi dan merenggut banyak korban, dan dengan demikian negara dituntut untuk bertanggungjawab atas peristiwa ini.

Isu keamanan yang muncul ketika Paguyuban bersama dengan para pendamping antara lain ancaman 1) Mendapatkan teror, 2) Ancaman tindakan pasukan keamanan ketika mengadakan aksi demonstrasi dan 3) Ancaman mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat sebagai keluarga penjarah. Romo Sandyawan dan kantor TRK tidak bisa dilepaskan dari aktivitas Paguyuban ketika mendapatkan teror bom, tidak lama setelah beraktivitas bersama dengan mereka. Kantor Romo Sandyawan juga pernah dijarah oleh massa yang mencari-cari dokumen tertentu untuk mereka bawa. Teror ini tak pelak mempengaruhi para anggota Paguyuban dalam beraktivitas bersama. Ruyati, koordinator Paguyuban, mengaku bahwa untuk beberapa lama dia harus melihat kanan dan kiri jika harus beraktivitas di jalan Arus, kantor TRK, karena waspada dan khawatir terhadap kemungkinan orang yang mengikuti. Selain itu, Ruyati dan korban lainnya kadang merasa takut saat dilihat orang dengan ekspresi aneh, karena terdapat desas-desus ada yang menyamar, dan karena pembakaran itu disengaja, ada orang di belakang terjadinya pembakaran itu.

Menghadapi pasukan huru-hara, ibu-ibu sering diletakkan di barisan depan ketika melakukan aksi demonstrasi. Ruyati sering berada di garis depan, bahkan sering menjadi orator menuntut hak-hak korban yang telah lama diabaikan oleh pemerintah. Kadang-kadang Ruyati merasa takut juga bila saja aparat keamanan akan marah. “Tapi saya sering menanyakan dulu pada mereka ketika orasi, apakah kalian bisa merasakan sebagai ibu, anak kalian di bakar di sana...” begitu ujar Ruyati dalam mengatasi rasa takutnya di depan para aparat pengaman demonstrasi. “Sekarang para polisi yang berjaga biasa-biasa saja, hanya diam saja, ada yang sopan, mungkin karena kita orang-orang tua”. Suatu ketika para keluarga korban dari berbagai kelompok korban 1998 berdemonstrasi di depan supermarket Sarinah, Jalan Tamrin Jakarta Pusat bersama Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRK). Saat itu demonstras mendapat reaksi keras dari aparat keamanan. Sekonyong-konyong ada yang kena tembak, namanya Tigor dari TRK. “Tigor melihat ibu seakan diinjak aparat, dan ditekan pakai rotan, kelihatan dari arah Tigor berdiri seperti menginjak saya, maka dia berdiri untuk menyelamatkan saya, dan dia tertembak oleh aparat.

Lalu dia ditangani oleh ibu Arif" papar Ruyati.[19]

Merespon pengalaman demi pengalaman menghadapi risiko keamanan, Ruyati dan Paguyuban tidak melakukan tindakan khusus untuk membuat mereka lebih nyaman. Mereka tidak melaporkan teror-teror di atas kepada pihak kepolisian. Kepolisian dalam konteks kerusuhan 1998 bukan tempat yang nyaman bagi para korban. Para korban bahkan marah kepada mereka karena tidak mau melindungi masyarakat ketika kerusuhan terjadi.

IV.4. Menghadapi Stigma sebagai Penjarah

Pandangan negatif masyarakat terhadap keluarga korban kerusuhan Mei tidak dapat dilepaskan dari stigma atas mereka sebagai penjarah. Keluaga korban cukup heran dengan respon aparat desa yang cukup cepat dalam menanggapi masalah penjarahan. Di desa Penggilingan, Cawang Jakarta Timur tempat Ruyati tinggal bersama keluarganya, aparat desa sudah berkeliling kampung mengumumkan supaya warga yang telah mengambil barang-barang di supermarket mengembalikan barang-barang tersebut ke kantor kelurahan begitu segera setelah kerusuhan terjadi, bahkan ketika perkabungan belum selesai. (berapa hari setelah kerusuhan, tanyakan lagi kepada bu Darwin!). Karena pengumuman itu masyarakat merasa bersalah, khawatir dan banyak yang merasa takut. Beberapa warga yang bukan bukan asli segera pindah ke lokasi lain. Beberapa yang lain bersembunyi di tempat saudara. Hal yang cukup mengherankan bagi keluarga Ruyati adalah kenyataan bahwa tindakan menjarah dilakukan oleh warga yang sedang menonton kebakaran dikarenakan anjuran kelompok massa provokator, tindakan aparat desa yang segera meminta warga yang mengambil barang untuk segera mengembalikan ke kantor desa dan negara tidak menyatakan kerusuhan Mei sebagai pelanggaran HAM seperti kasus lainnya, misalnya penembakan mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, kasus Semanggi I dan kasus Semanggi II. Hal ini membuat para anggota Paguyuban berpikir bahwa selama 10 tahun ini mereka berjuang dan tidak didengarkan oleh pemerintah karena mereka dianggap penjarah. Peristiwa ini seperti sebuah skenario yang disengaja, dimana pemerintah mengabaikan mereka dan masyarakat pun mendukung sikap pemerintah karena menganggap mereka adalah penjarah, dan semua ini sudah diatur sejak semula. Warga masyarakat Penggilingan juga tidak tahu, dan tidak mencari tahu, di mana barang-barang yang sudah dikumpulkan di kantor kelurahan itu, untuk apa dan siapa yang mengelolanya?[20] (Bisa ditanyakan kepada aparat desa yang bersangkutan, apakah ini perlu, karena hal ini tidak dilakukan sebab diluar konsen penelitian ini)

19 Wawancara dengan Ruyati tanggal 22 Januari 2009.
20 Wawancara dengan Ruyati pada tanggal 20 dan 22 Januari 2009.

Selain pandangan negatif terhadap keluarga korban kerusuhan Mei 1998, respon lain dari masyarakat lebih merupakan pertanyaan keingintahuan warga mengenai aktivitas para keluarga korban yang aktif di paguyuban. Bagi sebagian tetangga, mereka cukup perhatian baik dengan nada sinis, cibiran hingga yang berpandangan netral terhadap aktivitas dan penampilan keluarga korban. Misalnya Ruyati sering mendapat cibiran mengenai kaos yang sering dipakainya sebab tertulis slogan kampanye "IKOHI", "MELAWAN IMPUNITAS" dan lain-lain.

Keluarga Paguyuban Korban Mei 1998 melakukan berbagai aktivitas untuk menghilangkan stigma sebagai penjarah bagi mereka. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pemutaran film Munir, seorang pejuang HAM yang pada tahun 2004 dibunuh di pesawat Garuda dalam perjalanannya menuju Belanda untuk melanjutkan studi. Semula warga lingkungan dan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merasa khawatir dengan pemutaran film ini, sehingga sebagian dari mereka menyarankan pemutaran film dilakukan di dalam rumah, bukan di tempat umum. Respon seperti ini sudah diantisipasi oleh Paguyuban untuk memberi informasi kepada warga dan melakukan dialog mengenai siapa Munir, mengapa Munir terbunuh, apa yang dilakukan Munir sehingga dia terbunuh, untuk siapa Munir bekerja. Di sela-sela diskusi mengenai Munir tersebut, mereka juga menjelaskan dalam konteks yang lebih luas mengenai kerusuhan Mei 1998 di mana mereka dan sebagian warga lain menjadi korban, tidak saja korban jiwa, namun juga akibat setelah itu yang ditanggung oleh keluarga korban. Mereka membahas apa hubungan Munir dan kerusuhan Mei 1998, siapa KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan siapa IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang) itu.

Pemutaran film yang sudah dilakukan selama tiga kali itu membawa dampak positif di mana masyarakat mulai paham dengan konteks kerusuhan Mei 1998, dan stigma penjarah mulai berkurang terhadap keluarga korban. Terhadap Munir, ada sementara warga yang merasa kasihan, namun ada juga warga lain yang menganggap film ini terlalu melihat Munir sebagai orang besar, padahal dia biasa saja. Ada juga yang merasa takut dengan pemutaran film ini di tempat umum sebab saat dilakukan ini bersamaan dengan persidangan terkait dengan pembunuhan Munir dengan terdakwa Muchdi Poerwopranjono (mantan Deputi V Badan Intelijen Negara) yang didakwa bertanggungjawab atas terbunuhnya Munir.

V. Dukungan dan Perlindungan dari Masyarakat Sipil

Dukungan terhadap keluarga korban kerusuhan Mei 1998 diberikan dengan memberikan bantuan selayaknya dukungan terhadap korban kematian biasa. Di kampung Ruyati, yaitu kampung Penggilingan Jakarta Timur, terdapat dua

orang korban, Ruyati sendiri dan tetangga jauhnya. Dukungan terhadap Ruyati dan keluarga dilakukan oleh lingkungan dengan membantu mencari dan mengurus jenazah anaknya, Eten Karyana. Dukungan selanjutnya diberikan oleh pihak RT dan RW dengan memberikan bantuan finansial. Setelah pengurusan jenazah selesai, maka kehidupan di lingkungan kembali ke kondisi semula, masing-masing warga memiliki urusan sendiri dan korban tidak mendapatkan dukungan selayaknya. Ketika stigma mengenai penjarah dihembuskan oleh media massa, masyarakat lingkungan tidak bereaksi mendukung korban. Seakan-akan stigma itu juga hidup di antara warga sendiri bahwa keluarga korban memang berstatus penjarah. Maka Ruyati dan Paguyuban sendiri yang harus berjuang untuk menghilangkan stigma tersebut melalui kampanye dan penyadaran mayarakat, diantaranya melalui pemutaran film Munir.

Dukungan yang sesungguhnya bagi korban kerusuhan Mei 1998 diperoleh dari sesama korban pelanggaran HAM dan para pendamping dari LSM. Ketika mendapatkan undangan dari TRK menjelang 40 hari peringatan meninggalnya para korban kerusuhan Mei 1998, Ruyati dan para korban semula merasa sedih sekali. Ketika tim relawan memberikan bantuan dalam sebuah amplop, para korban merasa inikah yang diberikan kepada mereka setelah anak-anak dan keluarga mereka meninggal? Apakah dengan pemberian itu berarti masalah selesai?

Lama para korban terselimuti rasa sedih, marah dan kecewa. Namun hal itu berkurang ketika Romo Sandyawan, koordinator TRK, memberikan sambutan bahwa bantuan itu sekedar untuk mempersiapkan peringatan 40 para korban yang meninggal dunia. Upaya yang lebih penting adalah pertemuan-pertemuan mereka selanjutnya yang tidak saja memberikan penguatan antar sesama korban, namun juga penguatan-penguatan kesadaran yang diperlukan oleh para korban dalam mengadvokasi kasus mereka selanjutnya.[21]

Dukungan selanjutnya yang diberikan oleh pendamping kepada paguyuban korban Mei 1998 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dukungan moril dengan cara menguatkan korban dan memberikan penyadaran mengenai konteks masalah kerusuhan Mei 1998 secara lebih luas. Hal ini tidak saja membuat para korban kuat, namun juga dapat mensosialisasikan kepada publik bahwa kerusuhan Mei 1998 ada pihak yang harus bertanggungjawab, yaitu pemerintah.

2. Modal pinjaman membuka usaha kecil-kecilan, dari memasok baju-baju muslim dan sepatu-sepatu untuk dijual lagi, fasilitasi peminjaman beras sesuai dengan kebutuhan per hari untuk tiap keluarga. Modal ini semestinya dapat

21 Wawancara dengan Ruyati tanggal 20 Januari 2009

dikembangkan, namun karena keterdesakan kebutuhan sehari-hari, lama kelamaan modal tersebut habis.

Selain dukungan berupa dana rangsangan untuk usaha dan untuk kehidupan sehari-hari, kegiatan-kegaitan paguyuban korban bersama pendamping seperti TRK, Elsam, KontraS, Suara Ibu Peduli dan lain-lain dirasakan manfaatnya oleh para keluarga korban. Di antara manfaat itu yang dapat dicatat oleh Ruyati sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru. Bagi ibu-ibu yang biasa hanya bekerja di dapur seperti Ruyati merasa bahwa dalam 30 tahun era pemerintahan rejim Soeharto dia tidak tahu apa yang terjadi. Maka dia juga tidak tahu apa yang terjadi pada Mei 1998 yang menewaskan anaknya. Setelah anaknya menjadi korban, dia mulai merasa memahami sesuatu mengenai kaitan kejadian itu dengan politik kekuasaan. Pengertian ini mulai ada sejak dia turut aktif dalam forum berkumpul dan berdiskusi sesama korban dengan ditemani para pendamping korban.

2. Mendapat pengetahuan bagaimana harus mengatasi keadaan sulit dari relawan TRK, dan mendapatkan pengetahuan bagaimana mengadvokasi kasus dari KontraS. Kontras dan IKOHI mulai memiliki kegiatan dengan korban Mei 98 adalah sejak tahun 2004. Sebelumnya sejak kejadian tahun 98 yang mendampingi adalah TRK sampai TRK tidak aktif tahun 2006. Penguatan lebih lanjut didapatkan dari IKOHI sejak bergabung dengan organisasi ini yang secara khusus bekerja untuk mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM seputar pembunuhan dan penghilangan orang.

3. Mendapatkan pengetahuan mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya ketika beraktivitas di bersama IKOHI kasus korban Mei 98 maupun lainnya. Dengan korban pada pelanggaran HAM lainnya merasa seperti keluarga dan tidak asing lagi antara satu dengan yang lain, dan bisa memperkuat satu sama lain untuk menghadapi hari mendatang. Kondisi seperti ini tidak mungkin tanpa beraktivitas dalam organisasi seperti IKOHI.

4. Memperkuat diri sendiri sembari terus mengusahakan supaya kasus yang dihadapi korban dapat dituntaskan.

Walaupun terdapat manfaat-manfaat yang penting bagi korban, namun ketika melakukan aktivitas untuk mengadvokasi kasus kerusuhan Mei 1998, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Ruyati bersama korban lainnya. Kendala itu antara lain sebagai berikut:

a) Pengorbanan diri. Sebagai korban harus berkorban untuk kekuatan orga-

nisasi kalau mau maju, tidak sekedar mengandalkan bantuan, sebab kadang ada yang patah semangat tidak mencari jalan keluar, maka saya berani berkorban, termasuk dalam mengeluarkan uang

b) Mengaktifkan paguyuban. Kini kegiatan rutin paguyuban hanya diikuti lebih kurang 25-30, separuh dari jumlah anggota Paguyuban. Mereka tidak bisa terlibat aktif lagi oleh karena sebagian mereka adalah tulang punggung keluarga baik karena kehilangan suami maupun karena pasangan mereka jatuh ke dalam depresi berat akibat keluarganya menjadi korban, ataupun sebab lainnya

c) Ibu-ibu lebih aktif daripada bapak-bapak. Hal ini berkaitan dengan poin nomor 2, bahwa ketidakaktifan bapak-bapak dalam Paguyuban disebabkan beberapa hal yaitu karena depresi ditinggal keluarga yang menjadi korban kerusuhan, namun ada juga yang sejak awal memang malas. Dari kaca mata ibu-ibu, kehidupan terus berlangsung maka berbuat apapun untuk bisa bertahan. Supaya dandang tetap mengebul.

Dari Penjara Ke Penjara

Azwar Kaili
Korban Peristiwa Talang Sari, 1989

I. Anak Minang di Tanah Rantau

Azwar Kaili lahir pada tahun 1942 di Painan, Padang. Ia anak terakhir dari enam bersaudara. Ia menempuh pendidikan hingga kelas III Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 1957. Sayang, ia tidak sempat menamatkan pendidikannya. Dikarenakan ia bergabung dengan Tentara Pelajar Pasukan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) yang dipimpin oleh Komandan Ahmad Husein Simbolon.[1] Sebagaimana diketahui, PRRI di mata pemerintah pusat Indonesia dianggap sebagai pemberontak yang ingin memisahkan diri dari republik. Di PRRI inilah ia dilatih untuk mendalami bidang kesehatan. Banyak hal yang ia pelajari dalam bidang ilmu kesehatan, mulai dari pengetahuan obat-obatan, cara merawat orang luka, menjahit luka akibat sayatan, ataupun tertembak oleh peluru. Setelah tiga tahun bergelut di bidang kesehatan, PRRI dapat dilumpuhkan oleh pemerintah Indonesia. Para anggota PRRI diminta bergabung kembali oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka diberikan pilihan; ingin meneruskan sekolah di akademi militer atau meneruskan ilmu kesehatan.

Sementara itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) sedang menguat di pelbagai level nasional, dari tingkat pemerintah hingga tingkat Rukun Tangga (RT), dan persaingan partai politik di tingkat nasional semakin tajam. Solidaritas dan semangat komunis yang begitu kuat, secara tidak langsung, memaksa setiap warga untuk memiliki rasa simpati dan empati terhadap anggota masyarakat yang lainnya. Satu bentuk solidaritas yang "dipaksakan" itu adalah gotong royong dan pos ronda. Bagi orang yang tidak mau terlibat aktif dalam aktivitas tersebut, dengan alasan apapun akan terkena hukuman. Ia akan dianggap tidak memiliki solidaritas terhadap sesama warga kampung lainnya. Hal inilah yang dialami Azwar. Ia, dengan kondisi badan yang demam saat itu, pernah diancam untuk direndam tubuhnya di sungai jika tidak mau menjaga keamanan kampung di malam hari. Tindakan-tindakan agresif yang hampir berujung dengan kekerasan semakin lama makin menyebar di seluruh kampungnya. Akhirnya, saat ia berumur 18 tahun, Azwar memutuskan untuk merantau ke tempat pamannya, Sahadi, di Tanjung Karang, Kabupaten Lampung Selatan di tahun 1959 ketimbang mengikuti pilihan yang diberikan pemerintah.[2]

Selama di Tanjung Karang, ia membantu Sahadi berjualan warung kelontongan. Salah satu barang dagangannya adalah rokok Cap Gentong. Saat itulah ia dipercaya oleh orang Tionghoa asal Serang, Banten, untuk menjadi agen rokok. Dengan menjadi agen, sedikit demi sedikit usahanya mulai membuahkan hasil. Di tengah kehidupannya, kondisi perpolitikan Indonesia sedang berubah drastis. Tepatnya pada satu Oktober tahun 1965 terjadi kudeta, yang oleh rezim

1 Wawancara dengan Azwar Kaili, Korban peristiwa Talang Sari, 3 Desember 2008
2 Wawancara dengan Azwar Kaili, Korban peristiwa Talang Sari, 2 Desember 2008

Orde Baru disebut sebagai "G 30 S/PKI". Selain berpindahnya kekuasaan dari tangan Soekarno ke tangan Soeharto, imbas dari "kudeta" itu adalah atas istilah "G 30 S/PKI itu sendiri: terjadi pembunuhan massal di seluruh Indonesia dari tahun 1965-1966 kepada mereka yang berafiliasi dengan PKI maupun yang di-PKI-kan. Sikap anti PKI dan pelbagai hal yang terkait dengannya pun merebak di seluruh penjuru Indonesia. Rokok Cap Gentong yang dijualnya menjadi sasaran amukan massa, yang terdiri dari gerakan pemuda, mahasiswa, dan masyarakat umum. Kejadian itu dipicu dari rokok yang dijualnya. Rokok Cap Gentong yang ia dapat dari orang Tionghoa, yang biasa disebut dengan panggilan China. Frase "China" sebagaimana direproduksi oleh rezim Orde Baru, distereotipkan dengan komunis. Dengan demikian, pelampiasan kemarahan dengan menghancurkan warung Azwar terhadap rokok Cap Gentong merupakan bentuk sikap anti komunis yang dilakukan oleh masyarakat luas. Akibatnya, Azwar menderita kerugian besar, dan orang Tionghoa sebagai pihak pemasok, tidak mau mengirimkan kembali barang dagangannya.

Kondisi demikian tidak membuatnya patah semangat. Azwar lalu pergi merantau ke Palembang untuk mencari pekerjaan lain. Di tempat ini ia berdagang karet. Kepala desa tempat ia berdagang adalah Sirah. Lewat kekuasaannya sebagai kepala desa, Sirah sering menekan para pedagang yang lain, termasuk Azwar, dalam meregulasi barang yang akan dikirim ke daerah lain. Dalam meregulasi karet yang mesti ditimbang dan dikirim, Sirah lebih mementingkan barang dagangannya. Merasa dirugikan, Azwar kemudian berpindah profesi menjadi pedagang ikan asin. Untung yang didapatkan dalam berjualan ikan asin terbilang besar, sekitar lima kali lipat dari modal yang ia tanamkan. Sayang usaha itu tidak dilanjutkan. Lagi-lagi ia menderita kerugian besar. Peristiwa itu bermula dari kelalaian seorang kuli yang ia pekerjakan untuk mengangkut peti-peti berisi ikan asin tersebut. Saat lima peti ikan asin sampai di pelabuhan Merak tiba-tiba hujan deras mengguyur. Sementara si kuli itu terlambat untuk menutupi peti-peti berisi ikan asin itu dengan terpal. Akibatnya, setelah dikirim selama 2-3 hari perjalanan menuju pelabuhan Tanjung Priok, ketika peti-peti yang berisi ikan asin dibuka isinya sudah banyak yang hancur. Sudah tentu lima peti besar yang berisi ikan asin tidak layak dijual.[3]

Namun, sebagai orang Minang yang memiliki mental merantau dan berdagang, peristiwa itu tidak membuatnya *kapok*. Sekitar tahun 1969, oleh Cepi Hidayat, ketua pembukaan lahan, ia diminta bergabung dengan kelompok masyarakat pendatang yang akan membuka Desa Sidorejo di kawasan Hutan Lindung Gunung Balak, Lampung. Alasan utama mengapa ia diminta bergabung adalah karena ia dianggap sebagai seorang mantri yang mengerti mengenai kesehat-

3 Wawancara dengan Azwar Kaili, Korban peristiwa Talang Sari, 5 Desember 2008

an. Dengan demikian, kehadirannya diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan pengobatan. Pembayaran pengobatan itu akan dibayar setelah lahan mereka selesai dipanen.

Selama di desa Sidorejo, wilayah Gunung Balak, banyak dari anggota masyarakat yang berobat kepadanya. Sayang, hanya satu kali ketua kelompok masyarakat tersebut yang membayarnya setelah panen. Setelah itu, Azwar mengobati mereka dengan rasa penuh keikhlasan. Tidak ayal, modal yang dimiliki untuk membeli beragam obat dan peralatan kesehatan semakin menipis. Bahkan ia mengalami kerugian. Ini karena seluruh masyarakat wilayah Gunung Balak diminta oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meninggalkan tempat itu pada tahun 1972, termasuk Azwar. Gunung Balak, menurut Pemda, termasuk lahan hutan lindung, sehingga dilarang untuk dijadikan tanah hunian.

Dengan demikian, tidak ada orang yang membayar pengobatan kepadanya. Sebagian besar masyarakat desa Sidorejo yang "diusir" itu pindah ke daerah Gunung Sugi Bauk yang tidak jauh dari Sidorejo. Di sana mereka ditampung oleh Minah Raden. Azwar, dengan terpaksa, menjual modal satu-satunya, yaitu sepeda motor dan kacamata. Kedua barang itu laku ia jual dengan harga 1.300 Rupiah. Namun uang itu tidak cukup untuk membeli beragam obat yang ia butuhkan untuk membuka praktik keliling. Ia lalu meminjam uang ke toko Apotik yang berada di daerah Metro. Dengan modal inilah ia kembali membuka praktik keliling sebagai seorang mantri di daerah Gunung Sugi Bauk. Di tempat itu pula ia bertemu dengan Ismini, yang baru saja pindah dari Bandar Jaya, pada tahun 1973. Mereka kemudian menikah pada tanggal 13 bulan Maret 1973.[4]

Pada tahun 1974, sebagian masyarakat yang dipindah paksa itu kembali ke wilayah Gunung Balak, termasuk Azwar dengan isterinya ke desa Sidorejo. Di sana, ia diberikan lahan oleh ketua pembukaan untuk membuat rumah. Awalnya, ia dijanjikan setengah hektar tanah. Tapi, setelah terjadi pergantian kepengurusan yang mengurusi pembukaan lahan, luas tanahnya mulai dikurangi untuk pendirian Gereja, sehingga ia hanya memiliki seperempat hektar tanah. Baru beberapa tahun menetap di Gunung Balak, masyarakat dipindahkan paksa kembali untuk pindah ke daerah Mesuji. Padahal, banyak dari mereka sudah membangun rumah secara permanen. Dari 12 desa yang berada di Gunung Balak itu hanya tiga desa yang bersikukuh tidak mau pindah, yaitu desa Sidorejo, Bandar Agung, dan Mojopahit.

II. Membangun Kehidupan, Menuai Hasil Jerih Payah

Azwar bersama isterinya mulai membangun kehidupan secara permanen di

4 Wawancara dengan Ismini, istri Azwar Kaili, 4 Desember 2008

Sidorejo. Selain meneruskan pekerjaan yang sudah ditekuni, ia mulai berdagang dengan membuka warung kelontongan yang berisi sembako, minyak tanah, dan bensin. Usaha yang ditekuni cukup berhasil. Bahkan ia, oleh perusahaan kecap Cap Bangau, dipercaya menjadi agen utama pemasuk gula merah di wilayah Lampung. Di sini, para petani dan penadah sering menyetorkan hasil panen gula mereka kepadanya. Besarnya pesanan dan banyaknya hasil panen gula yang didapatkan membuat ia mempekerjakan enam orang sebagai karyawannya di gudang yang telah dibikinnya. Sukses sebagai agen utama itu membuat ia dipercaya menjadi pemasok utama jagung oleh pengusaha dari Jakarta. Oleh pengusaha tersebut ia diminta untuk mengirimkan satu mobil truk besar berisi kurang lebih 1 ton jagung setiap bulannya. Selain itu, ia, di pekarangan rumah yang begitu luas, menyempatkan diri beternak ayam.[5]

Sementara Ismini, isterinya, setelah melahirkan anak ketiga, Ujang, meminta ijin kepadanya agar mengikuti pendidikan kebidanan dan ilmu kesehatan. Sebelumnya, ia sudah diajak oleh dokter Zainuddin menjadi asistennya di rumah sakit Abdul Muluk. Setelah mengikuti pendidikan kebidanan dan kesehatan selama satu tahun, Ismini membuka praktik di rumah, meskipun belum mendapatkan ijin dari pemerintah daerah. Sebagian besar masyarakat Sidorejo datang ke rumahnya untuk berobat, melakukan cek kesehatan yang terkait dengan kehamilan dan persalinan. Banyaknya pasien yang datang, Ismini pun membuka praktik kebidanan dan kesehatan. Ia menyewa seorang dokter dari rumah sakit Abdul Muluk dan mempekerjakan empat orang suster. Atas usulan salah seorang susternya, ia juga membuka salon kecantikan, jasa peminjaman pakaian pernikahan, dan juru rias pengantin dengan mempekerjakan empat orang ahli. Lokasi ketiga tempat usaha itu berdampingan dengan rumahnya yang seluas seperempat hektar. Semua usaha yang dijalani, termasuk kepemilikan dua hektar lahan tanah untuk berladang, oleh Azwar dan Ismini menempatkan mereka sebagai orang, yang dari segi ekonomi dan modal sosial, sangat terpandang di daerah Sidorejo.[6]

Hal ini tampak dari penjelasan yang diberikan Azwar Kaili ketika menerangkan kondisi keluarganya saat itu, "Ketika orang belum punya televisi, saya sudah memilikinya. Rumah saya dahulu layaknya bioskop. Banyak orang datang beramai-ramai ke rumah saya untuk menontonnya. Saking ramainya, kesempatan itu digunakan oleh orang-orang sekitar kampung untuk berjualan makanan dan minuman yang berlokasi di depan rumah saya hingga perempatan jalan mereka berjejer berdagang. Akibatnya saya dan keluarga menjadi tidak bisa terlelap tidur".[7] Ini dikuatkan oleh pernyataan Ismini mengenai kondisi ekonomi mereka, "Ya kayak gitulah, dahulu orang belum memiliki sepeda

5 Wawancara dengan Ismini, istri Azwar Kaili, 3 Desember 2008

6 Wawancara dengan Ismini, istri Azwar Kaili, 4 Desember 2008

7 Wawancara dengan Azwar Kaili, 4 Desember 2008.

motor, anak saya sudah punya motor (bermerek) Famili ketika itu, walaupun jelek-jelek gitu".[8] Selain itu, mereka juga menyekolahkan kedua anaknya (anak pertama dan kedua) di Pondok Pesantren Ngruki, Solo, Jawa Tengah. Menurut ukuran kemampuan ekonomi masyarakat setempat saat itu, menyekolahkan anak ke pulau Jawa adalah suatu hal yang sangat istimewa. Ini mengingat mahalnya biaya yang harus mereka keluarkan. Sudah barang tentu, menyekolahkan anak ke pulau Jawa, dengan demikian, dilakukan oleh orangtua yang dari segi ekonomi berkecukupan.

III. Peristiwa yang Merubah Segalanya

"Saya, dengan kemapanan ekonomi yang sudah dimiliki,[9] tidak bisa membayangkan ketika harus menjadi orang melarat. 'Bagaimana ya rasanya?' ujar saya membatin"[10]

Ungkapan Ismini, isteri Azwar Kaili, di atas merupakan kondisi psikologis seseorang yang sudah mencapai kesejahteraan dan kemapanan ekonomi yang sudah diraihnya. Satu bentuk kecemasan antara takut kehilangan atas apa yang diraih dan perasaan khawatir untuk menghadapi realitas pahit yang akan dihadapi jika jatuh miskin. Dengan kata lain, sikap tersebut adalah satu pembayangan untuk memulai segala sesuatunya dari awal di mana sebelumnya sudah diraih dengan susah payah. Sikap semacam ini juga yang hampir dialami oleh semua orang yang sudah mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi di atas rata-rata masyarakat yang lainnya.

Ternyata kecemasan Ismini menjadi kenyataan. Kesejahteraan ekonomi yang yang dimiliki oleh keluarganya hancur dan raib seketika dalam hitungan hari. Peristiwa itu berawal dari surat pemanggilan yang ditujukan kepada suaminya agar segera melapor ke kantor Kecamatan Jabung pada 6 Februari 1989, jam 08.00 WIB. Surat itu sendiri dibawa oleh Tarmuji, Pamong Desa Sidorejo pada hari Sabtu, 4 Februari 1989, sekitar jam 11.00 WIB. Berhubung Azwar masih memiliki urusan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan, ia mendatangi kantor kecamatan satu hari setelah waktu ditentukan. Ia, dengan mengendarai sepeda motor, berangkat ke kantor Kecamatan pada pukul 08.00, 7 Februari, 1989. Sesampainya di sana, ia langsung menyerahkan surat pemanggilan itu kepada petugas piket pegawai kecamatan. Karena Camat sedang tidak berada di tempat, ia dipertemukan dengan wakil Camat Jabung untuk diperiksa mengenai aktivitas yang dilakukan di rumahnya. Sebagaimana laporan yang disampaikan Puskesmas Sidorejo, ada tuduhan bahwa Azwar telah mendirikan balai pengobatan dan kursus kesehatan kepada sejumlah masyarakat. Sebelumnya, ia juga mendapatkan surat panggilan untuk menghadap ke kantor Koramil

8 Wawancara dengan Ismini, 4 Desember 2008.

9 Garis miring dari penulis.

10 Wawancara Ismini, 4 Desember 2008.

Jabung terkait dengan tuduhan serupa.[11]

Tuduhan yang dilayangkan oleh kedua lembaga pemerintah tersebut dibantah. Alih-alih mendirikan balai pengobatan dan mengadakan kursus kesehatan, ia, karena melihat ada dua puluhan orang muda yang putus sekolah, berinisiatif membuka kursus keterampilan. Dengan harapan, lewat keterampilan yang diberikan tersebut bisa menjadi bekal hidup mereka kelak di masa depan. Ketrampilan itu lebih terkait dengan dunia salon dan tata rias kecantikan, mulai dari cara mengeriting rambut, memotong rambut, hingga bagaimana merias pengantin. Kursus keterampilan itu baru berjalan dua bulan dan masih dalam tahap percobaan. Sebab itu, Azwar atas saran wakil Kecamatan Jabung diminta untuk membuat surat bantahan, dengan meminjam surat panggilan laporan palsu kepada lembaga pemerintah itu untuk digandakan, sebagai bukti pencemaran nama baik. Berhubung tidak ada rental fotokopi di kantor itu, ia meminta ijin kepada wakil Kecamatan Jabung untuk pamit pulang ke rumah agar keesokan harinya surat-surat tersebut bisa digandakan di tempat lain. Selepas dari kantor kecamatan, pada pukul 12.30 WIB, Azwar bergegas ke kantor Koramil untuk menyerahkan surat bantahan atas laporan palsu yang ia terima. Namun sayang, orang yang dimaksud itu tidak berada di tempat. Azwar lalu pergi ke rumah komandan Koramil dan menyerahkan surat bantahan tersebut kepada pembantu laki-lakinya.[12]

Azwar, dengan perasaan lega, menaiki kendaraannya menuju rumah. Baru setengah jam perjalanan, kopling motor yang dikendarainya putus. Beruntung bengkel motor terletak tidak jauh dari tempat motornya rusak. Tidak sampai setengah jam kopling motor itu sudah dapat diganti dan berfungsi dengan baik. Ia meneruskan perjalanan. Tidak lama berselang, tiba-tiba hujan deras. Ia berhenti di warung kopi sampai jam 17.00 WIB. Khawatir terlalu malam diperjalanan, ia berniat melanjutkan perjalanannya. Lagi-lagi motornya menghadapi persoalan. Motor itu tidak bisa dihidupkan meski sudah dicoba berkali-kali. Padahal, saat itu waktu sudah menunjukkan jam 18.00 WIB. Tentu saja, menjelang malam seperti itu kendaraan umum sudah tidak ada yang melintas.[13]

Tidak disangka, ternyata ia melihat Hasan, teman kampung di Sidorejo, yang berasal dari Madura, sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya, Suhadi. Azwar tanpa pikir panjang memanggil mereka untuk berhenti. Saat mereka berhenti, Azwar menceritakan mengenai kondisi yang terjadi dengan motornya. Mereka memeriksa kondisi motor miliknya. Setelah dicoba untuk dihidupkan berkali-kali motornya tetap tidak bisa dihidupkan. Kesimpulan yang didapatkan setelah memeriksa kondisi dalam mesin,

11 Arsip dokumen Pribadi Keluarga Azwar Kaili, tidak diterbitkan, 1989
12 *Ibid*
13 Wawancara dengan Azwar Kaili, 2 Desember 2008.

motornya mengalami kerusakan pada perapian mesin yang terhubung dengan busi. Akhirnya, mereka menarik motor milik Azwar dengan seutas tali pinjaman dari pemilik warung kopi. Sementara Azwar sendiri mengendarai sepeda motornya yang ditarik itu.

Sekitar pukul 21.00 WIB Azwar dan kedua orang yang menolongnya sampai di depan rumahnya. Ia sangat kaget bercampur heran, mengapa semua lampu di sekitar rumah dan lingkungan tetangganya padam. Saat masuk ke rumahnya, Azwar bertambah khawatir ketika tidak ada satu pun isteri dan anak-anaknya menjawab panggilan dan ketukan pintu olehnya berkali-kali. Hasan, melihat kondisi yang mencurigakan itu, menawarkan Azwar menginap di rumahnya. Azwar, karena merasa kelelahan mendorong motornya yang mogok dengan kedua kakinya sebagai tumpuan yang ditarik dengan seutas tali tersebut, mengiyakan ajakan tersebut. Terlebih hari sudah larut malam.

Di rumah Hasan, sang isteri menyiapkan makan malam untuk mereka. Azwar dan Hasan, selepas makan malam, menikmati secangkir kopi sambil berbincang-bincang. Sang isteri kemudian ikut bergabung dan menceritakan kepada mereka mengenai apa yang terjadi di siang hari. Siang itu, kata isterinya Hasan, persis di depan rumah Azwar telah terjadi insiden yang menggemparkan masyarakat. Berita yang beredar, lanjutnya, adalah pengeroyokan masyarakat kepada garong (pencuri) yang masuk ke rumah Zamzuri. Akibat insiden itu ada tiga orang yang mati, Sarwoso, lurah desa Sidorejo, polisi, dan juga temannya Zamzuri dari Solo.

Azwar sangat khawatir ketika mendengarkan cerita tersebut. Terlebih lagi insiden itu terjadi dekat di depan rumahnya. Ia teringat dengan isteri dan anak-anaknya yang masih kecil. Isterinya Hasan, melihat kecemasan di wajah Azwar, memintanya tenang dan tidur dulu, terlebih kondisinya sudah sangat kelelahan. Ia diminta untuk tidak perlu khawatir. Akibat letusan tembakan dalam insiden itu, kata isterinya Hasan, banyak dari masyarakat sekitar sudah menyingkir mencari tempat aman. Azwar kemudian pergi ke arah tempat tidur yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Meski sangat lelah ia tidak dapat tertidur lelap. Sesekali ia terbangun, teringat isteri dan anak-anaknya. Saat terbangun itulah ia melihat Hasan berjalan masuk dan keluar rumah berulang kali dengan wajah penuh kecemasan.

Pada pukul 05.00 WIB Azwar bangun dari tempat tidur. Ia mengambil air wudhu untuk menunaikan salat subuh. Setelah sarapan pagi, ia membicarakan kembali persoalan yang diperbincangkan semalam dengan Hasan sambil menikmati teh panas. Ia mengungkapkan keheranannya kepada Hasan mengenai ketidaklaziman seorang pencuri yang beraksi di siang hari. Ini karena, orang bila ingin mencuri biasanya dilakukan di malam hari, saat semua orang terle-

lap. Sekitar jam 11.00, ia pamit dengan Hasan untuk menengok keluarganya di rumah seraya mengucapkan terima kasih.

Ia, dalam perjalanan pulang ke rumah, melihat banyak orang berkumpul di pasar tempat mereka berjualan. Azwar, dengan keingintahuan mendalam, berjalan mendekat untuk mengetahui perihal yang mereka bicarakan. *"Ada apa sebenarnya yang terjadi kemarin siang"*, tanyanya kepada salah seorang yang berkumpul tersebut. *"Lho, jadi Bapak belum tahu ya atas apa yang terjadi kemarin?"* Tanya salah satu warga. *"Belum, karena kemarin saya ada urusan ke Jabung hingga larut malam sehingga tidak tahu atas apa yang terjadi"*, jawabnya Azwar. Salah seorang di antara mereka lalu menceritakan peristiwa yang sama persis dengan penjelasan isterinya Hasan. Namun, di antara mereka tidak mengetahui dengan pasti atas apa yang sebenarnya terjadi.

Dalam waktu bersamaan, lewat dua orang Babinsa yang berjalan tidak jauh dari tempat posisi Azwar berdiri. Salah seorang Babinsa itu melambaikan tangan dan memanggilnya. Ia pun mendatangi mereka. *"Bapak Azwar, kemarin saya mendapatkan pesan dari Komandan Koramil. Bila saya bertemu dengan anda, saya diminta menyampaikan pesan agar Bapak Azwar datang ke kantor Koramil yang berada di Jabung"*. Ucap petugas Babinsa tersebut. *"Kapan? Apakah sekarang? Kalau sekarang saya tidak memiliki sepeda motor? Sepeda motor saya rusak"*, ungkap Azwar. Babinsa itu menawarkan boncengan kepadanya hingga perempatan Pogung. Sebelum menuju perempatan itu, ia meminta kepada petugas Babinsa untuk mampir sebentar ke rumahnya. Sayang, saat berada di rumah Azwar tidak menemui isteri dan anak-anaknya.

Di perempatan Pogung inilah mereka berhenti persis di depan warung makan. Ia turun dan makan bersama dengan petugas Babinsa yang juga ingin makan siang. Di tempat itu juga ada beberapa anggota kepolisian yang sedang menikmati santap siang. Kebetulan, pemilik warung itu adalah orang Padang sehingga memudahkan dirinya untuk meminta tolong. Saat itu kenang Azwar, selain berhutang atas makan siang, ia memohon pinjaman uang sebesar Rp 5000 kepada pemilik warung makan tersebut. Dari perempatan Pogung, ia menggunakan kendaraan umum menuju kantor Koramil.

Ia, setelah sampai di kantor Koramil, langsung menemui anak buah Komandan Koramil. *"Bapak, Komandan nya ke mana? Katanya saya dipanggil untuk bertemu dengannya?"* tanya Azwar. *"Oh, Komandan sedang berada di luar, Bapak tunggu saja dulu."* Jawab anak buah Komandan Koramil tersebut. Hampir satu jam Azwar menunggu, namun Komandan Koramil yang memanggilnya belum datang. Tiba-tiba datang seorang lelaki berbaju preman, dan menyuruh anak buahnya itu membawa Azwar ke kantor Kapolsek. Azwar dengan keras menolak. Ia merasa tidak memiliki urusan dengan kepolisian. Lagi pula kehadirannya di sini dim-

inta oleh Komandan Koramil. Karena itu, ia akan menunggunya untuk meminta penjelasan mengapa ia dipanggil. Anggota Koramil itu, melihat penolakan Azwar yang begitu keras, keluar ruangan dan masuk kembali beberapa menit kemudian. Ia lalu membujuk Azwar, *"Oh tidak ada apa-apa. Bapak hanya dipanggil saja oleh pihak kantor kepolisian. Mari, saya antarkan,"* bujuk anggota Koramil. Mereka berdua pun berangkat ke kantor kepolisian.[14]

Sesampainya di sana, ia langsung digeledah, seluruh pakaiannya diperiksa oleh seorang anggota kepolisian. Tanpa ada jeda istirahat, ia langsung diinterogasi, *"Kartunya (Kartu Tanda Penduduk) mana? Bapak kemarin seharian ke mana dan ada di mana?"* tanya salah seorang angggota kepolisian. Ia merasa kebingungan dengan penggeledahan dan pertanyaan tersebut. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, karena merasa tidak bersalah, ia menerangkan kronologis aktivitas yang dilakukannya sepanjang hari kemarin. Terlebih lagi dalam ruangan itu, ia mengenal dan berbincang-bincang dengan beberapa anggota kepolisian saat kemarin mereka makan siang di warung dekat perempatan Pogung. Karena itu, tidak ada satu anggota kepolisian yang memukulnya. Setelah itu, ia ditahan dalam sebuah sel. Di ruangan itu ia melihat seseorang dengan kondisi muka yang berlumuran darah. Azwar ditanya oleh anggota kepolisian yang mengantarkannya ke sel dan bertanya, *"Bapak mengenal orang ini?" "Tidak"*, jawab Azwar. Lelaki itu juga balik ditanya, apakah ia mengenal dengan Azwar. Jawabannya pun sama dengan Azwar.

Sekitar satu jam di ruangan tahanan, ia dan lelaki itu, dengan kondisi tangan diborgol, dibawa keluar oleh beberapa anggota kepolisian. Sontak, ia tambah kebingungan, *"Ada apa ini sebenarnya? Mengapa saya dipanggil di sini?"* tanya Azwar. *"Begini Pak, Sidorejo dalam kondisi yang sangat genting dan gawat. Jadi, untuk sementara Bapak kami amankan dahulu ke Kantor Kodim, Metro,"* jawab anggota kepolisian. Mendengar jawaban itu, Azwar makin penasaran, *"Kalau memang Sidorejo dalam keadaan gawat, mengapa saya ditahan? Apakah di Sidorejo isinya seorang Azwar saja, mengapa yang lain tidak diamankan?"*. Anggota kepolisian itu gelagapan, ia malah menuju arah ke depan mobil, seakan menghindar pertanyaan itu, *"Enggak ada apa-apa kok, kami hanya ingin mengambil keterangan saja dari Bapak Azwar,"* jawab mereka.

Ia kemudian memasukkan Azwar bersama lelaki itu ke mobil menuju kantor Kodim di Metro. Azwar, lelaki itu, dan beberapa orang yang sudah berada di sana, dipanggil secara bergiliran saat berada di ruangan besar yang berada di kantor Kodim. "Julianto" ujar anggota militer yang bertugas. Lelaki yang mukanya berdarah itu langsung menuju ke arah suara ia dipanggil. Beberapa menit kemudian, "Azwir", "Saudara Azwir, "Azwir", kata anggota militer. Azwar, merasa yang dipanggil itu bukan namanya, hanya diam. Lalu datang tiga

14 Wawancara Azwar Kaili, korban peristiwa Talang Sari, 5 Desember 2008.

orang anggota militer menghampirinya. Salah seorang dari mereka berbicara, "Mengapa dipanggil tidak mau menjawab". *"Siapa Pak yang dipanggil? Yang dipanggil namanya adalah Azwir, sedangkan saya adalah Azwar"* jawab Azwar tenang. "Oh Azwar ya! masuk ke sini Pak!" kata seseorang dari ruang sebelah memotong pembicaraan.

Azwar kemudian dipisahkan, dan dibawa ke ruangan Bapak Ampusinga, Kasi satu dari Korem. Ampusinga meminta dompetnya dan mengeceknya sambil bertanya, *"Bapak kemarin ke mana?"* Azwar lalu menceritakan kembali waktu yang dihabiskannya kemarin. Ia, dalam dompet tersebut, menemukan surat dari anaknya Azwar yang sedang belajar di Pondok Pesantren Ngruki, Solo, Jawa Tengah, dan kemudian mengajukan pertanyaan, *"Oh, anak Bapak mondok di Ngruki ya? Apakah Bapak tidak tahu bahwa gurunya itu sedang dalam pencarian, namanya Abdullah Sungkar?"* Azwar, dengan polos, menjawab bahwa ia tidak tahu. Ia, dapat informasi dari tetangga sekitarnya bahwa sekolah di sana itu lebih tertib dan bagus. Banyak dari para tetangganya yang juga menyekolahkan anak-anaknya di sana. Karena itu, ia menuruti saja kemauan anaknya ketika ingin menuntut ilmu di Ngruki. Ia, atas saran Ampusinga, diminta untuk mengambil anaknya agar tidak sekolah di tempat itu. Azwar mengangguk saja.

Ampusinga lalu membuat surat kecil yang berisi catatan agar ia tidak "diapa-apakan" terlebih dahulu. Ini karena belum jelas persoalannya, apakah ia terlibat atau tidak. Setelah memberikan surat itu kepada anak buahnya, ia bergegas pergi menuju kantor Kodim. Di ruangan besar yang berada di Kodim inilah Azwar, sambil duduk, melihat bagaimana para anggota militer, dengan membuka baju, menyiksa orang dewasa dan anak-anak yang masih berumur 16-17 tahun dengan tangan dan senjata. Ia tidak kuasa menahan air mata melihat itu. Setelah puas melakukan penyiksaan, salah seorang dari anggota militer mendatanginya sambil membentak, *"Ini dia satu lagi!"*. Azwar, merasa tidak bersalah, menantangnya dengan keras, *"Saya dipanggil ke sini belum tahu duduk persoalan sebenarnya. Kalau memang Bapak mau memukul, silakan saja pukul saya. Ditembak saja saya berani, kalau memang saya benar-benar terlibat masalah ini"*. Orang itu langsung mengurungkan niatnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Azwar dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Karang yang berada di daerah Lebak Budi. Selepas ditahan selama dua hari ini, ia dipindahkan ke Korem 043 di Tanjung Karang untuk diperiksa kembali selama dua hari. Ia, melalui pemeriksaan dengan seksama, ternyata tidak terbukti bersalah. Keesokan harinya, pukul 09.00, setelah mendapatkan surat pembebasan, ia bersiap kembali menuju ke rumahnya, Sidorejo. Ia, saat akan pulang ke rumah, didatangi oleh seorang militer berpangkat Mayor. Menurutnya, ia telah berbohong, ia sebenarnya terlibat dalam peristiwa itu. Informasi ini didapatkan dari laporan kepolisian dan masyarakat

desa Sidorejo sendiri.

Akhirnya, Azwar ditahan kembali di Lembaga Pemasyarakatan Umum yang berada di Lebak Budi, Tanjung Karang di bawah pengawasan militer. Di sana, ia diinterogasi kembali terkait keterlibatannya dengan peristiwa yang terjadi pada 7 Februari 1989. Dalam proses interogasi itu penyiksaan demi penyiksaan ia alami. Ini karena, ia dianggap tidak mau menceritakan peristiwa yang sesungguhnya. Sementara ia sendiri sudah berkata jujur atas apa yang ia habiskan waktu sehari penuh. Selama ditahan tiga bulan inilah ia diperlakukan sewenang-wenang layaknya binatang. Sebagaimana diungkapkan olehnya:

"Ya, saya dianggap bukan manusialah waktu itu. Punggung saya dipukul sampai pingsan ditendang oleh sepatu mereka. Badan saya juga babak belur dipukul mereka. Sampai sekarang kondisi badan, akibat pemukulan itu, sering kumat. Ketika itu, makanan yang kotor-kotor sering dikasihkan kepada para tahanan, termasuk saya. Bahkan, saya, saking hausnya, meminum air bak sisa orang membersihkan buang hajat. Apalah boleh buat, dari pada saya mati kehausan, karena tidak pernah dikasih air minum. Pisang yang dikasihkan oleh sipir penjara juga habis tidak tersisa, saya habiskan dengan kulit-kulitnya, saking laparnya." [15]

IV. Dibebaskan Tanpa Kebebasan

Pada 6 Mei 1989, Azwar, dengan nomor surat B/705/V/1989 yang dibuat oleh Komando Daerah Militer II Sriwijaya, Komando Resort Militer 043, dibebaskan dari penjara. Ia dianggap memiliki keterlibatan ringan sebagai eks Jamaah Warsidi.[16] Betapa kaget ketika ia sampai di rumah. Rumahnya sudah hancur terbakar, dan semua isinya habis entah ke mana. Sementara isteri dan anak-anaknya juga tidak ada. Ia, dengan marah langsung ke kantor kepala Desa Sidorejo. Selain menginformasikan bahwa telah kembali dari tahanan, ia menanyakan perihal rumah dan seisinya yang hilang. Menurut Kepala Desa, sebenarnya ia dan para petugas sudah mengamankan dan mengunci rumahnya dengan baik. *"Entah mengapa, rumah Bapak dihancurkan orang dan kami tidak tahu siapa orang-orangnya"*, ujar Kepala Desa tanpa rasa bersalah. Azwar tidak puas dengan jawaban itu. Ia pergi ke kantor kepolisian setempat. Selain menginformasikan bahwa telah kembali, ia menanyakan perihal kondisi rumah dan isinya. *"Kami tidak tahu apa yang terjadi di rumah Bapak, kami belum bertugas saat itu. Pertanyaan Bapak nanti kami sampaikan kepada atasan. Kami harap Bapak bisa bersabar"*, kata petugas polisi menenangkannya.

Ia, karena sudah tidak memiliki apa-apa yang bisa dimakan dan kondisi rumah

15 Wawancara Azwar Kaili, korban Peristiwa Talang Sari, 3 Desember 2008
16 Surat Pembebasan Tahanan Komando Daerah Militer II Sriwijaya, Komando Resort Militer 043, 6 Mei 1989, dokumentasi Keluarga Azwar, 1989.

yang tidak layak untuk disinggahi, pergi ke tempat pamannya yang berada di Panjang untuk menginap. Empat hari kemudian, anak pertamanya yang sekolah di Ngruki, Solo, Jawa Tengah datang menyusul ke Panjang. Selain merasa kangen dengan adik-adik dan kedua orangtuanya, alasan utama ia pulang ke rumah adalah karena sudah hampir empat bulan belum mendapatkan uang kiriman seperti biasa. Selama empat bulan itu gurunya di Ngruki tidak pernah menanyakan perihal SPP yang harus ia bayar. Ia, oleh gurunya, malah sering diberikan uang jajan. Ia sendiri memang sudah mengetahui apa yang terjadi di Lampung lewat cerita para gurunya. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa itu juga terjadi pada keluarganya.

Azwar dan anak pertamanya, setelah mendapatkan surat keterangan jalan dari Pemerintah Kabupaten Dati II Lampung Tengah Kecamatan Jabung, Kantor Desa Sidorejo bernomor 476/96/03/1989 dan juga kantor Korem 043, pergi menyusul isterinya di Painan, Padang. Ia tidak menyangka, isterinya ternyata juga ditahan di sana.[17] Sesampainya di Korem Padang, ia menyerahkan surat yang dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Jabung dan juga Korem 043. Hari itu juga isterinya dibebaskan dan diantarkan kembali ke rumah orangtuanya Azwar. Selepas seminggu berada di Padang, mereka bersama keempat anaknya kembali ke Sidorejo, Lampung Tengah.

17 Sebenarnya, kepergian Ismini ke kampung halaman sang suami ingin memberitahu keluarga besar Azwar bahwa sang suami telah ditangkap akibat peristiwa tersebut. Informasi ini didapatkan Ismini dari para tetangganya. Karena itu, pasca peristiwa di mana ia juga berada di tempat kejadian dan sempat membantu mengobati luka yang dialami Bapak Zamzuri, ia bersama kedua anaknya pergi menuju Pariaman, Padang. Setelah berada 10 hari di Padang, ia didatangi oleh Pamong desa, Camat, Koramil, dan polisi. Namun kehadiran mereka hanya sekedar mengecek keberadaan Ismini. Dengan demikian, ia tidak curiga dengan kedatangan mereka. Namun, setelah 45 hari di rumah Mertua, ia ditangkap oleh Kodim Painan. Alasan penangkapan dirinya adalah berdasarkan majalah Tempo yang mereka baca bahwa Azwar Kaili merupakan gembong kedua di Mujahidin (istilah yang sering digunakan oleh korban dan masyarakat sekitar ketika membicarakan peristiwa Talang Sari). Selain dipaksa untuk mengakui bahwa suaminya terlibat dalam peristiwa itu, ia, semasa di penjara, juga suruh mengiyakan bahwa suaminya telah meninggal oleh Zulkarnaen, seorang militer dari Kodim yang menginterogasinya. Alih-alih mau menuruti begitu saja kemauan Zulkarnaen, ia malah membantah. "Suami saya tidak ikut campur dalam peristiwa itu. Suami saya juga masih hidup saat saya tinggal. Kalau dia sudah mati, saya tidak melihat mayatnya sampai sekarang". Zulkarnaen naik pitam, ia langsung membenturkan kepala Ismini berkali-kali. Ia, merasa tidak mempan dengan kekerasan yang dilakukan kepada Ismini, mengancamnya akan menelanjangi. Ismini mendengar ancaman itu bukan membuatnya menurut, ia malah menantang Zulkarnaen untuk menembaknya, daripada ia harus ditelanjangi. Zulkarnaen merasa dilecehkan. Ia langsung membakar rambut Ismini dua kali. Kurang lebih selama dua bulan ia dipenjara dengan ditemani anak-anaknya secara bergiliran atas permintaan dirinya. Wawancara dengan Ismini, isteri Azwar Kaili, 3 Desember, 2008.

Mereka tinggal di atas sela-sela reruntuhan rumah yang sudah dihancurkan. Tidak ada barang tersisa sedikit pun yang bisa digunakan. Alih-alih sekedar tikar untuk alas tidur, beras untuk dimasak, piring, dan sendok mereka pun raib. Sebuah rumah yang dahulu begitu besar, luas dan kokoh berisi hasil panen dan tadahan padi, gula jawa, dan jagung, serta perabotan isi yang lainnya kini tinggal puing-puing semen saja. Azwar bersama isterinya tidak putus asa. Mereka pergi mencari pinjaman uang selama seharian ke daerah Panjang dan Tanjung Karang. Mereka, dari hasil usaha tersebut, mendapatkan bantuan uang dari dokter Zaenuddin Rp. 150.000,- saudaranya di Panjang Rp. 100.000,- dan juga kawan baiknya sebesar. Rp. 100.000,-. Dengan uang inilah ia bersama isteri mencoba membangun kembali keluarga yang hancur.

Mereka kembali keesokan harinya ke rumah dengan wajah penuh harapan. Mereka membawa sekantong beras dan belanjaan makanan yang lainnya. Namun betapa kagetnya ketika sampai di rumah. Mereka melihat rumahnya telah gosong terbakar. Menurut cerita yang didapatkan, pada saat anak-anaknya sedang tertidur lelap, tepatnya jam 01.00 WIB, tiba-tiba ada kobaran api. Untung saja, anak-anaknya terselamatkan oleh bantuan masyarakat yang saat itu langsung memadamkannya ketika tahu kobaran api mulai merembet. Terang saja Azwar, sebagai kepala rumah tangga, sangat marah melihat kejadian itu. Ia lalu mendatangi kantor kepala desa untuk melaporkan peristiwa yang dihadapinya. Ia, merasa tidak direspon, pergi ke kantor kepolisian. Sayang, pihak kepolisian juga sama sikapnya bahwa mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di rumah keluarga Azwar. Padahal, kata Azwar, letak rumahnya dengan kantor kepolisian jaraknya hanya 50 meter.

Ia tidak menyerah. Pada 23 September 1989, ia membuat laporan kehilangan kepada Kepala Desa Sidorejo, dengan tembusan kepada Camat, Dan Ramil 411-08, dan Kapolsek Jabung. Isi laporan mengenai barang yang hilang itu adalah (1). alat-alat rumah tangga, uang kontan sebesar Rp 37 juta, (2). perhiasan emas 78 gram, (3). alat kesehatan dan pengobatan, (4). segel kebun cengkeh di Serompok Panjang dengan luas 1 hektar, (5). satu lembar surat hibah tanah yang (disegel) luasnya 3 hektar, (6). 1 lembar ijazah SD Muhammadiyah atas nama Edy Arsadat, (7). 1 buku raport atas nama Erwanto, (8). 1 lembar polis asuransi kesehatan Bumi Putera atas nama Azwar, (9). dan sim C atas namanya juga.[18] Sayang, laporan rinci yang dibuatnya ini tidak pernah digubris oleh pihak pemerintah desa yang terkait.

Akibat peristiwa itu tidak hanya berdampak pada segi ekonomi mereka saja, melainkan juga pada masa depan rumah tangga dan juga nasib anak-anak mereka. Ini tampak semasa konflik yang terjadi antara Azwar dan isterinya menge-

18 "Surat Laporan Kehilangan", Arsip dokumen Keluarga Azwar Kaili, 23 September 1989.

nai upaya survival yang harus mereka lakukan. Bagi Ismini, lepas dari penjara di Padang dan dibebaskannya sang suami dari jeratan (yang dianggap) hukum bukanlah akhir dari segala penderitaaan keluarga mereka. Tapi, hal itu rentetan dari peristiwa pahit yang harus dijalani. Ia, sebelum peristiwa itu, selalu tidak merasa kekurangan secara ekonomi dan sangat dihormati oleh masyarakat sekitar Sidorejo, kini sebagian besar masyarakat menghindarnya. Mereka khawatir terkena masalah dan berurusan dengan "orang-orang Mujahidin". Dengan demikian, perlahan-lahan Ismini dan keluarganya pun dikucilkan. Selain tidak mau berobat dan memberikan hasil panen, sebagian besar masyarakat juga tidak mau bergaul dengan keluarga Ismini. Hanya orang-orang (transmigran) Bali saja yang mau menerima dan menganggapnya seperti dahulu, ketika keluarga Ismini belum terkena musibah peristiwa tersebut.

Sementara, anak-anaknya, selain tidak boleh bergaul dengan teman-teman sebaya, mereka juga tidak diperbolehkan untuk sekolah di lingkungan Sidorejo, di antaranya sekolah Muhammadiyah yang terletak tidak jauh dari depan rumah keluarga Azwar. Padahal, pendirian dan pembangunan sekolah Muhammadiyah itu atas inisiatif dan sumbangsih dana dari keluarga Azwar sendiri. Karena itu, Irwan dan Taufik, anak kedua dan terakhir, dikirim oleh Azwar ke Jakarta untuk sekolah di lembaga Islam. Tapi, ia harus memberikan status kepada kedua anaknya sebagai yatim, anak yang bapaknya sudah meninggal.[19] Ini karena tekanan negara atas peristiwa itu begitu kuat, sehingga dikhawatirkan Taufik dan Iwan akan menerima nasib yang sama dengan kakak-kakaknya, jika bapaknya masih dihidup dan dianggap "musuh negara".

Hancurnya ekonomi keluarga dan stigma negara, lewat aparatusnya yang kemudian berimbas kepada masyarakat dalam memandang korban dan keluarga korban peristiwa itu membuat Ismini merasa "malu" dan tidak "betah" berada di rumah. Rumahnya serasa "panas" untuk ditempati. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa dikerjakan untuk menghidupi keluarganya. Ia pernah meminta suaminya untuk pindah dari rumah itu, namun sang suami melarang. Jika kami pindah, kata Azwar, itu sama saja mengamini pendapat masyarakat mengenai keluarganya. Di sisi lain, sejak peristiwa itu, Azwar tidak mau bekerja menjadi mantri kesehatan. Dengan demikian, Ismini, melihat kondisi seperti itu, tetap bersikeras untuk pindah. Ia, meskipun dilarang oleh sang suami, sempat akan pergi untuk kedua kalinya mencari penghidupan buat keluarga dan pindah dari rumahnya. Pertama, ia mendaftarkan diri untuk menjadi transmigran ke Kalimantan. Namun, saat barang sudah dikemasi dan bersiap akan pergi ke pelabuhan Tanjung Priok, ia mengurungkan niatnya. Kedua, ia, diam-diam dan tanpa persetujuan suami, pernah mendaftarkan diri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai perawat di luar negeri. Bahkan ia sempat mengikuti pelatihan selama tiga bulan. Namun, ketika puncak hari pemberangkatannya

19 Wawancara dengan Ujang, Putera Azwar Kaili, 4 Desember 2008.

di bandara Soekarno Hatta, ia terjatuh pingsan akibat terlalu banyaknya beban pikiran yang ditanggung.[20]

Setelah Ismini kembali ke rumah ini kondisi psikologis keluarga Azwar kembali agak "normal" kembali. Tapi, ia tidak berhenti sampai di sini untuk menuntut kembali hak dan keluarganya yang dirampas. Pada 5 Juli 1990, usai menggali informasi dari beberapa tetangganya mengenai rumahnya yang hancur dan dibakar serta isinya yang hilang, Azwar, meskipun harus wajib lapor seminggu sekali oleh Korem 043 sebagai bentuk "pendisiplinan diri" dan kontrol negara selepas dari penjara, melaporkan gugatan kepada aparatus pemerintah dengan beberapa tembusan, mulai dari pihak Korem 043 Gatam Provinsi Lampung, Kanwil Departemen Kesehatan, Ketua DPR dan MPR RI, Menteri Penertiban Pendayagunaan, Menteri Kesehatan, Wakil Presiden. Ia, dibantu oleh Nurdin, seorang mantan pengacara kepolisian, menggugat M. Dahlan, pegawai negeri sipil yang bekerja di puskesmas Sidorejo. Menurutnya, M. Dahlan telah membuat surat yang berisi fitnah terhadap diri dan keluarganya. Azwar dan Ismini dituduh sebagai dana penyedia gudang logistik gerombolan pengacau keamanan. Akibatnya, mereka berdua ditahan, dengan perincian masing-masing Azwar dan Ismini 3 bulan tahanan, atau 2 x 90 hari = 180 hari, di Korem Padang dan Lampung. Tidak hanya itu, selain mengalami penderitaan moral, menurut Azwar, M. Dahlan, dengan mengajak dua orang aparat keamanan desa, dan dua orang lainnya, telah menghancurkan dan mengambil semua harta benda dan ternak miliknya. Diperkirakan ia menderita kerugian Rp. 40 juta.[21]

Lagi-lagi surat laporan dan gugatan itu tidak mendapatkan respon. Di saat yang bersamaan, Presiden Soeharto membuka program Tromol Pos 5000. Program itu diperuntukkan kepada masyarakat Indonesia yang memiliki keluhan dan persoalan yang terkait dengan pelayanan pemerintah serta memiliki persoalan sosial terkait dengan hidup yang dijalani agar tidak sungkan-sungkan melaporkannya. Surat pengaduan mereka akan dijawab sendiri langsung oleh Presiden Soeharto. Dengan kata lain, program Tromol Pos 5000 ini adalah bentuk kepedulian seorang pemimpin kepada masyarakatnya. Adanya program tersebut membuat harapan Azwar dan keluarga kembali menguat. Setidaknya, dengan adanya media pengaduan itu ia dapat mencurahkan persoalan yang sedang dihadapi, sehingga pihak pemerintah Indonesia, lewat perintah presiden, dapat bertindak tegas terhadap aparatusnya di daerah, khususnya di desa Sidorejo.

---

20 Wawancara dengan Azwar Kaili, 4 Desember 2008; Isterinya Azwar Kaili, 5 Desember 2008.

21 "Surat Permohonan Bantuan Pertimbangan dari Pemerintah Adanya Perusakan Rumah Pribadi oleh Masyarakat Sidorejo, Kecamatan jabung, Lampung Tengah" Arsip Dokumen Keluarga Azwar Kaili, 5 Juli 1990.

Alih-alih mendapatkan jawaban pembelaan terhadap surat keluhan yang dilayangkan kepada presiden, ia malah ditangkap kembali dan mendekam di penjara selama 2 bulan, 10 hari. Alasan utama mengapa ia ditangkap ialah karena surat keluhan untuk Tromol Pos 5000 yang dikirimkannya itu merupakan suatu ejekan bagi petinggi dan anggota militer yang bekerja di Lampung itu. Dengan adanya surat pengaduan itu, mereka akan dianggap tidak becus dalam menjaga keamanan dan "kenyamanan" di lingkungan masyarakat mereka bekerja. Bagi Azwar, Tromol Pos 5000 itu adalah suatu pancingan kepada korban dan keluarga korban agar mereka mau bersuara. Namun, ketika mereka bersuara langsung ditangkap kembali oleh aparat militer.

Bertolak dari kondisi di atas, Azwar dan Ismini mencoba realistis dalam menyikapi peristiwa yang mereka alami. Mereka lalu membangun kembali degup jantung perekonomian keluarga yang sempat luluh lantah. Azwar menjual warungnya sebesar Rp 2,5 juta, yang berada di samping depan rumahnya, persis di depan jalan umum. Sementara Ismini menjadi perawat di rumah sakit Abdul Muluk membantu dokter Zaenuddin. Mereka juga dibantu oleh masyarakat yang beretnis Bali memenuhi kebutuhan dan perabotan rumah tangga dengan suka rela, mulai dari beras, piring, gelas, dan hasil panen ladang lainnya. Atas pinjaman uang dari seorang teman sebesar Rp 3 juta, Azwar membuka lahan untuk bertani. Berlahan-lahan pertumbuhan ekonomi yang dimilikinya mulai agak membaik. Meskipun stigma masyarakat, khususnya transmigran yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang notabene beragama Islam, masih cukup kuat.

Ternyata cengkeraman penindasan tidak berhenti di sini. Sebagai orang yang dianggap "musuh negara", meskipun sudah dibebaskan, Azwar masih belum lepas dari bayang kesewenang-wenangan aparatus pemerintah. Ini tampak dari perlakuan yang diberikan kepada Azwar Kaili dan keluarga. Ia pernah diundang oleh Lurah Desa untuk menghadiri rapat tahunan dalam rangka merayakan ulang tahun kemerdekaan RI, biasa dikenal dengan tujuh belas Agustusan. Rapat desa itu dihadiri oleh hampir seluruh kepala desa yang berada di Jabung. Namun, rapat itu bukan membahas persoalan tujuh belas agustus-an, tapi upaya meminta paksa tanah yang luasnya 10 x 50 meter milik Azwar yang berada di utara, samping kiri rumahnya. Selain itu, pada hari Minggu 22 Juni 1994, lahan tanah milik Azwar seluas 4 hektar, berisikan jagung yang mulai panen, tanaman kacang kedelai berumur 1-2 bulan, pohon pepaya berumur 1 bulan, tiba-tiba dirampas begitu saja oleh beberapa orang polisi, Babinsa, dan dibantu gerombolan preman. Selain mengambil hasil panen milik Azwar, mereka menggusur lahan miliknya dengan cara mentraktornya. Ironisnya, hasil panen rampasan itu dikumpulkan di kecamatan Sribowono sebagai perwakilan. Betapa marahnya Azwar, melihat hasil panen dan tanamannya yang dipelihara dengan jerih payah dirampas dan dirusak. Ia, saking

marahnya, sambil mengumpat, sempat membawa golok mengejar mereka untuk mengusir mereka.

Ia, atas kerugian yang dialami, membuat surat aduan kepada Kapolres Metro, Lampung Tengah. Dengan harapan pihak kepolisian akan menghukum mereka secara setimpal. Alih-alih mendapatkan hak tanah dan hasil panennya yang dirampas, atas laporan pengaduan itu ia malah diputuskan oleh cabang Kejaksaan Negeri Metro di Sukadana sebagai terdakwa. Ia dianggap telah membawa senjata tajam tanpa ijin di muka umum dan juga melakukan ancaman kepada aparat keamanan yang bertugas. Ia, untuk ketiga kalinya, ditahan selama 20 hari.[22] Dengan demikian, dalam konteks ini, korban dan keluarga korban "Mujahidin", bagi aparatus negara, seperti binatang yang bisa diperlakukan sesuai dengan kehendak hatinya. Tidak ada keadilan hukum bagi mereka. Tapi, keadilan itu mutlak di tangan untuk, dari dan oleh aparatus negara sebagai pemegang otoritas tunggal.

V. Secercah Harapan, Segudang Cemas

Mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998 membuka ruang demokratisasi di Indonesia. Momentum ini sekaligus membuka kesempatan bagi sebagian masyarakat untuk menuntut pengungkapan kebenaran pelbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dipraktikkan rezim Orde Baru. Salah satu tuntutan itu menyangkut peristiwa Talang Sari 1989. Di sini, selain melakukan investigasi atas korban yang meninggal pada 7 Februari 1989 di Cihideung, Way Jepara, Talang Sari, Lampung, Azwar bersama keluarga, didampingi oleh Fikri Yasin, Kordinator Komite Solidaritas mahasiswa Lampung (Smalam), Ibrahim Bastari dari KP-HAM, dan juga aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum Lampung, melakukan koordinasi dan pencarian terhadap masyarakat yang menjadi korban atau pun bagian dari keluarga korban. Harapannya, dengan adanya koordinasi dan pengumpulan seluruh korban yang berada di Lampung, mereka dapat melakukan upaya penuntutan terhadap negara agar kasus tersebut diungkapkan.

Di sisi lain, momentum itu membuat Azwar dan anak-anaknya memiliki kesempatan untuk membuka lahan pertanian di Gunung Balak yang ketika itu dikuasai oleh Tomi Soeharto. Ia, sebagai orang yang terlebih dahulu membuka lahan, dibantu oleh kedua anaknya, Aris dan Irwan, memiliki 10 hektar tanah. Kedua anaknya itu, karena merasa mendapatkan lahan tanah begitu mudah, menjual satu hektar demi satu hektar tanah itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kini, lahan tanah itu tinggal 2 hektar, dan ditanami pohon coklat. Lewat bertanam coklat yang sangat menguntungkan inilah Azwar dan keluarganya menyambung hidup. Di tambah lagi dengan pendapatan harian

22 Wawancara dengan Azwar Kaili, 5 Desember 2008.

Ismini sebagai seorang mantri kesehatan yang membuka praktik di rumahnya, membuat Azwar dan keluarganya lumayan berkecukupan kembali. Kendati, kondisi ekonomi mereka tidak kembali besar seperti sebelum peristiwa itu.[23]

Setelah melakukan konsolidasi internal dan pernyataan sikap dalam jumpa pers, Azwar dan korban serta keluarga korban yang lain bersama aktivis Smalam, pada 5 November 1998, melakukan upaya penuntutan kepada negara dengan mendatangi lembaga-lembaga terkait untuk mendengarkan suara mereka. Suara mereka didengarkan oleh DPRD Lampung yang berasal dari lima parpol. Mereka adalah Syafruddin Husin (PUDi-Partai Uni Demokrasi Indonesia), Ibnu Hajar (PAN-Partai Amanat Nasional), Razak, (PBB-Partai Bulan Bintang), Abdul Hakim (Partai Keadilan), dan Matt Al Amin Kraying (PDI Perjuangan). Mereka, bersama kelima parpol ini juga, berunjuk rasa di Pemda Lampung. Mereka bertemu dengan Kariyotmo, Ketua DPRD Lampung, agar mendesak menuntaskan kasus itu kepada pemerintah pusat.[24] Di sini, kalangan korban dan keluarga korban juga membuat sebuah organisasi untuk menaungi mereka, yaitu Perkumpulan Keluarga dan Korban Pembantaian Talang Sari Lampung (PK2PTL). Yang menjadi kordinator dalam perkumpulan itu adalah Sukardi dan Fauzi Isman, wakil koordinator.

Sebelumnya, pada 4 September 1998, sebagian besar kalangan korban Talang Sari yang lain dengan dipimpin Ahmad Yani Wahid, Ketua Delegasi Masyarakat Korban Peristiwa Lampung mengadakan unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR. Mereka meminta agar Presiden BJ Habibie mengambil langkah konkret melakukan rekonsiliasi nasional untuk menyelesaikan persoalan politik di masa lalu, agar luka-luka lama dapat dihapuskan. Jika tidak, persoalan itu bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk memecah belah bangsa. Mereka juga menyalahkan pihak aktivis LSM yang baru bergerak saat reformasi bergulir. Sementara ketika mereka di penjara para aktivis LSM hanya diam. Selain itu, mereka juga meminta presiden untuk melakukan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan terhadap korban dan keluarganya, termasuk para tapol dan keluarganya yang hak perdatanya dimatikan. Terlebih lagi, saat itu, masih ada 14 tahanan narapidana politik yang berada di rumah tahanan.[25]

Di sini, kalangan korban dan keluarga korban sebenarnya sudah mengalami perpecahan. Sebagian besar dari mereka lebih menginginkan peristiwa itu di selesaikan secara damai, tidak melalui jalur hukum. Sementara kalangan korban yang lain ingin tetap menuntut, salah satunya adalah Azwar dan keluarganya. Perubahan sikap mereka ini berawal dari adanya bujukan untuk

23 Wawancara dengan Ismini, isteri Azwar Kaili, Korban Peristiwa Talang Sari, 4 Desember 2008.
24 "Lima Parpol Minta Kasus Talang Sari Diusut", Kompas, 5 November 1998
25 "Unjuk Rasa Soal Lampung", Kompas, 4 September 1998

berdamai dari pelaku lewat jalan islah. Lewat perdamaian islah inilah, meskipun mereka kurang begitu mengetahui apa makna dari istilah islah itu sendiri dalam perspektif Islam, dijanjikan sejumlah iming-iming kompensasi materi dari pihak Hendropriyono.

Kesepakatan islah antara para pelaku dan korban tragedi Talang Sari dilakukan kurang lebih sebanyak dua kali. Pertama, kurang lebih satu bulan paska reformasi, seiring dengan naiknya Habibie sebagai presiden. Kesepakatan damai yang diwakili sejumlah korban, seperti Nurhidayat, Sudarsono, Maulana dan Ahmad Yani Wahid (tapol kasus Imran atau Woyla). Dari pihak militer diwakili Hendropriyono, yang dahulu menjabat sebagai Komandan Korem 043 Garuda Hitam, berpangkat kolonel. Kedua, islah dilakukan pada tahun 1999. Islah ini satu bentuk negosiasi antara Hendropriyono dan para korban yang menjadi tahanan politik. Hasil negosiasi itu adalah dibebaskannya tiga belas dari empat belas narapidana dari kalangan korban. Pembebasan dilakukan lewat grasi (pengampunan) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101/G/1998. Dibebaskannya mereka menandakan bahwa kasus Talang Sari telah "selesai". Mereka dan Hendropriyono kemudian mendeklarasikan gerakan islah nasional sebagai gerakan moral bangsa.[26]

Bagi korban dan keluarga korban yang tidak islah, era reformasi masih sama seperti dahulu, meskipun dalam kadar yang berbeda. Mereka memang sudah bebas dari belenggu stigma atas masa lalu yang diciptakan rejim Orde Baru, tapi bukan berarti intimidasi itu hilang begitu saja. Sebagaimana direkam oleh laporan internal kontras, mereka (20 orang), pada tahun 1999, sepulang dari Komnas HAM pernah dikumpulkan Kasimin, Pamong Dusun Talang Sari, dan Sukimin, Kepala Rukun Tangga (RT). Selain menanyakan perihal alasan

26 Mengapa muncul isu dan gerakam moral islah begitu cepat? Sebagaimana diketahui, naiknya Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto, telah memberikan peluang besar bagi Hendropriyono untuk menggantikan Wiranto sebagai Panglima ABRI. Saat itu, Wiranto dianggap sebagai dalang di balik beberapa peristiwa, seperti kasus penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998, Semanggi, Banyuwangi, dan juga tragedi Ambon berdarah. Hal ini memperburuk citranya di mata masyarakat. Akan tetapi, berbagai tarik-ulur kekuatan politik yang ada tidak menghendaki Hendropriyono menggantikan Wiranto. Habibie hanya bisa menempatkan Hendropriyono sebagai Menteri Transmigrasi dan PPH (Pemukiman Perambah Hutan). Meskipun sudah menjadi Menteri, bukan berarti posisinya tidak tergoyahkan. Ia masih memiliki cacat di masa lalu, yaitu tragedi Talang Sari, 1989. Jadi, ide pengajuan islah yang diprakarsai ini adalah salah satu upaya menutup dosa-dosa politik yang pernah dilakukannya. Lihat, Irfan S. S Awwas, Trauma Lampung Berdarah: Di balik Manuver Hendropriyono, Yogyakarta: Wihdah Press, 2000, hal. 19, 99, 155-156; "Tiga belas Napol GPK Warsidi Dibebaskan" Kompas, 18 Januari 1999; Kontras Report, Peristiwa Talang Sari 1989: Sebuah Kisah Tragis Yang Dilupakan, tt, Dokumen Kontras (2006), Surat Pernyataan Korban Talang Sari Keluar dari Kesepakatan Islah.

kepergian mereka ke Jakarta, dua orang aparatus desa itu, disertai ancaman, meminta mereka untuk tidak membuka kembali kasus Talang Sari. Ini karena, upaya pengungkapan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum. Bahkan, pada tahun 2000, Tentara Koramil Way Jepara, Kapten Tukijan pernah masuk ke rumah salah seorang warga. Ia memaki-maki sambil membawa pistol, *"Isteri saya sekarang ada dua. Satu isteri di rumah dan satu lagi adalah ini"*, katanya sambil mengeluarkan senjata api.[27] Bagi Azwar dan keluarganya intimidasi itu lebih pada kontrol aparatus negara yang selalu datang ke rumahnya, dan menanyakan perihal aktivitas yang ia lakukan.

Kondisi ini diperparah dengan semakin banyaknya kalangan korban dan keluarga korban yang sudah terpengaruhi dengan tawaran iming-iming islah. Ironisnya, korban yang terpengaruh tersebut adalah adalah kordinator, dan wakil kordinator PK2PTL itu sendiri, yaitu Sukardi dan Fauzi Isman. Padahal, mereka berdualah yang dahulu sangat keras agar peristiwa tersebut dapat diungkapkan. Karena itu, lewat mereka, sampai tahun 2001, hampir 90 persen kalangan korban, baik yang di Lampung, Jakarta, dan Solo sudah melakukan islah.[28] Di sini, kalangan korban dan keluarga korban yang hanya beberapa gelintir bersama dengan Komite Smalam, LBH Lampung, dan juga KontraS tetap memperjuangkan kasus tersebut diungkap. Sementara, tampuk kepimpinan perkumpulan korban dan keluarga korban itu dipegang oleh Azwar. Selain terus melakukan penuntutan dengan pelbagai cara, baik demonstrasi, audensi ke DPR dan MPR, atau pun ke Komnas HAM, Azwar dan para pegiat HAM itu tetap berusaha merangkul kembali kalangan korban dan keluarga yang sudah terpengaruhi dan bergabung dalam kelompok islah.

Pada tahun 2001 sebagian besar kalangan korban yang berada di Lampung kemudian menyatakan keluar dari kesepakatan Islah dengan membuat surat pernyataan.[29] Mereka merasa telah dikhianati atas perjanjian tersebut. Salah satu contohnya adalah mengenai persoalan tambak. Setiap korban, awalnya, akan diberikan tambak. Mereka lalu diikutkan dalam pelatihan Program Plasma Tambak Inti Rakyat (TIR) di Lampung oleh Hendropriyono, saat itu menjabat sebagai Menteri Transmigrasi dan PPH. Penyelenggaranya adalah PT Central

27 KontraS Report, Peristiwa Talang Sari 1989: Sebuah Kisah Tragis Yang Dilupakan, tt, Dokumen Kontras (2006), hal. 14.
28 Wawancara Azwar Kaili dan Ujang, puteranya, 2 Desember, 2008.
29 Mereka yang keluar dari kesepakatan itu dan korban yang juga tetap menuntut peristiwa Talang Sari untuk diungkapkan berjumlah 28 orang, di antaranya adalah Jayus, Joko, Bibit, Warsidi SM, Siswanto, Rosnim, Kasman, Budi, Mino, Mardi, Sutrisno, Edi Arjadat, Parmo, Mahmud, Marzuki, Jamiran, Salim, A. Syamsudin, Bustanul Arifin, Jumadi, Sutrisno, Paimin, Margono, Sinar, Akmal, Aji Waluyo, Azwan, dan Purwoko. Lihat. "Surat Pernyataan Keluar Korban dan Keluarga Korban Talang Sari", Dokumen KontraS, 2001.

Pertiwi Bahari bekerjasama dengan Departemen Transmigrasi dan PPH.[30] Alih-alih mendapatkan modal dan tambak udang yang dijanjikan, mereka malah menjadi buruh untuk perusahaan tersebut. Bahkan, setelah pelatihan kedua lembaga itu tidak membiayai dan memberikan modal kepada mereka.[31]

Tidak dipungkiri, peran Azwar cukup besar dalam mempengaruhi kalangan korban dan keluarga korban yang berada di Lampung, sehingga mereka mau keluar dari kesepakatan tersebut dan bergabung kembali bersamanya. Salah satu cara merayu mereka adalah dengan membohonginya. Ia sering berbohong kepada mereka bahwa ia juga pernah ditawari uang ratusan juta rupiah, mobil, dan juga rumah agar ikut islah. Tapi, ia tetap tidak mau. Baginya, yang terpenting adalah adanya pengusutan tuntas terlebih dahulu atas peristiwa Talang Sari, dan pemerintah mau meminta maaf atas apa yang telah menimpa kalangan korban dan keluarga korban. Karena itu, ia tidak mau menerima islah dan mementingkan hasrat kepentingan sendiri. Ia lebih mementingkan perjuangan bersama dengan kalangan korban yang lainnya untuk menuntut peristiwa tersebut. Dengan kata lain, ia saja dengan iming-iming begitu besar tidak mau terlibat dalam islah, bagaimana dengan mereka yang selama ini lebih dihargai kecil oleh orang suruhan Hendropriyono. Benar saja. ternyata omongan Azwar itu dapat dibuktikan. Satu ketika anggota Kodim Lampung pernah datang ke rumah Azwar. Ia menawarkan kepadanya untuk membangun rumahnya kembali, jika Azwar mau ikut terlibat dalam islah. Sebagian besar kalangan korban yang saat itu sedang berkumpul di rumahnya pun menjadi percaya bahwa ternyata Azwar memang benar-benar tidak berbohong.[32]

Selain itu, ia juga menggunakan kasus lain untuk menguatkan perjuangan solidaritas di antara mereka. Tepatnya, pada 20 Agustus 2004, pasca putusan Pengadilan HAM adhoc Peristiwa Tanjung Priok menetapkan negara harus memberikan kompensasi materiil sejumlah Rp 658 juta dan imateriil sejumlah Rp 357.5 juta kepada korban dan keluarga korban yang tidak terlibat dalam islah[33]. Lewat putusan pengadilan HAM Adhoc Priok inilah Azwar menguatkan kalangan korban dan keluarga korban peristiwa Talang Sari yang lainnya bahwa jika mereka mau tetap menuntut pengungkapan kebenaran mereka akan mendapatkan kompensasi seperti teman-teman korban peristiwa Tanjung Priok.

Sejak itulah Azwar dan korban dengan didampingi KontraS terus memperjuangkan kasus Talang Sari. Beragam cara yang mereka lakukan untuk menun-

30 Irfan S. S Awwas, *Trauma Lampung Berdarah: Di balik Manuver Hendropriyono*, hal. 84.

31 Wawancara dengan Siran, Korban Peristiwa Talang Sari, 2 Desember 2008.

32 Wawancara dengan Azwar Kaili, korban peristiwa Priok, 5 Desember 2008.

33 Tim Kontras, *Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu, Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok,* Jakarta: Kontras, 2008, hal. 302.

tut peristiwa Talang Sari, mulai menggalang dukungan baik ormas Islam maupun ke lembaga negara. Penyelenggaraan tahunan memperingati peristiwa Talang Sari, hingga demonstrasi ke Komnas HAM untuk mempercepat diusutnya peristiwa tersebut. Komnas HAM, meskipun "setengah hati" dan mandatnya sudah harus bekerja sejak 2001, pada tahun 2007 mulai melakukan penyelidikan dan investigasi mengenai peristiwa itu. Pada tahun 2008 inilah Komnas HAM mulai memanggil sejumlah saksi dari korban dan keluarga korban peristiwa Talang Sari serta para petinggi militer yang dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa itu, mulai dari Sudomo, yang saat itu menjadi Menteri Kordinator Politik dan Keamanan, hingga upaya pemanggilan Hendropriyono.

VI. Meneguhkan Solidaritas Korban

Selain keteguhan sikap agar peristiwa Talang Sari terus diungkapkan, kejujuran, Azwar memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ditambah lagi dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya terbilang cukup bila dibandingkan dengan kalangan korban dan keluarga korban lain Modal sosial yang dimiliki ini lah yang membuat sebagian besar korban memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi koordinator dan juga representasi suara korban. Sejak Sukardi dan Fauzi Isnan membelot bergabung dengan kelompok islah, aktivitas yang terkait dengan penguatan solidaritas dan upaya penuntutan pengungkapan kebenaran dengan didampingi para pegiat HAM pun berpindah ke rumah Azwar. Di sana, mereka sering berkumpul membicarakan mengenai berita terbaru kasusnya atau pun inisiatif untuk pergi ke Jakarta untuk mengupayakan kembali penuntutan kasus tersebut.

Saat kasus Talang Sari sedang dalam proses investigasi di tangan Komnas HAM dan juga pemanggilan sejumlah petinggi militer, mereka sering berkumpul hampir setiap minggu. Lama-kelamaan kemudian menjadi sebulan sekali. Terlebih lagi, hampir setiap bulan KontraS mengirimkan buletinnya, sehingga mereka juga membahas kasusnya lewat buletin kontraS itu. Selain itu ada juga beberapa mahasiswa dari Lampung yang datang memberikan pengetahuan hukum dan dukungan moral kepada mereka. Karena Azwar sudah cukup tua, Ujang, sebagai anak ketiga, sering menggantikan posisinya dalam mengkordinir korban dan keluarga korban. Ia juga sering mewakili keluarga besar korban untuk mengikuti Kongres IKOHI dan juga melakukan koordinasi mengenai kasusnya dengan beberapa pegiat HAM.

Namun, kini konsolidasi di antara kalangan korban dan keluarga korban semakin berkurang, bahkan cenderung lemah. Ada beberapa alasan mengapa itu bisa terjadi. Pertama, semakin sibuknya Azwar dan keluarga, serta Ujang untuk menghidupi perekonomian keluarga mereka. Bagi Azwar untuk mengumpulkan korban dan melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas kasusnya

sesering mungkin itu memang sangat dibutuhkan. Dalam pertemuan itu biasanya ia yang membiayai kalangan korban dan keluarga korban yang berada di Way Jepara dan juga beberapa tempat mengenai akomodasi dan juga makan mereka. Mereka notabene adalah korban dari masyarakat yang menengah ke bawah dan di bawah rata-rata ekonomi masyarakat yang lain pada umumnya. Namun, kalau itu sering dilakukan, ia juga bisa "kesusahan" juga, karena harus menanggung begitu banyak orang. Selain itu, ia disibukkan dengan mengurusi ladangnya. Ujang, anaknya, pernah melakukan pemberdayaan kalangan korban, yaitu memberikan modal kepada kalangan korban untuk mengumpulkan buah kakao yang dijual kepadanya. Sayang, usaha itu tidak berjalan lama. Ia kehabisan modal, dan juga harus menafkahi isteri dan anaknya.

Kedua, mulai berkurangnya dampingan pegiat HAM. Perlu diakui, Fikri Yasin, Komite Smalam, yang selama ini mendampingi kalangan korban dan keluarga korban sejak pasca reformasi hingga tahun 2008. Ia sering mengarahkan dan juga mengajak kalangan korban dan keluarga korban untuk melakukan sesuatu. Namun, Fikri Yasin sekarang sedang sibuk untuk mendaftarkan diri menjadi caleg DPR RI dari daerah pemilihan Lampung, Partai Amanat Nasional (PAN). Berkurangnya dampingan darinya membuat kalangan korban dan keluarga korban tidak tahu harus melakukan apa, karena selama ini Fikri Yasin dan organisasi Komite Smalam yang mengarahkan mereka. Memang, KontraS sering mendampingi mereka. Letak geografis yang jauh, Jakarta-Lampung, membuat dampingan itu kurang efektif. Karena, dalam proses pendampingan untuk mereka tidak hanya satu bulan sekali, tapi terkadang seminggu sekali, bahkan ketika ia dibutuhkan.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap para pendamping dari pegiat HAM tersebut, Ujang, sebenarnya, telah membuat kantor Perkumpulan Korban Talang Sari Lampung (PKTL) dengan dibantu oleh Nasrun, warga kampung Sidorejo yang memiliki kepedulian terhadap peristiwa tersebut. Adanya kantor tersebut diharapkan dapat memudahkan konsolidasi antara korban dan juga para pendamping aktivis HAM yang berada di Jakarta sambil sedikit-sedikit upaya belajar mandiri mengenai hukum. Sayang, lagi-lagi usaha itu gagal, karena tidak ada modal yang memadai.

Karena itu, menurut Azwar, ada beberapa hal yang bisa dikuatkan di sini agar konsolidasi korban bisa kuat, ingatan atas peristiwa itu tetap hangat, silaturahmi di kalangan mereka tetap terjaga. Pertama, adanya pendirian koperasi untuk, oleh, dan dari kalangan korban. Selain menguatkan dan pemberdayaan terhadap ekonomi, koperasi ini dapat sebagai mediasi untuk menguatkan solidaritas mereka. Ini karena dengan seringnya mereka berinteraksi dan bertemu akan memudahkan melakukan inisiatif perjuangan dalam kasus mereka. Di sini, dukungan modal ekonomi dan juga pelatihan kewirausahaan menjadi

hal yang sangat penting. Kedua, pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum itu bisa berupa pendidikan, training, ataupun semacamnya. Setidaknya, dengan bekal itu, ia dan kalangan korban yang lain memiliki kemandirian yang lebih bagaimana harus bersikap dan apa yang harus dilakukan untuk memperjuangkan haknya di tingkatan lokal. Selain itu, ia dan kalangan korbannya yang lainnya bisa bersuara dan tidak mudah dibodohi ketika ada intimidasi dari pihak aparatus negara yang selama ini mereka alami.

Sekilas Perjalanan Hidup Ustadz Sang Pembela HAM

Muhammad Mizar Al Amir
Pejuang Lingkungan Yang Bersih

I. Mizar dan Kehidupan Sosialnya

Terlahir dengan nama Muhammad Mizar Al Amir, anak pertama dari empat bersaudara ini dilahirkan pada tanggal 22 Maret 1975. Mizar dibesarkan dalam lingkungan agraris, sehingga hidup dengan cara bekerja keras tidak menjadi hal yang memberatkan untuknya. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk membantu orang tuanya yang berprofesi sebagai petani *gurem*. Mizar kecil gemar menggembala ternak, khususnya kerbau. Salah satu hiburan yang ada adalah pada saat dia diberi tugas untuk menggembala ternak (kerbau). Dari kebiasaan menggembala itulah, dia kemudian menemukan bakat kepemimpinannya di dalam dirinya.

Pada usia 13 tahun, saat duduk di kelas 5 SD, Mizar dan keluarganya memutuskan pindah ke Kampung Bojong. Walau berjarak tidak lebih dari 3 kilometer, Mizar kecil dituntut harus bisa segera beradaptasi dengan lingkungan barunya itu. Sejak kecil, Mizar dididik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keyakinan, keberanian dan kejujuran. Nilai-nilai tersebut menjadi pegangan baginya dalam melakukan segala hal, dan nilai-nilai tersebut masih tertanam kuat hingga kini. Hal itu sangat terlihat dalam pergaulan Mizar sehari-hari dengan teman sepermainan. Mizar lebih banyak muncul sebagai seorang anak yang menengahi apabila jika terjadi perselisihan di antara teman-temannya. Dia selalu membela teman-temannya yang dianggap benar. Gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, lugas dan cenderung blak-blakan dalam mengungkapkan sesuatu, menjadi karakteristik Mizar dari dulu hingga kini.

Walau pun begitu, seorang anak kecil tetaplah anak kecil. Mizar terkenal dengan kebadungannya karena gemar berkelahi, sehingga dia kemudian ditakuti oleh teman-teman sepermainannya. Julukan preman cilik selalu hinggap setiap kali orang mengingat nama Mizar. Sayangnya, Mizar baru bisa masuk sekolah pada usia 8 tahun. Mizar menjadi anak yang paling tua, paling besar dari teman sekelasnya. Oleh karena itu, Mizar selalu dijadikan pohak penengah jika terjadi perselisihan di antara teman-temannya. Selain julukan preman cilik, orang juga banyak menganggap Mizar sebagai jagoan cilik juga. Walaupun terlambat masuk sekolah dan lebih tua dari teman sekelasnya, Mizar tidak pernah menunjukkan rasa mindernya. Bahkan, pada saat duduk dibangku SMP, Mizar ditunjuk sebagai ketua OSIS selama 2 tahun berturut-turut, mulai dari kelas 2 sampai kelas 3 SMP. Dia mengemukakan asumsi, bahwa dirinya ditunjuk untuk menjadi Ketua OSIS bukan karena kemampuannya untuk memimpin, tetapi lebih dikarenakan umurnya yang lebih tua di antara teman sekelasnya, sehingga dia menjadi lebih menonjol di antara yang lain. Menurut dia, hal tersebut adalah nilai lebih bagi dirinya.

Mizar mengakui di awal perjumpaan dengan peneliti lapangan, Muhammad

Widodo bahwa pada dasarnya masyarakat Bojong memiliki karakter yang keras. Banyak preman kampung yang muncul sebagai jagoan-jagoan kandang, yang sering menggunakan jalan kekerasan apabila masalah muncul. Namun, karena Bojong bukan daerah yang luas dan kondisi sosial yang masih kental dengan suasana kekeluargaan khas masyarakat Sunda, warga Bojong tetap memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat. Tolong menolong dan saling membantu antar sesama warga yang kesulitan, menjadi ciri dari budaya yang masih dipraktikkan sampai sekarang. Budaya itu kelak menjadi kunci sukses dari warga Bojong untuk bertahan pada saat mengalami kesulitan finansial setelah terjadi bentrokan yang mengakibatkan penangkapan paksa terhadap seluruh laki-laki Bojong, padahal mereka menjadi tulang punggung keluarga sehari-hari).

Mizar amat bersyukur bahwa kehidupan ekonomi keluarganya bisa mencukupi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Secara sosial, mayoritas masyarakat Bojong bermata pencaharian sebagai buruh tani, pedagang, dan sebagian kecil sebagai buruh pabrik dan pegawai negeri sipil. Kedua orang tua Mizar mampu menyekolahkan anak-anaknya dengan baik, bahkan Mizar bisa menggenapkan pendidikannya hingga jenjang pesantren hingga tahun 2000.

Di pesantren, Mizar dididik untuk hidup mandiri dan mengatasi masalahnya sendiri. Jiwa kepemimpinan dan kemampuan untuk berbicara di depan publik yang sudah dimilikinya, semakin terasah dalam proses pendidikan di pesantren. Mulanya, motivasi Mizar untuk masuk ke pesantren adalah ingin memiliki ilmu "kebal bacok", karena cita-cita Mizar ingin menjadi tentara. Mizar telah menyusun rencana, setelah menguasai ilmu "kebal bacok", ia akan langsung mendaftar menjadi tentara. Namun cita-cita untuk menjadi tentara semakin lama semakin pudar. Hal ini disebabkan nasehat yang diberikan oleh salah seorang gurunya yang mengatakan bahwa pengabdian hidup bukan hanya dilakukan ketika kita menjadi tentara, tetapi juga bisa dilakukan melalui jalur keagamaan.

Seorang kyai dapat disebut menjadi seorang pengabdi kepada negara dengan menyebarkan ajaran kebaikan dan kebenaran dalam Islam. Nilai-nilai kemandirian yang diajarkan di dalam pesantren antara lain semangat untuk bekerja keras dan pantang menyerah. Nilai-nilai itu diimplementasikan untuk membantu pembangunan perluasan pesantren. Pendidikan yang ia dapatkan di pesantren diberikan tidak berbasis pada kurikulum Sisdiknas, tetapi lebih mengacu pada kitab-kitab kuning yang menonjolkan ajaran-ajaran ke-Islaman.

Itu sebabnya, Mizar yang mulanya masuk pesantren tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak mengerti ajaran agama Islam secara mendalam, berubah men-

jadi seorang Mizar yang paham tentang ilmu keagamaan dan kelak ia gunakan dalam mengadvokasi kasus yang melibatkan masyarakat Bojong.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di pesantren, Mizar kembali ke kampungnya dan mendirikan tempat pengajian Al-Quran bagi anak-anak kecil. Tempat pengajian tersebut kemudian berkembang hingga akhirnya memiliki murid sampai 50 anak-anak. Metode pendidikan yang diterapkan diakui Mizar sangat keras dan disiplin. Mizar memberi jaminan kepada para orang tua dari anak-anak pengajiannya, bahwa dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan si anak dapat membaca Al-Quran, jika mereka rutin dan sungguh-sungguh belajar agama dengan baik. Keberhasilan dalam mendidik anak didiknya menjadikan tempat pengajiannya semakin banyak murid yang berguru kepadanya.

Selain menjadi guru mengaji yang tidak dibayar, kesibukan Mizar lainnya adalah menjadi makelar motor untuk menghidupi keluarganya. Karena sibuk mengurusi tempat pengajian dan pekerjaan lainnya, Mizar menjadi kurang aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Namun Mizar cukup dikenal oleh masyarakat sekitar karena dia mempunyai kemampuan melakukan pengobatan alternatif dan sering menolong orang yang membutuhkan bantuan. Kemampuan untuk melakukan pengobatan alternatif didapat Mizar setelah melaksanakan pendalaman ilmu (*lelaku*) spiritual atas nasehat dari gurunya di pesantren. Lelaku spiritual yang dilakukan di antaranya adalah berpuasa selama lebih dari 4 tahun. Selama 4 tahun itu, dia juga melakukan amalan-amalan seperti yang diajarkan oleh gurunya.

II. Pergolakan Warga Bojong

Kebiasaan berkumpul di warung kopi menjadi rutinitas melepas penat sehari-hari yang dilakukan oleh beberapa warga Bojong, salah satunya adalah Mizar. Aktivitas ini juga sering digunakan untuk membagi informasi dan membicarakan seputar kejadian sehari-hari masyarakat. Di sinilah Mizar mengetahui informasi mengenai penolakan warga Bojong terhadap pembangunan TPST Bojong yang rencananya akan dibangun di kampung Ciuncal, kurang lebih 2 km dari rumah Mizar. Ia mendengar dan kadang menyaksikan aksi dan demonstrasi yang dilakukan warga untuk melakukan penolakan tersebut.

Mizar mengetahui kabar tersebut dari para tetangganya. aksi-aksi warga tersebut dipimpin oleh Yos, salah seorang warga perumahan Klapa Nunggal dan warga yang terlibat bergabung dalam organisasi FKMPL (Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan). Namun, Mizar lebih cenderung mengambil sikap apatis dan kurang tertarik untuk bergabung dalam aksi-aksi tersebut, karena ia berpikir kampungnya tidak akan terkena dampak jika pemerintah akhirnya memutuskan untuk membangun TPST. Selain itu, ia juga mendengar

dari selentingan kabar yang berkembang bahwa aksi warga telah dibiayai oleh pihak-pihak tertentu. Mizar hanya memposisikan dirinya sebagai pengamat dari jarak jauh terhadap perkembangan gerakan penolakan pembangunan TPST Bojong.

III. Dari Guru Ngaji sampai Pembela Hak Asasi Manusia

Sikap apatis dan kecurigaan yang dimiliki oleh Mizar dalam menilai gerakan yang diusung oleh warga Bojong, lama kelamaan mulai terkikis. Namun sedikit demi sedikit, Mizar terlibat dalam gerakan penolakan tersebut. Hal ini pada awalnya dilandasi oleh perasaan ingin tahu siapa dibalik gerakan penolakan TPST Bojong, serta apa yang menjadi sebab dari semangat yang dimiliki oleh warga Bojong untuk melakukan penolakan. Mizar kemudian mengikuti rapat-rapat dengan warga yang lain, tetapi belum secara intens dan rutin. Dia masih belum terlibat secara penuh.

Pada akhir tahun 2003, tepatnya tanggal 23 Desember 2003 aksi warga menolak pembangunan TPST-Bojong berakhir dengan penangkapan 4 warga yaitu Mizar, Rohim, Andi dan Nasim yang dituduh melakukan provokasi.[1] Mizar adalah salah satu warga yang ditangkap, walaupun tidak terlibat dan tidak mengetahui sama sekali kejadian yang sebenarnya, Mizar digelandang ke kantor polisi untuk di BAP dan dipaksa untuk menginap selama semalam di sel tahanan. Upaya membebaskan para warga yang ditangkap terus diupayakan oleh warga, seperti Pak Yos sebagai pemimpin gerakan dan koordinator FKMPL, serta Walhi Jakarta sebagai organisasi pendamping.

Kejadian yang menarik adalah pada saat proses BAP. Mizar yang memang tidak mempunyai pekerjaan tetap, menguraikan secara panjang lebar aktivitas dia sehari-hari, termasuk kelebihan yang dia miliki. Dan pada saat itu kebetulan Mizar mengenakan peci (pada saat ditangkap, Mizar baru selesai mengajar ngaji anak-anak). Karena kebingungan untuk mencantumkan pekerjaan yang sesuai dengan pemaparan Mizar, maka penyidik menuliskan pekerjaan Mizar sebagai ustadz. Berawal dari kejadian itulah, Mizar kemudian dipanggil ustadz oleh penyidik yang melakukan BAP, dan julukan itu kemudian menjadi pengetahuan umum di kalangan warga Bojong. Mizar kemudian dikenal sebagai ustadz oleh warga Bojong.

Paska tragedi penangkapan tersebut, banyak warga yang trauma. Para pemimpin yang dahulu menjadi penggerak warga kemudian satu per satu menghilang, termasuk Pak Yos sebagai Koordinator FKMPL. Ada yang menyebutkan bahwa para pemimpin tersebut sengaja menghilang untuk menyelamatkan

1 dikutip dari kronologi Kasus Bojong versi Walhi Jakarta dan KontraS (tidak dipublikasikan).

diri karena menjadi target operasi dari polisi, namun ada pula yang menyebutkan bahwa menghilangnya para pemimpin warga adalah karena mereka telah menerima suap dari pihak lain.

Keadaan yang tanpa pemimpin dan efek trauma yang diderita warga membuat gerakan menjadi mandeg. Di sini kemudian Mizar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Ustadz Mizar mengambil keputusan untuk ambil bagian dan terlibat secara aktif dalam gerakan penolakan TPST Bojong. Dalam situasi vakum kepemimpinan, pada organisasi pendamping yang tergabung dalam TAWB (Tim advokasi Warga Bojong) kemudian mencari sosok warga yang mempunyai potensi untuk mengambil posisi pimpinan. Pada saat itu, organisasi pendamping khususnya Walhi Jakarta dan Walhi Eknas melihat sosok Ustadz Mizar yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan, memimpin serta mendinamisasi warga. Ustadz Mizar juga mempunyai kemampuan untuk meyakinkan dan berbicara di depan warga.

Kemampuan untuk berbicara di depan massa dan meyakinkan massa dimiliki oleh Ustadz Mizar karena latar belakang dia sebagai penceramah. Karena sering berceramah di depan jamaah masjid dan di pengajian-pengajian, menunjang peningkatan kemampuan dia untuk berbicara di depan massa. Namun menurut Ustadz Mizar, kemampuan tersebut adalah anugerah karena telah melaksanakan *lelaku spiritual*. Menurut dia, tanpa *lelaku spiritual* tersebut, kemampuan untuk berbicara di depan massa dan meyakinkan massa tidak akan dimilikinya, walaupun telah mengikuti pelatihan-pelatihan dari organisasi pendamping.[2]

Karena kebutuhan yang mendesak akan pemimpin warga, maka Walhi Jakarta dan Walhi Eknas kemudian mendorong Ustadz Mizar untuk mengambil posisi tersebut. Dan warga pun perpandangan sama dengan para organisasi pendamping dalam melihat Ustadz Mizar. Ustadz Mizar yang dahulu hanya seorang guru ngaji, kemudian berubah menjadi seorang pemimpin gerakan. Ustadz yang menjadi ikon perlawanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Gerakan perlawanan terhadap pembangunan TPST Bojong terus berlanjut. Beberapa kali bentrokan antara warga yang melakukan aksi dengan pasukan keamanan yang disewa oleh perusahaan serta pihak kepolisian yang mengamankan aksi-aksi warga.Tercatat selama proses advokasi terjadi 5 bentrokan.[3]

2 Ustadz Mizar adalah orang yang mempunyai kepercayaan mistis religius, sehingga memandang segala sesuatunya adalah anugerah. Untuk mendapatkan anugerah tersebut orang harus melakukan lelaku spiritual, serta berdoa. Usaha-usaha seperti mengikuti pelatihan hanya bersifat membantu saja.

3 Lihat kronologis kasus TPST Bojong dalam Kasus Posisi yang disusun oleh Walhi Jakarta (tidak dipublikasikan).

Penentuan sepihak Kampung Rawa Jeler, Desa Bojong, Klapanunggal, Bogor sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) telah menimbulkan banyak peristiwa kekerasan. Proses sepihak, tanpa pelibatan masyarakat setempat telah dilakukan aparat PEMDA DKI Jakarta, PEMDA Bogor dan pemilik modal; PT. Wira Guna Sejahtera/WGS sejak Desember 2001 sampai dengan puncaknya tanggal 22 November 2004, oleh sebab tindakan represif aparat atas protes yang dilakukan sekitar 2.000 orang, terdiri dari tujuh desa; Cipeucang, Situsari, Ciuncal, Bojong, Singasari. 7 warga menderita luka tembak, 39 orang ditangkap sewenang-wenang, penyisiran dan penggeledahan paksa dilakukan aparat. Pasca penembakan dan penyisiran, terhitung 133 orang warga tidak diketahui keberadaannya.[4]

Menurut pengakuan dari Ustadz sendiri, bentrok yang terjadi adalah merupakan puncak kemarahan warga, terlebih lagi bentrok besar yang terjadi pada 22 November 2004. Karena langkah-langkah seperti audiensi, rapat, pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait, ternyata tidak membuahkan hasil dan pembangunan terus berlanjut, maka warga berisnisiatif untuk melakukan aksi kembali di areal TPST. Kemarahan warga semakin diperparah dengan rencana peresmian yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 22 November 2004.

Pada malam sebelumnya yaitu pada tanggal 21 November 2004, warga telah melakukan penebangan pohon di sepanjang jalan mulai dari Cipeucang, untuk memblokir akses masuk ke areal TPST. Upaya demi upaya dilakukan untuk menghentikan peresmian TPST. Suasana pada Bojong saat itu sangat tegang. Pada malam itu juga, sudah bersiap pasukan polisi, kurang lebih 25 sampai 30 orang, untuk mengamankan lokasi TPST. Pasukan polisi tersebut dipersenjatai dengan senapan laras panjang dan pakaian lengkap (tameng, pentungan, rompi anti peluru dll) untuk menghalau massa.

Pada bentrokan besar yang terjadi tanggal 22 November 2004 Ustadz Mizar menjadi komandan lapangan aksi. Ustadz Mizar berada di belakang massa untuk memberikan komando mengenai apa yang harus dilakukan oleh massa. Kemudian dia berorasi untuk membangkitkan semangat massa yang sudah terkumpul kurang lebih 3000 orang. Peristiwa bentrok terjadi begitu sangat cepat. Pada awalnya massa berkumpul dan memblokade jalan masuk ke areal TPST mulai dari akses masuk di Cipeucang dan membakar ban-ban bekas disepanjang jalan tersebut. Massa merangsur-angsur berjalan menuju ke sekitar areal TPST dan mencoba menghadang peresmian TPST yang memang direncanakan akan dilakukan pada hari itu.

Massa mencoba untuk merangsek ke dalam areal TPST tetapi dihadang oleh

4 Lihat kronologis kasus TPST Bojong dalam Kasus Posisi yang disusun oleh Kontras (tidak dipublikasikan).

pasukan pengamanan dari kepolisian yang memang sudah bersiap dari malam sebelumnya. Dalam usaha melakukan penghadangan massa, polisi (*buser*) mengeluarkan tembakan bertubi-tubi. Beberapa saat kemudian polisi tidak saja mengarahkan tembakan ke udara akan tetapi menembakkan gas air mata diarahkan kepada kerumunan massa. Massa kemudian kocar-kacir dan lari tunggang langgang karena tidak menduga polisi akan melakukan tindakan tersebut. Massa kemudian melakukan perlawanan dengan melemparkan batu dan ketapel ke arah polisi. Menghadapi perlawanan massa pasukan pengamanan akhirnya mundur kembali masuk ke lokasi TPST dan menunggu pasukan bantuan.

Setelah memaksa polisi untuk mundur, kemudian sekumpulan orang mulai masuk ke lokasi TPST dan melakukan perusakan dan pembakaran. Yang menjadi sasaran pengrusakan diantaranya adalah loket kendaraan masuk, pos keamanan, 1 buah traktor, 3 buah mobil perusahaan, 1 buah mobil Polisi dan kantor karyawan.[5] Tindakan pengrusakan dan pembakaran tersebut adalah spontan karena diprovokasi oleh tindakan polisi yang menembakkan gas air mata. Ustadz Mizar sebagai komandan lapangan tidak bisa mencegah tindakan tersebut karena massa kocar-kacir dan suasana sudah tidak terkontrol lagi. Walaupun dalam keadaan sakit dan tangannya masih digendong (pada saat itu ustadz baru mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tangan kanannya patah dan harus menjalani operasi), dia berusaha untuk menarik massa untuk mundur dan menahan massa untuk tidak melakukan tindakan pengrusakan dan pembakaran. Tetapi karena keadaan sudah tidak terkendali, maka massa terus merangsek ke dalam areal TPST.

Setelah terjadi pembakaran areal TPST polisi kemudian menyerang massa dengan mengunakan gas air mata dan melakukan penembakan dengan menggunakan peluru tajam ke arah kerumunan massa. Tercatat paling tidak 7 orang warga terluka tembak peluru tajam.[6] Massa semakin marah dengan tindakan polisi, dan mereka membalas dengan melempar batu, kayu dan barang-barang disekitar yang bisa ditemukan. Beruntung bagi Ustadz Mizar tidak terluka sedikitpun dalam peristiwa bentrok tersebut. Dengan kondisi yang sakit, dia masih bisa memberikan komando kepada massa agar mundur untuk menghindari jatuh korban yang lebih banyak. Dia berhasil meloloskan diri dan mengamankan diri bersama warga yang lain.

Pasca peristiwa 22 November 2004, suasana mencekam terus melanda sampai dengan Agustus 2005. Aksi premanisme dengan senjata tajam, raungan motor

5 Diambil dari kronologis kasus TPST Bojong dalam Kasus Posisi yang disusun oleh Walhi Jakarta.

6 Diambil dari kronologis kasus TPST Bojong dalam Kasus Posisi yang disusun oleh Walhi Jakarta.

serta ancaman kekerasan terus meneror warga Bojong dan sekitarnya, terjadi pembakaran empat rumah warga yang selama ini gigih menolak keberadaan TPST, perusakan rumah, penurunan spanduk, serta ancaman dan teror terhadap warga Bojong dan sekitarnya, serta ancaman terhadap para buruh asal Bojong, dan Ciuncal yang bekerja di daerah Babakan dan Klapanunggal. Di lain tempat, penyiksaan para tahanan di penjara Paledang dan kematian 2 warga (Ejan dan Adang) Bojong pasca keluar dari tahanan Paledang. Lebih dari itu empat orang PNS (Guru) juga mendapatkan ancaman berupa mutasi dari dinas P&K setempat. Aksi Premanisme yang diciptakan melahirkan konflik antara masyarakat Bojong dan sekitarnya dengan massa preman yang dikendalikan oleh PT WGS, seakan yang ingin diperlihatkan adalah konflik horizontal, aksi premanisme seakan ingin berkilah menghapus segala kepentingan PT WGS, Pemkab Bogor, dan PEMDA DKI.[7]

Dengan kondisi keamanan yang tidak kondusif, banyaknya tindakan-tindakan represif dan sweeping dari aparat serta intimidasi dan aksi premanisme yang kerap terjadi, membuat warga Bojong tidak leluasa menjalankan kegiatan sehari-hari. Banyak keluarga diantara mereka ditinggal oleh suami-suaminya karena sedang dicari oleh polisi. Selain itu, banyak pula yang terlantar karena tulang punggung keluarga yang menghidupi sedang ditahan oleh polisi.Keadaan tersebut juga dialami oleh keluarga Ustadz Mizar. Kehidupan Ustadz Mizar setelah bentrokan selalu diselimuti intimidasi. Sweeping oleh polisi memaksa Ustadz Mizar untuk mengamankan dirinya untuk beberapa saat agar tidak ditahan. Selain itu, preman-preman yang disewa oleh perusahaan sering muncul dan mengancam masyarakat sekitar, termasuk Ustadz Mizar sendiri.

Setelah terjadi bentrokan besar, rumah Ustadz Mizar pernah 1 kali dicoba untuk dibakar oleh orang-orang tidak dikenal. Usaha tersebut hanya berhasil membakar dapur belakang rumah, karena diketahui olehnya. Intimidasi yang dilakukan oleh preman-preman dengan membakar rumah, ditanggapi dengan biasa saja. Menurut dia, hal ini merupakan resiko dalam perjuangan.

Tempat pengajian yang dibangun oleh Ustadz Mizar praktis terhenti karena dia tidak punya waktu untuk mengurusinya. Selain itu, anak-anak pengajian juga merasa terancam keselamatannya. Tempat pengajian yang dibangun mulai tahun 2000 dan telah mempunyai lebih dari 20 anak didik menjadi tidak berjalan lagi. Ustadz Mizar sendiri disibukkan dengan kegiatan-kegiatan advokasi yang dbebankan kepadanya sebagai seorang koordinator organisasi. Beberapa kali dia harus bolak-balik ke Jakarta untuk mengkoordinasikan langkah-langkah advokasi dengan organisasi pendamping. Dia juga sering mengikuti pertemuan, rapat serta audensi dengan lembaga pemerintah terkait yang berada baik di Jakarta, Bogor maupun Bandung. Dengan aktivitas advokasi

7 Disunting dari kronik Kontras.

yang sangat menyita waktunya, dia harus membagi waktu antara kepentingan advokasi dan keluarga. Dalam keadaan inilah dia ditantang untuk mengatur waktu sedemikian rupa agar kedua kewajibannya dapat terpenuhi. Beruntung bahwa keluarganya memaklumi kesibukan dia. Karena peran Ustadz Mizar yang penting dalam advokasi, istri dan anak-anaknya memberikan dukungan terhadap tugas-tugasnya sebagai koordinator.

Kesulitan secara finansial memang dia hadapi, karena pekerjaan yang dilakukannya praktis terhenti dan pemasukan keuangan tidak ada. Namun karena dukungan dan pertolongan dari tetangga sekitar, keluarga Ustadz Mizar masih dapat bertahan. Mereka satu sama lain membantu warga yang kesulitan. Subsidi silang dari warga yang mampu kepada warga yang tidak mampu berjalan layaknya sistem yang sudah terprogram lama. Budaya tolong menolong menjadi penyelamat warga Bojong dalam menghadapi badai krisis ekonomi pasca bentrok 22 November 2004.

Dalam menghadapi intimidasi dan aksi premanisme, warga kemudian melibatkan aparat kepolisian serta Komnas HAM. Namun sangat disayangkan bahwa laporan kepada kepolisian (Polres Bogor) tidak direspon dengan cepat. Beberapa kasus malah dianggap tidak penting dan terbengkalai tanpa ada kejelasan tindak lanjutnya. Warga harus memaksa polisi untuk melakukan pengamanan terhadap tindakan premanisme dan intimidasi, dengan melakukan aksi ke Mabes Polri. Warga menginap selama 2 malam di Mabes Polri dan mendesak kepolisian untuk menurunkan pasukan pengamanan, serta mendesak kepolisian agar bertindak lebih netral dalam kasus Bojong. Aksi tersebut membuahkan hasil. Beberapa hari setelah aksi, pasukan pengamanan dari kepolisian turun langsung ke Bojong dan mengamankan daerah tersebut.

Komnas HAM dilibatkan dalam konteks pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian pada saat bentrok terjadi dan setelah bentrok. Menurut Ustadz Mizar, terjadi pemukulan serta penembakan pada saat terjadi bentrok terakhir yang memakan korban. Begitu juga setelah bentrok terjadi, polisi melakukan *sweeping* sampai ke rumah-rumah warga, pelakukan penangkapan secara sewenang-wenang, melakukan penahanan tanpa alasan yang kuat, terjadi penganiayaan bahkan pelecehan seksual. Kejadian-kejadian tersebut dilaporkan ke Komnas HAM untuk meminta perlindungan serta mendesak institusi kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Warga juga melibatkan ormas-ormas yang menjadi jaringan, seperti Muhammadiyah, KAHMI, NU, Ponpes At Taibin, FPI dan Ormas lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengatasi premanisme dan intimidasi yang terjadi. Ustadz Mizar berpikir bahwa semakin banyak pihak yang dilibatkan dan mendukung warga, maka akan semakin kuat posisi warga dalam menghadapi para preman.

IV. Berorganisasi Dan Berjejaring

Penolakan masyarakat sudah di mulai sejak 2003, ketika mereka mengetahui bahwa penandatanganan perjanjian yang mereka lakukan bukan diperuntukan pembangunan pabrik keramik melainkan untuk TPST, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor tanggal 1 maret 2001 Nomor 591/31/KPTS/Huk/2001 mengenai izin lokasi pembangunan TPST di Bojong. Selain kebohongan publik berupa rekayasa penandatangan yang diciptakan Pemda Bogor, keberadaan TPST diyakini warga akan merusak lingkungan seputar perkampungan Bojong Klapanunggal, lebih dari itu; Pihak Pemda, kabupaten Bogor, PT Wira Guna Sejahtera, dan PEMDA DKI Jakarta telah menyalahi ketentuan hukum yaitu; UU No 42/192 tentang tata ruang, UU No. 23/1997 tentang pengolahan lingkungan hidup, PP No. 27/1999 Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, serta Perda No.17/2000 rencana tata ruang daerah[8].

Sekitar awal tahun 2003, beberapa tokoh masyarakat yang tergabung dalam FKMPL bersama warga mendatangi kawan-kawan LSM di Jakarta. Beberapa diantaranya adalah Walhi, Kontras, LBH Jakarta dll. Mereka mengetahui informasi tentang lembaga-lembaga tersebut dari pemberitaan di media massa. Tujuan mereka datang adalah mereka merasa terdesak karena demo-demo yang dilakukan oleh warga selalu dikriminalisasi dan tidak mendapat tanggapan dari pemerintah.

Dalam perjalanannya, lembaga pendamping yang intens melakukan pengorganisasian di Bojong adalah Walhi (Jakarta dan Eksekutif Nasional) dan Lembaga Studi Advokasi untuk Demokrasi Indonesia. Mereka melakukan pendidikan serta pengorganisasian warga Bojong. Pendidikan-pendidikan, diskusi-diskusi baik secara formal maupun informal, serta rapat-rapat untuk membuat desain advokasi selalu dilakukan secara rutin. Pelibatan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam setiap agenda yang dilakukan lembaga pendamping.

Sejak awal lembaga pendamping selalu menekankan bahwa keterlibatan lembaga pendamping adalah sebagai pendukung. Yang melaksanakan advokasi adalah masyarakat sendiri. Keberhasilan dan kegagalan dari advokasi penolakan pembangunan TPS Bojong adalah bergantung dari kekuatan warga dan organisasi rakyat yang melaksanakannya. Beberapa lembaga yang terlibat dalam proses advokasi penolakan pembangunan TPST Bojong antara lain adalah Walhi Jakarta, Walhi Eknas, Kontras, LS-Adi, LBH Jakarta, beberapa

8 Lihat kronologis kasus TPST Bojong dalam Kasus Posisi yang disusun oleh Kontras dan kasus TPST Bojong dalam Kasus Posisi yang disusun oleh Walhi Jakarta (tidak dipublikasikan).

organisasi mahasiswa (intra dan ekstra kampus), dan beberapa organisasi internasional.

Lembaga pendamping selalu mencoba memfasilitasi agenda-agenda advokasi yang dilakukan oleh warga Bojong, beberapa diantaranya adalah kampanye di media cetak dan elektronik, mempertemukan dengan pihak-pihak terkait, memberikan pelatihan untuk meningkatkan *skill* advokasi dan pengorganisasian serta membantu merencanakan strategi dan taktik advokasi, merencanakan aksi-aksi. Namun ada kalanya terjadi perbedaan persepsi dalam menyusun langkah-langkah advokasi. Seperti diantaranya adalah, Ustadz Mizar sebagai koordinator serta warga lain menyusun rencana untuk mempergunakan cara-cara kekerasan, seperti menggunakan preman untuk melawan intimidasi preman yang disewa perusahaan. Hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan lembaga pendamping. Tindakan tersebut tentu tidak disetujui oleh lembaga pendamping. Menurut lembaga pendamping, tindakan tersebut menjadi sebuah kegagalan lembaga pendamping dalam melakukan pendidikan HAM. Kemudian, warga Bojong juga masih kental dengan budaya patronase, yang mengkultuskan orang tertentu, baik terhadap Ustadz Mizar sebaga ikon gerakan maupun terhadap beberapa individu dalam sebuah lembaga pendamping. Sehingga apabila orang-orang tersebut tidak ada, orang yang menjadi pengganti tidak didengar pendapatnya. Gerakan pun menjadi mandek.

Keterlibatan lembaga pendamping adalah untuk membantu pelaksanaan advokasi penolakan pembangunan TPST-Bojong dan mengembalikan kehidupan warga Bojong seperti semula. Trauma yang diderita warga Bojong terutama perempuan dan anak-anak sangat memprihatinkan. *Sweeping* dan penangkapan terhadap laki-laki Bojong membuat desa tersebut menjadi desa yang dihuni oleh perempuan dan anak-anak. Laki-laki yang selamat dari sweeping terpaksa meninggalkan Bojong untuk menghindari penangkapan oleh polisi. Kehidupan mereka menjadi kekurangan pascapenangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh polisi paska terjadi bentrok besar tanggal 22 November 2004.

V. Kemenangan Warga Bojong

Ustadz Mizar sebagai koordinator FKMPL sekaligus diposisikan sebagai ikon bagi gerakan warga Bojong telah menelan manis dan pahit dalam perjuangan penolakan pembangunan TPST Bojong. Langkah-langkah advokasi selalu dia laksanakan dengan pendampingan dari lembaga pendamping.

Untuk menyuarakan penolakan, dia mengikuti rapat maupun audiensi dengan instansi terkait dengan TPST. Beberapa kali dia diundang untuk melakukan

pertemuan dengan Bupati Bogor untuk membicarakan TPST. Dalam pertemuan tersebut, beberapa kali juga datang para pejabat daerah Bogor, seperti Kapolres Bojong, Camat Klapa Nunggal, Kapolsek Klapa Nunggal, dan pejabat lainnya. Namun karena tidak membuahkan hasil, strategi advokasi kemudian diubah. Instansi yang didatangi dalam rangka advokasi penolakan pembangunan TPST Bojong bukan hanya dilingkaran Pemda Bogor, tetapi juga instansi-instansi Provinsi, baik Jawa Barat maupun DKI, DPRD Jawa Barat, DPR-RI, sampai dengan Mabes Polri. Pertemuan di tingkat provinsi antara lain adalah Ustadz Mizar diundang untuk mendengarkan presentasi dari para pakar lingkungan dari ITB beserta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Namun langkah-langkah tersebut belum juga memperlihatkan hasil yang maksimal. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan hanya bersifat formal dan tidak memberikan hasil yang positif dalam pencapaian tujuan advokasi.

Ustadz juga pernah diundang musyawarah mediasi untuk mempertemukan kepentingan antara warga Bojong dan pihak perusahaan. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Anton Medan sebagai salah satu tokoh yang dianggap netral bagi kedua belah pihak. Musyawarah tersebut juga tidak menemukan kata sepakat di antara kedua belah pihak. Hasil dari musyawarah tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Walaupun tidak memberikan dampak secara langsung, langkah-langkah yang diambil ternyata membuat media terus memantau perkembangan advokasi. Masyarakat setiap hari disuguhi berita tentang perkembangan terkini seputar keadaan warga Bojong dan proses advokasi penolakan pembangunan TPST Bojong. Tekanan politik semakin menguat. DPR RI kemudian menurunkan tim untuk menyelidiki tentang pembangunan TPST Bojong, dan mengeluarkan hasil analisa yang bernada positif mendukung perjuangan warga Bojong dan merekomendasikan penutupan TPST Bojong karena menyalahi aturan dan dapat menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat serta lingkungan. Opini kemudian terbentuk dan memberikan pengaruh kepada masyarakat luas. Rekomendasi DPR RI menjadi senjata yang ampuh untuk menekan pemerintah (pusat dan daerah) untuk merespon permintaan masyarakat luas.

Tahap demi tahap dilalui dalam proses advokasi penolakan pembangunan TPST Bojong. Warga yang bertahan menjadi semakin kuat perlawanannya setelah diuji dengan bentrok yang terjadi berulang kali. Setelah melalui berbagai tahap advokasi, serta menjalankan berbagai macam taktik dan strategi perlawanan, perjuangan warga Bojong berbuah keberhasilan. Tuntutan maksimal dari perjuangan warga Bojong tercapai. Perjuangan warga Bojong yang dilakukan kurang lebih selama 5 tahun mencapai hasil yang gemilang. Penutupan TPST Bojong menambah direktori kemenangan perjuangan rakyat melawan penindasan, ketidakadilan dan pelanggaran HAM oleh Negara. TPST Bo-

jong kemudian ditutup secara resmi pada tanggal 12 Oktober 2006.

VI. Potret Perjalanan Advokasi Warga Bojong Bersama Ustadz Mizar

Awal keterlibatan lembaga pendamping, yaitu Walhi Jakarta adalah pada saat setelah terjadi bentrok pertama. Beberapa warga ditangkap karena dituduh melakukan provokasi, dan sebagian warga menjadi sasaran target operasi polisi. Pada saat itu warga sempat trauma dan menguat keinginan untuk menghentikan perlawanan terhadap pembangunan TPST Bojong. Warga kesal akibat tidak didengarnya penolakan terhadap TPST yang terus disuarakan. Warga juga selalu dipojokkan dan dianggap sebagai pihak yang salah apabila melakukan aksi penolakan.

Melihat hal itu, beberapa warga yang menjadi pengurus di FKMPL (Pak Yos dan Pak Ipang) berinisiatif untuk menghubungi lembaga-lembaga yang dinilai bisa membantu proses advokasi. Lembaga yang didatangi pertama kali adalah Walhi Jakarta. Respon positif dari Walhi Jakarta membuat warga mendapat angin segar. Segera mereka mengkonsolidasikan diri kembali. Walhi Jakarta datang ke lokasi dan langsung melakukan investigasi lapangan untuk menyusun rencana advokasi. Setelah memperoleh data-data dan melakukan analisis sosial, ditarik kesimpulan hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pengorganisiran dan penguatan struktur organisasi rakyat[9]. Pelibatan ibu-ibu dan anak-anak dalam Organisasi rakyat dan menjadi bagian dalam gerakan merupakan strategi untuk memperkuat organisasi.

Walhi Jakarta beserta warga kemudian membuat pelatihan-pelatihan dengan materi yang ditujukan untuk menunjang advokasi. Pelibatan warga diperluas.[10] Organisasi rakyat lambat laun berubah menjadi organisasi yang kuat dengan keanggotaan yang *massif*, yang terdiri dari warga Bojong yang peduli terhadap ancaman kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan TPST Bojong. Setelah konsolidasi berlanjut warga Bojong merasa harus ada tindakan kongkret. Kemudian aksi damai dilakukan untuk menyuarakan kembali penolakan warga atas pembangunan TPST Bojong. Pada tanggal 23 Desember 2003 kurang lebih 700 warga Bojong dan sekitarnya turun ke jalan, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak turut berpartisipasi dalam aksi damai. Warga menduduki jalan yang menghubungkan jalan proyek dengan lokasi proyek. Namun aksi damai berubah menjadi bentrokan. 4 orang warga yang

9 Petikan wawancara dengan Alin, pendamping dari Walhi Eksekutif Nasional.

10 Menurut pengakuan dari Ustadz Mizar, beberapa warga Bojong, serta Pendamping dari Walhi Eksekutif nasional, dahulu FKMPL yang bersifat elitis karena hanya diisi oleh warga Bojong dari kelas menengah ke atas, sekarang melibatkan warga secara terbuka.

ditangkap yaitu: (Ustadz) Mizar, Rohim, Andi dan Nasim. Mereka diangkut ke Polres Bogor dengan tuduhan menghambat pembangunan.

Pascapenangkapan, kondisi desa mencekam dan warga semakin panik karena apa yang mereka lakukan selama ini tidak berarti apa-apa. Para tokoh masyarakat diwanti-wanti dan dilarang untuk bertemu dan berdiskusi dengan warga, mereka didatangi kerumah-rumah oleh intel Polres Bogor.

Sebagai salah satu korban dari penangkapan secara sewenang-wenang, Ustadz Mizar kemudian merasa mempunyai keinginan untuk terlibat lebih jauh dalam gerakan tersebut. Dia kemudian semakin giat terlibat dalam berbagai kegiatan yang diadakan. Berbagai rapat dan pelatihan selalu dia ikuti. Ustadz Mizar kemudian ditunjuk sebagai koordinator sekaligus sebagai ikon gerakan warga Bojong, karena pada saat itu para pengurus FKMPL mengamankan diri agar tidak ditangkap oleh polisi. Dalam perjalanan advokasi, karena menghadapi situasi yang semakin kompleks, kemudian dibentuklah TAWB (Tim Advokasi Warga Bojong) yang diantaranya terdiri dari WALHI Jakarta, WALHI Nasional, PBHI, LBH Jakarta, ICEL, Pan-Indonesia, KPS, KontraS, Elsam, TAPAL, LS-ADI dll. TAWB bertugas untuk melakukan kampanye di media cetak dan elektronik, mempertemukan dengan pihak-pihak terkait, memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill advokasi dan pengorganisasian, mendampingi dalam proses litigasi, membantu merencanakan strategi dan taktik advokasi, serta merencanakan aksi-aksi.

Peningkatan kapasitas, memperkuat struktur organisasi rakyat serta membangkitkan kesadaran masyarakat akan HAM menjadi agenda utama yang disusun oleh FKMPL bersama dengan TAWB. Pelibatan dan perluasan dukungan masyarakat juga menjadi target dalam setiap kampanye. Perluasan tersebut termasuk juga melibatkan para korban pelanggaran HAM di kasus-kasus yang lain. Hal ini intensif difasilitasi oleh organisasi pendamping

Organisasi pendamping mempunyai peran besar dalam memfasilitasi pertemuan dengan korban-korban pelanggaran HAM di daerah lain. Contoh seperti korban kasus Talang sari, Tanjung Priok, Munir, Penculikan, dll. Sempat beberapa kali Ustadz Mizar dipertemukan dalam sebuah forum yang tujuannya adalah *sharing* pengalaman dalam melakukan advokasi di tempat masing-masing. Hasilnya adalah warga Bojong menjadi terinspirasi dengan pengalaman dari kawan-kawan di daerah lain yang sekian lama berjuang untuk mendapatkan keadilan dan memperjuangkan HAM. Ustadz Mizar mengemukakan pengalaman warga Bojong dalam menolak pembangunan TPST kepada para korban pelanggaran HAM lainnya. Kemudian Ustadz Mizar juga meminta kepada para korban pelanggaran HAM lainnya untuk memberikan dukungan solidaritas kepada warga Bojong.

Paska berhasil menutup TPST, Ustadz Mizar beserta warga Bojong terlibat juga dalam berbagai advokasi penuntasan kasus pelanggaran HAM di tempat lain. Namun Ustadz Mizar cenderung bersifat pasif dalam menjalin komunikasi. Apabila dibutuhkan dan diundang dalam berbagai agenda, Ustadz Mizar akan memenuhi undangan dari korban pelanggaran HAM lainnya. Beberapa kali Ustadz Mizar dan warga Bojong mengikuti aksi damai yang dilakukan sebagai bentuk dukungan dan solidaritas sesama korban pelanggaran HAM.

Menurut pengakuan Ustadz Mizar, pelanggaran HAM yang terjadi di tempat lain harus dibantu. Namun karena keterbatasan warga Bojong, dukungan yang diberikan hanya sebatas kemampuan warga Bojong. Keterlibatan Ustadz Mizar dalam kasus lain adalah mengikuti aksi solidaritas. Diantaranya adalah aksi solidaritas untuk kasus Munir, kasus penolakan tambang pasir di Desa Mampir, kasus pengungkapan orang hilang, perjuangan kaum buruh, perjuangan Serikat Petani Pasundan terhadap pencaplokan lahan pertanian, solidaritas aksi hari HAM, hari Bumi, hari Buruh, hari Tani dan lain-lain. Peran pendukung yang dilakukan oleh HRD, menurutnya sudah maksimal. Karena beberapa keterlibatannya dalam kasus lain terkendala masalah dana dan waktu.

Beberapa kasus yang advokasinya diikuti secara intens adalah kasus Munir dan kasus penolakan tambang pasir di Desa Mampir. Beberapa kali Ustadz Mizar "mengerahkan" warga Bojong untuk mengikuti persidangan kasus Munir. Hal ini kemudian difasilitasi oleh KontraS dan KASUM. Menurut Ustadz Mizar, Munir merupakan sosok pejuang HAM yang telah mendapatkan ketidakadilan oleh negara, oleh karena itu, dia merasa terpanggil untuk mengikuti kasus tersebut dan menuntaskannya sampai akhir.

Dalam kasus penolakan tambang pasir di desa Mampir[11], TAWB memang mendesain agar FKMPL diposisikan sebagai lembaga pendamping. Pengalaman dan pengetahuan yang didapat dalam proses advokasi penolakan pembangunan TPST Bojong merupakan modal awal untuk melakukan pendampingan terhadap warga Mampir. Sempat diadakan pertemuan secara rutin antara warga Mampir dengan FKMPL untuk membicarakan proses advokasi peno-

11 Kasus Mampir adalah merupakan penolakan terhadap penambangan pasir di Desa Mampir. Karena menimbulkan kerusakan lingkungan serta polusi udara, warga Mampir kemudian merasa terganggu dengan keberadaan penambangan tersebut. Dalam perjalanannya, Ustadz Mizar bersama FKMPL mendampingi proses advokasi penolakan tambang pasir desa Mampir. Namun akhirnya proses pendampingan warga Mampir oleh FKMPL tidak dilanjutkan karena terjadi peristiwa perkelahian antara preman bayaran perusahaan tambang dengan beberapa warga Bojong, diantaranya adalah adik Ustadz. Perkelahian tersebut mengakibatkan kematian. Adik Ustadz Mizar menjadi salah satu pelakunya bersama dengan beberapa warga Bojong lainnya, dan divonis bersalah oleh pengadilan.

lakan tambang pasir. Kesadaran warga Bojong yang terbangun, lambat laun ditransfer kepada warga Mampir. Namun proses tersebut terputus ditengah jalan.

Secara umum Ustadz Mizar merupakan sosok yang mengetahui kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tempat lain, tetapi hal ini lebih dikarenakan peran lembaga pendamping yang selalu berusaha melibatkannya dalam advokasi di tempat lain. Pemahaman Ustadz Mizar belum sepenuhnya terbangun, masih bersifat etis, hanya membalas jasa organisasi pendamping yang membantu perjuangan warga Bojong. Beberapa aksi yang dilakukan oleh warga Bojong bukan karena kesadaran akan pelanggaran HAM yang terjadi, namun masih didasari faktor "*perasaan tidak enak*" dengan lembaga pendamping yang mengajak.

VII. Negara sebagai Pelindung Rakyat?

Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. Itu adalah landasan berpikir yang digunakan untuk menuntut negara melakukan pengamanan masyarakat. Namun hal tersebut terkadang tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Kewajiban negara, dalam hal ini aparat kepolisian, sebagai alat pengamanan masyarakat tidak berfungsi dengan maksimal.

Dalam konteks kekerasan serta intimidasi yang terjadi di Bojong, masyarakat menggunakan prosedur legal untuk menghadapinya. Kepolisian menjadi alat utama untuk memberikan pengamanan di Bojong.

Beberapa kali tercatat, baik sebelum maupun setelah peristiwa bentrokan, masyarakat Bojong mengalami aksi kekerasan serta intimidasi oleh preman-preman yang dibayar oleh pihak perusahaan. Peristiwa pembakaran rumah yang dialami oleh Ustadz Mizar menjadi salah satu contoh kekerasan yang mendera masyarakat Bojong. Pemukulan, pengeroyokan serta pengrusakan rumah juga dialami oleh warga Bojong lainnya. Ironisnya, pelaku kekerasan di Bojong bukan hanya dilakukan oleh preman-preman bayaran yang disewa oleh pihak perusahaan saja. Polisi juga terlibat dalam aksi kekerasan terhadap warga Bojong.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh tim pendamping dan warga apabila ada intimidasi dan kekerasan adalah membentuk posko pengaduan. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat melaporkan dan menampung informasi. Ada 3 posko yang tersebar sepanjang jalan dari Cipeucang sampai perbatasan desa Bojong. Kemudian setelah informasi masuk ke posko, warga melaporkan ke polisi. Namun tanggapan yang diberikan oleh kepolisian sangatlah jauh dari

harapan. Beberapa kali laporan warga tentang tindak kekerasan dan permohonan pengamanan justru ditolak oleh Polsek Klapa Nunggal. Pihak Polsek Klapa Nunggal berdalih bahwa segala hal yang berkaitan dengan kasus Bojong telah menjadi kewenangan Polres Bogor.

Warga Bojong lagi-lagi dikecewakan dengan respon kepolisian. Polres Bogor sangat lambat menanggapi laporan warga Bojong. Bahkan warga harus menggelar aksi dan menginap selama 2 hari di Mabes Polri untuk menekan kepolisian agar menurunkan pasukan pengamanannya ke Bojong. Aksi tersebut dikarenakan Polsek dan Polres tidak bergerak dan merespon laporan tindak kekerasan terhadap warga Bojong, serta terkesan membiarkan kekerasan tersebut terjadi. Selain aparat kepolisian, warga melibatkan Komnas HAM untuk memantau perkembangan situasi di Bojong. Harapan warga terhadap Komnas HAM adalah mendesak pemerintah untuk memberikan pengamanan serta mengusut tuntas kekerasan yang terjadi di Bojong, baik yang dilakukan oleh sipil maupun aparat kepolisian. Jadi, pilihan utama apabila terjadi kekerasan terhadap warga adalah mengedepankan proses hukum.

Selain itu, warga juga melibatkan jaringannya masing-masing. Ada beberapa warga yang aktif menjadi salah satu anggota lembaga tertentu, mereka lalu menggunakan lembaga tersebut untuk membantu apabila ada intimidasi dan kekerasan di Bojong. Pernah juga ada massa dari FUI dan FPI yang turun membantu warga Bojong dalam mengatasi premanisme dan intimidasi, tapi itu tidak signifikan membantu.

Menduduki Pabrik Sebagai Bukti Buruh Bisa Berdaulat

Kiswoyo
Aktivis Buruh di PT Istana Magnoliatama

I. Pengalaman Masa Muda

Lahir di Sragen pada 37 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 20 Maret 1972, Kiswoyo merupakan anak kelima dari delapan bersaudara. Di antara lima laki-laki dan tiga perempuan, Kiswoyo berada dalam keluarga besar, di mana orang tuanya harus berusaha keras untuk menghidupi seluruh anak-anaknya.

Hidup di lingkungan masyarakat Jawa, keluarga Kiswoyo masih memegang nilai-nilai dan budaya Jawa. Apalagi kakek Kiswoyo adalah merupakan salah seorang Pamong Desa yang menjabat sebagai *kebayan*, yang memegang adat istiadat Jawa secara ketat. Ayah Kiswoyo adalah anak tunggal tanpa saudara kandung, sehingga sangat dimanja. Seluruh peninggalan dari kakek Kiswoyo, menjadi hak dari ayah Kiswoyo, sehingga kehidupan keluarga Kiswoyo dapat dibilang berkecukupan.

Walaupun anak tunggal dan berasal dari keluarga yang berkecukupan, ayah Kiswoyo hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat Sekolah Rakyat SR (setingkat dengan Sekolah Dasar). Berbeda halnya dengan ibu Kiswoyo, yang walaupun sama-sama berasal dari keluarga yang berkecukupan, sang ibu bisa bersekolah sampai dengan Sekolah Calon Keperawatan.

Meskipun berpendidikan lebih tinggi dari sang suami, ibu Kiswoyo memiliih untuk menjadi ibu rumah tangga yang mengurus keluarga dan tidak bekerja. Hal ini dikarenakan adat Jawa yang sangat kental di lingkungan keluarga tersebut, di mana perempuan lebih baik tidak bekerja dan dirasa lebih baik mengurus keluarga di rumah. Konstruksi budaya yang masih bersifat *patriarkhi*, disadari atau tidak dalam suatu kondisi tertentu, perempuan dipandang sebagai warga negara "kelas dua". Dalam masyarakat Jawa, perempuan seringkali digambarkan sebagai "*konco wingking*" (teman belakang). Artinya perempuan hanya ikut laki-laki (suami) sehingga tidak memiliki otoritas yang otonom.[1]

Dibesarkan dalam keluarga yang cukup berada dan berkecukupan, keluarga besar Kiswoyo dipandang baik di mata masyarakat. Kiswoyo sendiri memiliki sikap yang tidak pilih-pilih dalam bergaul dan hal ini berasal dari orang tuanya. Tentu saja, karena sikap itu, membuat Kiswoyo dan keluarganya dikenal dekat dengan para tetangganya. Menurut Kiswoyo, yang membanggakan dari orang tuanya adalah beliau senang menolong. Sebagai contoh, sering ada orang yang akan punya hajatan dan membutuhkan pisang. Kebetulan cukup banyak pisang yang ditanam di kebun. Orang yang akan punya hajatan tersebut kemudian berniat untuk membeli pisang, namun oleh orang tua Kiswoyo pisang itu diberikan begitu saja. Beliau adalah tipe orang yang tidak pelit de-

1 Kesetaraan Gender dalam Perspektif Agama dan Budaya", www.sinarharapan.co.id diakses pada 3 Januari 2009.

ngan barang yang dimilikinya. Bahkan suatu ketika pernah ada mangga yang dicuri oleh orang, beliau hanya mengikhlaskan saja. Dibesarkan bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Kiswoyo tumbuh menjadi anak yang punya cita-cita untuk bisa mandiri. Di dalam keluarganya selalu ditekankan bahwa ukuran kedewasaan seorang laki-laki adalah kemampuannya untuk mandiri, dan tidak menjadi beban orang lain. Oleh karena itu, dia memilih untuk bersekolah hanya sampai SMP dan terus bekerja untuk membantu orang tua serta adik-adiknya untuk bersekolah. Keputusan tersebut diambil bukan karena paksaan orang tua maupun terdesak kondisi, tetapi karena keyakinan yang tertanam dalam hati Kiswoyo. Keyakinan bahwa dia (laki-laki) harus mandiri setelah selesai bersekolah. Segala kebutuhan harus dicukupi sendiri, tanpa harus merepotkan orang tua maupun orang lain. Bahkan menurut kisahnya, Kiswoyo bisa mencukupi kebutuhan untuk bersekolah bagi adik-adiknya.

Orang tua Kiswoyo selalu mengajarkan kepada-anaknya agar menjadi orang yang berguna di lingkungan sekitar. Mereka memiliki konsep "Lebih baik memberi daripada menerima dari orang lain". Nilai-nilai seperti ini yang tertanam dan selalu diamalkan oleh Kiswoyo dalam menjalani kehidupannya.

Keputusan besar yang diambilnya adalah pergi ke Jakarta untuk bekerja. Keputusan tersebut diambil pada saat dia berumur 20 tahun. Dengan berbekal semangat dan keyakinan yang bulat serta ijasah SMP, dia menanggapi ajakan temannya untuk bekerja di pabrik plastik di Tegal Alur, Jakarta. Karena tidak betah, Kiswoyo akhirnya hanya bertahan di pabrik plastik kurang lebih selama 6 bulan. Selanjutnya dia ikut kakaknya bekerja di home industri pabrik garmen. Dan kemudian dia berpindah dari satu pabrik ke pabrik lain. Karena sudah menguasai kemampuan di bidang garmen, maka dia memilih untuk terus bekerja di bidang garmen. Sampai akhirnya dia masuk ke PT. Istana Magnoliatama pada tahun 1995. Kiswoyo bertahan di PT. Istana Magnoliatama sampai sekarang, bahkan menduduki pabrik garmen, dengan alasan mereka (baca: Kiswoyo dan buruh lainnya) menolak PHK secara sepihak yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.

Sebelum peristiwa PHK Sepihak oleh pengusaha, Kiswoyo bersama dengan beberapa buruh lainnya menginisiasi pembentukan Serikat Buruh Karya Utama (SKBU). SKBU memang dibentuk karena pada saat itu ada buruh yang akan di PHK secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas, tetapi tidak dilindungi oleh serikat yang sudah ada.

Walaupun sudah ada serikat yang berdiri, yaitu Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), para buruh selalu dikecewakan oleh kinerja dari SPTP yang selalu memihak perusahaan apabila ada kasus yang antara buruh dan pengusaha. Selain itu, SPTP pengurusnya berasal dari buruh di bagian manajemen, sehingga

perusahaan selalu ikut campur dalam proses pengambilan keputusan di SPTP. SKBU adalah merupakan bentuk kekecewaan buruh terhadap serikat yang sudah ada, dan puncak dari kekecewaan tersebut adalah pada saat tidak diperjuangkannya ke-46 buruh yang akan di PHK.

Proses pembentukan SKBU juga tidak berjalan dengan lancar. Berkali-kali pengusaha menghalangi pembentukan SKBU. Beberapa tindakan anti serikat (*union busting*)[2] dilakukan oleh pengusaha terhadap buruh yang vokal, salah satunya adalah Kiswoyo. Beberapa kali pengusaha melakukan intimidasi terhadap buruh yang tergabung dalam kelompok kerja (pokja) pembentukan SKBU, diantaranya dengan menggabungkan tempat kerja bersama dengan buruh yang sakit/mengandung, tidak memberikan lembur, tidak memberikan cuti dll. Tindakan pengusaha terus dilakukan walaupun sudah terbentuk SKBU yang anggotanya kurang lebih 200 orang. Pengusaha juga tidak mengakui legalitas dari SKBU sebagai perwakilan dari buruh.

Dalam proses pembentukan SKBU, Kiswoyo kemudian terpilih menjadi koordinator SKBU. Sejak itulah dia diberikan tanggung jawab untuk memimpin. Tanggung jawab tersebut akan selalu dilaksanakan sampai proses perjuangan buruh PT. Istana dapat merebut haknya sebagai buruh.

Buruh-buruh yang tergabung di SKBU inilah yang akan melakukan penduduk an pabrik sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan penutupan pabrik dan PHK sepihak oleh pengusaha.

II. Perlawanan Dari Kaum Buruh

Pada bulan Mei 2007, perusahaan menawarkan kepada para buruh untuk mengundurkan diri dan sebagai kompensasinya, mereka akan memberikan uang pisah ditambah 2,5 bulan upah. Namun karena sebagian besar buruh menolak, maka tawaran tersebut berubah menjadi paksaan. Intimidasi juga dilaku-

2 Pasal 28 undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh menyebutkan: "Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:
a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh."
Lihat: http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2000/21-00.pdf diakses pada 3 Januari 2009.

kan kepada para buruh yang menolak, akibatnya beberapa buruh perempuan dengan terpaksa menerima tawaran perusahaan. Kiswoyo dan kawan-kawan buruh yang tergabung dalam SKBU menolak secara tegas tawaran tersebut, karena menyalahi peraturan perundang-undangan perburuhan.

Perusahaan kemudian menunjuk pengacara. Dan saat itu pula, tanpa alasan yang jelas perusahaan bermaksud untuk menutup pabrik. Penutupan pabrik dilakukan secara mendadak dan tanpa melibatkan para buruh. Perusahaan hanya menawarkan uang pisah ditambah 2,5 bulan upah, padahal para buruh telah bekerja 7 - 24 tahun[3]. Termasuk Kiswoyo yang telah bekerja selama kurang lebih 10 tahun, dia diberikan tawaran yang sama dengan buruh lainnya yang masa kerjanya lebih pendek. Tentu saja hal tersebut ditolak olehnya.

Karena menuai penolakan dari mayoritas buruh, maka pengacara pengusaha mengajak buruh untuk berunding. Namun perundingan dengan pengacara kemudian tidak menghasilkan kesepakatan karena pihak pengusaha tetap menawarkan uang pisah ditambah 2,5 bulan upah. Buruh kemudian menolak, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perundingan tersebut gagal, begitu juga perundingan – perundingan berikutnya.

Pada tanggal 17 Juli 2007 Sekitar pukul 08.30, perusahaan menyebarkan formulir permohonan pengunduran diri dengan tawaran yang sama. Siangnya, sekitar pukul 12.00 banyak pengumuman yang tertempel dipabrik yang isinya mulai tanggal 25 Juli 2007 PT. Istana Magnoliatama dinyatakan tutup/tidak operasi lagi.

Para buruh tidak percaya kalau perusahaan tutup, karena selama pabrik beroperasi order tidak pernah sepi, dan pembayaran upah buruh tidak pernah telah. Hal ini membuktikan bahwa kondisi perusahaan sangatlah baik. Buruh kemudian melakukan penolakan atas penutupan dan tawaran perusahaan, pada saat itu juga Kiswoyo melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota SBKU untuk menyikapi tindakan pengusaha. Diambil lah kesepakatan bahwa buruh untuk tetap di dalam pabrik sekaligus menjaga aset-aset perusahaan, karena dikhawatirkan pengusaha akan mengalihkan aset tersebut ke pihak lain.

Mulai saat itu, buruh PT. Istana Magnoliatama menempati pabrik guna menjaga aset dan mencegah hal-hal yang dikhawatirkan akan terjadi. Pada saat mengambil keputusan tersebut, Kiswoyo melakukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, dan Kelurahan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

3Ketentuan penghitungan pesangon diatur dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lihat : http://pkbl.bumn.go.id/file/UU-13-2003-ketenagakerjaan.pdf diakses pada 3 Januari 2009.

Kemudian pada tanggal 20 Juli 2007, Kiswoyo sebagai perwakilan dan juga sebagai koordinator, mengadukan permasalahan ini ke pihak Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara. Pengaduan ini dilakukan secara bersama-sama dengan buruh yang tergabung dalam SKBU. Pengaduan tersebut juga didampingi oleh pendamping dari Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) dan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Hasil dari pengaduan tersebut ditindak lanjuti oleh Suku Dinas dengan memanggil pengusaha untuk melakukan perundingan dengan pihak buruh. Suku Dinas bertindak sebagai fasilitator dalam perundingan tersebut.

Perundingan antara pengusaha dan buruh yang difasilitasi oleh Suku Dinas berlangsung pada tanggal 31 Juli 2007. Perundingan antara pengusaha dengan buruh bertempat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara. Kiswoyo bertindak sebagai wakil dari buruh, sedangkan pengusaha diwakili oleh pengacaranya. Dalam perundingan tersebut Kiswoyo juga didampingi oleh pendamping dari FSBKU dan dari LBH Jakarta. Sementara perundingan berjalan, kawan-kawan buruh yang lain melakukan aksi di depan kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara. Namun pengusaha tetap dengan pendiriannya, dan buruh menolak karena tidak sesuai dengan undang-undang mengingat dengan lamanya pengabdian dari para buruh. Perundingan tersebut gagal menemukan kata sepakat. Tetapi perjuangan kawan-kawan buruh PT. Istana Magnoliatama terus berlanjut.

Setelah perundingan tersebut, pengusaha tidak menunjukkan itikad untuk melakukan perundingan lagi. Bahkan terhitung mulai bulan Juli 2007 buruh tidak lagi mendapatkan upahnya. Kondisi ini tentu memberikan pukulan yang sangat berat kepada para buruh, dan berakibat pada mengendurnya solidaritas dikalangan buruh sendiri.

Tertanggal 16 Agustus 2007, keluar surat nomor 3816/-1.838 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, yang pada intinya memerintahkan kepada pengusaha agar tetap membayarkan upah dan hak-hak lainnya kepada para buruh sampai kasus ini memiliki suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun pihak pengusaha tidak melaksanakan perintah dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara. Buruh semakin marah dan terus mencaci maki pengusaha karena tidak melaksanakan kewajibannya.

Sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan kasus tersebut, Kiswoyo bersama dengan kawan-kawan buruh lainnya, melaporkan tindak pidana ketenagakerjaan ke POLDA METRO JAYA pada tanggal 17 September 2007. Dalam proses laporan tersebut, LBH Jakarta berperan sebagai pendamping dari buruh PT. Istana Magnoliatama. Namun laporan tersebut sampai sekarang belum ada

tindak lanjutnya. Belakangan pengusaha dipanggil sebagai terlapor. Namun menurut Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), penyidikan tersebut masih kurang bukti yang kuat sehingga perlu bukti-bukti baru agar penyidikan berjalan lancar.

Sementara upaya-upaya untuk menekan pengusaha agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut, buruh PT. Istana Magnoliatama yang tergabung dalam SKBU terus menduduki pabrik. Semula buruh yang masih bertahan adalah 98 orang. Tetapi karena tekanan kondisi keuangan yang semakin berat, sekitar 21 orang buruh kemudian mengundurkan diri dari perjuangan, dan memilih untuk berunding dengan pengusaha dan menerima PHK serta uang pisah yang ditawarkan.

Mundurnya 21 orang dari proses perjuangan ternyata tidak memberikan pengaruh besar kepada Kiswoyo dan kawan-kawan yang lain. Kiswoyo menganggap hal tersebut adalah merupakan pilihan sehingga dia tidak bisa melarangnya. Dia mengemukakan bahwa, ke-21 orang yang menerima tawaran pengusaha adalah orang-orang yang tidak bisa membaca kondisi objektif yang berkembang. Dia menyerahkan keputusan tersebut kepada masing-masing individu.

Sekitar bulan Oktober 2007 datang 2 orang laki-laki tidak dikenal dan memaksa masuk ke pabrik. Mereka mengaku Petugas dari Depnakertrans dan mengatakan jika buruh masih bertahan di pabrik, maka buruh tidak akan mendapatkan apa-apa. Sejak saat itu mulai terjadi intimidasi terhadap para buruh.

Salah satu upaya lain dalam menyelesaikan permasalahan PHK sepihak oleh pengusaha, buruh PT. Istana Magnoliatama resmi mencatatkan perselisihan hak (*tripartit*) terkait dengan tidak dibayarnya upah buruh ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara pada tanggal 29 Oktober 2007.

Pada tanggal 19 November 2007, pengusaha mencoba untuk mengambil dokumen-dokumen dari dalam pabrik. Tindakan tersebut dilakukan oleh salah seorang mantan karyawan PT. Istana Magnoliatama yang bernama Anyu. Dia datang ke pabrik dengan ditemani oleh seorang satpam masuk ke dalam kantor, dan mengambil 3 kardus yang berisi dokumen perusahaan. Kiswoyo yang kebetulan berada di pabrik beserta kawan-kawan buruh lainnya mencegah tindakan orang-orang tersebut, karena khawatir dokumen tersebut merupakan dokumen tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Terjadi adu mulut antara buruh dengan satpam. Akhirnya dokumen tersebut tidak jadi diambil. Langkah-langkah proteksi oleh buruh untuk mengantisipasi penghilangan barang bukti pelanggaran pengusaha terus dilakukan.

Puncak dari intimidasi oleh pengusaha terjadi pada tanggal 21 November 2007. kurang lebih pada pukul 06.30 WIB satpam pabrik menutup satu-satunya pintu akses masuk ke dalam pabrik dengan cara memasang rantai. Pada saat itu masih ada 5 orang buruh yang semuanya wanita berada di dalam pabrik, dan akibat dari penutupan paksa pintu pabrik mengakibatkan 5 buruh terkurung di dalam pabrik dan tidak bisa keluar.

Mendengar kabar tersebut, Kiswoyo yang sedang berada di sekretariat SBKU, mencoba menghubungi kawan-kawan buruh lainnya dan memberikan komando untuk segera merapat ke pabrik. Karena tidak bisa masuk ke dalam pabrik, maka mereka tertahan di luar pabrik.

Buruh yang berada di luar akhirnya mendirikan tenda di depan pabrik, dan menyuplai kebutuhan bagi buruh yang berada di dalam. Selama 6 hari mereka terkurung di dalam, sedangkan buruh perempuan yang bertahan di luar berusaha masuk ke dalam pabrik, namun petugas keamanan tetap menghalang-halangi, bahkan pintu gerbang digembok dari dalam dan dipasang rantai dari luar dan dipasang papan penghalang setinggi meter.

Kemudian pada tanggal 26 November 2007, pada malam hari tiba – tiba datang 2 mobil (sedan dan kijang) yang ditumpangi oleh 5 orang yang berperawakan besar dan kulit hitam. kelima orang tak dikenal tersebut diiduga adalah merupakan preman bayaran pengusaha. Mereka memaksa masuk ke dalam pabrik dan mengusir buruh yang berada di luar. Dan kemudian mereka memanggil satpam untuk membukakan pintu pabrik. 5 buruh yang di dalam dipaksa untuk keluar dengan alasan untuk mengosongkan orang yang berada di dalam pabrik. Namun akhirnya, 5 buruh perempuan tersebut tetap bertahan didalam pabrik.

Dalam situasi kritis tersebut, pihak kepolisian datang ke lokasi pabrik setelah beberapa jam sejak kedatangan orang tak dikenal tersebut. Polisi bertujuan untuk menjemput 5 orang yang tak dikenal tersebut, namun buruh tidak setuju sebelum mendapatkan kejelasan atas alasan kedatangan 5 orang tak dikenal ke pabrik.

Keesokan harinya, petugas pengawasan dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara datang ke lokasi pabrik untuk berunding dengan petugas keamanan pabrik dan buruh. Pada siang hari Petugas kepolisian berhasil masuk ke pabrik dan membawa preman-preman tersebut, namun hanya berhasil membawa 4 orang, sedangkan yang satu orang telah melarikan diri lewat pagar pabrik bagian belakang sekitar pukul 03.00 WIB.

Peristiwa premanisme yang mengancam keselamatan buruh PT. Istana Mag-

noliatama, terutama kelima buruh yang terkurung dalam pabrik menjadi pelajaran yang berharga bagi perjuangan kawan-kawan buruh PT. Istana Magnoliatama. Langkah-langkah antisipasi agar peristiwa tersebut tidak terjadi kembali terus dipersiapkan.

Dalam menyikapi peristiwa tersebut, menurut pengakuan Kiswoyo, kawan-kawan buruh tidak menjadi trauma. Peristiwa tersebut malah menjadi pemicu semangat untuk berjuang merebut keadilan bagi kaum buruh.

Dalam rangkaian peristiwa premanisme tersebut peran Kiswoyo adalah sebagai koordinator. Dia bersama kawan-kawan buruh yang lainnya mencari bantuan dan melaporkan aksi premanisme ke pihak kepolisian, kelurahan, RT, RW, serta ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dia juga menjadi negosiator yang berusaha membebaskan kawan-kawan buruh yang terkurung di dalam pabrik. Selain itu, bantuan dari pada organisasi pendamping juga diminta Kiswoyo.

Sampai saat ini para buruh, yang sebagian besar adalah perempuan tetap bertahan di pabrik, meskipun dalam kondisi yang sangat memperihatinkan. Apalagi disaat musim hujan, pabrik terkena banjir, sehingga mengancam kesehatan para buruh.

Setelah aksi premanisme yang terjadi, proses penyelesaian melalui musyawarah *Tripartit* dimulai. Perjuangan buruh PT. Istana Magnoliatama untuk menyelesaikan perselisihan hak mengenai upah yang tidak dibayar oleh pengusaha, melalui proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.[4]

Musyawarah Tripatrit tidak mencapai kesepakatan, dan kemudian Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara mengeluarkan Anjuran Nomor 5615/-1.831, yang inti dari Anjuran tersebut adalah agar perusahaan membayar upah kepada para buruh selama proses ini berjalan beserta juga hak-hak normatif lainnya. Anjuran tersebut diterima oleh buruh. Namun dari pihak pengusaha tidak mau melaksanakan anjuran dari Suku Dinas.

Sembari melakukan advokasi penyelesaian perkara PHK melalui jalur advokasi litigasi, buruh pun terus melakukan pengambilalihan pabrik dan mulai merencanakan untuk membuka dan melakukan proses produksi sendiri. Untuk tujuan tersebut, dibentuklah Komite Pengambil Alihan Pabrik yang terdiri dari buruh PT. Istana Magnoliatama serta organisasi yang mendampingi.

4 lihat: http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2004/02-04.pdf diakses pada 3 Januari 2009.

Perjuangan kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dan gugatan diajukan oleh ke-77 buruh PT. Istana Magnoliatama yang menolak PHK sepihak. Kiswoyo dan beberapa buruh yang namanya tercantum dalam gugatan perkara, menjadi perwakilan dari buruh yang lainnya. Dan babak baru perjuangan buruh PT. Istana Magnoliatama dimulai.

III. Pergulatan Hidup Sang Buruh

Paska PHK, Kiswoyo beserta kawan-kawan buruh PT. Istana Magnoliatama otomatis tidak mempunyai penghasilan. Upah yang diterima setiap bulan dari bekerja di pabrik praktis terhenti, karena PHK. Penghasilan Kiswoyo per bulan, yaitu sekitar Rp. 900.000,- kini tidak didapat lagi olehnya. Kewajiban memberikan nafkah sebagai seorang kepala rumah tangga yang harus dilaksanakan, kini terkendala akibat PHK sepihak dari pengusaha.

Kemudian muncul pertanyaan dalam benak Kiswoyo pascaperistiwa tersebut, bagaimana dia dapat menjadi kepala keluarga, yang menafkahi keluarganya. Di lain sisi, ia harus memimpin serikat buruh untuk mengambilalih pabrik dan tentu saja akan menyita waktu dan perhatian cukup banyak. Hiruk pikuk advoaksi krisis finansial keluarga tentu menempatkan Kiswoyo dalam posisi yang dilematis.

Didorong oleh kondisi, Kiswoyo menjadi orang yang pantang menyerah dan mau untuk mempelajari hal serta keahlian baru. Tuntutan untuk menghidupi keluarganya menjadi dorongan kuat baginya untuk melakukan berbagai upaya untuk menopang ekonomi keluarganya.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Kiswoyo untuk tetap bertahan dan dapat menafkahi keluarganya. Sembari juga membantu dan tidak meninggalkan perjuangan kawan-kawannya, Kiswoyo mencoba untuk berdagang baso, mie ayam, dan jahe wangi. Walaupun selama hidupnya dia tidak pernah membuat baso dan mie ayam, tapi dia belajar dari pedagang-pedagang yang menjadi tetangganya di sekitar kontrakannya.

Tetapi karena kondisi perjuangan yang memposisikan dia sebagai pemimpin, usaha yang dirintisnya sebagai pencaharian baru untuk menghidupi keluarganya menjadi tidak maksimal. Urusan serikat buruh, persidangan di PHI, serta rapat-rapat rutin dengan lembaga-lembaga pendamping sangat menyita waktu, sehingga menjadikan usaha berdagangnya putus ditengah jalan.

Beruntung istri Kiswoyo juga bekerja. Walaupun juga sebagai buruh pabrik, upah yang didapat istri Kiswoyo dapat memenuhi kebutuhan keluarga, dan anak-anaknya. Tetapi menurut pengakuan Kiswoyo, kebutuhan untuk dirinya,

dia tidak meminta dari istrinya. Dia masih bisa bertahan dari bantuan logistik. *"Kamu ga usah memikirkan kebutuhanku, aku masih bisa bertahan hidup. Pokoknya penuhi saja kebutuhan keluarga"*[5].

Solidaritas dari serikat buruh yang sekawan serta bantuan dari pihak-pihak yang bersimpati menjadi tumpuan Kiswoyo serta buruh-buruh lainnya, untuk bertahan dalam proses perjuangan buruh PT. Istana Magnoliatama. Upaya untuk memberikan pemahaman kepada keluarga, istri serta orang tua terus dilakukan oleh Kiswoyo:

"Apalagi posisi saya adalah sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami yang harus bisa bertanggung jawab dan memberikan nafkah kepada keluarga. Tapi ini adalah realita yang harus dijalani, jadi saya harus bisa memberikan pemahaman kepada keluarga saya. Asalkan kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, saya rasa, istri saya cukup memahami keadaan ini." [6]

Meski demikian, upaya memberikan bentuk pemahaman kepada keluarga terkadang masih mengalami hambatan. Seperti yang dialami langsung oleh Kiswoyo:

"Kalau dilihat dan dirasakan, saya merasa istri saya kurang mendukung. Tetapi kembali ke itu tadi, bahwa saya harus bisa memberikan pemahaman yang jelas mengenai tanggung jawab serta keberadaan saya. Sebenarnya banyak tantangan-tantangan yang besar yang harus saya hadapi. Saya sebenarnya kadang juga mengeluh. kalau dulu keluarga saya bisa mendapatkan upah sebagai hasil kerja saya, namun keadaan sekarang sudah berbeda. Dan sebagai istri, dia tentunya mengharapkan nafkah dari saya. Tapi sekarang kan sudah berbeda keadaannya"[7].

Bentuk hambatan itu lebih banyak dipandang oleh Kiswoyo sebagai tantangan yang harus bisa ia jalani sebagai bagian dari proses advokasi:

"Saya pernah disuruh oleh istri saya untuk negosiasi dengan pengusaha. Tetapi saya berprinsip bahwa ini adalah merupakan tanggung jawab. Itu harus saya jalani sampai tuntas"[8].

Kendala finansial dalam keluarga Kiswoyo dapat dipahami oleh istrinya. Penjelasan terhadap keluarga tentang kondisi yang dihadapi menjadi kunci penting dalam memecahkan masalah ini. Selain itu, dana yang dikeluarkan oleh Kiswoyo dalam proses perjuangan yang melalui tahap-tahap advokasi

5 Kutipan wawancara dengan Kiswoyo
6 Petikan wawancara dengan Kiswoyo
7 Petikan wawancara dengan Kiswoyo
8 Petikan wawancara dengan Kiswoyo

yang panjang tidak berasal dari uang pribadinya. SKBU-lah yang membiayai seluruh proses advokasi.

Dana yang dikeluarkan oleh SKBU berasal dari iuran kolektif, serta sumbangan dari organisasi pendamping dan juga dari berbagai pihak yang bersimpati. *"Ini merupakan masalah bersama, jadi harus dihadapi bersama. Apapun kondisinya, solidaritas dan kolektivitas harus terus dijaga"*[9]. Kendala Kiswoyo dalam melaksanakan perannya dalam proses perjuangan buruh PT. Istana Magnoliatama adalah pembagian waktu. Terlebih lagi sekarang proses produksi oleh buruh PT. Istana Magnoliatama sudah mulai berjalan[10].

"Bagaimana menyiasati kendala pembagian waktu, sampai sekarangpun saya belum bisa juga. Jadi kalau ada 2 agenda yang bentrok saya bingung untuk mengaturnya. Kalau berkaitan dengan kasus, paling dilangsungin aja. Contohnya, kalau habis dari PHI, saya bisa langsung ke LBH, atau konsolidasi dengan federasi. Tapi kalau untuk keperluan produksi, itu yang susah. Keperluan mencari order, ngambil sampel atau nganterin pesanan, itu yang kadang harus bolak-balik. Tapi yang terpenting adalah kita harus disiplin dengan waktu"[11].

Yang bisa dilakukan oleh Kiswoyo adalah terus-menerus melibatkan kawan-kawan buruh yang lain. Hal ini dilakukan agar bukan hanya dia saja yang mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk melakukan proses advokasi, khususnya advokasi litigasi dalam proses di PHI. Ini adalah proses learning by doing. Apabila setiap buruh pernah terlibat serta mempunyai kemampuan advokasi, peran Kiswoyo sedikit demi sedikit dapat digantikan dengan yang lain. Dan pembagian tugas dapat berjalan dengan lancar.

Solidaritas dan kolektivitas memainkan peran penting dalam menghadapi kendala serta memelihara semangat untuk tetap terus melakukan perjuangan. Tanggungjawab yang diberikan kepada Kiswoyo oleh kawan-kawan buruh lainnya juga menjadi motivasi baginya untuk tetap bertahan dalam perjuangan melawan ketidakadilan pengusaha.

IV. Buruh Bersatu Tak Bisa Dikalahkan

Solidaritas dan kolektivitas menjadi kunci perjuangan buruh PT. Istana Magnoliatama, dan berjejaring dengan organisasi-organisasi sekawan. Keterbukaan

9 Petikan wawancara dengan Kiswoyo

10 Setelah putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang memenangkan gugatan buruh PT. Istana Magnoliatama, Kiswoyo beserta kawan-kawan buruh lainnya mulai membuka bangunan-bangunan di dalam pabrik untuk menginventarisasi aset perusahaan. Buruh juga mulai melakukan proses produksi untuk menyambung hidup mereka.

11 Petikan wawancara dengan Kiswoyo

untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak adalah upaya untuk memperluas dukungan serta memperoleh bantuan. Keterlibatan FSBKU, KASBI, ABM, LBH Jakarta serta belakangan bergabung juga PRP, menjadi sebuah keniscayaan untuk memperkuat solidaritas perjuangan buruh PT. Istana Magnoliatama.

"*Kita punya keterikatan secara keorganisasian. Jadi keterkaitan kita adalah mulai dari serikat kita, yaitu SBKU-FSBKU-KASBI-ABM. Jadi kita sebenarnya satu kesatuan, tidak terpisah dan terkait satu sama lain. Dan bentuk solidaritasnya bukan hanya secara emosional saja, tetapi secara materi mereka bisa mengusahakan untuk membantu kita*"[12].

Berbagai hal telah dilakukan oleh organisasi pendamping bersama-sama dengan Kiswoyo dan buruh PT. Istana Magnoliatama. Pelatihan, diskusi, rapat, dilakukan untuk menguatkan wacana serta pemahaman teoritik. Selain itu, kebutuhan logistik untuk menunjang kehidupan buruh PT. Istana Magnoliatama juga diupayakan pemecahannya. Organisasi pendamping selalu mendampingi setiap proses advokasi yang dilakukan oleh Kiswoyo dan buruh PT. Istana Magnoliatama. Pelatihan keorganisasian serta manajemen keorganisasian yang diselenggarakan oleh FSBKU pernah diikutinya bersama-sama dengan, bukan hanya kawan-kawan buruh PT. Istana Magnoliatama saja tetapi juga bersama dengan kawan-kawan buruh dari basis lain yang tergabung dalam FSBKU.

Karena rapat-rapat dan diskusi-diskusi seringkali dilakukan di sekretariat FSBKU yang berada di Cimone, seringkali menjadi kendala yang menghalangi kedatangan Kiswoyo. Tetapi dia berusaha untuk tetap menghadiri agenda demi agenda yang diadakan oleh FSBKU.

"*Kendala waktu saja yang kadang menyulitkan, karena diadakan malam hari dan selesai rapat bisa sampai jam 2 pagi. Ditambah lagi dengan jarak kita yang jauh dengan federasi*"[13].

Kemudian, untuk mengawal proses pengambilalihan pabrik buruh PT. Istana Magnoliatama bersama-sama dengan organisasi pendamping sepakat untuk membentuk sebuah komite pengambilalihan pabrik. Di dalam komite inilah, melalui rapat-rapat serta diskusi-diskusi, seluruh permasalahan serta kendala dicoba untuk dicarikan pemecahannya serta dibuat rencana tindak lanjutnya.

Namun Kiswoyo masih menyimpan harapan terhadap pendamping agar mereka bisa memberikan motivasi, support, solusi, dan dukungan. *"Karena tanpa itu semua, saya pikir kita tidak akan bisa jalan seperti ini. Jadi kita pikir memang kita*

12 Petikan wawancara dengan Kiswoyo
13 Petikan wawancara dengan Kiswoyo

butuh itu semua"[14].

Yang menjadi salah satu keberhasilan dalam membangun jaringan dengan organisasi-organisasi lain adalah semakin banyak dukungan yang muncul. Yang mendukung dan bergabung dalam solidaritas perjuangan buruh PT. Istana Magnoliatama di antaranya adalah Persatuan Rakyat Pekerja (PRP), Serikat Pekerja Angkasa Pura I (SP-AP I), Serikat Pekerja (SP) PLN. Selain dukungan moral, mereka juga memberikan sumbangan bagi perjuangan buruh PT. Istana Magnoliatama.

Keberhasilan ini memberikan semangat dan motivasi baru terhadap perjuangan Kiswoyo dan kawan-kawan. Keyakinan bahwa kebenaran berada di pihak buruh menjadi semakin membara. Keyakinan akan keadilan bagi kaum buruh semakin terang terlihat.

"Sebenarnya saya hanya ingin menuntut keadilan saja. Dan saya yakin bahwa yang dilakukan oleh pengusaha adalah salah. Keadilan untuk saya dan teman-teman, dan tentunya keadilan untuk kaum buruh akan datang apabila terus diperjuangkan. Kita yakini saja. Kalau kita yakin dan berusaha maka kita akan tahu hasilnya. Tidak akan terjawab pertanyaan tersebut kalau kita hanya pasrah saja"[15].

Kepercayaan yang diberikan oleh Kiswoyo terhadap organisasi pendamping dilandasi oleh persamaan prinsip yang dipegang oleh Serikat, Federasi, KASBI, serta ABM. Kolektivitas yang terbangun serta keputusan-keputusan yang diambil melalui rapat-rapat atas kesepakatan bersama, membangun kepercayaan di antara semua pihak.

Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa wacana seorang Kiswoyo, sebagai bagian dari buruh PT. Istana Magnoliatama maupun sebagai salah satu bagian dalam gerakan buruh, belum terbuka kesadarannya terhadap kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di ranah yang lain. Anggapan bahwa buruhlah yang menjadi komponen mayoritas rakyat menjadikan wacananya fokus hanya di ranah buruh saja. Walaupun sering berdiskusi tentang isu-isu kontemporer seperti kenaikan BBM, SKB 4 Menteri dll, dia hanya melihat dampaknya dari perspektif apakah merugikan buruh atau tidak. Begitu juga aksi-aksi yang diikutinya. Momen-momen aksi solidaritas hanya dilakukan apabila berhubungan dengan isu buruh saja. Kurangnya kesadaran seorang Kiswoyo untuk terlibat pada advokasi pelanggaran Hak Asasi Manusia menjadi catatan tersendiri organisasi pendamping.

14 Petikan wawancara dengan Kiswoyo
15 Petikan wawancara dengan Kiswoyo

V. Buruh Menggugat

Perjuangan Buruh PT. Istana Magnoliatama merupakan proses panjang. Mulai awal pembentukan SBKU pada tahun 2003, tahun 2005 sudah mulai ada rumor pabrik akan dipindahkan ke daerah lain, kemudian tahun 2006 mulai ada pengumuman agar buruh mengundurkan diri, sampai pada tahun 2007 terjadi PHK sepihak, serta ada insiden terkurungnya 5 orang buruh di dalam pabrik. Kemudian, proses advokasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut harus ke wilayah hukum. Tentu proses tersebut menambah daftar panjang pekerjaan yang harus dilakukan oleh Kiswoyo dan kawan-kawan. Sebagai orang yang mempunyai peran penting dalam proses advokasi, Kiswoyo dituntut untuk selalu terlibat dan hadir dalam setiap tahap advokasi.

Keterlibatan FSBKU dalam proses perjuangan buruh PT. Istana Magnoliatama berawal dari pembentukan SBKU di PT. Istana Magnolitama. FSBKU merupakan inisiator pembentuk SBKU, dan memotori kinerja pokja pembentukan SBKU. FSBKU melakukan berbagai diskusi-diskusi, rapat-rapat dan pelatihan-pelatihan untuk menunjang kinerja kelompok kerja dalam melakukan proses pengorganisiran. Selain itu juga, fungsi untuk memberikan motivasi dilakukan melalui metode menampung berbagai keluh kesah dari para buruh, kemudian memberikan semangat dan juga mencari solusi bersama-sama.

Kasus PT. Istana Magnoliatama merupakan kasus pertama yang didampingi oleh FSBKU yang sampai tahap persidangan di PHI. Sebelum kasus PT. Istana Magnoliatama, FSBKU terlibat menjadi pendamping dalam kasus PT. Sindol Pratama, namun bukan beracara di PHI, tetapi di pengadilan umum.

Kiswoyo adalah salah satu orang pertama yang melakukan kontak dengan FSBKU. Selain dia, kawan-kawan buruh yang terlibat kontak pertama kali dengan FSBKU di antaranya yaitu Qibtiyah, Rahayu, dan Lastri. Mereka juga tergabung dalam kelompok kerja yang mempersiapkan pembentukan SBKU. Mereka juga menjadi pengurus inti dari SBKU dan bertahan sampai sekarang tengah perjuangan panjang.

SKBU memang dibentuk karena pada saat itu ada buruh yang akan di PHK secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas, tetapi tidak dilindungi oleh serikat yang sudah ada. Walaupun sudah ada serikat yang berdiri, yaitu Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), para buruh selalu dikecewakan oleh kinerja dari SPTP yang selalu memihak perusahaan apabila ada kasus yang antara buruh dan pengusaha. Selain itu, SPTP pengurusnya berasal dari buruh di bagian manajemen, sehingga perusahaan selalu ikut campur dalam proses pengambilan keputusan di SPTP. SKBU adalah merupakan bentuk kekecewaan buruh terhadap serikat yang sudah ada, dan puncak dari kekecewaan tersebut adalah

pada saat tidak diperjuangkannya ke-46 buruh yang akan di PHK.

Proses pembentukan SKBU juga tidak berjalan dengan lancar. Berkali-kali pengusaha menghalangi pembentukan SKBU. Beberapa tindakan anti serikat (*union busting*)[16] dilakukan oleh pengusaha terhadap buruh yang vokal, salah satunya adalah Kiswoyo. Beberapa kali pengusaha melakukan intimidasi terhadap buruh yang tergabung dalam kelompok kerja (pokja) pembentukan SKBU, diantaranya dengan menggabungkan tempat kerja bersama dengan buruh yang sakit/mengandung, tidak memberikan lembur, tidak memberikan cuti dll. Tindakan pengusaha terus dilakukan walaupun sudah terbentuk SKBU yang anggotanya kurang lebih 200 orang. Pengusaha juga tidak mengakui legalitas dari SKBU sebagai perwakilan dari buruh.

Dalam proses pembentukan SKBU, Kiswoyo kemudian terpilih menjadi koordinator SKBU. Sejak itulah dia diberikan tanggung jawab untuk memimpin. Tanggung jawab tersebut akan selalu dilaksanakan sampai proses perjuangan buruh PT. Istana dapat merebut haknya sebagai buruh. Buruh-buruh yang tergabung di SKBU inilah yang akan melakukan pendudukan pabrik sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan penutupan pabrik dan PHK sepihak oleh pengusaha.

Pasang surutnya pengorganisasian buruh PT. Istana Magnoliatama oleh SBKU ditandai dengan semakin menyusutnya buruh yang tergabung di SBKU sendiri. Seleksi alam menyisakan 77 orang buruh militan yang masih bertahan sampai sekarang.

"*Tapi memang setelah teman-teman buruh itu kan kesadarannya baru muncul ketika sudah benturan dengan masalah, jadi ini makanya aku melihat PT. Istana itu sebenarnya kayak butuh keajaiban gitu loh. Mulai terbentuk serikat telah diintimidasi sampai habis anggotanya itu, pengurusnya itu sempat down banget, terus sampai kayaknya enggak mau jalan gitu, udah hampir enggak mau jalan, terus rapat-rapat juga enggak jalan sampai untuk mengumpulkan anggota yang masih tersisa itu juga sangat sulit sekali. makanya sampai habis anggota tiba-tiba ada kasus, sampai menghilang udah 100 (seratus) lebih lah kemarin itu, sejak awalnya, itu sampai militannya sampai sekarang*

16 Pasal 28 undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh menyebutkan: Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:
e. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
f. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
g.melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
h.melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh

itu aku sendiri juga heran"[17].

Peran tokoh sentral yang dapat mengkonsolidasikan massa sangat dibutuhkan disini. Kiswoyo sebagai ketua, dan beberapa pengurus SBKU melakukan kerja-kerja pengorganisiran dan berhasil untuk mengumpulkan kembali anggota-anggota SBKU yang menghilang. Kemampuan untuk mengorganisir dan mengkonsolidasikan massa menjadi modal besar yang dimiliki Kiswoyo dalam melakukan proses perjuangan buruh PT. Istana Magnoliatama.

Kemampuan tersebut didapat dari pembelajaran bersama-sama dengan pendamping. FSBKU berperan besar dalam mentransformasikan pengetahuan dan kemampuan tersebut.

"Sejak awalkan ketika ada pendidikan-pendidikan kita diskusikan bahwa PHK itu kan sebenarnya ada syarat-syaratnya, terus ketika perusahaan menyatakan pailit atau merugi atau bangkrutlah istilahnya, itu kan enggak hanya sekedar lisan, harus ada bukti-bukti yang audit dua tahun terakhir itu. Rupanya itu walaupun pendidikannya udah lama, masih tertanam di pikiran teman-teman, jadi ketika manajemen mengumumkan merugi, itu dia enggak serta-merta menerima, walaupun banyak mayoritas menerima, ya ada beberapa orang yang masih tertanam itu dan dia memperjuangkan haknya itu ternyata. Kita juga bersama-sama dengan teman-teman basis lain mengadakan pelatihan-pelatihan pengorganisasian basis"[18].

Bermodal solidaritas, dan kolektivitas, buruh PT. Istana Magnoliatama menggugat pengusaha dan berkeyakinan memperjuangkan keadilan.

VI. Melawan Kekuatan Modal

Perlakuan pengusaha yang melakukan PHK sepihak terhadap buruh PT. Istana Magnoliatama adalah akar permasalahan yang menjadi awal perjuangan buruh PT. Istana Magnoliatama. Proses perselisihan hak antara buruh dan pengusaha tersebut berbuntut pada pendudukan pabrik, serta gugatan oleh buruh.

Gugatan perselisihan hak diajukan ke PHI dan telah diputus oleh hakim dengan mengabulkan gugatan buruh dan menghukum pengusaha untuk membayar upah serta memberikan pesangon[19]. Namun karena pengusaha melakukan upaya hukum lain, maka putusan itu belum *in krach*.

Sebelum melakukan gugatan di PHI, Kiswoyo bersama-sama dengan kawan-kawan buruh PT. Istana Magnoliatama melakukan pengaduan perlakuan pe-

17 Petikan wawancara dengan Nuzul, pendamping dari FSBKU
18 Petikan wawancara dengan Nuzul, pendamping dari FSBKU
19 Putusan gugatan perselisihan hak

ngusaha ke berbagai pihak. Di antaranya adalah pengaduan ke bagian pengawasan Suku Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi, Komnas HAM, Komnas Perempuan serta ke Menteri Pemberdayaan Wanita.

Dalam proses pendudukan pabrik inillah Kiswoyo dan kawan-kawan buruh PT. Istana Magnoliatama mendapatkan perlakuan dari pengusaha yang mengancam keselamatan diri para buruh. Aksi premanisme yang puncaknya adalah insiden terkurungnya 5 buruh PT. Istana Magnoliatama di dalam pabrik.

Aksi kekerasan dan premanisme yang dilakukan oleh pengusaha kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian, aparat kelurahan serta Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, dan langsung ditindak lanjuti dengan datang untuk membantu upaya membebaskan 5 buruh yang terkurung:

"Ya kita lapor ke polisi juga kita lapor ke RT/RW, kita juga lapor ke pihak kelurahan setempat, waktu itu juga pihak kelurahan datang, juga dari Satpol PP, waktu malem itu juga sebenernya pengen untuk segera dijemput membawa keluar mereka. ya nggak tahu apakah ini ada permainan dari pihak perusahaan supaya pihak yang jemput premannya biar aman".[20]

Insiden penyekapan buruh selama 6 hari (mulai tanggal 21 s/d 27 November 2007) berakhir dengan "dijemputnya" preman-preman pelaku penyekapan dan segera diamankan oleh polisi.

Paska kejadian tersebut, Kiswoyo bermaksud mendorong polisi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap aksi premanisme. Namun karena menurut kepolisian selalu menunda-nunda proses penyidikan, dan hanya mengenakan wajib lapor terhadap para pelaku, maka Kiswoyo memutuskan untuk menghentikan proses di kepolisian. Selain itu, menurut dia masih tugas lain yang harus diselesaikan dalam proses perjuangan, jadi dia memilih untuk fokus pada tugas yang lain.

Hampir senada dengan polisi, aparat kelurahan melemparkan urusan penyelesaian dalam insiden penyekapan tersebut kepada kepolisian. Menurut mereka, kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah berada di kepolisian.

Tidak ada sistem perlindungan bagi korban terhadap pelanggaran seperti yang terjadi di PT. Istana Magnoliatama, padahal tindakan pendudukan pabrik oleh buruh jauh-jauh hari telah diberitahukan kepada pihak kepolisian dan kelurahan. Tindakan pengamanan terhadap lokasi pabrik setelah insiden penyekapan juga tidak dilakukan. Bahkan, terbersit dugaan bahwa pihak kepolisian dan kelurahan bermain mata dengan pihak pengusaha tidak berpihak pada buruh.

20 Petikan wawancara dengan Kiswoyo

Profil

HRSF

Human Rights Support Facilities (HRSF) merupakan sebuah inisiatif bersama yang digagas oleh KontraS, LBH Jakarta, HRWG, Yayasan Pulih dan Yayasan Tifa pada tahun 2007, di Jakarta. Inisiatif ini lahir atas dasar kebutuhan akan perlunya perlindungan terhadap para pembela HAM di Indonesia, baik itu jaminan perlindungan dalam situasi darurat, maupun jaminan untuk jejaring perlindungan di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

KontraS

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dibentuk pada 20 Maret 1998 untuk menangani persoalan penculikan beberapa aktivis yang diduga berhubungan dengan kegiatan politik yang mereka lakukan. Dalam perjalanannya, KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat (korban) untuk menangani berbagai kasus kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh dan Papua, maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya KontraS berkembang menjadi organisasi independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran HAM sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

LBH Jakarta

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Lambat laun LBH Jakarta menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi. Hal ini disebabkan upaya LBH Jakarta membangun dan menjadikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia.

HRWG

Human Rights Working Group (HRWG) adalah sebuah lembaga koalisi yang menaungi sebagian besar LSM yang bekerja dalam sektor advokasi hak asasi manusia. dalam aktivitasnya HRWG banyak melakukan kegiatan advokasi isu-isu penegakan HAM di tingkat internasional, khususnya dalam mendorong

terlaksananya mekanisme internasional untuk meraih keadilan bagi komunitas korban pelanggaran HAM. selain itu, HRWG bekerja untuk memaksimalkan tujuan dengan mendorong pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kewajiban internasional dan konstitusional dalam rangka melindungi, memenuhi, menghormati dan mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia.

Yayasan Pulih

Pulih berupaya memberdayakan kembali korban, baik itu individu, kelompok, keluarga dan komunitas, sehingga dapat menjalani kehidupan produktif yang bermakna. Ciri khas Pulih adalah sebagai organisasi pembelajaran yang bermanfaat baik secara internal maupun eksternal dalam memasyarakatkan pengembangan mengenai pentingnya kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis melalui penyadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan trauma. Dengan penekanan pendampingan psikososial berbasis komunitas, bekerjasama dan menguatkan mitra kerja, memakai prinsip pembelajaran sistematis, dan mengembangkan sistem rujukan.

Yayasan Tifa

Demokratisasi yang mulai berjalan seiring dengan jatuhnya rezim Soeharto, meninggalkan banyak pekerjaan. Salah satu yang dianggap penting adalah dengan mendorong Indonesia dan masyarakatnya menjadi lebih terbuka, tidak lagi tertutup seperti yang terjadi pada masa rejim sebelumnya. Dan dengan pemikiran itu, pada tanggal 18 Desember 2000, Tifa didirikan. Misi Tifa adalah memperjuangkan masyarakat terbuka di Indonesia, yang menghormati keragaman serta menjunjung tinggi penegakan hukum, keadilan,dan persamaan. Visi Tifa adalah sebuah komunitas dimana penduduk, pemerintah, dan sektor bisnis mendukung hak-hak individu khususnya hak dan pandangan kaum perempuan, kaum minoritas, dan kelompok marjinal lainnya, serta mendukung dan memupuk solidaritas dan tata pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, Tifa berupaya dengan cara memperkuat dan memberdayakan masyarakat sipil.